

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya berdasarkan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan durasi waktunya, perencanaan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen RPJMD ialah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, memperhatikan RPJM Provinsi Jawa Barat dan Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya

ditegaskan pula bahwa RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dengan telah dilantiknya Bupati Cirebon dan Wakil Bupati Cirebon masa bakti periode 2014-2019, pada tanggal 19 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.2-813 Tahun 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.32-814 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat, maka melekat kewajiban untuk menyusun RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun.

Dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu RPJMD juga telah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Provinsi Jawa Barat dan Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, serta disusun berdasarkan kolaborasi empat pendekatan berikut:

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan pasangan kepala daerah sebagai proses penyusunan rencana program. Pemilihan pasangan kepala daerah dilakukan berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah pada saat kampanye.
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematis oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.

3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses Tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Selain itu, hal yang mendapat perhatian adalah pemahaman awal posisi Kabupaten Cirebon yang unik atau berbeda dengan daerah lain pada umumnya. Keunikan ini muncul dari faktor karakteristik geostrategis wilayah yang meliputi geoekonomi, geopolitik, geososiobudaya, geohistori dan georeligi.

Dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon Periode 2014-2019 merupakan Tahap III RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025. Dokumen RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu :

1. RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 merupakan media untuk mengimplementasikan janji pasangan kepala daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2. RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 merupakan pedoman pembangunan daerah dan penyelerasan dengan pembangunan nasional, Jawa Barat, dan daerah perbatasan selama 5 (lima) tahun ke depan.
3. RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019 merupakan pedoman penyusunan RKPD, Keberadaanya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) SKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 merupakan alat atau instrument pengendalian bagi satuan evaluasi dan pengawas internal (SPI) dan Bappeda.
5. RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala daerah selama 5 (lima) tahun.

6. RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, dialog yang melibatkan *stakeholders* dan pemangku kepentingan, analisis gambaran umum daerah, analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan indikatif, perumusan permasalahan pembangunan daerah, hasil analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah, perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, penetapan indikator kinerja daerah yang dirumuskan secara transparan, responsif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dokumen ini merupakan komitmen dan kehendak bersama dari seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Cirebon untuk mewujudkan arah dan tindakan dalam mencapai tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
26. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
27. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014.
28. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan nomor 28 Tahun 2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

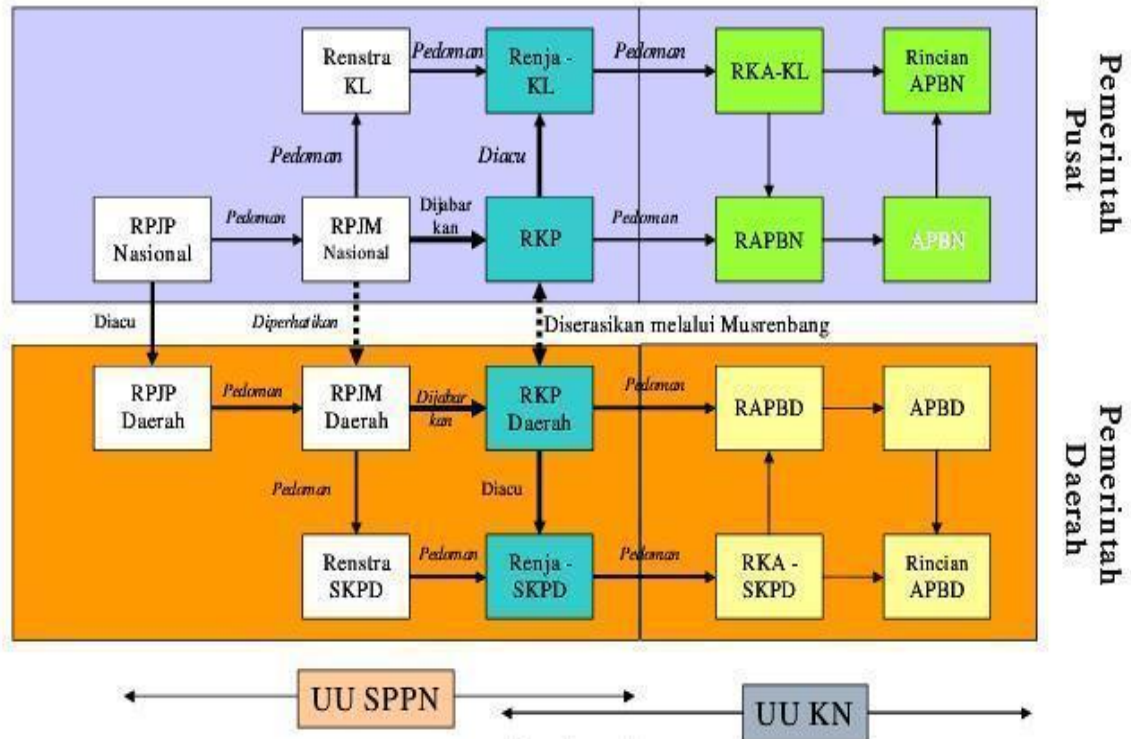
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D)
32. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 .
33. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon .
34. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
35. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 dengan tetap memperhatikan arahan RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014 dan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi kebijakan dan program pembangunan daerah selama satu periode masa jabatan. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan dalam dokumen perencanaan disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, perencanaan dan penganggaran terpadu, kerangka pendanaan dan pagu indikatif, urusan wajib dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan urusan pilihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, RPJM Daerah sebagai dokumen strategis perlu dijabarkan ke dalam kebijakan taktikal berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon, yang akan menjadi acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. RKPD Kabupaten Cirebon akan menjadi pedoman bagi penyusunan RAPBD Kabupaten Cirebon. Hubungan antar dokumen perencanaan dan penganggaran dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.1 Pola Hubungan Dokumen RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019 sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, sistematika penyusunan, maksud dan tujuan.
BAB	II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bab ini menjelaskan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis, demografis, ekonomis, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
BAB	III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan daerah.
BAB	IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Bab ini menjelaskan analisis isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam kurun 5 (lima) tahun.
BAB	V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun rencana.
BAB	VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran.
BAB	VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini menjelaskan hubungan kebijakan umum dan program pembangunan sesuai dengan target capaian indikator kinerja.
BAB	VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Bab ini menjelaskan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan indikatif.
BAB	IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Bab ini menggambarkan keberhasilan pencapaian visi dan misi yang ditunjukkan dari pencapaian indikator kinerja daerah.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bab ini menjelaskan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

BAB XI PENUTUP

1.5. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan sinergi dan keberlanjutan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam kurun 2014-2019.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019 adalah :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan hasil pembangunan dan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Cirebon
2. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah jangka menengah;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang meliputi RENSTRA SKPD, RKPD, RENJA SKPD;
4. Menyediakan rancangan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan terukur.
6. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon serta dengan kabupaten/kota yang berbatasan;

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis dan Demografis

Wilayah Kabupaten Cirebon membentang dari Barat Laut ke Tenggara, menjadi pintu gerbang Provinsi Jawa Barat di bagian Timur, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

2.1.1. Kondisi Geografis Daerah

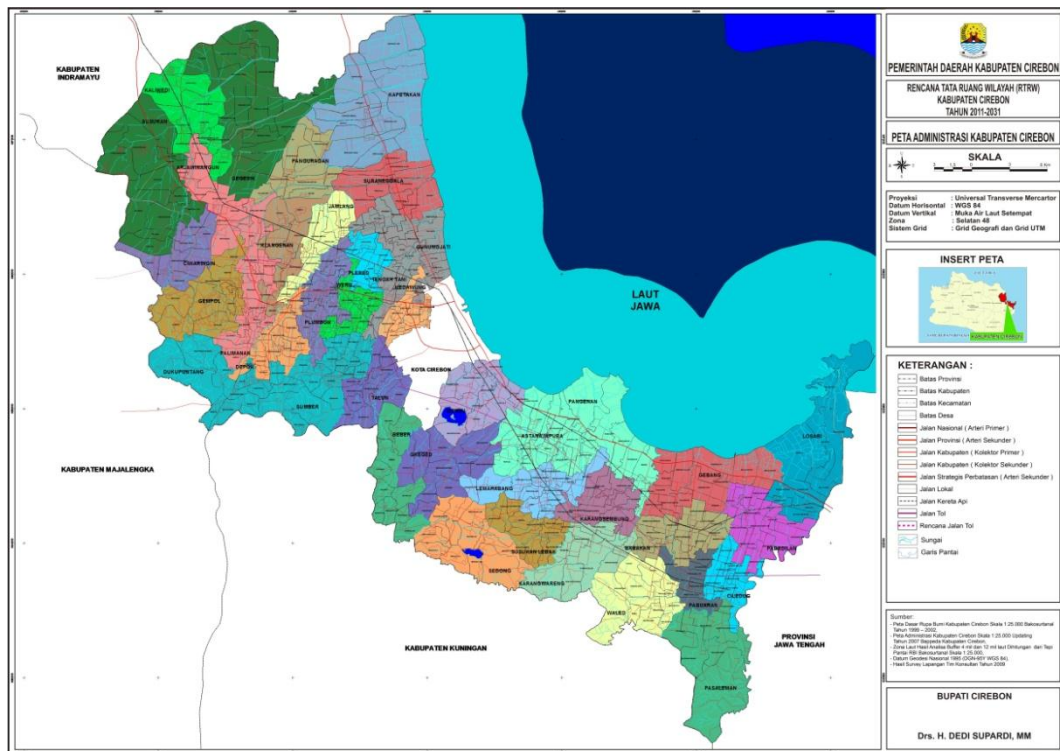
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Cirebon memiliki letak geostrategis dijalur Pantai Utara Jawa Barat dengan panjang garis pantai ± 54 kilometer (km). Secara geografis, wilayah Kabupaten Cirebon berada pada posisi $108^{\circ}19'30''$ - $108^{\circ}50'03''$ Bujur Timur (BT) dan $6^{\circ}30'58''$ - $7^{\circ}00'24''$ Lintang Selatan (LS). Jarak terjauh dari Utara ke Selatan sepanjang 39 km dan jarak terjauh dari Barat ke Timur sepanjang 54 km. Secara administratif, Kabupaten Cirebon memiliki wilayah seluas 990,36 Km² yang terbagi menjadi 40 kecamatan, 412 desa, 12 kelurahan, 9.377 Rukun Tetangga (RT) dan 2.700 Rukun Warga (RW).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Cirebon berkewenangan untuk mengelola perairan pesisir dalam zona 0-4 mil dari garis pantai. Dengan demikian, wilayah perairan pesisir yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon seluas 399.6 km² (54km x 4mil x 1.85km).

Adapun batas-batas administratif Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Laut Jawa
Sebelah Selatan	: Kabupaten Kuningan
Sebelah Barat Laut	: Kabupaten Majalengka
Sebelah Timur	: Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah



Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon, 2011

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Cirebon

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Cirebon memiliki posisi yang strategis (*geo-strategic*) dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:

- Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi pintu gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat. Hal ini merupakan potensi pengembangan Kabupaten Cirebon untuk menarik investor ke wilayah ini.
- Wilayah Kabupaten Cirebon berada di pantai Utara Jawa yang dilalui oleh jalan arteri primer dan jalan kolektor primer sebagai penghubung antara Jakarta dengan kota-kota besar di wilayah Jawa dan kota-kota di sekitar Cirebon.
- Wilayah Kabupaten Cirebon menjadi lintasan ruas jalan bebas hambatan (Jalan Tol) yakni ruas jalan tol Cikampek-Palimanan (Cikapa), ruas jalan tol Palimanan-Kanci (Palikanci), ruas jalan tol Kanci-Pejagan.
- Wilayah Kabupaten Cirebon dilalui juga oleh Jalur Kereta Api yakni jalur kereta api Cirebon-Jakarta, jalur kereta api Cirebon-Bandung, jalur kereta api lintas Utara

Jawa (Cirebon-Semarang-Surabaya), dan jalur kereta api lintas Selatan Jawa (Cirebon-Yogyakarta-Surabaya).

- e) Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Electric Power (CEP) di Kecamatan Astanajapura yang merupakan salah satu pemasok listrik jalur transmisi Sumatera-Jawa-Bali.

2.1.1.2. Ketinggian (Topografis)

Wilayah Kabupaten Cirebon memiliki ketinggian antara 0-130 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah kecamatan yang terletak sepanjang jalur Pantura termasuk pada dataran rendah yang memiliki ketinggian antara 0 – 10 m, yaitu Kecamatan Gunungjati, Suranenggala, Kapetakan, Mundu, Gebang, Pangenan, Losari, Astanajapura dan Pabedilan. Adapun wilayah kecamatan yang terletak di bagian Selatan memiliki ketinggian antara 11-130 mdpl. Berdasarkan ketinggian, Kabupaten Cirebon dapat dikelompokkan sebagai berikut:

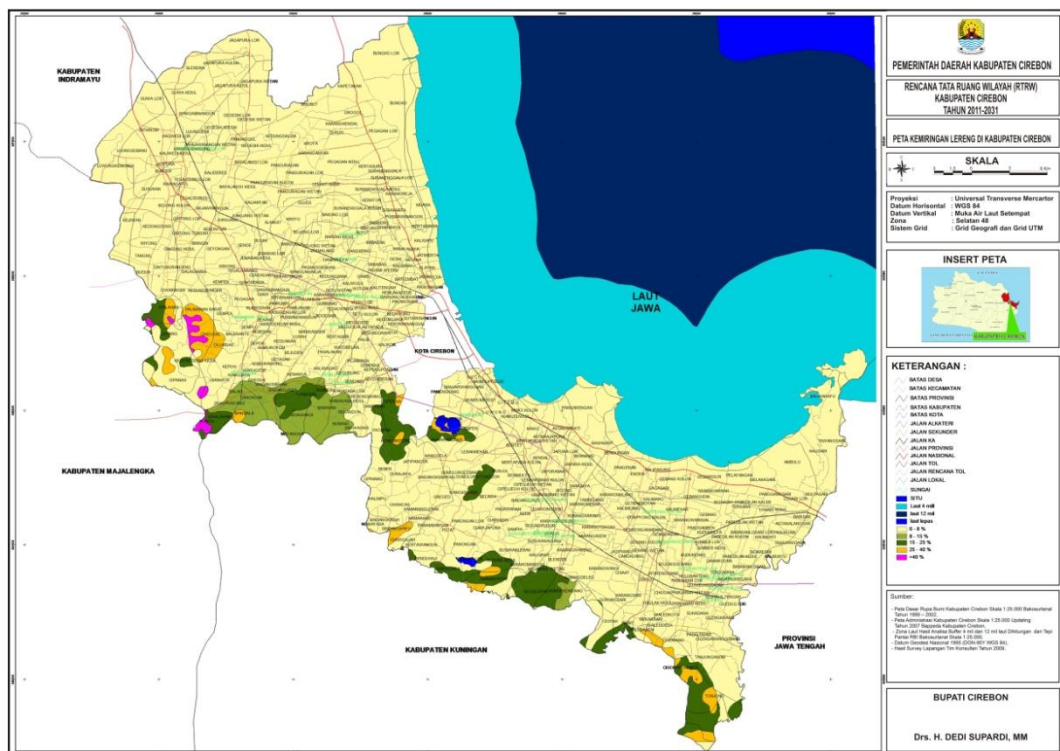
- 1) Wilayah dengan ketinggian 0-25 m dpl, tersebar dengan luas ± 64.636 Ha atau 65,31% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon.
- 2) Wilayah dengan ketinggian 25-50 m dpl, tersebar dengan luas $\pm 1.525,20$ Ha atau 10,65% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon.
- 3) Wilayah dengan ketinggian 50-100 m dpl, tersebar dengan luas $\pm 10.196,40$ Ha atau 10,30% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon.
- 4) Wilayah dengan ketinggian 100-200 m dpl, tersebar dengan luas ± 61.150 Ha atau 6,21% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon.
- 5) Wilayah dengan ketinggian 200-300 m dpl, tersebar dengan luas $\pm 4.275,55$ Ha atau 4,32% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon.
- 6) Wilayah dengan ketinggian 300 m dpl, tersebar dengan luas $\pm 2.180,20$ Ha atau 2,20% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon.

Kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Cirebon bervariasi antara 0–8% sampai dengan lebih dari 40%.

Tabel 2.1. Kemiringan Lereng di Kabupaten Cirebon

No	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0 – 8 %	88.075, 71	88,93
2	>8 – 15 %	2.598, 48	2,62
3	>15 – 25 %	5.152, 05	5,2
4	>25 – 40 %	1.853, 52	1,87
5	>40 %	1356, 24	1,37
Jumlah		99.036	100

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon, 2011



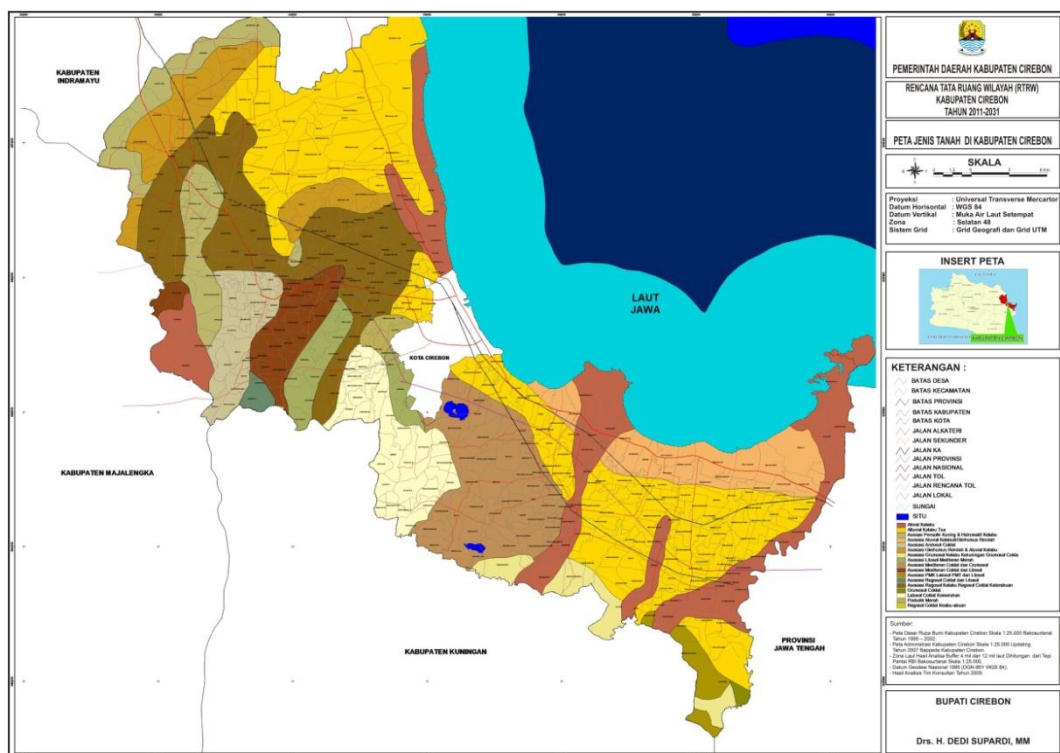
Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon, 2011

Gambar 2.2. Peta kemiringan lahan

2.1.1.3. Struktur dan Jenis Tanah (Geologis).

Kabupaten Cirebon memiliki struktur dan jenis tanah beragam. Berdasarkan hasil identifikasi, struktur geologis tanah adalah hasil gunung api muda yang tak terurai (Qyu) seluas 33.740 Ha (34,10%), breksi kompleks Kromong (Qvk) seluas 1.110 Ha (1,12 %), batu gamping kompleks Kromong (MI) seluas 202,60 Ha, formasi Kaliwungu (Pk) seluas 8.964,20 Ha (9,06%), formasi Cijulang (Tpel) seluas 825 Ha (0,83%), formasi

Kalibiuk (Tpb) seluas 1.345 Ha (1,36%), dan hasil gunung api tua yang tak terurai (Qvu) seluas 560 Ha (0,63%). Kondisi struktur geologistersebut dipengaruhi oleh keberadaan Gunung Ciremai. Jika ditinjau dari kondisi jenis tanah, wilayah Kabupaten Cirebon didominasi oleh jenis tanah aluvial (aluvial/Qa) seluas 52.224 ha (52,76%), baik aluvial kelabu, aluvial kelabu tua, maupun asosiasi aluvial kelabu tua dan asosiasi regosol kelabu, regosol coklat keterabuan. Jenis-jenis tanah tersebut umumnya sesuai untuk pertanian semusim terutama padi, palawija dan perikanan. Jenis tanah lainnya adalah litosol, grumosol, mediteran, latasol, podsolik, regosol, dan glei humus.



Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon, 2011

Gambar 2.3. Peta Jenis tanah di Kabupaten Cirebon

2.1.1.4. Sumber Daya Air (Hidrologis).

Tinjauan kondisi hidrologis meliputi air tanah dan air permukaan. Kondisi sebaran air tanah di wilayah Kabupaten Cirebon diklasifikasikan empat wilayah, yaitu air tanah asin, air tanah dangkal, air tanah sedang, dan air tanah langka. Berdasarkan jenis, air tanah dibedakan menjadi air tanah dangkal dan air tanah dalam. Sementara, jenis air permukaan meliputi sungai, danau/situ dan mata air.

2.1.1.4.1. Air Permukaan

2.1.1.4.1.1. Sungai

Kabupaten Cirebon memiliki satu Wilayah Sungai (WS) yaitu Cimanuk-Cisanggarung, dengan lima belas Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi DAS Cisanggarung, DAS Ciberes, DAS Bangkaderes, DAS Situnggak, DAS Kanci, DAS Kedungpane, DAS Cipager, DAS Jamblang, DAS Winong, DAS Ciwaringin, DAS Kumpulkwista, DAS Pamengkang, DAS Kalijaga, DAS Suba, dan DAS Cimanis. Juga, Kabupaten Cirebon memiliki empat belas Daerah Pengaliran Sungai (DPS) seluas 1.312 Km².

DAS Cisanggarung memiliki Daerah Irigasi (DI) yang terbagi dalam kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Pembagian pengelolaan kewewenang DI tersebut sebagai berikut:

- a. DI dengan kewenangan pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Cirebon meliputi Sungai Condong, Sungai Kalijaga, Sungai Kanci, Sungai Ciberes dan Sungai Cimanis.
- b. DI kewenangan Pemerintah Pusat seluas± 32.503 Ha meliputi:
 1. DI Rentang seluas ± 20.632 Ha;
 2. DI Ciwaringan seluas ±1.103 Ha;
 3. DI Seuseupan seluas ± 3.865 Ha dan
 4. DI Cikeusik seluas ±6.903 Ha.
- c. DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat seluas ±8.988 Ha meliputi:
 1. DI Walahar seluas ±1.292 Ha;
 2. DI Jamblang seluas ± 2.164 Ha;
 3. DI Cipager seluas ± 1.056 Ha;
 4. DI Setupatok seluas ±1.408 Ha;
 5. DI Paniis Lebak seluas ± 332 Ha;
 6. DI Cibacang seluas ± 259 Ha;
 7. DI Cipurut seluas ± 134 Ha;
 8. DI Jawa seluas ± 111 Ha;
 9. DI Mungkal Gajah seluas ± 27 Ha;
 10. DI Katiga seluas ± 662 Ha; dan

11. DI Ambit seluas ± 1.543 Ha.
- d. DI kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon seluas ± 6.002 Ha meliputi:
 1. DI Jatisawit seluas ± 690 Ha;
 2. DI Soka seluas ± 282 Ha;
 3. DI Rajadana seluas ± 170 Ha;
 4. DI Ciparigi seluas 467 Ha;
 5. DI Keputon seluas ± 446 Ha;
 6. DI W. Sedong seluas ± 168 Ha;
 7. DI Ciwado seluas ± 833 Ha;
 8. DI Agung seluas ± 711 Ha;
 9. DI Kecepat seluas ± 477 Ha;
 10. DI Panongan seluas ± 952 Ha dan
 11. DI Cangkuang seluas ± 806 Ha.

2.1.1.4.2. Danau/Situ

Kabupaten Cirebon memiliki dua danau/situ yaitu Setu Patok di Desa PenPen Kecamatan Mundu, luas ± 175 Ha dengan kapasitas tampung sebanyak $\pm 13.790.000$ m³, dan Setu Sedong di Desa Karangwuni Kecamatan Sedong, luas $\pm 19,67$ Ha dengan kapasitas tampung sebanyak $\pm 1.850.000$ m³.

2.1.1.4.3. Mata Air

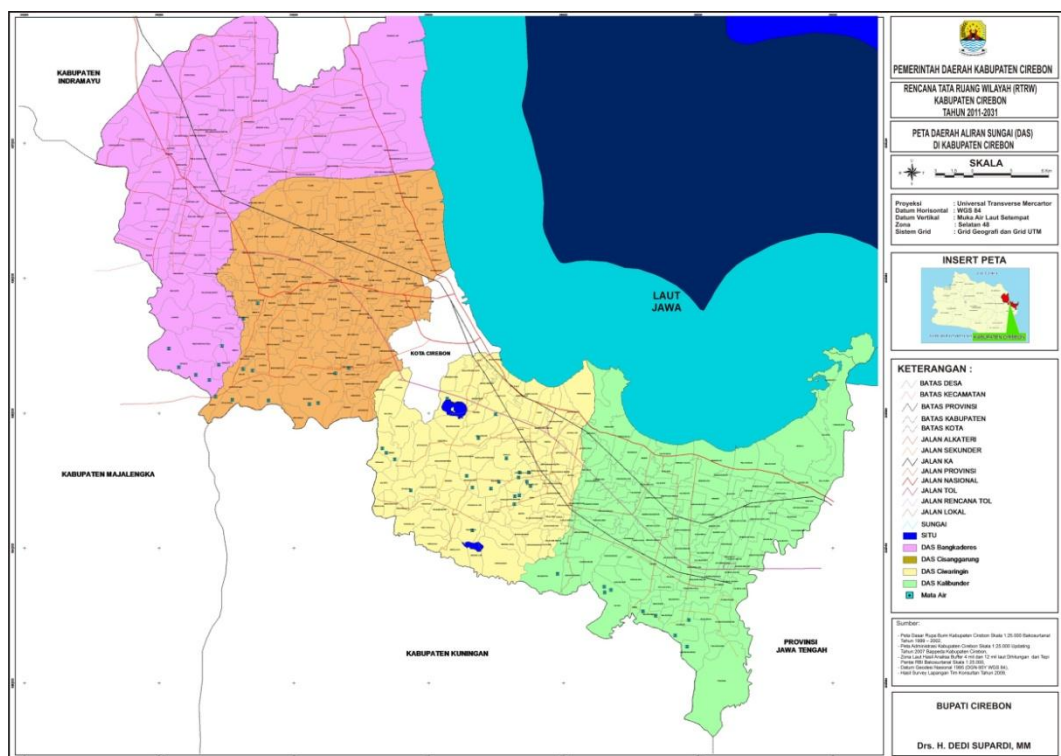
Jumlah mata air di Kabupaten Cirebon sebanyak empat puluh empat titik yang tersebar di dua belas kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Persebaran Mata Air di Kabupaten Cirebon

No	Kecamatan	Jumlah Titik	Nama Mata Air
1	Dukupuntang	4	1. Mata air Citangkurak di Desa Cipanas 2. Mata air Cidahu di Desa Cipanas 3. Mata air Cibuyut di Desa Cipanas 4. Mata air Cilingga di Desa Cangkoak
2	Palimanan	1	1. Mata air Pancuran Daris di Desa Balerante
3	Beber	3	1. Mata air Cimara di Desa Sindang Kempeng 2. Mata air Balonggede di Desa Cipinang 3. Mata air Ciwaru di Desa Beber
4	Greged	7	1. Mata air Bakam di Desa Greged 2. Mata air Umbar di Desa Nanggela 3. Mata air Cilengceng di Desa Nanggela 4. Mata air Mandiingin di Desa Durajaya 5. Mata air Cikarang di Desa Gumulunglebak 6. Mata air Pakuwon di Desa Gumulung 7. Mata air Pagadungan di Desa Lebak Mekar
5	Lemahabang	14	1. Mata air Cikubang Daris di Desa Belawa 2. Mata air Cidahu di Desa Belawa 3. Mata air Ciloa di Desa Belawa 4. Mata air Kegambulan di Desa Belawa; 5. Mata air Cikondang di Desa Wangkelang; 6. Mata air Ciseureuh di Desa Wangkelang; 7. Mata air Pesantren di Desa Pasawahan; 8. Mata air Cibirung di Desa Pasawahan; 9. Mata air Sumurgandung di Desa Pasawahan; 10. Mata air Sindang Pancuran di Desa Sindanglaut; 11. Mata air Pamuruyan di Desa Sindanglaut; 12. Mata air Cibanbansari di Desa Cipeujeuh; 13. Mata air Karacak di Desa Cipeujeuh Kulon; 14. Mata air Cibuyut di Desa Cipeujeuh Kulon;
6	Sedong	1	1. Mata air Ciwado di Desa Panongan
7	Astanajapura	1	1. Mata air Pesantren di Desa Munjul
8	Waled	5	1. Mata air Gunung Tukung di Desa Waled Asem; 2. Mata air Cudus Gintung di Desa Waled Asem

No	Kecamatan	Jumlah Titik	Nama Mata Air
			3. Mata air Gunung Cibelut di Desa Ciuyah 4. Mata air Balong di Desa Ciuyah 5. Mata air Bulak Canggih di Desa Ciuyah
9	Pasaleman	2	1. Mata air Tambu Racak di Desa Cigobang 2. Mata air Cikondang di Desa Cigobang Wangi
10	Karangsembung	1	1. Mata air Kondangsari di Desa Sumur Kondang
11	Talun	2	1. Mata air Krandon di Desa Krandon 2. Mata air Sumur Waluh di Desa Kemantren
12	Sumber	3	1. Mata air Ciseureuh di Desa Cisaat 2. Mata air Seureuh Beureum di Desa Sidawangi 3. Mata air Sipedang di Desa Sidawangi

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon, 2011



Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon, 2011

Gambar 2.4. Peta Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Cirebon

2.1.1.5. Iklim (Klimatologis)

Berdasarkan klasifikasi *Schmidt* dan *Ferguson*, keadaan iklim di Kabupaten Cirebon termasuk tipe C dan D. Karakteristik daerah dengan kategori ini beriklim tropis, dengan suhu minimum 24°C dan suhu rata-rata 28°C. Kabupaten Cirebon memiliki jumlah curah hujan antara 0-3.317 mm dengan rata-rata jumlah curah hujan sebanyak 1.265,15 mm. Curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Dukupuntang (3.317 mm) dan Kecamatan Palimanan (3.204 mm), sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Suranenggala (136 mm).

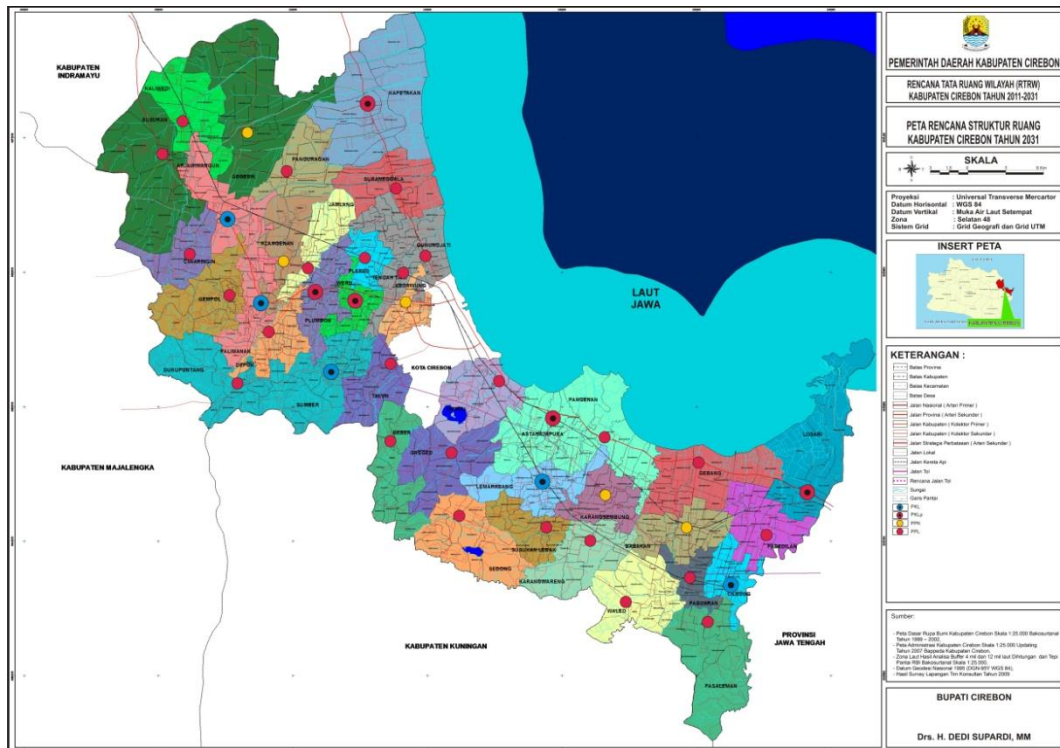
2.1.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Cirebon memiliki potensi pengembangan wilayah cukup prospektif. Potensi ini dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Cirebon (RTRW Kabupaten Cirebon 2011-2031) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 Seri E.7). Arah pengembangan wilayah Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

- a. Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan terpadu.
- b. Pengembangan kawasan industri, agroindustri, industri kecil dan mikro sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia.
- c. Pengembangan wisata agro dan wisata religi dengan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya.
- d. Pengembangan pusat pelayanan bersinergis didukung prasarana wilayah dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- e. Pengembangan dan pelestarian kawasan berfungsi lindung sesuai dengan fungsi dan potensi sumberdaya alam.
- f. Pendistribusian penduduk sesuai dengan pengembangan sistem perkotaan.
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Selanjutnya, pengembangan wilayah disusun berdasarkan rencana struktur ruang wilayah yaitu rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana

wilayah. Rencana pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Kabupaten Cirebon memiliki beberapa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan. Sementara, PKLp adalah pusat pelayanan kawasan yang akan dipromosikan menjadi PKL.



Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon, 2011

Gambar 2.5. Struktur Ruang Kabupaten Cirebon

2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Cirebon memiliki wilayah rawan bencana alam tanah longsor, gelombang pasang, banjir, dan angin ribut. Adapun rincian wilayah rawan bencana sebagai berikut:

- (1) Wilayah rawan tanah longsor seluas kurang lebih 4.635 Ha meliputi :
 - a. Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang;
 - b. Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang;
 - c. Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang;
 - d. Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang;

- e. Desa Kedondong Kidul Kecamatan Dukupuntang;
- f. Desa Sidawangi Kecamatan Sumber;
- g. Desa Cupang Kecamatan Gempol; dan
- h. Desa Karangwuni Kecamatan Sedong.

(2) Wilayahrawan gelombang pasang seluas kurang lebih 24.209 Ha meliputi:

- a. Kecamatan Kapetakan;
- b. Kecamatan Suranenggala;
- c. Kecamatan Gunungjati;
- d. Kecamatan Mundu;
- e. Kecamatan Astanajapura;
- f. Kecamatan Pangenan;
- g. Kecamatan Gebang; dan
- h. Kecamatan Losari.

(3) Wilayahrawan banjir seluas kurang lebih 4.412 Ha meliputi :

- a. Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan;
- b. Desa Grogol Kecamatan Kapetakan;
- c. Desa Wanakaya Kecamatan Gunungjati;
- d. Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati;
- e. Desa Tawang Sari Kecamatan Losari;
- f. Desa Ambulu Kecamatan Losari;
- g. Desa Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik;
- h. Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik;
- i. Desa Cangkuang Kecamatan Babakan;
- j. Desa Babakan Kecamatan Pabedilan;
- k. Desa Losari Lor Kecamatan Pabedilan;
- l. Desa Ciuyah Kecamatan Waled;
- m. Desa Ambit Kecamatan Waled;
- n. Desa Gunungsari Kecamatan Waled;
- o. Desa Mekarsari Kecamatan Waled;
- p. Desa Mundu Mesigit Kecamatan Mundu;

- q. Desa Bayalangu Kecamatan Gegesik;
- r. Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang;
- s. Desa Kedongdong Kecamatan Dukupuntang; dan
- t. Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang.

(4) Wilayahrawan angin ribut seluas kurang lebih 2.001 Ha meliputi :

- a. Desa Panggangsari Kecamatan Losari;
- b. Desa Melakasari Kecamatan Gebang;
- c. Desa Jatianom Kecamatan Susukan; dan
- d. Desa Luwung Kencana Kecamatan Susukan.

2.1.2. Kependudukan (Demografis)

Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon (2013), jumlah penduduk Kabupaten Cirebon sebanyak 2.293.397 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kabupaten Cirebon terdiri dari 1.139.263 jiwa perempuan (49,67%) dan 1.154.134 jiwa laki-laki (50,33%). Angka sex ratio sebesar 98,71%. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk laki-laki terdapat 98 penduduk perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki berjumlah lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah Jiwa dalam Keluarga				
		Laki-Laki	%	Perempuan	%	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Waled	29.388	50,53	28.770	49,47	58.158
2	Ciledug	23.054	50,58	22.523	49,42	45.577
3	Losari	31.704	50,11	31.562	49,89	63.266
4	Pabedilan	31.203	50,39	30.723	49,61	61.926
5	Babakan	37.631	49,06	39.068	50,94	76.699
6	Karangsembung	19.122	50,61	18.664	49,39	37.786
7	Lemahabang	27.989	50,91	26.990	49,09	54.979
8	Susukanlebak	20.488	50,21	20.316	49,79	40.804
9	Sedong	22.459	51,32	21.301	48,68	43.760
10	Astanajapura	40.218	50,61	39.250	49,39	79.468

No	Kecamatan	Jumlah Jiwa dalam Keluarga				
		Laki-Laki	%	Perempuan	%	Jumlah
11	Pangenan	22.574	50,28	22.323	49,72	44.897
12	Mundu	37.943	51,62	35.556	48,38	73.499
13	Beber	21.411	51,60	20.087	48,40	41.498
14	Talun	34.361	51,36	32.539	48,64	66.900
15	Sumber	43.421	50,31	42.892	49,69	86.313
16	Dukupuntang	31.740	50,64	30.943	49,36	62.683
17	Palimanan	31.559	50,19	31.314	49,81	62.873
18	Plumbon	39.124	49,96	39.179	50,04	78.303
19	Weru	35.071	52,02	32.342	47,98	67.413
20	Kedawung	33.171	49,57	33.745	50,43	66.916
21	Gunungjati	42.846	50,28	42.364	49,72	85.210
22	Kapetakan	29.783	50,17	29.579	49,83	59.362
23	Klangenan	25.875	49,46	26.444	50,54	52.319
24	Arjawinangun	34.434	49,07	35.736	50,93	70.170
25	Panguragan	25.686	50,02	25.670	49,98	51.356
26	Ciwaringin	19.886	48,85	20.825	51,15	40.711
27	Susukan	37.924	50,14	37.716	49,86	75.640
28	Gegesik	40.515	49,82	40.813	50,18	81.328
29	Kaliwedi	21.828	50,07	21.763	49,93	43.591
30	Gebang	32.036	49,78	32.321	50,22	64.357
31	Depok	33.358	50,90	32.175	49,10	65.533
32	Pasaleman	14.137	50,10	14.080	49,90	28.217
33	Pabuaran	18.906	50,71	18.374	49,29	37.280
34	Karangwareng	15.670	50,48	15.374	49,52	31.044
35	Tengahani	22.131	51,50	20.838	48,50	42.969
36	Plered	27.956	49,75	28.240	50,25	56.196
37	Gempol	23.697	49,68	24.007	50,32	47.704
38	Greged	29.517	51,02	28.342	48,98	57.859
39	Suranenggala	23.343	49,46	23.854	50,54	47.197
40	Jamblang	20.975	50,38	20.661	49,62	41.636
JUMLAH		1.154.134	50,32	1.139.263	49,68	2.293.397

Sumber: BPPKB Kabupaten Cirebon, 2013

Pada tahun 2013, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Cirebon sebesar 1,28%. Kecamatan yang berpenduduk terbanyak adalah Kecamatan Sumber sebanyak 86.313 jiwa dan kecamatan yang berpenduduk paling sedikit adalah Kecamatan Pasaleman sebanyak 28.217 jiwa.

Tabel 2.4 Perkembangan Penduduk Kab Cirebon Tahun 2009-2013

Komponen	2009	2010	2011	2012	2013
Penduduk (jiwa)	2.211.186	2.065.142	2.104.313	2.263.978	2.293.397
LPP (%)	0,85	-6,6	1,89	7,58	1,29

Sumber : BPS Kab Cirebon

**Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cirebon Per Kecamatan Tahun 2012-2013**

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk		%
		Tahun 2012	Tahun 2013	Pertumbuhan
1	Waled	57.585	58.158	0,99
2	Pasaleman	27.181	28.217	3,67
3	Ciledug	46.038	45.577	(1,01)
4	Pabuaran	36.781	37.280	1,34
5	Losari	58.926	63.266	6,86
6	Pabedilan	56.144	61.926	9,34
7	Babakan	67.720	76.699	11,71
8	Gebang	62.830	64.357	2,37
9	Karangsembung	37.690	37.786	0,25
10	Karangwareng	29.009	31.044	6,56
11	Lemahabang	55.308	54.979	(0,60)
12	Susukan Lebak	40.381	40.804	1,04
13	Sedong	43.115	43.760	1,47
14	Astanajapura	83.048	79.468	(4,50)
15	Pangenan	47.272	44.897	(5,29)
16	Mundu	81.503	73.499	(10,89)
17	Beber	39.768	41.498	4,17
18	Greged	55.973	57.859	3,26
19	Talun	69.690	66.900	(4,17)
20	Sumber	89.139	86.313	(3,27)
21	Dukupuntang	66.624	62.683	(6,29)
22	Palimanan	60.517	62.873	3,75
23	Plumbon	80.375	78.303	(2,65)
24	Depok	62.214	65.533	5,06
25	Weru	70.715	67.413	(4,90)
26	Plered	56.298	56.196	(0,18)
27	Tengah Tani	44.322	42.969	(3,15)
28	Kedawung	68.716	66.916	(2,69)
29	Gunung Jati	85.283	85.210	(0,09)
30	Kapetakan	56.301	59.362	5,16

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk		%
		Tahun 2012	Tahun 2013	Pertumbuhan
31	Suranenggala	45.145	47.197	4,35
32	Klangenan	55.971	52.319	(6,98)
33	Jamblang	38.484	41.636	7,57
34	Arjawinangun	68.749	70.170	2,03
35	Panguragan	46.499	51.356	9,46
36	Ciwaringin	41.653	40.711	(2,31)
37	Gempol	47.674	47.704	0,06
38	Susukan	67.968	75.640	10,14
39	Gegesik	76.118	81.328	6,41
40	Kaliwedi	39.251	43.591	9,96
	Jumlah	2.263.978	2.293.397	1,29

Sumber : Bappeda-BPS dan BPPKB Kabupaten Cirebon 2012-2013

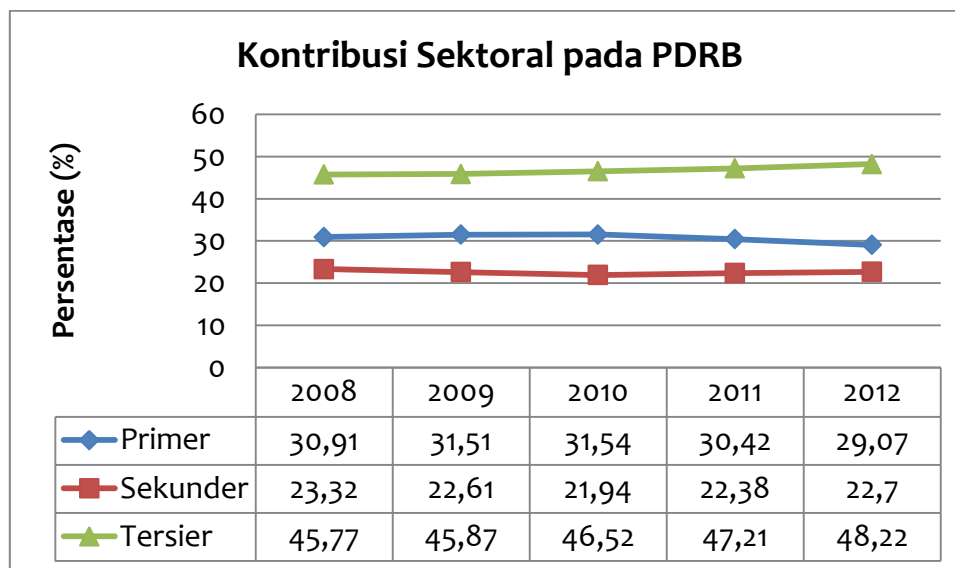
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Subbab ini menjelaskan gambaran dan hasil analisis kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Kondisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Kemampuan daerah ini menciptakan nilai tambah untuk berbagai aktivitas ekonomi. Ada dua jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku (adhb) dan atas dasar harga konstan (adhk).



Sumber : BPS Kab Cirebon, 2012

Gambar 2.6. Grafik Kontribusi Sektor pada Pembentukan PDRB Kabupaten Cirebon

Dilihat dari kontribusi sektoral menunjukkan bahwa sektor tersier berkontribusi paling besar dibanding sektor yang lain. Pada kurun 2008-2012 nilainya semakin meningkat, dari 45,77% menjadi 48,22%. Jika diurai, sub sektor perdagangan dan jasa memberikan kontribusi paling besar pada sektor tersier. Ini menunjukkan bahwa sub sektor perdagangan dan jasa menjadi bagian aktivitas ekonomi masyarakat. Sektor primer berkontribusi semakin menurun pada kurun 2008-2012. Angkanya mulai dari 30,91% menjadi 29,07%. Penurunan kontribusi sektor primer bergeser kepada sektor tersier. Sementara, kontribusi sektor sekunder relatif stabil pada angka 22%.

**Tabel 2.6. PDRB Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2013
(dalam Rp. 000.000)**

Lapangan Usaha	2009	2010	2011**	2012**	2013***
1. PERTANIAN	5.330.751	5.977.337,67	6.307.535,96	6.549.665,62	7.318.566,15
a. Tanaman Bahan Makanan	3.311.956	3.791.817,55	3.950.554,73	4.033.190,03	4.483.519,25
b. Tanaman Perkebunan	267.666	269.627,56	293.683,42	316.314,94	342.285,02
c. Peternakan dan hasil-hasilnya	921.356	1.001.018,35	1.068.887,39	1.138.640,12	1.284.446,97
d. Kehutanan	25.533	26.203,03	27.571,72	30.035,97	32.156,92
e. Perikanan	804.241	888.671,18	966.838,70	1.031.484,56	1.176.157,99
2. PERTAMBANGAN DAN PENGALIAN	63.854	68.874,15	74.632,03	81.022,11	90.602,23
a. Minyak dan Gas bumi (migas)					
b. Pertambangan tanpa Migas					

Lapangan Usaha	2009	2010	2011**	2012**	2013***
c. Penggalian	63.854	68.874,15	74.632,03	81.022,11	90.602,23
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	2.408.511	2.555.301,90	2.829.318,42	3.129.826,96	3.482.434,90
a. Industri Migas					
1). Pengilangan Minyak Bumi					
2). Gas Alam Cair					
b. Industri tanpa Migas	2.408.511	2.555.301,90	2.829.318,42	3.129.826,96	3.482.434,90
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	375.639	415.398,60	454.648,74	501.391,55	566.383,33
a. Listrik	357.905	396.066,20	434.087,19	478.505,94	540.587,59
b. Gas kota	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	17.735	19.332,29	20.561,55	22.885,61	25.795,74
5. BANGUNAN / KONTRUKSI	1.086.993	1.236.019,03	1.410.972,19	1.545.947,35	1.788.305,15
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	3.559.237	3.975.083,46	4.385.110,48	4.832.056,04	5.511.817,12
a. Perdagangan Besar dan Eceran	2.786.808	3.117.693,84	3.439.571,94	3.811.296,13	4.365.782,12
b. Hotel	10.581	11.400,65	12.307,62	13.286,74	14.926,47
c. Restoran/Rumah Makan	761.848	845.988,96	933.230,92	1.007.473,17	1.131.108,54
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	1.200.022	1.318.197,31	1.457.149,19	1.595.552,05	1.781.312,12
a. Pengangkutan	1.121.243	1.225.483,69	1.355.590,68	1.484.853,28	1.653.904,34
1). Angkutan Rel	3.298	3.336,41	3.488,34	3.716,97	3.916,47
2). Angkutan Jalan Raya	1.035.981	1.122.988,92	1.242.874,05	1.363.128,83	1.514.454,36
3). Angkutan Laut	-	-	-	-	-
4). Angkutan Sungai dan Penyeberangan	-	-	-	-	-
5). Angkutan Udara	-	-	-	-	-
6). Jasa Penunjang Angkutan	81.964	99.158,36	109.228,29	118.007,48	135.533,51
b. Komunikasi	78.779	92.713,63	101.558,51	110.698,77	127.407,79
1). Pos dan Telekomunikasi					
2). Jasa Penunjang Komunikasi					
8. KEUANGAN, SEWA BANGUNAN DAN JASA PERUSAHAAN	693.314	767.254,85	856.520,01	950.484,00	1.089.162,57
a. Bank	28.251	31.993,27	36.091,96	41.076,65	47.972,18
b. Lemb. Keuangan Selain Bank	120.930	132.643,48	145.304,51	161.221,91	183.173,94
c. Jasa Penunjang Keuangan					
d. Sewa Bangunan	428.021	471.990,96	526.005,61	580.941,63	663.657,23
e. Jasa Perusahaan	116.113	130.627,14	149.117,93	167.243,81	194.359,22
9. JASA - JASA	2.400.419	2.857.839,52	3.206.944,59	3.619.999,09	4.270.302,89
a. Pemerintahan Umum	1.765.591	2.112.890,90	2.365.116,69	2.706.219,51	3.208.263,54
1). Adm. Pemerintahan & Pertahanan					
2). Jasa Pemerintahan Lainnya					
b. Swasta	634.828	744.948,62	841.827,91	913.779,58	1.062.039,35
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	115.489	128.805,12	144.461,89	159.132,58	182.830,31
2). Jasa Hiburan & Rekreasi	14.592	16.636,87	18.991,89	21.110,51	24.326,24
3). Jasa Perseorangan & Rumah tangga	504.747	599.506,63	678.374,13	733.536,49	854.882,80
P D R B	17.118.740	19.170.306,38	20.982.831,60	22.805.944,77	25.898.886,46

Sumber : BPS Kab.Cirebon, *angka sementara, ** angka sementara sekali, *** proyeksi

PDRB adhb yang digunakan sebagai barometer pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2013, produksi regional bruto mencapai 25.898.886,46 juta rupiah atau meningkat sebesar 13,56% dari tahun 2012 (22.805.944,77 juta rupiah). Angka ini meningkat bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 yang mencapai 8,69%. Angka kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87 %.

Tabel 2.7. Distribusi Prosentase PDRB Berdasarkan Harga Berlaku Kabupaten Cirebon Tahun 2012-2013

Lapangan Usaha	2009	2010	2011**	2012**	2013***
[1]	[11]	[12]	[13]	[14]	[13]
1. PERTANIAN	31,14	31,18	30,06	28,72	28,26
a. Tanaman Bahan Makanan	19,35	19,78	18,83	17,68	17,31
b. Tanaman Perkebunan	1,56	1,41	1,40	1,39	1,32
c. Peternakan dan hasil-hasilnya	5,38	5,22	5,09	4,99	4,96
d. Kehutanan	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12
e. Perikanan	4,70	4,64	4,61	4,52	4,54
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	0,37	0,36	0,36	0,36	0,35
a. Minyak dan Gas bumi (migas)	-	-	-	-	-
b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	0,37	0,36	0,36	0,36	0,35
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	14,07	13,33	13,48	13,72	13,45
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
1). Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
2). Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri tanpa Migas	14,07	13,33	13,48	13,72	13,45
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	2,19	2,17	2,17	2,20	2,19
a. Listrik	2,09	2,07	2,07	2,10	2,09
b. Gas kota	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
5. BANGUNAN / KONTRUKSI	6,35	6,45	6,72	6,78	6,90
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	20,79	20,74	20,90	21,19	21,28
a. Perdagangan Besar dan Eceran	16,28	16,26	16,39	16,71	16,86
b. Hotel	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
c. Restoran/Rumah Makan	4,45	4,41	4,45	4,42	4,37
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	7,01	6,88	6,94	7,00	6,88
a. Pengangkutan	6,55	6,39	6,46	6,51	6,39
1). Angkutan Rel	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2). Angkutan Jalan Raya	6,05	5,86	5,92	5,98	5,85
3). Angkutan Laut	-	-	-	-	-
4). Angkutan Sungai dan Penyeberangan	-	-	-	-	-
5). Angkutan Udara	-	-	-	-	-
6). Jasa Penunjang Angkutan	0,48	0,52	0,52	0,52	0,52
b. Komunikasi	0,46	0,48	0,48	0,49	0,49
8. KEUANGAN, SEWA BANGUNAN DAN JASA PERUSAHAAN	4,05	4,00	4,08	4,17	4,21
a. Bank	0,17	0,17	0,17	0,18	0,19
b. Lemb. Keuangan Selain Bank	0,71	0,69	0,69	0,71	0,71
d. Sewa Bangunan	2,50	2,46	2,51	2,55	2,56
e. Jasa Perusahaan	0,68	0,68	0,71	0,73	0,75

g.JASA - JASA	14,02	14,91	15,28	15,87	16,49
a. Pemerintahan Umum	10,31	11,02	11,27	11,87	12,39
b. S w a s t a	3,71	3,89	4,01	4,01	4,10
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,67	0,67	0,69	0,70	0,71
2). Jasa Hiburan & Rekreasi	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
3). Jasa Perseorangan & Rumah tangga	2,95	3,13	3,23	3,22	3,30
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

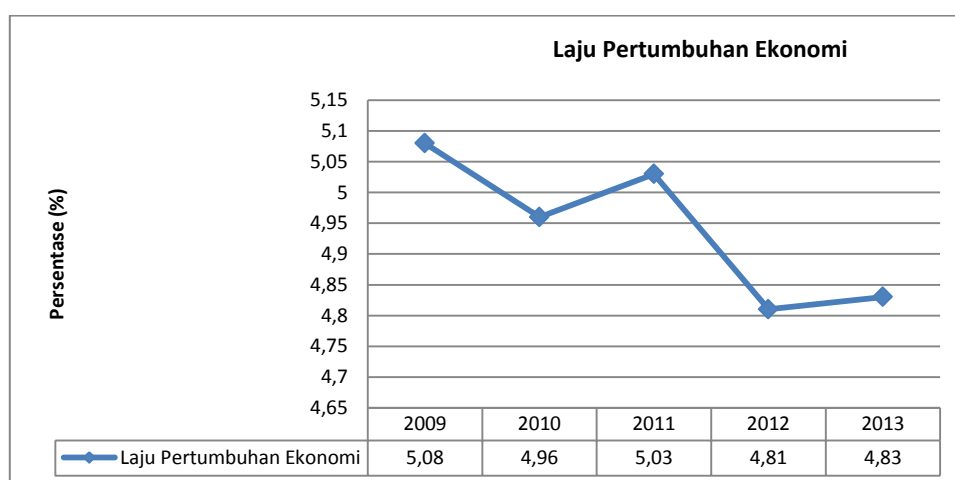
Sumber:

- BPS Kabupaten Cirebon
- *) Angka Perbaikan
- **) Angka Sementara
- Bappeda Kabupaten Cirebon
- ***) Angka Proyeksi

Jika dilihat dari kontribusi sektoral adhb, sektor pertanian berkontribusi paling besarpada PDRB adhk yaitu sebesar28,26 %. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon masih merupakan wilayah agraris atau daerah yang bergantung pada ekonomi pertanian dan hasil-hasilnya. Sektor lain yang berkontribusinya cukup besar adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan besaran 21,28 %. Subsektor perdagangan yang berperan adalah perdagangan besar dan eceran sebesar 16,86%.

2.2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)ditunjukkan oleh tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Dinamika ketercapaian LPE pada kurun 2009 sampai 2013 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber : BPS Kab Cirebon, 2013

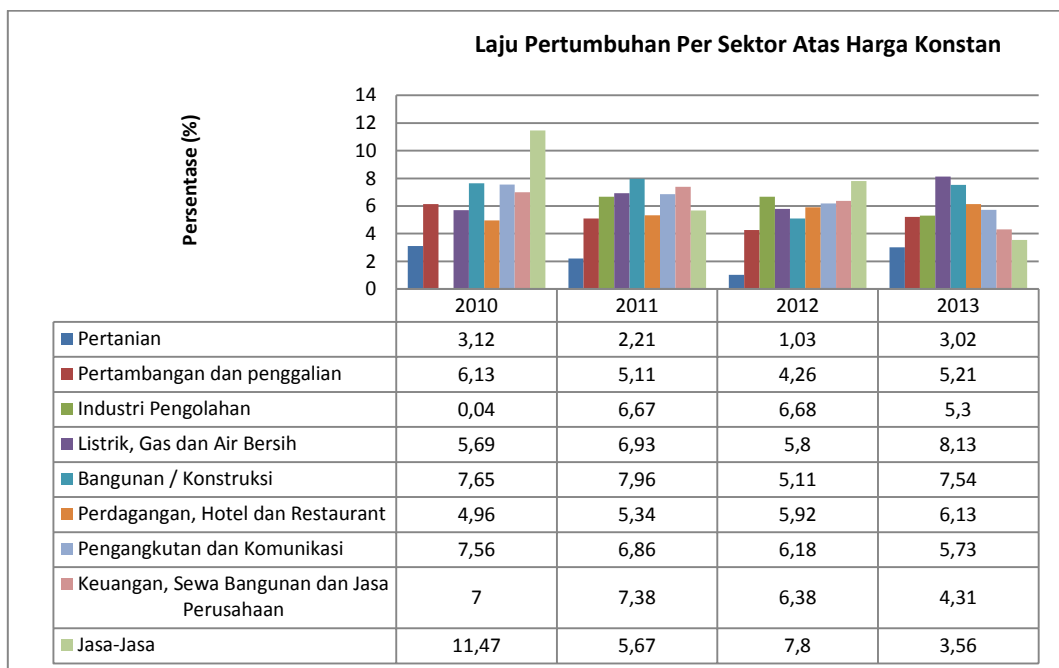
Gambar 2.7. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Harga Konstan Kab Cirebon 2012-2013 (%)

NO	LAPANGAN USAHA	Tahun 2010	Tahun 2011	TAHUN 2012 **)	TAHUN 2013 ***)
A.	PRIMER				
1.	Pertanian	3,12	2,21	1,03	3,02
2.	Pertambangan dan penggalian	6,13	5,11	4,26	5,21
B.	SEKUNDER				
3.	Industri Pengolahan	0,04	6,67	6,68	5,30
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	5,69	6,93	5,80	8,13
5.	Bangunan / Konstruksi	7,65	7,96	5,11	7,54
C.	TERSIER				
6.	Perdagangan, Hotel dan Restaurant	4,96	5,34	5,92	6,13
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	7,56	6,86	6,18	5,73
8.	Keuangan, Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan	7,00	7,38	6,38	4,31
9.	Jasa-Jasa	11,47	5,67	7,80	3,56
	PDRB	4,96	5,03	4,81	4,83

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon

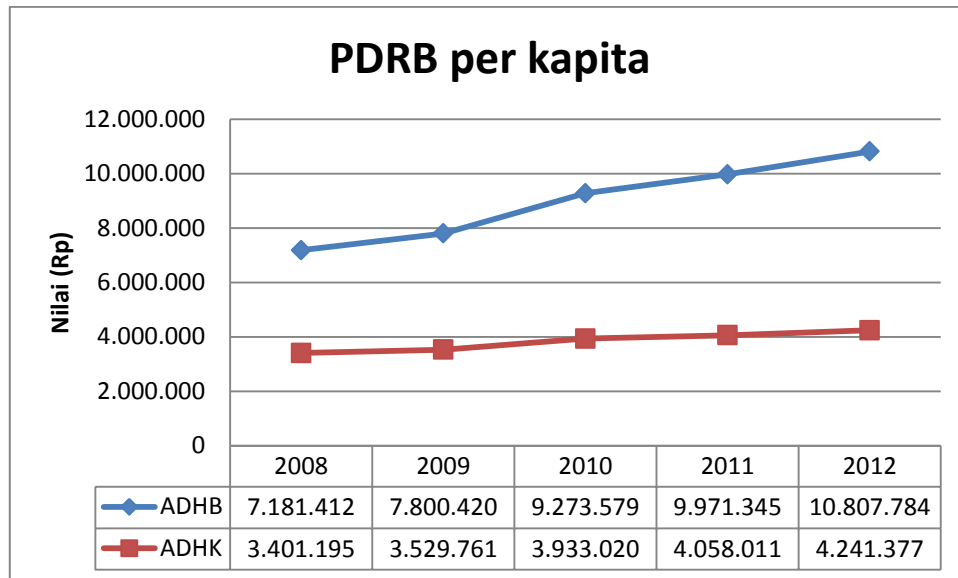
**) Angka Sementara dan ***) Angka Sangat Sementara



Sumber : BPS Kab Cirebon, 2013

Gambar 2.8 Grafik Laju Pertumbuhan Per Sektor Atas Harga Konstan

Dilihat dari tingkat pendapatan per kapita, pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan. Pada tahun 2008, pendapatan per kapita sebesar Rp7.613.394,93 , pada tahun 2012 nilainya sebesar Rp 10.807.780 dan pada tahun 2013 diproyeksikan sebesar Rp 12.112.403,73.. Ini menunjukkan bahwa pembangunan memberikan hasil positif bagi peningkatan pendapatan penduduk.



Sumber : BPS Kab Cirebon, 2012

Gambar 2.8. Grafik perkembangan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dan konstan

2.2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Antar Kecamatan

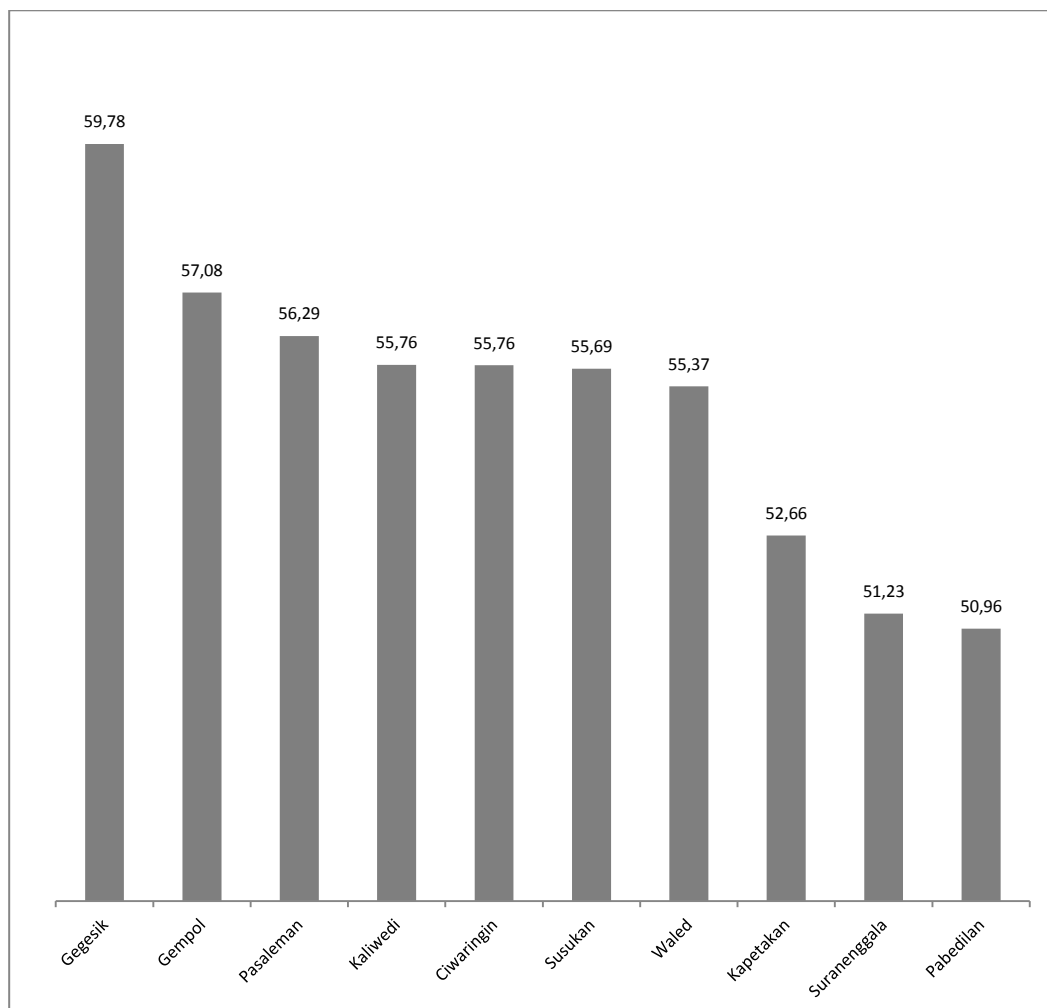
Struktur perekonomian suatu kecamatan sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Untuk menggambarkan struktur perekonomian di seluruh kecamatan. Sektor pertanian merupakan sektor yang masih memegang peranan penting bagi sebagian besar kecamatan. Sektor pertanian dengan persentase tertinggi PDRB tahun 2011 adhb di sektor pertanian ini ada di Kecamatan Gegesik dengan angka 59,78 % dan persentase terendah ada di Kecamatan Weru dengan persentase sebesar 4,29 %.

**Tabel 2.9. Perubahan Peringkat PDRB Per Kecamatan Kabupaten Cirebon
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 dan 2011**

No	Kecamatan	Tahun			
		2010		2011	
		Nilai (Milyar Rp.)	%	Nilai (Milyar Rp.)	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Palimanan	993.855,14	5,18	1.091.466,01	5,20
2	Plumbon	905.036,76	4,72	978.547,70	4,66
3	Gegesik	857.282,62	4,47	892.056,84	4,25
4	Depok	807.120,32	4,21	878.570,39	4,19
5	Gunungjati	755.303,86	3,94	784.091,30	3,74
6	Weru	695.141,34	3,63	774.059,83	3,69
7	Plered	687.358,72	3,59	764.979,44	3,65
8	Arjawinangun	655.408,69	3,42	717.247,21	3,42
9	Susukan	673.607,11	3,51	696.580,92	3,32
10	Astanajapura	635.476,06	3,31	687.323,84	3,28
11	Kapetakan	573.427,62	2,99	642.916,32	3,06
12	Babakan	562.463,33	2,93	593.860,92	2,83
13	Gebang	536.882,61	2,80	587.213,82	2,80
14	Ciledug	517.655,78	2,70	554.007,65	2,64
15	Panguragan	491.442,95	2,56	551.410,81	2,63
16	Dukupuntang	509.566,11	2,66	542.049,60	2,58
17	Sumber	484.940,89	2,53	521.068,76	2,48
18	Losari	447.673,58	2,34	511.878,95	2,44
19	Mundu	478.037,60	2,49	511.068,39	2,44
20	Kedawung	473.814,81	2,47	495.935,83	2,36
21	Suranenggala	398.894,11	2,08	480.303,96	2,29
22	Talun	420.016,49	2,19	479.100,88	2,28
23	Kaliwedi	422.902,92	2,21	470.340,02	2,24
24	Tengah Tani	418.169,41	2,18	452.828,47	2,16
25	Klangenan	392.017,38	2,04	433.850,82	2,07
26	Lemahabang	378.176,82	1,97	417.205,90	1,99
27	Pabuaran	358.426,75	1,87	392.309,11	1,87
28	Ciwaringin	319.934,05	1,67	370.116,81	1,76
29	Pabedilan	335.358,53	1,75	368.556,27	1,76
30	Waled	342.259,59	1,79	364.178,31	1,74
31	Sedong	321.323,33	1,68	359.816,31	1,71
32	Jamblang	326.431,68	1,70	355.606,66	1,69
33	Gempol	277.325,47	1,45	321.092,18	1,53
34	Beber	272.912,34	1,42	313.446,28	1,49
35	Pangenan	268.270,42	1,40	310.173,69	1,48

No	Kecamatan	Tahun			
		2010		2011	
		Nilai (Milyar Rp.)	%	Nilai (Milyar Rp.)	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
36	Susukan Lebak	266.816,24	1,39	290.469,21	1,38
37	Karangwareng	241.333,15	1,26	272.153,89	1,30
38	Karangsembung	238.368,71	1,24	270.485,30	1,29
39	Greged	237.529,23	1,24	264.820,36	1,26
40	Pasaleman	192.343,89	1,00	219.642,67	1,15
	Jumlah	19.170.306,41		20.982.831,63	

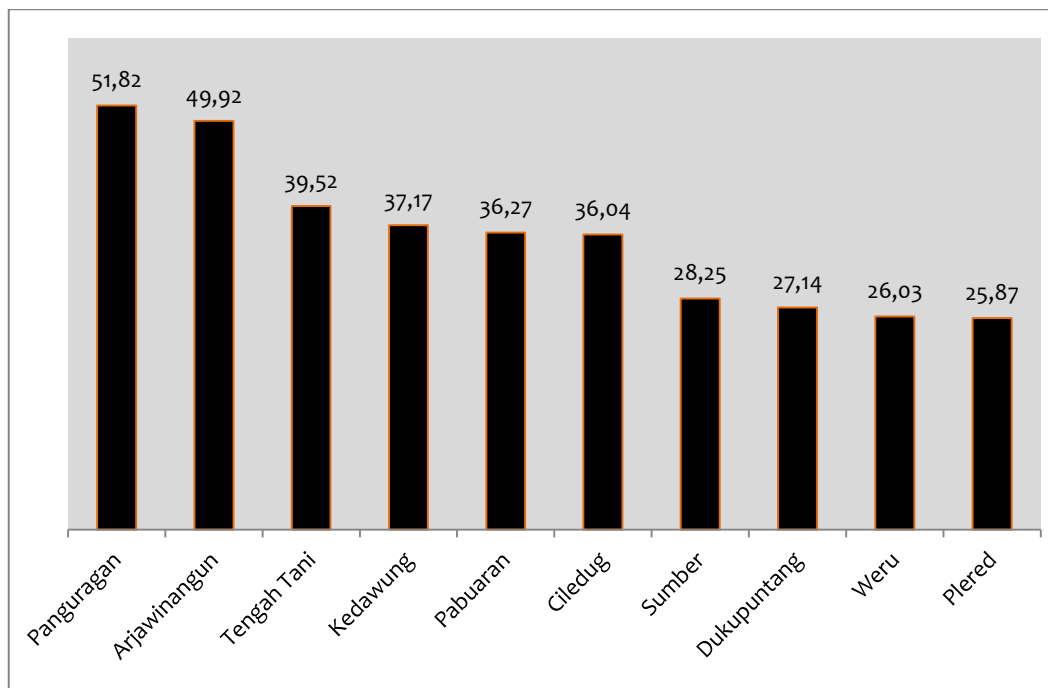
Sumber : BPS Kab Cirebon, 2012



Sumber : BPS Kabupaten Cirebon, 2012

Gambar 2.9. Grafik 10 Kecamatan dengan Peran Sektor Pertanian Terbesar di Kabupaten Cirebon Tahun 2011

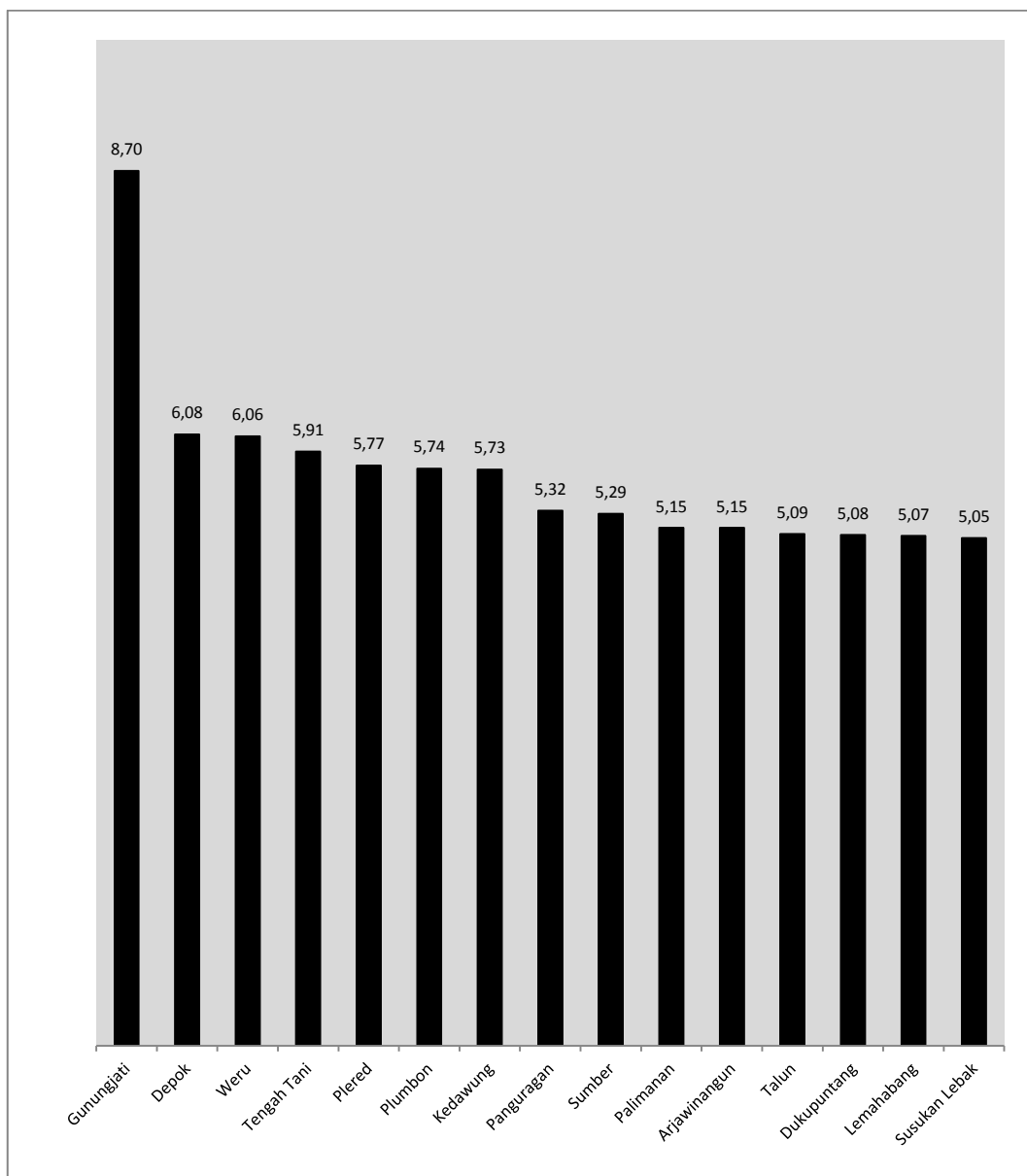
Sektor perdagangan, hotel dan rumah makan dengan persentase tertinggi PDRB tahun 2011 adhb di sektor perdagangan, hotel dan rumah makan ini ada di Kecamatan Panguragan dengan angka 51,82 % dan persentase terendah ada di Kecamatan Pasaleman dengan persentase sebesar 9,27 %.



Sumber : BPS Kabupaten Cirebon, 2012

Gambar 2.10. Grafik 10 Kecamatan dengan Peran Sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan Terbesar Tahun 2011

Laju pertumbuhan ekonomi setiap kecamatan sangat bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh laju pertumbuhan beberapa sektor yang tergantung dari karakteristik sektor tersebut. Bagi suatu daerah indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang.



Sumber : BPS Kabupaten Cirebon, 2012

Gambar 2.11. Grafik 15 Kecamatan dengan LPE di atas 5 Persen

PDRB per kapita merupakan gambaran kasar dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu kecamatan dan dapat digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran. Nilai PDRB per kapita menjadi ukuran bagi tingkat kemakmuran suatu daerah akan tetapi data tersebut tidak dapat digunakan langsung dalam pengukuran pemerataan pendapatan.

Tabel 2.10. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan LPE Kecamatan Tahun 2011

No	Kecamatan	PDRB Perkapita	Laju Pertumbuhan Ekonomi / LPE
1	Waled	6.897.815	3,8
2	Pasaleman	8.777.807	3,72
3	Ciledug	13.080.931	4,91
4	Pabuaran	11.583.184	4,99
5	Losari	9.452.323	3,91
6	Pabedilan	7.171.053	4,13
7	Babakan	9.553.075	4,11
8	Gebang	10.187.834	4,2
9	Karangsembung	7.793.483	4,59
10	Karangwareng	10.269.547	4,38
11	Lemahabang	8.181.355	5,07
12	Susukan Lebak	7.817.376	5,05
13	Sedong	9.090.370	4,08
14	Astanajapura	8.971.368	4,28
15	Pangenan	7.119.636	4,77
16	Mundu	6.767.382	4,7
17	Beber	8.549.154	4,34
18	Greged	5.133.815	4,43
19	Talun	7.430.722	5,09
20	Sumber	6.338.159	5,29
21	Dukupuntang	8.855.622	5,08
22	Palimanan	19.596.035	5,15
23	Plumbon	13.218.291	5,74
24	Depok	15.311.223	6,08
25	Weru	11.908.701	6,06
26	Plered	14.770.943	5,77
27	Kedawung	12.160.059	5,73
28	Tengah Tani	7.127.682	5,91
29	Gunungjati	9.991.417	8,7
30	Kapetakan	12.434.675	3,57
31	Suranenggala	11.577.336	3,71
32	Klangenan	8.447.973	4,67
33	Jamblang	10.078.860	4,45
34	Arjawinangun	11.340.406	5,15
35	Panguragan	12.955.396	5,32
36	Ciwaringin	9.684.979	3,98
37	Gempol	7.345.479	3,97
38	Susukan	11.177.785	3,42
39	Gegesik	12.755.504	3,27
40	Kaliwedi	13.082.724	3,82

Sumber : BPS Kab Cirebon, 2012

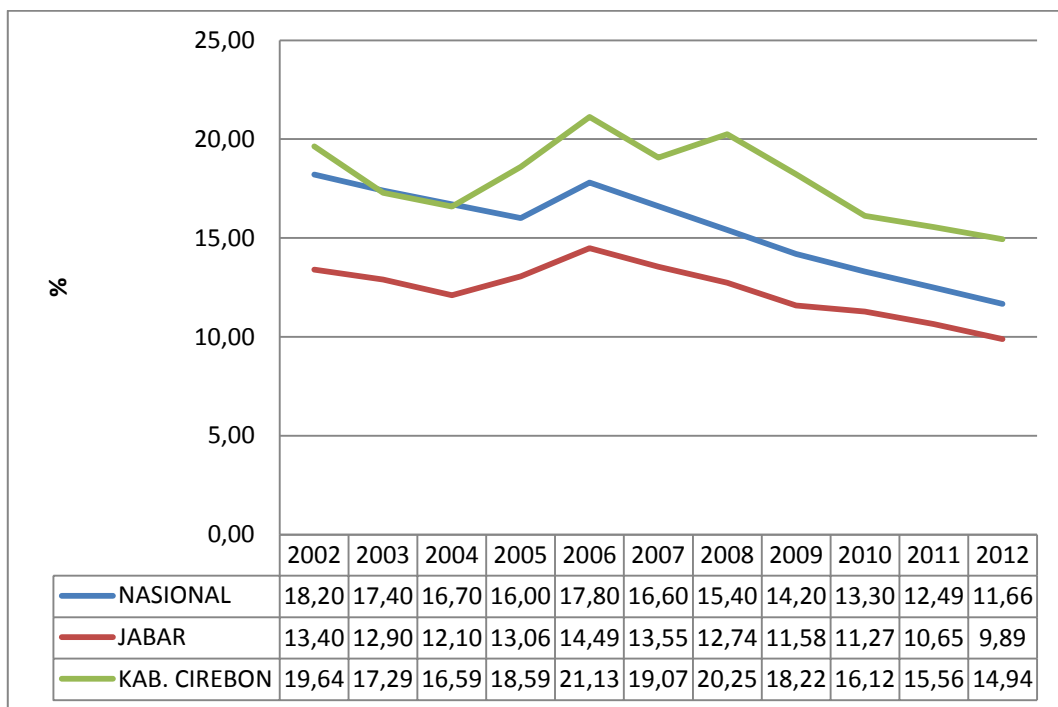
2.2.1.4. Tingkat kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu indikator kemakmuran. Pada kurun 2002-2012, tingkat kemiskinan Kabupaten Cirebon masih berada diatas rata-rata nasional dan Jawa Barat. Angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon (17,83%) nasional (14,91%), dan Jawa Barat (12,15%). Namun demikian, kinerja penurunan angka kemiskinan Kabupaten Cirebon lebih besar dibandingkan Jawa Barat. Capaian Kinerja Pembangunan menurunkan angka Kemiskinkan Di Kabupaten Cirebon Rata-rata 0,47% per tahun.

Tabel 2.11. Angka Kemiskinan Nasional, Jawa Barat, dan Kabupaten Cirebon Tahun 2002-2012

TAHUN	ANGKA KEMISKINAN (%)			KINERJA PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN		
	NASIONAL	JABAR	KAB. CIREBON	NASIONAL	JABAR	KAB. CIREBON
2002	18.20	13.40	19.64			
2003	17.40	12.90	17.29	-0.80	-0.50	-2.35
2004	16.70	12.10	16.59	-0.70	-0.80	-0.70
2005	16.00	13.06	18.59	-0.70	0.96	2.00
2006	17.80	14.49	21.13	1.80	1.43	2.54
2007	16.60	13.55	19.07	-1.20	-0.94	-2.06
2008	15.40	12.74	20.25	-1.20	-0.81	1.18
2009	14.20	11.58	18.22	-1.20	-1.16	-2.03
2010	13.30	11.27	16.12	-0.90	-0.31	-2.10
2011	12.49	10.65	15.56	-0.81	-0.62	-0.56
2012	11.66	9.89	14.94	-0.83	-0.76	-0.62
Rata-Rata	14.91	12.15	17.83	-0.65	-0.35	-0.47

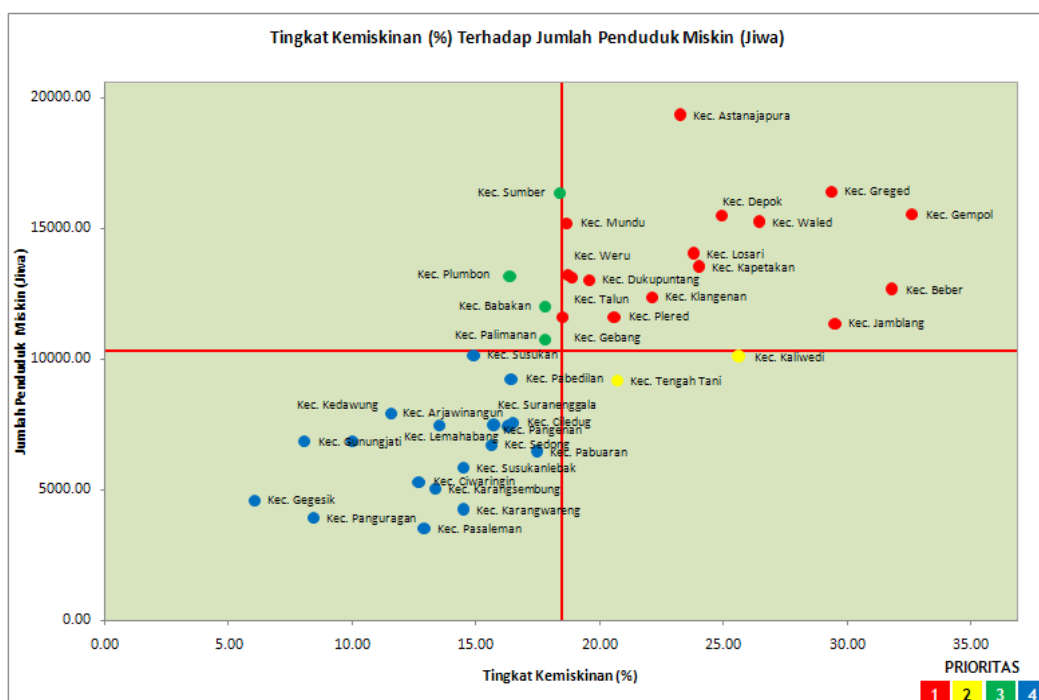
Sumber : BPS tahun 2002-2012



Sumber : BPS

Gambar 2.12. Grafik Angka Kemiskinan Tahun 2002-2012

Pada tingkat kecamatan, ada 18 kecamatan dengan tingkat kemiskinan yang perlu mendapat penanganan prioritas pertama. Ada 2 kecamatan yang harus mendapat prioritas kedua. Ada 4 kecamatan yang harus mendapat prioritas ketiga dan 26 kecamatan yang harus mendapat prioritas keempat.



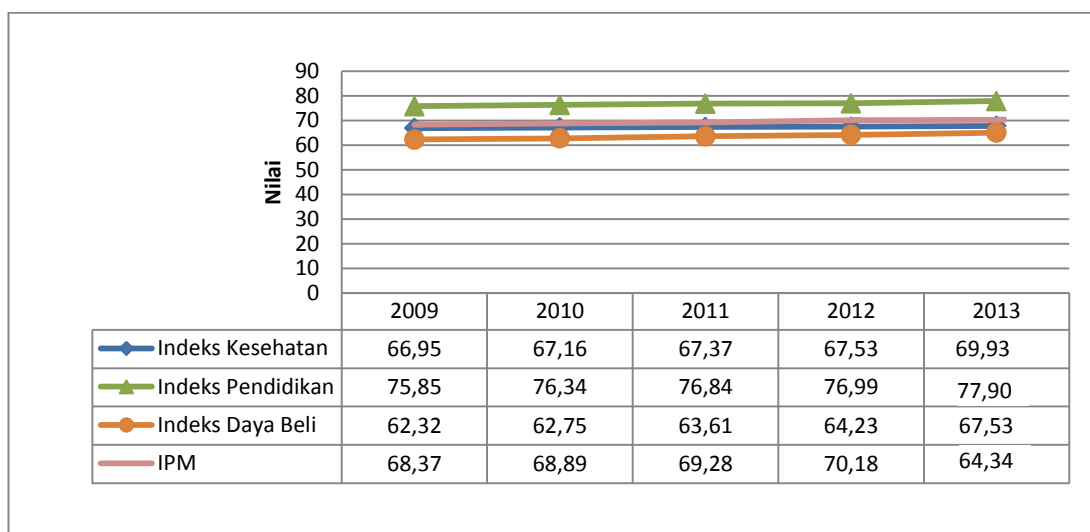
Sumber : TNP2K, 2012

Gambar 2.13. Grafik Tingkat Kemiskinan Dan Prioritas Penanganan Kemiskinan

2.2.2. Kesejahteraan Sosial

Pembangunan daerah dibidang kesejahteraan sosial berkaitan dengan kualitas manusia di Kabupaten Cirebon yang tercermin dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Aspek pendidikan diukur dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Aspek kesehatan diukur dari angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), dan balita gizi buruk. Aspek ekonomi diukur dari tingkat daya beli dan kesempatan kerja/penduduk yang bekerja.

Angka capaian IPM Kabupaten Cirebon dari tahun ke tahun selalu meningkat. Rata-rata kenaikan sebesar 0,47 point atau sekitar 0,688% per tahun. Aspek yang berkontribusi terbesar bagi capaian IPM adalah berasal dari indeks pendidikan sebesar 77,90 poin, indeks kesehatan sebesar 69,93 poin dan kontribusi terkecil berasal dari indeks daya beli sebesar 67,53 poin.



Sumber : BPS Kab Cirebon

Gambar 2.14. Capaian Indeks Pembangunan Manusia

2.2.2.1. Capaian Bidang Pendidikan

Pada bidang pendidikan, Angka Melek Huruf (AMH) atau tingkat literasi menunjukkan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis. Pada kurun 2012-2013, capaian AMH mengalami kenaikan dari 92,50 % menjadi 93,52%. Ini berarti upaya pemberantasan buta huruf berdampak positif bagi pengurangan penderita buta huruf. Juga, angka tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon masih menyisakan sebesar 6,48% penderita buta huruf.

Sementara, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah durasi rata-rata tahun penduduk mencapai pendidikan tertinggi. Pada tahun 2012-2013 capaian RLS mengalami kenaikan dari 6,89 tahun menjadi 7,01 tahun atau kenaikan sebesar 0,12 tahun. Ini menunjukkan program wajib belajar sembilan tahun berdampak positif bagi peningkatan pendidikan penduduk Kabupaten Cirebon. Namun, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA mengalami kenaikan dari tahun 2009-2013. Adapun rasio ketersediaan sekolah jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA relatif tetap. Untuk rasio guru per murid jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA berfluktuatif dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelas, kita dapat mencermati angka-angka pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.12Capaian Indikator Sasaran Sektor Pendidikan Tahun 2009-2013

No	Indikator Sasaran	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013*)
1	Angka Melek Huruf (AMH)	91,55	92,33	92,41	92,50	93,52
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	6,67	6,85	6,87	6,89	7,01
3	APK – SD	94,45	111,92	106,59	115,24	109,23
4	APM – SD	86,02	97,36	93,41	99,24	99,99
5	APK – SMP	80,85	65,78	73,00	90,63	110,63
6	APM – SMP	62,65	66,47	66,15	71,31	89,3
	APK – SMA	41,03	40,09	47,51	60,02	79,58
	APM – SMA	34,25	43,25	40,14	45,25	59,88
7	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah*)					
	SD	-	49,40	49,83	49,86	49,86
	SMP	-	20,48	26,12	26,18	26,18
	SMA	-	14,34	17,93	17,95	17,95
8	Rasio Guru per Murid*)					
	SD	-	59,74	34,50	32,36	39,67
	SMP	-	54,05	55,80	43,99	53,43
	SMA	-	83,82	64,33	70,18	70,18

Sumber:

1. Puskaldisbang Provinsi Jawa Barat, 2013.
2. *) LAKIP Pemerintah Kabupaten Cirebon dan RKPD 2012-2014

2.2.2.2. Capaian Bidang Kesehatan

Pada aspek kesehatan,Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan perkiraan rata-rata lama hidup dari kelahiran penduduk. Capaian rata-rata AHH pada tahun 2012-2013 tetap yaitu 65,52 tahun. Faktor-faktor yang berpengaruh dominan pada capaian AHH adalah Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Kematian Ibu (AKI), status gizi bayi dan balita, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan tingkat pendidikan atau wawasan ibu yang sedang hamil, mempunyai bayi, dan balita.

Pada kurun tahun 2009-2012 AKB mengalami penurunan, dari 7,68 menjadi 5. Rata-rata capaian AKB sebesar 5,74 per tahun. Capaian rata-rata AKBA sebesar 3,59 per tahun. Capaian rata-rata Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 118,2 per tahun. Rata-rata jumlah balita gizi buruk sebesar 0,01.

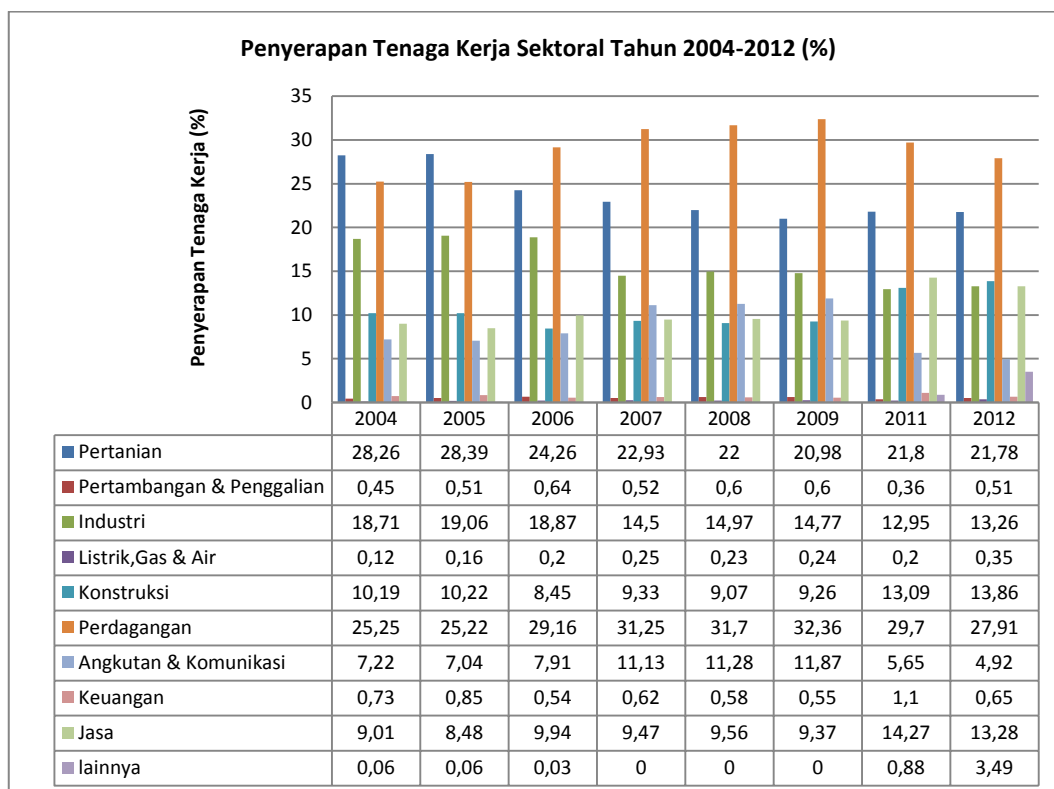
Tabel 2.13. Capaian Indikator Sasaran Kesehatan

No	Indikator Sasaran Kesehatan	Tahun				Rata-Rata per tahun
		2009	2010	2011	2012	
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	7,68	5,19	5,1	5	5,74
2	Angka Kematian Balita per 1.000 KH	2,1	1,26	5,8	5,2	3,59
3	Angka Kematian Ibu (AKI) per 10.000 KH	119,15	110,57	104,9	138,2	118,21
4	Balita gizi buruk	0,66%	0,51%	1,55%	1,62%	0,01
5	Rumah tangga PHBS	38,23%	48,54%	50,77%	52,92	13,57
6	Berat Bayi Lahir Ringan (BBLR)	131,45%	131,45%	2,71%	2,98%	0,67

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Cirebon, 2013

2.2.2.3. Ketenagakerjaan

Pada kurun tahun 2004-2012, tenaga kerja tiap sektor mengalami pergeseran. Sektor pertanian mengalami penurunan. Sementara, sektor perdagangan dan jasa relatif mengalami peningkatan.



Sumber : Bappeda dan BPS Kab Cirebon

Gambar 2.15. Grafik tenaga kerja per sektor

Pada tahun 2013 jumlah angkatan kerja yang bekerja sebanyak 885,651 orang atau 90,90% dan tidak bekerja sebanyak 97,344 orang atau 9,10%. Berdasarkan jenjang pendidikan, kualifikasi pendidikan tenaga kerja di Kabupaten Cirebon didominasi oleh tenaga kerja kasar/tidak trampil sebanyak 97,70% berpendidikan hingga jenjang pendidikan SMA. Dan, sebanyak 2,30% berpendidikan perguruan tinggi.

Tabel 2.14. Tenaga Kerja Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2013

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Bekerja	%
Tidak sekolah	57,728	6,52
Tidak tamat SD	215,74	24,36
SD	350,295	39,55
SMP	131,529	14,85
SMA	110,002	12,42
PT	20,357	2,30
Jumlah	885,651	100,00

Sumber : BPS dan Disnakertrans Kabupaten Cirebon, 2013

Tabel 2.15. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Berdasarkan Umur Dan Kegiatan Tahun 2013

Kelompok Umur/ Age Group	Angkatan Kerja/ <i>Economically Active</i>					Bukan Angkatan Kerja/ <i>Not Economically Active</i>				Jumlah/ <i>Total</i>	% Bekerja thd Angkatan Kerja/ % <i>Working to economically Active</i>	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)/ <i>Employment Rate (%)</i>	% Angkatan Kerja thd Penduduk Usia Kerja/ % <i>Economically Active to Working Age Population</i>
	Bekerja/ <i>Working</i>	Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment</i>			Jumlah Angkatan Kerja/ <i>Total Economically Active</i>	Sekolah/ <i>Attending School</i>	Mengurus Rumah Tangga/ <i>House Keeping</i>	Lainnya/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>				
		Pernah Bekerja/ <i>Ever Worked</i>	Tdk Pernah Bekerja/ <i>Never Worked</i>	Jumlah / <i>Total</i>									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
15 - 19	42,397	5,280	25,217	30,497	72,894	112,341	8,769	20,441	141,551	214,445	58.16	41.84	33.99
20 - 24	70,497	7,028	16,375	23,403	93,900	6,983	27,108	12,284	46,375	140,275	75.08	24.92	66.94
25 - 29	72,902	4,350	2,272	6,622	79,524	1,275	44,458	5,998	51,731	131,255	91.67	8.33	60.59
30 - 34	110,109	2,851	3,270	6,121	116,230	-	55,601	6,550	62,151	178,381	94.73	5.27	65.16
35 - 39	131,066	2,235	1,517	3,752	134,818	-	53,287	4,563	57,850	192,668	97.22	2.78	69.97
40 - 44	119,555	1,673	1,489	3,162	122,717	-	43,877	3,461	47,338	170,055	97.42	2.58	72.16
45 - 49	91,536	1,409	1,370	2,779	94,315	-	40,520	5,247	45,767	140,082	97.05	2.95	67.33
50 - 54	90,247	751	1,921	2,672	92,919	-	32,787	6,271	39,058	131,977	97.12	2.88	70.41
55 - 59	67,257	3,223	2,613	5,836	73,093	-	26,709	6,613	33,322	106,415	92.02	7.98	68.69
60 - 64	45,083	3,366	2,067	5,433	50,516	-	17,443	9,654	27,097	77,613	89.24	10.76	65.09
65+	45,002	2,884	4,183	7,067	52,069	-	30,528	21,391	51,919	103,988	86.43	13.57	50.07
Kabupaten Cirebon/ Cirebon Regency	885,651	35,050	62,294	97,344	982,995	120,599	381,087	102,473	604,159	1,587,154	90.10	9.90	61.93

Sumber : BPS dan Disnakertrans Kab. Cirebon, 2013

Tabel 2.16
Tenaga Kerja Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tertinggi Tahun 2013

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan/ <i>Educational Attainment*)</i>	Angkatan Kerja/ <i>Economically Active</i>					Bukan Angkatan Kerja/ <i>Not Economically Active</i>				Jumlah/ <i>Total</i>	% Bekerja thd Angkatan Kerja/ % <i>Working to economically Active</i>	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)/ <i>Employment Rate (%)</i>	% Angkatan Kerja thd Penduduk Usia Kerja/ % <i>Economically Active to Working Age Population</i>
	Bekerja/ <i>Working</i>	Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment</i>			Jumlah Angkatan Kerja/ <i>Total Economically Active</i>	Sekolah/ <i>Attending School</i>	Mengurus Rumah Tangga/ <i>House Keeping</i>	Lainnya/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>				
		Pernah Bekerja/ <i>Ever Worked</i>	Tdk Pernah Bekerja/ <i>Never Worked</i>	Jumlah/ <i>Total</i>									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
0	57,728	2,854	4,388	7,242	64,970	0	39,156	13,793	52,949	117,919	88.85	11.15	55.10
1	215,740	8,533	9,481	18,014	233,754	553	101,183	29,194	130,930	364,684	92.29	7.71	64.10
2	350,295	9,474	13,844	23,318	373,613	26,490	161,529	28,853	216,872	590,485	93.76	6.24	63.27
3	131,529	7,026	15,106	22,132	153,661	78,343	53,548	20,033	151,924	305,585	85.60	14.40	50.28
4	110,002	6,908	18,572	25,480	135,482	14,731	24,708	8,512	47,951	183,433	81.19	18.81	73.86
5	20,357	255	903	1,158	21,515	482	963	2,088	3,533	25,048	94.62	5.38	85.90
Kabupaten Cirebon/ <i>Cirebon Regency</i>	885,651	35,050	62,294	97,344	982,995	120,599	381,087	102,473	604,159	1,587,154	90.10	9.90	61.93

Sumber : BPS dan Disnakertrans Kab. Cirebon, 2013

*) 0. Tidak/Belum Pernah Sekolah/ *No Schooling*

1. Tidak/Belum Tamat SD/ *Didn't Complete/ Not Yet Completed Primary School*

2. Sekolah Dasar/ *Primary School*

3. SLTP/ *Junior High School*

4. SLTA/ *Senior High School*

5. Diploma I/II/III/Akademi/Universitas/ Diploma I/II/III/Academy/University

2.2.2.4. Seni, Budaya, dan Olahraga

Kabupaten Cirebon memiliki seni dan budaya beragam. Ada lima jenis seni dan budaya yaitu seni lukis, tari, suara, drama/teater, dan ukir. Seni lukis berkembang adalah seni lukis kaca, kaligrafi, dan batik. Seni tari yang menjadi unggulan adalah seni tari topeng, jaipong, dan tayuban. Seni suara yang dimiliki adalah seni macapat dan tarling. Seni drama/teater yang berkembang adalah seni sandiwara/masres, dan akrobat genjring. Seni ukir yang berkembang adalah seni pahat wayang kulit, topeng, dan wayang golek. Sementara, untuk fasilitas prasarana olahraga semakin bertambah. Pada tahun 2009-2013, fasilitas gedung olahraga di tingkat kecamatan sebanyak 10 unit. Fasilitas ini digunakan untuk mendorong budaya masyarakat berolahraga.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Fokus aspek pelayanan umum diukur dari indikator layanan pendidikan (Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, Rasio Guru Murid), indikator layanan kesehatan (Rasio rumah sakit/penduduk, rasio puskesmas/penduduk), indikator layanan perizinan (jumlah perizinan yang dikeluarkan) dan Indikator layanan kependudukan (rasio penduduk ber KTP).

2.3.1. Layanan Umum Pendidikan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Cirebon (2013), penyebaran sekolah dasar di Kabupaten Cirebon sudah cukup meratakan proporsional dengan jumlah penduduk. Jumlah sekolah dasar yang terbanyak 34 sekolah terdapat di Kecamatan Sumber dengan jumlah murid 9.684 murid. Sedangkan jumlah SLTP (negeri dan swasta) sebanyak 159 sekolah dengan 78.280 murid.

Capaian di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Pada jenjang pendidikan SD untuk ajaran 2012/2013 seorang guru SD rata-rata mengajar 26 murid SD. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka beban seorang guru semakin sedikit, dimana untuk jenjang pendidikan SLTP rata-rata seorang guru mengajar 17 murid dan di jenjang SLTA beban seorang guru hanya mengajar 15 murid. Rasio jumlah peserta didik dan tenaga pendidik

rata-rata sebanyak 20 peserta didik per tenaga pendidik. Nilai ini sebenarnya sudah mencukupi, namun masih mendapat kendala pada kualitas tenaga pendidik yang tidak merata. Oleh karena itu, kualitas tenaga pendidikan perlu ditingkatkan kompetensi dan keahlian dalam mengajar.

Tabel 2.17. Rasio Peserta Didik dan Tenaga Pendidik Kabupaten Cirebon Tahun 2012

No	Jenjang	Formal			Non Formal			Jumlah		
		Peserta Didik	Tenaga Pendidik	Rasio Peserta Didik/Tng Pendidik	Peserta Didik	Tenaga Pendidik	Rasio Peserta Didik/Tng Pendidik	Peserta Didik	Tenaga Pendidik	Rasio Peserta Didik/Tng Pendidik
1	SD Sederajat	229,781.00	8,932.00	25.73	39,560.00	805.00	49.14	269,341.00	9,737.00	27.66
2	SMP Sederajat	79,126.00	4,258.00	18.58	18,179.00	2,101.00	8.65	97,305.00	6,359.00	15.30
3	SMA Sederajat	17,475.00	1,232.00	14.18	11,128.00	971.00	11.46	28,603.00	2,203.00	12.98
4	SMK	38,571.00	2,688.00	14.35	0.00	0.00	0.00	38,571.00	2,688.00	14.35
	JUMLAH	364,953.00	17,110.00	21.33	68,867.00	3,877.00	17.76	433,820.00	20,987.00	20.67

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Cirebon

Dalam aspek kuantitas dan kualitas sarana prasarana, layanan pendidikan masih kurang. Rasio peserta didik dengan ruang kelas adalah sebesar 19-37 peserta didik per ruang kelas atau rata-rata 27 peserta didik per ruang kelas. Rasio peserta didik dan ruang kelas masih cukup memadai, namun masih kurang bila dibandingkan penduduk usia sekolah sebesar 578.354.

Tabel 2.18. Rasio Peserta Didik dan Ruang Kelas Kabupaten Cirebon Tahun 2011

No	Jenjang	Formal			Non Formal			Jumlah		
		Peserta Didik	Ruang Kelas	Rasio Peserta Didik/R. Kelas	Peserta Didik	Ruang Kelas	Rasio Peserta Didik/R. Kelas	Peserta Didik	Ruang Kelas	Rasio Peserta Didik/R. Kelas
1	SD Sederajat	229,781.00	6,071.00	37.85	448.00	805.00	0.56	230,229.00	6,876.00	33.48
2	SMP Sederajat	79,126.00	2,049.00	38.62	757.00	2,101.00	0.36	79,883.00	4,150.00	19.25
3	SMA Sederajat	17,475.00	518.00	33.74	293.00	971.00	0.30	17,768.00	1,489.00	11.93
4	SMK	38,571.00	810.00	47.62	0.00	0.00	0.00	38,571.00	810.00	47.62
	JUMLAH	364,953.00	9,448.00	38.63	1,498.00	3,877.00	0.39	366,451.00	13,325.00	27.50

Sumber: Profil Pendidikan

Rasio ketersediaan sekolah per penduduk pada jenjang SD rasionya naik dari 49,83 menjadi 49,86. Jenjang SMP rasionya naik dari 26,12 menjadi 26,18. Dan, jenjang SMA naik dari 17,93 menjadi 17,96. Sementara, rasio guru per murid pada jenjang SD rasionya

naik dari 34,50 menjadi 39,67. Jenjang SMP rasionya naik dari 55,80 menjadi 53,43. Dan, jenjang SMA naik dari 64,33 menjadi 70,18.

2.3.2. Layanan Umum Kesehatan

Untuk mewujudkan masyarakat sehat dan produktif, Pemerintah Kabupaten Cirebon berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan. Dalam kerangka memberikan pelayanan kesehatan yang baik, Pemerintah berupaya untuk menyediakan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan paramedis.

Angka rasio posyandu per jumlah balita terus naik dari tahun ke tahun, dari angka 11,14 (tahun 2009) menjadi 13,04 (tahun 2013). Keberadaan posyandu berperan untuk mendukung penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas), pembudayaan NKKBS, peningkatan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB, dan sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera.

Tabel 2.19. Rasio Jumlah Posyandu dengan Jumlah Balita di Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2013

NO	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Posyandu	2.466	2.480	2.509	2.527	2.544
2	Jumlah Balita	221.320	223.560	211.275	193.680	195.160
3	Rasio	11,14	11,89	11,88	13,05	13,04

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Cirebon

Rasio Rumah Sakit per 1.000 satuan penduduk mengalami kenaikan dari 0,031 menjadi 0,052.

Tabel 2.20. Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk di Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2013

NO	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	2	2	2	2	2
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	1	1	1	1	1

NO	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	0	0	0	0	0
4.	Jumlah rumah sakit swasta	4	4	4	6	7
5.	Jumlah Penduduk	2.211.816	2.066.313	2.246.811	2.263.978	2.293.397
	Rasio	0,0045	0,0024	0,0022	0,0022	0,0044

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Cirebon

Angka rasio jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu (pustu) per jumlah penduduk mengalami perubahan seiring dengan jumlah penduduk yang bertambah dari tahun 2009-2013. Angkanya berkisar antara 0,055 (tahun 2012) sampai 0,057 (tahun 2013).

Tabel 2.21. Rasio Jumlah Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2013

NO	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Puskesmas	53	56	56	57	57
2.	Jumlah Poliklinik	-	-	-	-	6
3.	Jumlah Pustu	67	66	66	66	69
4.	Jumlah Penduduk	2.211.816	2.066.313	2.246.811	2.263.978	2.293.397
5.	Rasio	0,054	0,059	0,054	0,055	0,0579

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Cirebon

Angka rasio dokter per jumlah penduduk angkanya relatif naik dari tahun 2009-2013. Terjadi peningkatan jumlah dokter yang cukup signifikan di tahun 2013 dengan angka 0,080 (tahun 2009) menjadi 0,174 (tahun 2013).

Tabel 2.22. Rasio Jumlah Dokter per Jumlah Penduduk Tahun 2009-2013

NO	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Dokter	286	241	287	286	355
2	Jumlah Penduduk	2.211.816	2.066.313	2.246.811	2.263.978	2.293.397
3	Rasio	0,129	0,117	0,128	0,126	0,155

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Cirebon

Ket : dokter = dokter umum, dan dokter spesialis

Angka rasio tenaga medis per jumlah penduduk relatif naik dari tahun 2009-2013. Walaupun pada tahun 2011 jumlah tenaga medis mengalami penurunan terendah menjadi 128 tenaga medis tapi angkanya kembali naik menjadi 404 tenaga medis pada tahun 2013.

Tabel 2.23. Rasio Tenaga Medis per Jumlah Penduduk Tahun 2009-2013

NO	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Tenaga Medis	326	280	330	330	404
2.	Jumlah Penduduk	2.211.816	2.066.313	2.246.811	2.263.978	2.293.397
3.	Rasio	0,147	0,136	0,147	0,146	0,176

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Cirebon

Ket: Tenaga medis = Dokter, dokter gigi, dr/drg Spesialis

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Sektor Basis dan Non Basis

Hasil identifikasi potensi internal yang menggunakan metoda analisis *Location Quotient* (LQ) untuk menganalisis sektor basis dan non-basis. Teknik LQ ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan satu sektor antara daerah yang dianalisis dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas secara matematis. Bila hasil perhitungan $LQ > 1$, ini menunjukkan bahwa sektor tersebut menjadi sektor basis dan berorientasi ekspor. Jika $LQ < 1$, ini berarti bukan sektor basis (Sektor lokal/impor). Teknik ini memiliki asumsi bahwa semua penduduk di suatu daerah memiliki pola permintaan yang sama dengan pola permintaan regional.

Dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, terdapat 6 lapangan usaha yang termasuk sektor basis di Kabupaten Cirebon selama 2009-2013 adalah sektor pertanian, bangunan, perdagangan hotel restoran, pengangkutan komunikasi, keuangan persewaan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa. Dari sektor basis tersebut yang paling menonjol peranannya di Kabupaten Cirebon adalah sektor pertanian dengan $LQ = 2,37$ dan sektor bangunan dengan $LQ = 1,97$.

Tabel 2.24. Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Cirebon dibanding Jawa Barat Tahun 2009-2013

No	Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata	Ket
1	Pertanian	2,22	2,29	2,38	2,46	2,47	2,37	BASIS
2	Pertambangan dan Penggalan	0,16	0,17	0,19	0,22	0,23	0,19	NON-BASIS
3	Industri Pengolahan	0,33	0,32	0,33	0,34	0,34	0,33	NON-BASIS
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,95	0,95	1,02	1,01	1,02	0,99	NON-BASIS
5	Bangunan	2,14	2,09	1,95	1,82	1,83	1,97	BASIS
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,12	1,06	1,05	1,01	1,00	1,05	BASIS
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1,32	1,24	1,17	1,13	1,10	1,19	BASIS
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,36	1,33	1,29	1,26	1,23	1,29	BASIS
9	Jasa-jasa	1,86	1,92	1,91	1,93	1,92	1,91	BASIS

Sumber : Hasil analisis, Bappeda.

Dalam lingkup nasional, terdapat 5 lapangan usaha yang termasuk sektor basis di Kabupaten Cirebon selama 2009-2013 yaitu sektor pertanian, listrik-gas-air bersih, bangunan, perdagangan-hotel-restoran, dan sektor jasa-jasa. Dari sektor basis tersebut yang paling menonjol peranannya di Kabupaten Cirebon adalah sektor pertanian dengan LQ = 2,37 dan sektor bangunan dengan LQ= 1,97.

Tabel 2.25. Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Cirebon dibanding Nasional Tahun 2009-2013

No	Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata	Ket
1	Pertanian	2,25	2,28	2,29	2,25	2,26	2,26	BASIS
2	Pertambangan dan Penggalan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	NON-BASIS
3	Industri Pengolahan	0,54	0,52	0,53	0,55	0,55	0,54	NON-BASIS
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	2,73	2,77	2,87	2,90	3,00	2,85	BASIS

No	Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata	Ket
5	Bangunan	1,13	1,18	1,18	1,18	1,20	1,17	BASIS
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,36	1,33	1,30	1,29	1,31	1,32	BASIS
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0,65	0,63	0,62	0,60	0,58	0,62	NON-BASIS
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,45	0,46	0,47	0,47	0,46	0,46	NON-BASIS
9	Jasa-jasa	1,31	1,39	1,40	1,45	1,44	1,40	BASIS

2.4.1.2. Sektor Unggulan

2.4.1.2.1. Sektor Pertanian:

2.4.1.2.1.1. Padi

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu lumbung padi Jawa Barat. Luas lahan yang tersedia untuk budidaya padi $\pm$ 54.000 hektar, dengan rata-rata luas tanam setiap tahunnya $\pm$ 85.000 ha (IP rata-rata 200), kapasitas produksi sebesar $\pm$ 510.856 ton/tahun Gabah Kering Giling (GKB). Kecamatan potensial penghasil padi yaitu Gegesik, Susukan, Kapetakan, Kaliwedi, Dukupuntang, Arjawinangun, Klangeran, Sedong, Ciwaringin, Suranenggala, dan Palimanan.

2.4.1.2.1.2. Bawang Merah

Luas tanam potensial bawang merah adalah $\pm$ 3.927 hektar dengan kapasitas produksi sebesar $\pm$ 40.155 ton/ tahun. Kecamatan potensial penghasil bawang merah yaitu Waled, Losari, Astanajapura, Pabedilan, Babakan, Gebang dan Pangenan.

2.4.1.2.1.3. Mangga Gedong Gincu

Luas lahan potensial mangga Gedong Gincu yaitu $\pm$ 9.000 hektar, atau sama dengan $\pm$ 671.485 pohon dengan kapasitas produksi sebesar $\pm$ 359.622 ton/tahun. Kecamatan potensial penghasil mangga Gedong Gincu yaitu Lemahabang, Astanajapura, Beber, Greged, Dukupuntang, Palimanan, Tengah Tani, Talun, Sumber, dan Sedong.

2.4.1.2.1.4. Tebu

Luas areal potensial adalah $\pm$ 8.061,239 hektar dengan kapasitas produksi $\pm$ 434.353,001 ton per tahun dengan produksi hablur $\pm$ 141.801.213 ton per tahun. Kecamatan

potensial penghasil tebu yaitu Kecamatan Astanajapura, Lemahabang, Gebang, Babakan, Pangenan, Waled, Pasaleman, Pabedilan dan Ciledug.

2.4.1.2.1.5. Itik

Potensi Itik di Kabupaten Cirebon cukup baik dengan jumlah populasi sebanyak ± 368.749 ekor/tahun dan produksi telur sebanyak $\pm 2.550,84$ ton/tahun. Kecamatan potensial penghasil itik yaitu Kapetakan, Suranenggala, Panguragan, Gunungjati, Babakan, Gebang dan Losari.

2.4.1.2.1.6. Ayam Ras

Lahan potensial untuk pengembangan budidaya ayam ras seluas ± 40 hektar. Kecamatan yang berpotensi untuk pengembangan ayam ras adalah Kecamatan Karangwareng, Talun, Gegesik, Gunungjati, dan Beber.

2.4.1.2.1.7. Domba

Lahan potensial untuk pengembangan budidaya domba seluas ± 70 hektar. Kecamatan yang berpotensi untuk pengembangan domba adalah Kecamatan Mundu, Jamblang, Gegesik, Sumber, Talun, Losari, Pabedilan, Pabuaran, dan Waled.

2.4.1.2.1.8. Sapi

Lahan potensial untuk pengembangan budidaya sapi seluas ± 100 hektar. Lokasi yang berpotensi untuk pengembangan sapi adalah Desa Jatimerta (Gunungjati), Desa Ujungsemi, Bayalangu (Gegesik), dan Desa Tonjong (Waled).

2.4.1.2.2. Sektor Kelautan dan Perikanan

2.4.1.2.2.1. Ikan Laut

Kabupaten Cirebon memiliki sektor unggulan perikanan dengan produksi ikan cukup tinggi. Produksi ikan laut pada tahun 2012 mencapai $\pm 33.662,9$ ton. Pada tahun 2011 produksinya sebesar $\pm 27.358,6$ ton. Ini menunjukkan adanya kenaikan produksi ikan sebesar $\pm 6.304,4$ ton. Industri pengolahan ikan yang ada di Kabupaten Cirebon meliputi ikan asin, pindang, peda, asapan/panggang, udang breded, pengalengan rajungan dan terasi.

2.4.1.2.2.2. Tambak

Budidaya perikanan tambak merupakan potensi budidaya kelautan dengan lahan potensial tambak seluas ± 7.500 hektar, jumlahnya masih dapat terus dikembangkan.

Budidaya perikanan tambak potensial adalah tambak udang, bandeng, dan rumput laut. Sentra tambak berada di Kecamatan Kapetakan, Gebang, Losari, Astanajapura, Gunung Jati, Pangenan, Suranenggala, dan Mundu.

2.4.1.2.2.3. Garam

Areal tambak garam seluas ± 24.028 hektar. Sentra lokasi tambak garam berada di Kecamatan Pangenan.

2.4.1.2.3. Sektor Industri

2.4.1.2.3.1. Kerajinan Rotan

Kerajinan rotan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak ± 56.269 orang pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 jumlahnya bertambah menjadi ± 57.102 orang. Nilai investasi di industri rotan sebesar Rp214.615.617.000,00 pada tahun 2012 dan jumlahnya meningkat menjadi Rp215.110.199.000,00 pada tahun 2013. Kapasitas produksi industri rotan sebanyak ± 72.902 ton pada tahun 2012 dan bertambah menjadi ± 75.085 ton pada tahun 2013. Nilai produksi industri rotan naik dari tahun 2012 yang sebesar Rp1.520.321.199.000,00 dan menjadi Rp. 1.900.121.107.000,00 pada tahun 2013. Negara tujuan ekspor adalah negara-negara Eropa, Amerika, Asia, dan Australia. Lokasi sentra kerajinan rotan berada di Kecamatan Weru, Plumbon, Depok, Plered, dan Palimanan.

2.4.1.2.3.2. Kerajinan Batik

Kerajinan Batik merupakan produk unggulan khas kebanggaan Indonesia yang telah diakui oleh dunia, dan secara resmi diakui UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak-benda warisan manusia (*Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*) dalam Sidang ke-4 Komite Antar-Pemerintah tentang Warisan Budaya Tak-benda di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab tahun 2009 dan dikukuhkan sebagai Warisan Budaya Dunia atau “World Heritage” oleh UNESCO tahun 2009. Kabupaten Cirebon memiliki berbagai motif batik. Salah satunya adalah motif “Mega Mendung”. Motif ini menjadi cover buku batik terbitan luar negeri berjudul “Batik Design” karya Pepin van Roojen, berkebangsaan Belanda.

Dalam upaya mendorong peningkatan pemasaran dan promosi produk batik, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah membangun pasar batik di Kecamatan Weru. Pada tahun 2012, Kabupaten Cirebon memiliki usaha batik sebanyak 404 unit dan tahun

2013 menjadi 521 unit. Jumlah usaha sebanyak itu mampu menyerap tenaga kerja sebanyak ± 3.691 orang pada tahun 2012 dan tahun 2013 jumlahnya bertambah menjadi ± 4.462 orang. Kapasitas produksi industri batik sebesar ± 19.043 kodi pada tahun 2012 dan jumlahnya meningkat menjadi 23.023 kodi pada tahun 2013. Nilai produksi industri ini sebesar Rp 65.560.443.000,00.

Wilayah pemasaran produk kerajinan batik adalah dalam negeri dan luar negeri. Negara tujuan pemasaran keluar negeri adalah Jepang, Brunei, dan Malaysia. Sentra kerajinan batik di Kecamatan Plered berada di Desa Trusmi Kulon, Trusmi Wetan, dan Panembahan. Sementara, sentra kerajinan batik di Kecamatan Tengah Tani berada di Desa Kalibaru, dan Kalitengah.

2.4.1.2.3.3. Pakaian Jadi

Pada kurun 2012-2013, unit usaha pakaian jadi (garmen) berjumlah 595 unit usaha. Jumlah usaha sebanyak ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak ± 5.985 orang. Nilai investasi di industri pakaian jadi bernilai Rp 15.201.100.000,00. Kapasitas produksi industri pakaian jadi sebesar $\pm 5.319.000$ pcs. Nilai produksi Rp 20.051.600.000,00. Lokasi sentra pakaian jadi berada di Desa Tegalbug Kecamatan Arjawinangun dan Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber.

2.4.1.2.3.4. Mebel Kayu

Berbagai jenis mebel berbahan kayu (mahoni, jati, dll) hasil kreasi perajin Kabupaten Cirebon, terus mengalami peningkatan permintaan ekspor. Pada tahun 2012, unit usaha mebel kayu sebanyak ± 1.220 unit dan meningkat menjadi ± 1.245 unit pada tahun 2013. Penyerapan tenaga kerja industri ini sebesar ± 7.210 orang pada tahun 2012 dan meningkat menjadi ± 7.351 orang pada tahun 2013. Kapasitas produksi mebel kayu sebesar ± 990.158 pcs pada tahun 2012 dan bertambah menjadi $\pm 1.051.158$ pcs pada tahun 2013. Nilai produksi industri ini sebesar Rp 362.117.011.000,00. Wilayah tujuan pemasaran produk mebel kayu adalah dalam negeri dan luar negeri. Wilayah pemasaran luar negeri adalah Jepang, Taiwan, Malaysia, dan Brunei. Lokasi sentra mebel kayu berada di Kecamatan Plered, Weru, Plumbon, dan Depok.

2.4.1.2.3.5. Kerajinan Batu Alam

Pada tahun 2012 dan 2013, jumlah unit usaha kerajinan batu berjumlah 344 unit. Industri ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak ± 2.010 orang pada tahun 2012 dan 2013. Nilai investasinya tetap pada tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp 11.209.311.000,00. Pada tahun 2012 dan 2013, nilai produksinya juga tetap sebesar Rp 173.622.917.000,00. Tujuan pemasaran adalah dalam negeri dan luar negeri (Malaysia, Brunei, dan beberapa negara di Eropa). Lokasi sentra kerajinan batu alam berada di Kecamatan Palimanan, Depok, dan Dukupuntang.

2.4.1.2.3.6. Kerajinan Sandal Karet

Pada kurun 2012-2013, jumlah unit usaha kerajinan sandal karet berjumlah 20 unit. Jumlah ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak ± 225 orang. Kapasitas produksi sebanyak ± 35.250 kodi pada tahun 2012 maupun 2013. Nilai investasi di industri sandal karet sebesar Rp 1.182.156.000,00 pada tahun 2012 dan tahun 2013. Nilai produksi industri ini Rp 4.355.100.000,00. Wilayah tujuan pemasaran produk meliputi pemasaran dalam negeri dan ekspor. Lokasi sentra kerajinan sandal karet terdapat di Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon dan Desa Panembahan Kecamatan Plered.

2.4.1.2.3.7. Makanan Ringan

Pada kurun 2012-2013, industri makanan ringan berjumlah 417 unit. Usaha ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak ± 5.029 orang pada tahun 2012 dan 2013. Kapasitas produksinya sebesar ± 13.200 ton pada tahun 2012 dan 2013. Nilai produksi industri ini sebesar Rp 146.142.050,00. Lokasi sentra kegiatan makanan kecil berada di Kecamatan Weru, Kedawung, Plered, Tengah Tani dan Plumbon.

2.4.1.2.3.8. Emping Melinjo

Pada kurun 2012-2013, industri emping melinjo di Kabupaten Cirebon berjumlah 132 unit usaha. Jumlah tenaga kerja yang terserap sejumlah ± 1.194 orang pada tahun 2012 dan 2013. Nilai investasi pada industri emping melinjo senilai Rp 632.965.000,00 pada tahun 2012 dan 2013. Kapasitas produksi emping melinjo pada tahun 2012 dan 2013 sebesar 957 ton. Nilai produksi emping melinjo tetap sebesar Rp 19.175.643.000,00 pada tahun 2012 dan 2013. Wilayah pemasarannya adalah dalam negeri dan luar negeri (Malaysia,

Brunai, dan Arab Saudi). Lokasi sentra produksi emping melinjo berada di Kecamatan Kedawung, Ciwaringin dan Gunung Jati.

2.4.1.2.3.9. Industri Kulit Kerang

Pada kurun 2012-2013, unit usaha kerajinan kulit kerang di Kabupaten Cirebon berjumlah 8 unit. Industri ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak± 753 orangdengan kapasitas produksi sebanyak ± 321.100pcs. Nilai produksinya sebesarRp12.544.094.000,00 pada tahun 2013. Wilayah tujuan pemasaran adalah dalam negeri dan luar negeri (Italia dan Perancis). Lokasi pabrik kerajinan kulit kerang berada di Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani dan Desa Megugede Kecamatan Weru.

2.4.1.2.4. Sektor Pariwisata

Kabupaten Cirebon memiliki wisata ziarah dan cagar budaya, wisata alam, wisata kuliner, wisata belanja batik, dan wisata kearifan lokal.

2.4.1.2.4.1. Wisata Ziarah

Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai destinasi wisata pilgrimage (ziarah) dan cagar budaya sesuai dengan kesepakatan bersama antara gubernur dengan bupati/walikota nomor 912/05/Bapp tentang prioritas pembangunan ekonomi wilayah koordinasi perencanaan pembangunan di Jawa Barat. Lokasi wisata ziarah di Kabupaten Cirebon adalah :

2.4.1.2.4.1.1. Wisata ziarah makam Sunan Gunung Jati.

Obyek wisata ini berada di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati. Kawasan wisata ziarah Gunung Jati. Lokasi ini merupakan tujuan wisata religi, Sunan Gunung Jati dengan areal mencapai ± 20 Ha. Makam Sunan Gunung Jati tidak hanya menjadi obyek wisata, tetapi obyek ini juga sudah ditetapkan menjadi cagar budaya yang harus dilindungi.

2.4.1.2.4.1.2. Wisata ziarah Kramat Talun.

Obyek wisata ini merupakan tempat peristirahatan sesepuh Cirebon, Mbah Kuwu Cirebon Girang. Obyek wisata ini berada di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun. Obyek wisata ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya yang dilindungi. Pengunjung obyek wisata ini berasal dari lokal, dan regional Jawa.

2.4.1.2.4.1.3. Wisata ziarah makam Syech Magelung Sakti.

Obyek wisata ziarah ini berada di Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan. Pengunjung obyek wisata ini berasal dari lokal dan regional Jawa Barat.

2.4.1.2.4.1.4. Wisata ziarah makam Nyi Mas Gandasari.

Obyek wisata ziarah ini berada di Desa Panguragan Kecamatan Panguragan. Pengunjung obyek wisata ini berasal dari lokal dan regional Jawa Barat.

2.4.1.2.4.2. Wisata Alam

Kabupaten Cirebon memiliki sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi obyek pariwisata alam. Lokasi wisata alam adalah:

2.4.1.2.4.2.1. Wisata alam Gronggong dan Ciperna.

Gronggong memiliki ketinggian sekitar ± 50 meter dpl dengan suasana alam yang menarik. Pada ketinggian ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan suasana kota Cirebon dan pesisir Cirebon. Obyek wisata ini berada di jalur Cirebon-Kuningan. Secara administratif berada di Desa Patapan Kecamatan Beber. Fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung obyek wisata ini adalah hotel, losmen, restoran, rumah makan, pusat kesegaran jasmani, padang golf, dan areal lesehan alam terbuka.

2.4.1.2.4.2.2. Wisata alam Setu Patok

Obyek wisata ini berada di Desa Setu Patok Kecamatan Mundu. Wisata alam ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai areal pemancingan, pemandian, dan outbond. Situ Patok, dengan ciri khas berupa panorama alam, rekreasi air dan pemancingan dengan luas lahan mencapai ± 7 ha.

2.4.1.2.4.2.3. Wisata alam Plangon.

Obyek wisata ini berada di Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber. Obyek wisata ini memiliki sumber daya alam satwa monyet dan petilasan Pangeran Kejaksan dan Pangeran Panjunan. Lokasi ini telah ditetapkan sebagai cagar alam yang dilindungi. Luas taman rekreasi plangon ini adalah 10 Ha.

2.4.1.2.4.2.4. Wisata Alam Belawa.

Obyek wisata ini berada di Desa Belawa Kecamatan Sedong. Obyek wisata ini memiliki sumber daya alam satwa unik berupa labi-labi. Lokasi ini telah ditetapkan sebagai cagar alam yang dilindungi.

2.4.1.2.4.2.5. Wisata Banyu Panas.

Obyek wisata ini berada di Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol berupa wisata pemandian air panas yang kaya akan kandungan belerang. Obyek wisata Banyu Panas ini merupakan daya tarik yang berkembang seiring pengembangan sarana prasarana wisata di lokasi dan promosi wisata.

2.4.1.2.4.2.6. Situ Sedong,

Situ Sedong mempunyai ciri khas berupa panorama indah yang dikenal dengan Situ Pengasingan, rekreasi air, pemancingan, dan kebun mangga. Luas lahan situ ini mencapai ±62,5 Ha.

2.4.1.2.4.3. Wisata Kuliner

Kabupaten Cirebon memiliki wisata kuliner berbagai macam makanan khas. Jenis wisata kuliner di Kabupaten Cirebon adalah :

2.4.1.2.4.3.1. Wisata kuliner ikan bakar.

Obyek wisata ini berada di kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang, Desa Grogol Kecamatan Kapetakan, dan Kelurahan Sendang Sumber.

2.4.1.2.4.3.2. Wisata kuliner Nasi Jamblang/Sega Jamblang.

Obyek wisata ini berada tersebar di Kecamatan Jamblang, Plered, Kedawung, dan Sumber.

2.4.1.2.4.3.3. Wisata kuliner Empal Gentong.

Obyek wisata ini berada tersebar di 40 kecamatan.

2.4.1.2.4.3.4. Wisata kuliner Bubur Sop Ayam

Obyek wisata ini berada tersebar di Kecamatan Plumbon, Ciledug, dan Sumber.

2.4.1.2.4.3.5. Wisata kuliner Produk Tahu (Tahu Gejrot dan Intip Tahu)

Obyek wisata ini berada tersebar di Kecamatan Ciledug dan Lemahabang.

2.4.1.2.4.3.6. Wisata kuliner Sate Beber

Obyek wisata ini berada tersebar di Kecamatan Beber.

2.4.1.2.4.4. Wisata Belanja Batik

Kabupaten Cirebon mempunyai wisata belanja batik. Lokasinya berada di Desa Trusmi Wetan, Trusmi Kulon, Panembahan, dan Kalitengah Kecamatan Plered, dan Desa Bringin Kecamatan Ciwaringin.

2.4.1.2.4.5. Wisata Kearifan Lokal

Kabupaten Cirebon memiliki wisata kearifan lokal berupa perayaan tradisional atau pesta rakyat. Wisata jenis ini dilaksanakan berkaitan dengan tradisi dan adat istiadat masyarakat.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah

2.4.2.1. Air Bersih

Jumlah prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih PDAM di Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan dari tahun 2009-2013. Angkanya berkisar antara $\pm 4,35\%$ Kepala Keluarga (KK) tahun 2009 dan naik menjadi $\pm 4,65\%$ KK tahun 2013. Pada tahun 2013, jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih ± 29.759 KK atau $4,65\%$ dari 639.771 rumah tangga.

Tabel 2.25. Jumlah Pelanggan Air Bersih PDAM di Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013**)
1	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	24.722	25.866	27.124	28.689	29.759
2	Jumlah Rumah Tangga	572.621	547.786	591.501	594.938	639.771
3	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Air Bersih (11/12)	4,32	4,72	4,59	4,82	4,65

Sumber : Bappeda Kabupaten Cirebon, 2013.

Total pelanggan yang terdaftar di PDAM Kabupaten Cirebon mampu menghasilkan pendapatan lebih dari 30 miliar rupiah.

Tabel 2.26. Jenis Pelanggan PDAM di Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2012

Jenis Pelanggan	2011			2012		
	Jumlah Pelanggan	Banyaknya (m ³)	Nilai (Rp.)	Jumlah Pelanggan	Banyaknya (m ³)	Nilai (Rp.)
Rumah tempat tinggal	27.124	382.361	25.409.681.910	28.689	4.703.051	26.577.930.290
Badan Sosial & Rumah Sakit	372	11.917	452.607.140	407	159.776	543.111.120
Sarana Umum	78	5.287	146.318.500	75	111.662	297.352.540
Perusahaan, pertokoan & industri	3	179	34.625.920	3	4.229	62.636.000
Instansi Pemerintahan	223	16.667	1.377.864.190	228	1.925.541	1.416.563.060
Lain-lain/Tangki	-	4.115	85.105.000	34	27.599	61.004.800
Niaga kecil	352	7.482	823.656.300	362	92.836	873.657.080
Niaga sedang	31	1.936	263.074.240	33	29.919	324.844.420
Niaga besar	4	59	18.261.640	4	1.354	17.652.040
Kab. Cirebon	28.187	430.003	28.611.194.840	29.835	7.083.037	30.174.751.350

Sumber : PUSDALISBANG Prov. Jabar, 2013.

Adapun distribusi jumlah keluarga yang menggunakan air bersih dan memiliki jamban sendiri pada tahun 2013 adalah berjumlah 646.621 keluarga atau 98,53% dari total keluarga di Kabupaten Cirebon. Kecamatan yang pemenuhan kebutuhan air bersihnya masih kurang adalah Kecamatan Susukan dengan pemenuhan kebutuhan air bersih sekitar 66,37%. Untuk kepemilikan jamban sendiri prosentasenya sekitar 80,31% atau 527.073 KK. Kecamatan yang prosentase kepemilikan jamban sendiri masih rendah adalah Kecamatan Tengah Tani 50,65% dan Kecamatan Kapetakan 59,95%.

Tabel 2.27. Jumlah Keluarga yang Memiliki Sumber Air Bersih & Jamban Sendiri per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Sumber Air Bersih	%	Jamban Sendiri	%
1	WALED	17.891	16.530	92,39	15.256	85,27
2	CILEDUG	13.584	13.341	98,21	10.473	77,10
3	LOSARI	17.615	16.800	95,37	13.285	75,42
4	PABEDILAN	19.017	19.017	100,00	12.798	67,30
5	BABAKAN	23.502	23.502	100,00	20.509	87,26
6	KARANGSEMBUNG	11.067	11.067	100,00	10.616	95,92

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Sumber Air Bersih	%	Jamban Sendiri	%
7	LEMAHABANG	15.950	15.950	100,00	15.945	99,97
8	SUSUKANLEBAK	11.871	11.871	100,00	9.036	76,12
9	SEDONG	13.382	13.382	100,00	9.730	72,71
10	ASTANAJAPURA	20.691	20.691	100,00	17.390	84,05
11	PANGENAN	12.564	12.564	100,00	9.641	76,74
12	MUNDU	21.568	21.453	99,47	16.877	78,25
13	BEBER	11.066	10.735	97,01	9.985	90,23
14	TALUN	19.059	18.585	97,51	17.420	91,40
15	SUMBER	24.647	24.647	100,00	17.833	72,35
16	DUKUPUNTANG	17.347	17.347	100,00	13.308	76,72
17	PALIMANAN	19.131	19.131	100,00	14.735	77,02
18	PLUMBON	21.777	21.777	100,00	18.533	85,10
19	WERU	16.913	16.913	100,00	14.383	85,04
20	KEDAWUNG	16.562	16.562	100,00	16.562	100,00
21	GUNUNGJATI	22.396	22.396	100,00	21.246	94,87
22	KAPETAKAN	16.090	16.090	100,00	9.646	59,95
23	KLANGENAN	15.956	15.956	100,00	13.741	86,12
24	ARJAWINANGUN	19.981	19.981	100,00	17.872	89,44
25	PANGURAGAN	15.407	15.407	100,00	14.397	93,44
26	CIWARINGIN	11.191	11.191	100,00	8.103	72,41
27	SUSUKAN	18.825	12.495	66,37	9.534	50,65
28	GEGESIK	26.961	26.961	100,00	19.111	70,88
29	KALIWEDI	13.976	13.976	100,00	9.287	66,45
30	GEBANG	19.520	19.520	100,00	15.220	77,97
31	DEPOK	17.558	17.558	100,00	15.714	89,50
32	PASALEMAN	8.796	8.796	100,00	8.543	97,12
33	PABUARAN	10.678	10.678	100,00	8.698	81,46
34	KARANGWARENG	9.692	9.692	100,00	9.692	100,00
35	TENGAHTANI	11.225	11.225	100,00	6.213	55,35
36	PLERED	16.466	16.466	100,00	12.383	75,20
37	GEMPOL	13.351	13.351	100,00	9.484	71,04
38	GREGED	16.479	16.479	100,00	11.479	69,66
39	SURANENGGALA	13.101	13.101	100,00	10.724	81,86
40	JAMBLANG	13.437	13.437	100,00	11.671	86,86
JUMLAH		656.290	646.621	98,53	527.073	80,31

Sumber : BPPKB Kabupaten Cirebon, 2013.

2.4.2.2. Energi Listrik dan Gas

Persentase rumah tangga di Kabupaten Cirebon yang menggunakan listrik cenderung naik dari tahun 2009-2013. Secara umum prosentase rumah tangga yang mendapatkan aliran listrik adalah sekitar 50-60%.

Tabel 2.28. Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013**) (6)/(7)
1	Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	304.026	303.379	318.579	338.248	358.184
2	Jumlah Rumah Tangga	572.621	547.786	591.501	594.938	619.771
3	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (6)/(7)	53,09	55,38	53,86	56,90	57,79

Sumber : Bappeda Kabupaten Cirebon, 2013.

Secara keseluruhan pemenuhan kebutuhan listrik dan gas untuk rumah tangga di Kabupaten Cirebon mencapai 358.184 keluarga atau 57,79%. Namun, ada beberapa kecamatan yang prosentase pemenuhan kebutuhan energi berupa gas/listrik masih rendah yaitu Kecamatan Susukan.

Tabel 2.29. Pemenuhan Kebutuhan Gas/Listrik untuk Memasak dan Sumber Penerangan di Kabupaten Cirebon Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Memasak dengan Gas/Listrik	%	Listrik Sumber Penerangan	%
1	WALED	17.891	16.349	91,38	16.611	92,85
2	CILEDUG	13.584	12.492	91,96	13.309	97,98
3	LOSARI	17.615	15.791	89,65	16.860	95,71
4	PABEDILAN	19.017	17.238	90,65	18.993	99,87
5	BABAKAN	23.502	22.791	96,97	23.502	100,00
6	KARANGSEMBUNG	11.067	11.067	100,00	11.067	100,00
7	LEMAHABANG	15.950	15.946	99,97	15.950	100,00
8	SUSUKANLEBAK	11.871	11.871	100,00	11.871	100,00
9	SEDONG	13.382	12.818	95,79	13.382	100,00
10	ASTANAJAPURA	20.691	16.735	80,88	20.691	100,00
11	PANGENAN	12.564	11.894	94,67	12.564	100,00
12	MUNDU	21.568	20.770	96,30	21.453	99,47
13	BEBER	11.066	10.811	97,70	11.036	99,73
14	TALUN	19.059	18.495	97,04	18.539	97,27
15	SUMBER	24.647	18.216	73,91	24.647	100,00
16	DUKUPUNTANG	17.347	16.673	96,11	17.347	100,00
17	PALIMANAN	19.131	19.131	100,00	19.131	100,00
18	PLUMBON	21.777	21.621	99,28	21.777	100,00
19	WERU	16.913	15.913	94,09	16.913	100,00
20	KEDAWUNG	16.562	16.562	100,00	16.562	100,00
21	GUNUNGJATI	22.396	22.127	98,80	21.941	97,97
22	KAPETAKAN	16.090	15.925	98,97	16.090	100,00
23	KLANGENAN	15.956	11.253	70,53	15.956	100,00
24	ARJAWINANGUN	19.981	19.981	100,00	19.981	100,00
25	PANGURAGAN	15.407	15.407	100,00	15.407	100,00
26	CIWARINGIN	11.191	11.191	100,00	11.191	100,00
27	SUSUKAN	18.825	12.670	67,30	12.442	66,09
28	GEGESIK	26.961	25.865	95,93	26.961	100,00
29	KALIWEDI	13.976	13.976	100,00	13.976	100,00
30	GEBANG	19.520	19.056	97,62	19.520	100,00
31	DEPOK	17.558	16.181	92,16	17.558	100,00
32	PASALEMAN	8.796	8.796	100,00	9.796	111,37
33	PABUARAN	10.678	10.535	98,66	10.678	100,00
34	KARANGWARENG	9.692	9.692	100,00	9.692	100,00
35	TENGAHTANI	11.225	11.225	100,00	11.225	100,00
36	PLERED	16.466	15.466	93,93	16.466	100,00

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Memasak dengan Gas/Listrik	%	Listrik Sumber Penerangan	%
37	GEMPOL	13.351	12.702	95,14	12.930	96,85
38	GREGED	16.479	13.818	83,85	16.479	100,00
39	SURANENGKALA	13.101	13.101	100,00	13.101	100,00
40	JAMBLANG	13.437	13.437	100,00	13.437	100,00
JUMLAH		656.290	598.853	91,25	647.032	98,59

Sumber : BPPKB Kabupaten Cirebon, 2013.

2.4.2.3. Jaringan Jalan

Keberadaan sarana penghubung di Kabupaten Cirebon relatif cukup baik dilihat dari kondisi jalan kabupaten, jalan propinsi maupun jalan negara. Tingkat pengelolaan jalan untuk kategori jalan kabupaten membentang sepanjang ±646,65 Km.

Tabel 2.30. Kondisi Jalan Kabupaten dan Propinsi Tahun 2011 dan 2012

No	Keadaan/Kondisi Jalan	Jalan Kabupaten (km)		Jalan Propinsi (km)	
		2011	2012	2011	2012
1	Baik	266,93	296,76	122,764	83,859
2	Sedang	191,77	196,43	141,13	245,684
3	Rusak	115,31	94,79	185,879	8,400
4	Rusak Berat	68,35	58,67	-	1,200
	Jumlah	642,36	646,65	282,773	339,143

Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon

Secara umum jalan yang ada di Kabupaten Cirebon berkualitas baik dengan panjang jalan yang berkondisi baik sekitar ±953,63 km (tahun 2013). Adapun jalan-jalan yang berkondisi rusak sedang sekitar ±517,95 km (24,35%), kondisi rusak ±105,95 km (4,98%), dan ±54,91km(2,58%) berkondisi rusak berat.

Tabel 2.31. Panjang Jalan (km) di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Kondisi Tahun 2009-2013

No	Kondisi Jalan	Panjang jalan (km)				
		2009	2010	2011	2012	2013**)
1	Kondisi Baik	279,91	373,93	367,276	1560,21	953,63
2	Kondisi Rusak Sedang	206,91	256,47	232,572	337,56	517,95
3	Kondisi Rusak	208,81	87,98	132,942	113,38	105,95
4	Kondisi Rusak Berat	90,43	68,90	83,43	58,67	54,91
5	Jalan secara keseluruhan(nasional, provinsi, dankabupaten)	786,06	787,28	816,23	2.069,82	2.126,48

Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon

2.4.2.4. Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi yang mengalir lahan pertanian di Kabupaten Cirebon terdiri dari jaringan primer sepanjang ± 158.755 km, jaringan sekunder $\pm 338.583,50$ km dan jaringan tersier sepanjang $\pm 1.169.486$ km.

Tabel 2.32. Jaringan Irigasi (km) Kabupaten Cirebon Tahun 2013

No	Jaringan Irigasi	Panjang Irigasi (km) tahun 2013
1	Jaringan primer	158.755
2	Jaringan Sekunder	338.583,50
3	Jaringan Tersier	1.169.486
4	Luas lahan budidaya Pertanian	53.172

Sumber : Dinas PSDAP Kabupaten Cirebon

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Iklim Investasi

Iklim investasi di Kabupaten Cirebon terus berkembang dan menarik investor dari tahun ke tahun seiring bertambahnya pertumbuhan ekonomi di wilayah ini yang ditargetkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6% per tahun. Untuk mendorong iklim investasi yang baik, Kabupaten Cirebon memiliki Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Cirebon yang dibentuk atas kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006. Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Cirebon serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Cirebon.

Target penyerapan investasi di Kabupaten Cirebon pada tahun 2014 melalui BPPT sebesar Rp756.250.000,000. BPPT Kabupaten Cirebon menargetkan peningkatan penyerapan investasi sebesar 8% per tahun.

Proyeksi investasi di Kabupaten Cirebon diperkirakan terus berkembang karena adanya pengembangan jalur tol CIKAPA, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Electric Power (CEP), jalur ganda kereta api, bandara udara internasional Kertajati, pelabuhan Cirebon, dan tersedianya tenaga kerja terampil. Selain itu, perkembangan kondisi infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), kajian-kajian potensi dan peluang investasi, pembinaan, pemantauan dan pengawasan kepada perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon juga mendorong pertumbuhan investasi di wilayah ini.

Saat ini jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Cirebon adalah 230 investor dan BPPT menargetkan jumlah investor sebesar 1.334 investor dengan upaya berupa adanya forum koordinasi dengan dunia usaha, promosi investasi, penilaian perusahaan terbaik di Kabupaten Cirebon, peningkatan kualitas pelayanan perijinan terpadu, dan peningkatan kualitas SDM.

Pada kondisi awal kepemilikan perizinan bagi usaha masyarakat adalah sebesar 8.942 usaha. BPPT menargetkan adanya peningkatan kepemilikan perizinan bagi usaha masyarakat sebesar 5% per tahun sehingga pada kondisi akhir RPJMD, SK yang diterbitkan mencapai 11.413 SK.

Indeks kepuasan masyarakat pada awal kondisi RPJMD adalah 79,99%. BPPT Kabupaten Cirebon menargetkan peningkatan sebesar 0,5% per tahun sehingga kondisi akhir RPJMD sebesar 82,01% dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para pemohon/pelaku usaha. Adapun BPPT Kabupaten Cirebon melakukan survai langsung dengan memberikan angket pertanyaan kepada para pemohon perizinan yang datang ke Kantor BPPT Kabupaten Cirebon.

Penanganan pengaduan yang terselesaikan adalah 100%. Dalam jangka waktu 5 tahun kedepan, BPPT Kabupaten Cirebon menargetkan 100% penanganan pengaduan yang terselesaikan setiap tahun dengan membentuk timsatuan tugas (*Task Force*) sebagai mediator dalam penyelesaian setiap permasalahan penanaman modal.

Pelayanan perizinan yang tepat waktu merupakan indikator kinerja BPPT Kabupaten Cirebon yang berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dengan menargetkan pelayanan perizinan yang tepat waktu sebesar 100% setiap tahun selama 5 tahun kedepan.

BPPTKabupaten Cirebon menargetkan pelayanan berbasis Teknologi Informasi terutama pengembangan sistem pelayanan dan website BPPT Kabupaten Cirebon yang aplikatif sehingga masyarakat/pelaku usaha dapat mengakses informasi berupa jenis perizinan, persyaratan perizinan, proses perizinan, perkembangan investasi, perkembangan penerbitan perizinan, perkembangan retribusi, indeks kepuasan masyarakat dan potensi serta peluang investasi di Kabupaten Cirebon dengan target kinerja sebesar 10% setiap tahun. Hal ini didukung kondisi teknologi yang berkembang cepat dengan adanya perbaikan dan pengembangan sistem pelayanan terpadu.

2.4.3.2. Keamanan dan Ketertiban

Faktor keamanan dan ketertiban sangat berperan penting untuk menarik investor menanamkan modalnya di suatu wilayah. Pelaku bisnis dan investor menginginkan jaminan keamanan dan ketertiban di tempat mereka berinvestasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah sudah selayaknya memberikan perhatian yang besar untuk menjaga kondisi keamanan yang stabil di wilayah pelayanan sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya di wilayah yang bersangkutan.

Berdasarkan data yang berasal dari Kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ada indikator kinerja yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Cirebon yaitu (1) kasus tindak pelanggaran ketertiban umum, (2) kejadian kejahatan dan kecelakaan di rumah dinas, dan gedung kantor pemerintahan, (3) jumlah surat peringatan dibandingkan terhadap para pelaku usaha, (4) prosentase jumlah pelaku usaha yang ditindak, (5) Pedagang kaki lima yang berjualan dilokasi yang dilarang, (6) Jumlah pengedar miras dan narkoba, dan (7) jumlah pelaku prostitusi.

Tabel 2.33. Indikator Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Cirebon Tahun 2013

No	Indikator Keamanan dan Ketertiban	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					2013
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4						4
1.	Terkendalnya kasus tindak pelanggaran ketertiban umum di 150 titik pantau	%	80	87	90	92	95	98	98
2.	Terkendalnya keamanan pada Rumah Dinas Pejabat Daerah, Komplek perkantoran PEMDA	%	100	100	100	100	100	100	100
3.	Jumlah pelaku usaha yang tertib ijin	%	408 pelaku usaha	71	75	80	87	92	92
4.	Berkurangnya jumlah PKL berjualan di atas trotoar Kota Sumber, badan jalan, taman kota, hutan kota sempadan jalan, sempadan sungai/irigasi dan saluran air jalur Sumber-Talun, Sumber-Weru dan Sumber-Kenanga	%	157 PKL	38	45	55	65	75	75
5.	Terkendalnya peredaran miras di 40 titik pantau	%	40 titik pantau	100	100	100	100	100	100
6.	Kabupaten Cirebon bebas prostitusi	Orang	40 kec	0	0	0	0	0	0
7.	Terdatanya peredaran rokok di 424 desa/kelurahan	%	10.000 pengecer	50	65	75	85	100	100

Sumber : Kantor Kesatuan Polisi pamong Praja Kabupaten Cirebon

BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

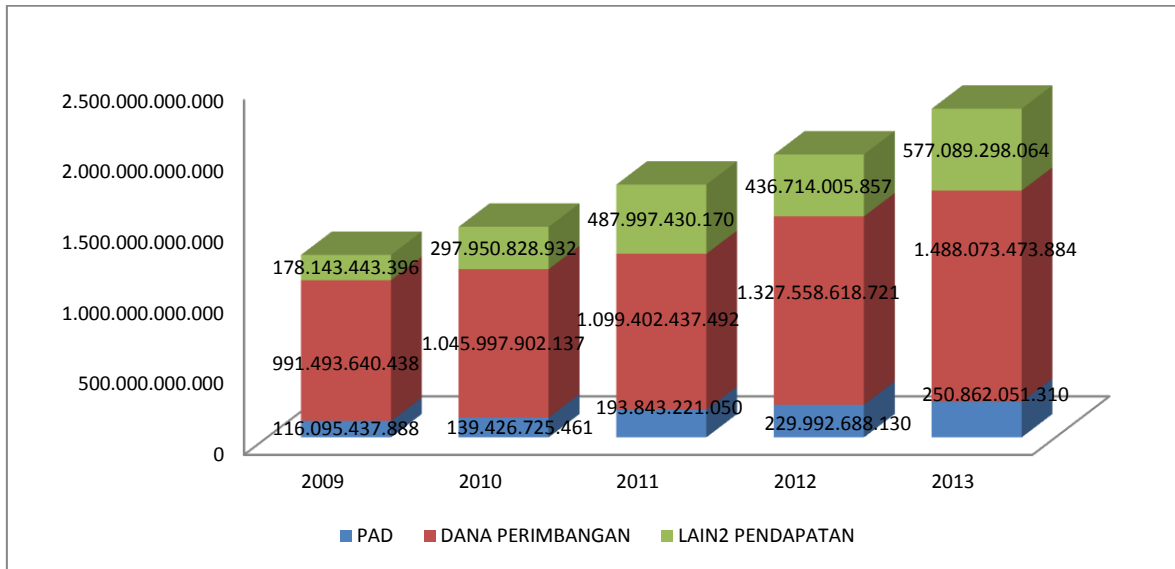
3.1.1.1. Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan data tahun 2009-2013, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon rata-rata mampu menyumbangkan sebesar 10,34 % dari total realisasi pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Dana Perimbangan sebesar 68,03 % dari total pendapatan daerah. Sedangkan sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 21,63 %.

Proporsi Dana Perimbangan cenderung menurun dari tahun 2009-2013. Pada tahun 2009, proporsi Dana Perimbangan mencapai 77,12 % dan pada tahun 2013 turun menjadi 64,25 %. Namun penurunan proporsi dana perimbangan ini belum menunjukkan kemandirian daerah secara signifikan. Penurunan proporsi dana perimbangan yang relatif besar tidak diikuti peningkatan proporsi PAD yang sebanding. Selama tahun 2009-2013, kenaikan proporsi PAD hanya berkisar 1,80 %. Proporsi PAD pada tahun 2009 sebesar 9,03 % dan pada tahun 2013 menjadi 10,83 %. Pergeseran proporsi pendapatan yang signifikan bersumber dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pada tahun 2009, proporsinya hanya sebesar 13,86 % dan pada tahun 2013 mencapai 24,92 %. Pergeseran yang besar ini disebabkan karena adanya peningkatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terkait dengan dana transfer daerah untuk tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan untuk guru PNSD.

Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama tahun 2009-2013, rata-rata pertumbuhan mencapai 15,89 % per tahun. Pertumbuhan yang tertinggi adalah Lain-lain Pendapatan Yang Sah, yang rata-rata pertumbuhannya mencapai 38,17 % per tahun. Tingginya pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan pendapatan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta

Pendapatan Hibah. Sementara itu, pertumbuhan PAD dan Dana Perimbangan masing-masing sebesar 21,71 % per tahun dan 10,86 % per tahun.



Gambar 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2013
(Sumber : Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon)

Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2013

Uraian Pendapatan	2009		2010		2011		2012		2013		Pertumbuhan
	Nilai (Rp)	Proporsi	Nilai (Rp)	Proporsi	Nilai (Rp)	Proporsi	Nilai (Rp)	Proporsi	Nilai (Rp)	Proporsi	
PENDAPATAN	1.285.732.521.722,00		1.483.375.456.530,00		1.781.243.088.712,00		1.994.265.312.708,00		2.316.024.823.258,00		15,89%
❖ PAD	116.095.437.888,00	9,03%	139.426.725.461,00	9,40%	193.843.221.050,00	10,88%	229.992.688.130,00	11,53%	250.862.051.310,00	10,83%	21,71%
• Pajak Daerah	29.017.998.930,00	2,26%	29.986.986.625,00	2,02%	50.361.167.621,00	2,83%	71.338.103.707,00	3,58%	81.617.720.438,00	3,52%	31,84%
• Retribusi Daerah	77.114.206.830,00	6,00%	23.514.121.751,00	1,59%	35.331.921.898,00	1,98%	50.217.553.424,00	2,52%	53.661.715.750,00	2,32%	7,44%
• Hasil Pengelolaann Kuangan Daerah yang Dipisahkan	4.334.555.141,00	0,34%	6.258.056.571,00	0,42%	6.854.318.000,00	0,38%	7.157.156.407,00	0,36%	7.532.149.268,00	0,33%	15,89%
• Lain2 PAD	5.628.676.987,00	0,44%	79.667.560.514,00	5,37%	101.295.813.531,00	5,69%	101.279.874.592,00	5,08%	108.050.465.854,00	4,67%	337,30%
❖ DANA PERIMBANGAN	991.493.640.438,00	77,12%	1.045.997.902.137,00	70,51%	1.099.402.437.492,00	61,72%	1.327.558.618.721,00	66,57%	1.488.073.473.884,00	64,25%	10,86%
• DBH Pajak dan SDA	85.725.562.438,00	6,67%	97.508.413.137,00	6,57%	92.727.287.492,00	5,21%	105.765.363.721,00	5,30%	110.030.815.884,00	4,75%	6,73%
• DAU	856.714.078.000,00	66,63%	867.300.289.000,00	58,47%	930.060.350.000,00	52,21%	1.135.758.785.000,00	56,95%	1.280.797.128.000,00	55,30%	10,84%
• DAK	49.054.000.000,00	3,82%	81.189.200.000,00	5,47%	76.614.800.000,00	4,30%	86.034.470.000,00	4,31%	97.245.530.000,00	4,20%	21,30%
❖ LAIN2 PENDAPATAN	178.143.443.396,00	13,86%	297.950.828.932,00	20,09%	487.997.430.170,00	27,40%	436.714.005.857,00	21,90%	577.089.298.064,00	24,92%	38,17%
• DBH Pajak Prov	61.416.455.000,00	4,78%	77.624.841.832,00	5,23%	89.516.523.340,00	5,03%	103.933.248.539,00	5,21%	134.176.731.594,00	5,79%	21,73%
• Dana Penyesuaian	32.600.532.896,00	2,54%	121.148.936.000,00	8,17%	283.483.387.080,00	15,91%	194.676.765.000,00	9,76%	291.023.324.000,00	12,57%	105,94%
• Banprov	84.126.455.500,00	6,54%	99.177.051.100,00	6,69%	114.997.519.750,00	6,46%	138.103.992.318,00	6,93%	151.889.242.470,00	6,56%	15,98%

Sumber : Laporan Keuangan Daerah (LKD) Kabupaten Cirebon

3.1.1.2. Pendapatan Daerah

3.1.1.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PAD yang sah.

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Cirebon cenderung mengalami peningkatan, namun tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, khususnya terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) masih besar. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan PAD dari tahun 2009 hingga 2013, angka pertumbuhannya selalu positif. Artinya dari sisi daya tumbuh sudah besar, hanya kontribusinya ke Pendapatan Daerah masih relatif kecil. Penerimaan dari Pajak Daerah tumbuh rata-rata sebesar 31,84 % per tahun dan Retribusi Daerah hanya tumbuh rata-rata 7,44 % per tahun. Sedangkan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2013 masing-masing sebesar 3,52 % dan 2,32 % (lihat tabel 3.1).

Realisasi PAD pada tahun 2013 mencapai nilai sebesar Rp 250.862.051.310,00 atau 97,41% dari target yang ditetapkan yaitu Rp 257.537.874.736,00. Realisasi penerimaan dari seluruh sumber PAD dapat memenuhi dan bahkan melebihi target, kecuali yang bersumber dari Lain-lain PAD. Penerimaan Pajak Daerah mencapai sebesar Rp 81.617.720.438,00 atau 106,48 % dari target yang ditetapkan. Untuk Retribusi Daerah tercapai penerimaan sebesar Rp 53.661.715.750,00 atau 101,75 % dari target yang ditetapkan. Untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tercapai penerimaan sebesar Rp 7.532.149.268,00 atau sebesar 99,90 % dari target yang ditetapkan. Untuk realisasi Lain-lain PAD Yang Sah tercapai penerimaan sebesar Rp 108.050.465.854,00 atau baru mencapai 89,59 % dari target yang ditetapkan (lihat tabel 3.2).

Jika dilihat dari strukturnya, pembentuk PAD cenderung mengalami sedikit pergeseran selama dua tahun terakhir. Pada tahun-tahun awal pengamatan (2009), pembentuk PAD terbesar adalah retribusi daerah. Namun di tahun-tahun akhir pengamatan (2013),

pembentuk PAD terbesar adalah Lain-lain PAD Yang Sah dengan kontribusi sebesar 43,07 % terhadap PAD. Pergeseran ini akibat adanya pengalihan pendapatan yang bersumber dari pendapatan rumah sakit umum daerah (RSUD), yang semula masuk dalam jenis pendapatan Retribusi Daerah, namun ketika berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatannya dimasukkan dalam jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PAD sebesar 32,53 %. Penerimaan pajak ini terutama berasal dari pajak penerangan jalan dan pajak BPHTB, masing-masing sebesar Rp 37.193.997.586,00 dan Rp 22.954.309.790,00.

3.1.1.2.2 Dana Perimbangan

Dalam penjelasan UU Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Proporsi dana perimbangan terhadap Pendapatan Daerah relatif besar, mencapai 64,25 %. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon dalam pendanaan daerah masih bergantung pada Pemerintah. Hingga akhir tahun anggaran 2013, realisasi penerimaan Dana Perimbangan mencapai 100,60% atau sebesar Rp 1.488.073.473.884,00. Capaian realisasi untuk DAU dan DAK sebesar 100%, sedangkan realisasi penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak melebihi target yaitu sebesar 108,85 %.

Dana Alokasi Umum pada tahun 2013 memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan dari Dana Perimbangan. Kontribusinya mencapai lebih dari 86,07 % dari total Dana Perimbangan atau 55,30 % dari total Pendapatan daerah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Cirebon. Sementara itu, penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak adalah memberikan kontribusi sebesar 7,39 % dari dana perimbangan atau sebesar 4,75 % dari total pendapatan daerah. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan kontribusi sebesar 6,53 % dari total dana perimbangan atau sebesar 4,2 % dari total pendapatan daerah. Walaupun sumber penerimaan DAK ini bukan

merupakan yang dominan, namun pertumbuhannya merupakan yang tertinggi dengan rata-rata 21,30 % per tahun.

3.1.1.2.3 Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kabupaten Cirebon terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya. Proporsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap pendapatan daerah Kabupaten Cirebon mencapai 24,92 % pada tahun 2013. Proposi ini menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, ditargetkan Lain-Lain Pendapatan yang Sah memperoleh Rp 650.652.086.244,00, dan pada akhir tahun terealisasi sebesar Rp 577.089.298.064,00 atau tercapai 95,28 % dari target.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kontribusi masing-masing bervariasi setiap tahunnya. Pada tahun 2013 masing-masing memberikan kontribusi sebesar 50,43 % dan 26,32 % terhadap Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah atau sebesar 12,57 % dan 6,56 %. Selama tahun 2009-2013, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus untuk Kabupaten Cirebon meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan 105,94 % per tahun. Peningkatan besaran Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ini terkait dengan adanya dana transfer daerah untuk tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan untuk guru PNSD yang mencapai Rp 291.023.324.000,00.

3.1.1.3. Belanja daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja

- (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, dan (c) Belanja Modal.

Pada tahun 2013, realisasi belanja Kabupaten Cirebon mencapai Rp 2.324.459.340.602,00. Besaran belanja ini meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 17,72 % per tahun. Walaupun besaran belanja mengalami peningkatan, proporsi masing-masing belanja relatif tidak banyak mengalami perubahan. Proporsi Belanja Tidak Langsung masih lebih besar, yaitu sebesar 61,41 %, sementara proporsi Belanja Langsung hanya 38,59 %. Dari Belanja Tidak Langsung, pengeluaran Belanja Pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya. Proporsinya terhadap total Belanja Daerah mencapai 53,71% dan terhadap Belanja Tidak Langsung mencapai 87,47%. Belanja pegawai ini merupakan penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya bagi pegawai negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Besaran belanja langsung yang terkait langsung dengan program dan kegiatan dengan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 20,13 % per tahun. Proporsi belanja barang dan jasa merupakan yang terbesar sebesar 19,41 % terhadap Belanja Daerah atau 50,30 % terhadap Belanja Langsung, sedangkan belanja modal untuk pengadaan aset tetap berwujud hanya sebesar 13,95 % dari total Belanja daerah atau sebesar 36,14 % dari Belanja Langsung. Besaran belanja barang dan jasa serta belanja modal dari tahun ke tahun secara rerata mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 21,15% per tahun dan 26,83 % per tahun.

Realisasi belanja untuk Kabupaten Cirebon selama kurun waktu 2009-2013 tidak pernah melampaui target. Pada tahun 2013, realisasi belanja daerah hanya mencapai 95,90 %. Hal ini dapat disebabkan karena kinerja pemerintah belum optimal dalam

menyerap anggaran dan merealisasikannya untuk pelayanan publik. Realisasi untuk Belanja Tidak Langsung adalah sebesar 97,72 % dan untuk Belanja Langsung adalah sebesar 93,15 %. Realisasi belanja yang paling baik adalah untuk Belanja Pegawai dalam pos Belanja Tidak Langsung. Realisasi belanja pegawai merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja lainnya karena sifatnya rutin. (lihat tabel 3.2). Apabila dilihat berdasarkan SKPD, pada tahun 2013 belanja terbesar adalah untuk SKPD yang melaksanakan urusan wajib karena terkait dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, terutama belanja urusan pekerjaan umum (Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, dan PSDAP) mencapai 31,33 % serta urusan kesehatan (Dinas Kesehatan dan BRSUD) mencapai 30,21 % dari total belanja langsung. (lihat tabel 3.3).

**Tabel 3.2. Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2013**

U R A I A N	TAHUN ANGGARAN 2009			TAHUN ANGGARAN 2010			TAHUN ANGGARAN 2011		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
1	2	3		4	5		6	7	
BELANJA DAERAH	1.260.725.055.265,00	1.212.197.559.304,00	96,15%	1.591.701.620.365,00	1.488.743.155.743,00	93,53%	1.883.903.810.341,00	1.749.525.592.819,00	92,87%
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	790.219.845.859,00	773.534.417.841,00	97,89%	1.018.792.941.047,00	997.750.081.295,00	97,93%	1.093.136.666.706,00	1.070.055.550.103,00	97,89%
5.1.1. BELANJA PEGAWAI	676.081.307.109,00	667.319.571.330,00	98,70%	869.924.597.547,00	860.047.601.579,00	98,86%	959.473.790.706,00	940.312.470.023,00	98,00%
5.1.4. BELANJA HIBAH	8.559.500.000,00	8.284.500.000,00	96,79%	12.015.000.000,00	11.779.950.000,00	98,04%	28.136.068.000,00	26.968.704.375,00	95,85%
5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL	61.609.038.750,00	55.589.846.911,00	90,23%	83.076.005.250,00	73.123.080.500,00	88,02%	35.972.345.000,00	34.242.489.601,00	95,19%
5.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA KOTA	150.000.000,00	70.780.000,00	47,19%	198.105.250,00	192.611.382,00	97,23%	191.400.000,00	187.762.750,00	98,10%
5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN	42.220.000.000,00	42.202.169.600,00	99,96%	51.038.458.000,00	50.566.062.834,00	99,07%	66.363.063.000,00	65.724.401.634,00	99,04%
5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA	1.600.000.000,00	67.550.000,00	4,22%	2.540.775.000,00	2.040.775.000,00	80,32%	3.000.000.000,00	2.619.721.720,00	87,32%
5.2. BELANJA LANGSUNG	470.505.209.406,00	438.663.141.463,00	93,23%	572.908.679.318,00	490.993.074.448,00	85,70%	790.767.143.635,00	679.470.042.716,00	85,93%
5.2.1 BELANJA PEGAWAI	87.181.255.800,00	82.648.356.121,00	94,80%	95.254.081.906,00	84.068.133.478,00	88,26%	123.760.041.200,00	121.393.972.074,00	98,09%
5.2.2 BELANJA BARANG JASA	231.816.120.277,00	214.025.692.006,00	92,33%	284.010.266.761,00	266.537.368.960,00	93,85%	393.315.533.697,00	363.641.310.009,00	92,46%
5.2.3 BELANJA MODAL	151.507.833.329,00	141.989.093.336,00	93,72%	193.644.330.651,00	140.387.572.010,00	72,50%	273.691.568.738,00	194.434.760.633,00	71,04%

Lanjutan Tabel 3.2.

U R A I A N	TAHUN ANGGARAN 2012			TAHUN ANGGARAN 2013		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA DAERAH	2.053.403.281.817,00	2.033.136.939.599,00	99,01%	2.412.241.747.741,00	2.324.459.340.602,00	96,36%
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.163.870.661.026,00	1.204.501.286.758,00	103,49%	1.424.278.563.440,00	1.427.369.733.089,00	100,22%
5.1.1. BELANJA PEGAWAI	1.027.432.173.176,00	1.073.334.636.882,00	104,47%	1.235.693.722.940,00	1.248.557.039.626,00	101,04%
5.1.4. BELANJA HIBAH	64.459.654.950,00	60.009.653.450,00	93,10%	98.052.882.000,00	90.560.682.000,00	92,36%
5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL	4.643.000.000,00	4.598.125.520,00	99,03%	21.116.100.000,00	20.308.898.000,00	96,18%
5.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA KOTA	188.307.500,00	140.849.412,00	74,80%	188.307.500,00	29.256.281,00	15,54%
5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN	65.874.525.400,00	65.846.362.744,00	99,96%	67.727.551.000,00	67.553.557.182,00	99,74%
5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA	1.273.000.000,00	571.658.750,00	44,91%	1.500.000.000,00	360.300.000,00	24,02%
5.2. BELANJA LANGSUNG	889.532.620.791,00	828.635.652.841,00	93,15%	987.963.184.301,00	897.089.607.513,00	90,80%
5.2.1 BELANJA PEGAWAI	126.982.929.780,00	118.638.969.489,00	93,43%	130.702.782.110,00	121.702.423.998,00	93,11%
5.2.2 BELANJA BARANG JASA	397.268.181.919,00	371.043.933.962,00	93,40%	481.737.146.469,00	451.216.248.322,00	93,66%
5.2.3 BELANJA MODAL	365.281.509.092,00	338.952.749.390,00	92,79%	375.523.255.722,00	324.170.935.193,00	86,33%
Surplus/(Defisit)	(102.885.345.817,00)	(38.871.626.891,00)	37,78%	(69.921.583.441,00)	(8.434.517.344,00)	12,06%

**Tabel 3.3. Realisasi Belanja per SKPD
Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2013**

NO,	SKPD	2009				2010				2011			
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	PROPORSI THD BL (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	PROPORSI THD BL (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	PROPORSI THD BL (%)
1	DINAS PENDIDIKAN	84.134.483.590,00	81.139.848.775,00	96,44	18,49	141.477.726.595,00	90.629.963.014,00	64,06	18,46	283.491.974.530,00	214.388.413.257,00	75,62	31,55
2	DINAS KESEHATAN	45.100.849.053,00	38.641.825.252,00	85,68	8,81	55.219.897.017,00	48.834.899.318,00	88,44	9,95	72.254.429.372,00	56.016.173.853,00	77,53	8,24
3	BRSUD ARJAWINANGUN	40.443.493.100,00	38.771.251.284,00	95,87	8,84	46.862.184.000,00	40.858.381.188,00	87,19	8,32	49.719.138.693,00	46.257.254.407,00	93,04	6,81
4	BRSUD WALED	46.311.926.425,00	41.295.942.681,00	89,17	9,41	44.461.251.000,00	43.097.524.780,00	96,93	8,78	64.269.245.000,00	61.674.362.837,00	95,96	9,08
5	DINAS BINA MARGA	49.939.559.000,00	47.516.697.358,00	95,15	10,83	54.395.103.000,00	52.528.233.196,00	96,57	10,70	29.472.796.400,00	28.613.161.303,00	97,08	4,21
6	DINAS CIPTA KARYA & TR	19.359.135.300,00	18.888.527.956,00	97,57	4,31	22.729.657.848,00	22.437.639.094,00	98,72	4,57	60.818.870.640,00	57.565.208.851,00	94,65	8,47
7	DINAS PSDAP	24.380.041.535,00	20.477.255.307,00	83,99	4,67	35.925.110.100,00	32.195.043.245,00	89,62	6,56	51.306.213.250,00	50.067.206.018,00	97,59	7,37
8	BAPPEDA	3.876.868.500,00	3.776.110.819,00	97,40	0,86	3.931.945.000,00	3.793.279.514,00	96,47	0,77	2.968.451.900,00	2.903.296.694,00	97,81	0,43
9	DINAS PERHUBUNGAN	3.086.755.180,00	2.951.450.588,00	95,62	0,67	3.577.375.300,00	3.488.541.215,00	97,52	0,71	4.313.226.200,00	4.199.628.003,00	97,37	0,62
10	BLHD	1.940.911.250,00	1.903.773.044,00	98,09	0,43	1.691.942.100,00	1.623.391.189,00	95,95	0,33	1.631.084.250,00	1.600.638.152,00	98,13	0,24
11	DISDUKCAPIL	4.002.591.875,00	3.772.094.944,00	94,24	0,86	5.392.362.280,00	5.019.525.798,00	93,09	1,02	8.650.145.120,00	8.388.957.536,00	96,98	1,23
12	BPPKB	4.614.040.575,00	4.498.915.440,00	97,50	1,03	4.411.954.500,00	3.760.395.553,00	85,23	0,77	5.730.594.834,00	5.459.073.301,00	95,26	0,80
13	DINAS SOSIAL	1.455.584.495,00	1.405.842.628,00	96,58	0,32	1.351.743.486,00	1.307.255.256,00	96,71	0,27	1.852.734.320,00	1.830.656.482,00	98,81	0,27
14	DISNAKERTRANS	10.632.759.650,00	10.536.572.805,00	99,10	2,40	7.854.041.000,00	7.214.882.261,00	91,86	1,47	7.456.130.800,00	6.695.819.646,00	89,80	0,99
15	DINAS KOPERASI & UMKM	850.000.000,00	832.341.175,00	97,92	0,19	1.595.770.798,00	1.572.064.534,00	98,51	0,32	1.289.120.825,00	1.258.930.141,00	97,66	0,19
16	BPPT	1.411.273.800,00	1.319.976.353,00	93,53	0,30	1.536.931.450,00	1.445.017.504,00	94,02	0,29	1.836.434.445,00	1.752.605.373,00	95,44	0,26
17	DISBUDPARPORA	2.664.263.550,00	2.608.099.015,00	97,89	0,59	3.496.663.100,00	3.345.584.544,00	95,68	0,68	3.814.536.450,00	3.745.816.197,00	98,20	0,55
18	BADAN KESBANGLINMAS	1.532.224.786,00	1.458.081.747,00	95,16	0,33	1.780.650.000,00	1.729.942.525,00	97,15	0,35	1.780.643.050,00	1.758.259.416,00	98,74	0,26
19	SAT POL PP	3.091.286.660,00	2.963.632.947,00	95,87	0,68	2.824.331.000,00	2.803.988.515,00	99,28	0,57	3.306.970.920,00	3.238.258.978,00	97,92	0,48

NO,	SKPD	2009			PROPORSI THD BL (%)	2010				2011			
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	PROPORSI THD BL (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	PROPORSI THD BL (%)
20	SEKRETARIAT DAERAH	42.692.923.395,00	40.645.607.369,00	95,20	9,26	45.869.184.560,00	43.939.167.907,00	95,79	8,95	44.443.132.956,00	43.451.163.608,00	97,77	6,39
21	SEKRETARIAT DPRD	20.467.264.820,00	17.909.400.378,00	87,50	4,08	30.768.511.000,00	26.875.204.299,00	87,35	5,47	30.486.610.500,00	23.820.881.579,00	78,14	3,51
22	INSPEKTORAT	3.368.233.475,00	2.955.327.851,00	87,74	0,67	3.181.288.540,00	2.877.811.211,00	90,46	0,59	3.453.825.500,00	3.205.820.030,00	92,82	0,47
23	DISPENDA	4.380.609.850,00	4.272.660.267,00	97,54	0,97	4.464.402.725,00	4.314.931.168,00	96,65	0,88	3.655.865.109,00	3.479.133.805,00	95,17	0,51
24	BKPPD	18.857.243.000,00	17.643.435.091,00	93,56	4,02	10.353.702.382,00	8.887.108.695,00	85,84	1,81	8.254.346.920,00	7.647.143.119,00	92,64	1,13
25	BKPSK	2.335.422.000,00	2.270.180.839,00	97,21	0,52	2.689.557.000,00	2.652.289.590,00	98,61	0,54	3.541.095.900,00	3.371.041.360,00	95,20	0,50
26	BPM PEMDES	2.967.623.600,00	2.913.139.727,00	98,16	0,66	3.485.797.000,00	3.436.058.468,00	98,57	0,70	2.650.215.900,00	2.578.624.402,00	97,30	0,38
27	KANTOR KEARSIPAN	696.595.000,00	672.438.376,00	96,53	0,15	702.413.400,00	685.732.163,00	97,63	0,14	706.277.940,00	672.072.246,00	95,16	0,10
28	DISKOMINFO	1.443.504.582,00	1.378.253.603,00	95,48	0,31	1.362.341.950,00	1.336.112.916,00	98,07	0,27	1.843.324.210,00	1.754.287.078,00	95,17	0,26
29	KANTOR PERPUSDA	569.000.000,00	538.643.000,00	94,66	0,12	689.385.250,00	681.365.323,00	98,84	0,14	662.348.350,00	646.314.433,00	97,58	0,10
30	DISTANBUNAKHUT	7.346.957.490,00	7.086.881.408,00	96,46	1,62	8.754.390.500,00	8.667.255.104,00	99,00	1,77	11.642.570.475,00	9.921.282.243,00	85,22	1,46
31	DISLAKAN	1.511.482.500,00	1.445.917.406,00	95,66	0,33	5.005.445.100,00	4.591.895.503,00	91,74	0,94	7.638.623.345,00	6.930.044.565,00	90,72	1,02
32	DISPERINDAG	2.907.987.000,00	2.632.963.029,00	90,54	0,60	3.925.553.750,00	3.540.605.576,00	90,19	0,72	3.841.720.675,00	3.411.595.116,00	88,80	0,50
33	KECAMATAN	12.101.052.664,00	11.590.053.001,00	95,78	2,64	11.140.066.587,00	10.821.984.282,00	97,14	2,20	11.984.444.856,00	11.166.918.687,00	93,18	1,64
TOTAL		470.473.947.700,00	438.713.141.463,00	93,25	100,00	572.908.679.318,00	490.993.074.448,00	85,70	100,00	790.767.143.635,00	679.470.042.716,00	85,93	100,00

Lanjutan Tabel 3.3.

NO,	SKPD	2012				2013				Pertumbuhan				
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	PROPORSI THD BL (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	PROPORSI THD BL (%)	2010	2011	2012	2013	Rata-rata
1	DINAS PENDIDIKAN	168.516.960.593,00	158.428.969.479,00	94,01	19,12	117.733.446.970,00	83.698.074.222,00	71,09	9,33	11,70%	136,55%	-26,10%	-47,17%	18,74%
2	DINAS KESEHATAN	91.345.060.956,00	88.465.562.373,00	96,85	10,68	99.167.141.892,00	94.255.936.292,00	95,05	10,51	26,38%	10,51%	10,68%	10,66%	14,56%
3	BRSUD ARJAWINANGUN	69.360.746.500,00	56.535.249.287,00	81,51	6,82	68.815.849.064,00	54.846.816.354,00	79,70	6,11	5,38%	6,11%	6,82%	6,20%	6,13%
4	BRSUD WALED	87.411.140.000,00	82.310.203.831,00	94,16	9,93	126.652.772.775,00	121.902.494.037,00	96,25	13,59	4,36%	13,59%	9,93%	13,79%	10,42%
5	DINAS BINA MARGA	62.924.920.300,00	62.431.269.813,00	99,22	7,53	95.724.709.050,00	92.507.248.099,00	96,64	10,31	10,55%	10,31%	7,53%	10,47%	9,71%
6	DINAS CIPTA KARYA & TR	79.118.506.091,00	77.827.216.429,00	98,37	9,39	87.713.627.433,00	86.532.935.731,00	98,65	9,65	18,79%	9,65%	9,39%	9,79%	11,90%
7	DINAS PSDAP	77.297.490.350,00	73.547.188.627,00	95,15	8,88	110.233.633.500,00	102.015.853.177,00	92,55	11,37	57,22%	11,37%	8,88%	11,54%	22,25%
8	BAPPEDA	5.664.184.100,00	5.252.037.863,00	92,72	0,63	8.763.869.900,00	8.318.005.545,00	94,91	0,93	0,45%	0,93%	0,63%	0,94%	0,74%
9	DINAS PERHUBUNGAN	7.048.956.700,00	6.811.751.642,00	96,63	0,82	5.135.498.450,00	4.946.817.440,00	96,33	0,55	18,20%	0,55%	0,82%	0,56%	5,03%
10	BLHD	3.895.555.270,00	3.767.877.835,00	96,72	0,45	4.481.279.495,00	4.114.308.348,00	91,81	0,46	-14,73%	0,46%	0,45%	0,47%	-3,34%
11	DISDUKCAPIL	8.953.245.210,00	8.392.748.748,00	93,74	1,01	6.120.590.084,00	5.735.831.261,00	93,71	0,64	33,07%	0,64%	1,01%	0,65%	8,84%
12	BPPKB	5.724.008.609,00	5.081.024.624,00	88,77	0,61	7.717.727.419,00	7.424.592.999,00	96,20	0,83	-16,42%	0,83%	0,61%	0,84%	-3,53%
13	DINAS SOSIAL	3.919.678.500,00	3.854.804.116,00	98,34	0,47	6.624.191.050,00	6.446.206.969,00	97,31	0,72	-7,01%	0,72%	0,47%	0,73%	-1,27%
14	DISNAKERTRANS	6.029.803.600,00	5.677.575.437,00	94,16	0,69	6.158.268.750,00	5.888.134.150,00	95,61	0,66	-31,53%	0,66%	0,69%	0,67%	-7,38%
15	DINAS KOPERASI & UMKM	3.090.838.480,00	2.630.165.079,00	85,10	0,32	3.081.125.120,00	2.702.824.049,00	87,72	0,30	88,87%	0,30%	0,32%	0,31%	22,45%
16	BPPT	1.983.304.695,00	1.877.191.799,00	94,65	0,23	2.706.882.100,00	2.553.128.449,00	94,32	0,28	9,47%	0,28%	0,23%	0,29%	2,57%
17	DISBUDPARPORA	14.859.900.940,00	13.488.547.352,00	90,77	1,63	14.294.546.640,00	13.967.067.518,00	97,71	1,56	28,28%	1,56%	1,63%	1,58%	8,26%
18	BADAN KESBANGLINMAS	2.220.127.920,00	2.195.865.659,00	98,91	0,26	4.739.262.100,00	4.525.956.401,00	95,50	0,50	18,65%	0,50%	0,26%	0,51%	4,98%
19	SAT POL PP	4.211.860.420,00	4.175.644.192,00	99,14	0,50	4.363.410.700,00	4.213.174.388,00	96,56	0,47	-5,39%	0,47%	0,50%	0,48%	-0,98%

NO,	SKPD	2012				2013				Pertumbuhan				
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	PROPORSI THD BL (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	PROPO RSI THD BL (%)	2010	2011	2012	2013	Rata- rata
20	SEKRETARIAT DAERAH	50.123.771.347,00	48.281.981.053,00	96,33	5,83	58.469.010.366,00	56.135.062.276,00	96,01	6,26	8,10%	6,26%	5,83%	6,35%	6,63%
21	SEKRETARIAT DPRD	37.504.646.929,00	28.477.280.275,00	75,93	3,44	34.564.506.500,00	26.847.130.717,00	77,67	2,99	50,06%	2,99%	3,44%	3,04%	14,88%
22	INSPEKTORAT	4.379.343.460,00	4.032.736.720,00	92,09	0,49	5.911.182.910,00	5.632.939.274,00	95,29	0,63	-2,62%	0,63%	0,49%	0,64%	-0,22%
23	DISPENDA	6.974.114.890,00	6.284.934.334,00	90,12	0,76	11.949.677.730,00	9.957.048.207,00	83,32	1,11	0,99%	1,11%	0,76%	1,13%	1,00%
24	BKPPD	8.969.050.110,00	7.945.336.991,00	88,59	0,96	10.207.718.271,00	9.110.304.061,00	89,25	1,02	-49,63%	1,02%	0,96%	1,03%	-11,66%
25	BKP5K	7.675.239.800,00	7.401.358.787,00	96,43	0,89	10.575.538.750,00	10.261.526.610,00	97,03	1,14	16,83%	1,14%	0,89%	1,16%	5,01%
26	BPM PEMDES	3.828.448.550,00	3.784.463.344,00	98,85	0,46	5.699.527.510,00	5.495.683.714,00	96,42	0,61	17,95%	0,61%	0,46%	0,62%	4,91%
27	KANTOR KEARSIPAN	831.213.400,00	778.310.011,00	93,64	0,09	956.620.700,00	907.350.810,00	94,85	0,10	1,98%	0,10%	0,09%	0,10%	0,57%
28	DISKOMINFO	1.856.042.470,00	1.790.702.500,00	96,48	0,22	2.432.597.314,00	2.348.914.879,00	96,56	0,26	-3,06%	0,26%	0,22%	0,27%	-0,58%
29	KANTOR PERPUSDA	914.142.300,00	900.507.721,00	98,51	0,11	3.227.000.000,00	3.121.103.981,00	96,72	0,35	26,50%	0,35%	0,11%	0,35%	6,83%
30	DISTANBUNAKHUT	28.100.049.775,00	26.531.886.726,00	94,42	3,20	31.859.403.625,00	30.086.313.595,00	94,43	3,35	22,30%	3,35%	3,20%	3,40%	8,06%
31	DISLAKAN	9.677.564.100,00	5.682.732.911,00	58,72	0,69	12.646.490.983,00	11.960.135.876,00	94,57	1,33	217,58%	1,33%	0,69%	1,35%	55,24%
32	DISPERINDAG	8.582.759.350,00	7.910.337.883,00	92,17	0,95	5.678.983.550,00	5.483.945.119,00	96,57	0,61	34,47%	0,61%	0,95%	0,62%	9,16%
33	KECAMATAN	16.535.445.076,00	16.082.189.400,00	97,26	1,94	13.557.093.600,00	13.150.669.965,00	97,00	1,47	-6,63%	1,47%	1,49%	1,49%	-0,55%
TOTAL		889.528.120.791,00	828.635.652.841,00	93,15	100,00	974.406.090.701,00	897.093.534.513,00	92,07	100,00					

3.1.2. Neraca Keuangan

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci sebagaimana tergambar dalam tabel 3.3.

3.1.2.1 Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya. Pada tahun 2013, Kabupaten Cirebon memiliki aset senilai Rp 3.207.653.753.935,52, dengan nilai aset terbesar berasal dari aset tetap sebesar Rp 2.993.811.118.348,00. Sedangkan nilai pertumbuhan aset selama 2009-2013 tercatat 7,55 % per tahun.

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar untuk Kabupaten Cirebon pada tahun 2013 mencapai Rp 133.682.438.552,74 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,90 % per tahun.

Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Untuk Kabupaten Cirebon, investasi jangka panjang tumbuh dengan rata-rata 1,11 % per tahun. Pada tahun 2009, investasi jangka panjang baru sebesar Rp 76.645.456.815,89.

Namun tahun 2013 mencapai Rp 77.422.373.149,78. Investasi jangka panjang ini didominasi oleh investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah.

3.1.2.2 Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 68.618.324.493,00. Kewajiban jangka pendek, yang diharapkan harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, bertumbuh rata-rata 481,13 % per tahun. Peningkatan utang jangka pendek ini didorong adanya peningkatan Utang Jangka Pendek Lainnya. Sementara itu, sejak tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak mempunyai kewajiban jangka panjang.

3.1.2.3 Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (i) Ekuitas Dana Lancar, (ii) Ekuitas Dana Investasi, dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kabupaten Cirebon mencapai Rp 3.139.035.429.442,52. Nilai ekuitas dana yang terbesar adalah berupa ekuitas dana investasi sebesar Rp 3.073.971.315.382,78

**Tabel 3.4. Neraca Keuangan Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2013**

Uraian	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Laju (%)
ASET	2.429.395.143.742,32	2.303.354.045.910,72	2.701.859.933.395,92	3.057.419.350.612,10	3.201.752.187.396	7,15
ASET LANCAR	137.145.086.749,33	149.300.932.442,24	141.360.609.688,75	94.834.608.159,56	134.552.093.612	(0,48)
Kas di Kas Daerah	98.866.815.310,00	90.263.519.787,00	111.098.139.031,00	62.581.037.458,00	61.269.686.379	(11,27)
Kas di Bendahara Pengeluaran	87.163.555,00	10.097,00	67.282.134,00	950,00	6.688.012	(47,37)
Kas di Bendahara Penerimaan	388.991.532,00	4.234.155.305,00	-	214.963.250,00	63.703.500	(36,39)
Kas di BLUD	-	-	1.095.120.143,00	1.432.680.518,00	2.429.108.795	15,06
Piutang Pajak	11.469.244.505,00	12.453.898.421,00	1.834.804.612,00	1.094.480.431,00	160.729.141	(65,59)
Piutang Retribusi	-	24.052.964,00	1.172.311.700,00	183.731.718,52	47.419.154	25,39
Bagian Lancar Penjualan Angsuran	632.075.875,00	2.280.030.100,00	1.513.937.040,00	1.160.961.700,00	1.438.551.943	22,83
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	117.900.000,00	178.850.000,00	113.950.000,00	101.350.000,00	475.096.815	41,68
Piutang Lainnya	12.479.017.997,12	19.596.402.698,00	18.130.276.544,75	9.707.797.788,76	46.376.711.642	38,84
Persediaan	13.103.877.981,21	20.270.013.070,24	6.334.788.484,00	18.357.604.345,28	22.284.398.231	14,20
INVESTASI JANGKA PANJANG	76.645.456.815,89	61.741.238.167,28	62.557.805.802,17	67.882.538.313,54	72.600.272.476	(1,35)
Investasi Non Permanen	14.075.000.000,00	8.787.330.700,00	8.430.910.172,00	8.047.617.368,00	7.853.557.373	(13,57)
Dana Bergulir	14.075.000.000,00	14.075.000.000,00	14.075.000.000,00	14.075.000.000,00	14.075.000.000	-
Dana Bergulir diragukan tertagih	-	(5.287.669.300,00)	(5.644.089.828,00)	(6.027.382.632,00)	(6.221.442.627)	5,57
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	-			

Uraian	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Laju (%)
Investasi Permanen	62.570.456.815,89	52.953.907.467,28	54.126.895.630,17	59.834.920.945,54	64.746.715.103	0,86
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	62.570.456.815,89	52.953.907.467,28	54.126.895.630,17	59.834.920.945,54	64.746.715.103	0,86
ASET TETAP	2.211.141.518.941,00	2.085.489.675.500,00	2.486.119.519.282,00	2.881.576.356.479,00	2.991.861.997.423	7,85
Tanah	552.433.521.521,00	261.871.117.477,00	476.259.923.481,00	478.336.641.733,00	265.955.874.910	(16,70)
Peralatan dan Mesin	246.461.008.028,24	274.728.502.246,00	346.553.804.748,00	426.063.237.151,00	485.829.538.967	18,49
Gedung dan Bangunan	686.399.554.704,00	744.918.046.030,00	794.032.106,00	991.428.301.738,00	1.139.451.135.873	13,51
Jalan, Jaringan dan Instalasi	710.620.654.011,05	768.169.860.308,00	821.644.834.370,00	903.592.025.461,00	1.035.326.451.608	9,87
Aset Tetap Lainnya	14.739.419.676,71	34.906.960.943,00	36.886.866.743,00	59.903.266.046,00	60.188.027.046	42,15
Konstruksi dalam Pengerjaan	487.361.000,00	895.188.496,00	10.741.983.472,00	22.252.884.350,00	5.110.969.019	79,95
DANA CADANGAN	0,00	-	5.000.000.000,00	10.292.184.209,00	0,00	
Dana Cadangan	0,00	-	5.000.000.000,00	10.292.184.209,00	0,00	
ASET LAINNYA	4.463.081.236,10	6.822.199.801,20	6.821.998.623,00	2.833.663.451,00	2.737.823.885,00	(11,50)
Aset Rusak Berat	4.463.081.236,10	6.822.199.801,20	6.821.998.623,00	2.833.663.451,00	2.737.823.885,00	(11,50)
KEWAJIBAN	354.370.913,95	3.826.922.743,00	15.643.466.414,00	30.065.125.490,00	68.618.324.493,00	275,44
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	251.370.913,95	3.732.922.743,00	15.643.466.414,00	30.065.125.490,00	68.618.324.493,00	306,47
Utang Pada Pihak Ketiga	251.370.913,95	144.793.721,00	2.208.022.004,00	1.943.602.000,00	3.461.524.500,00	92,64
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	3.588.129.022,00	13.341.444.410,00	28.121.523.490,00	65.156.799.993,00	(100,00)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	94.000.000,00	94000000,00	94000000,00	0,00	0,00	(100,00)
Penerimaan Diterima Dimuka	94.000.000,00	94000000,00	94000000,00	0,00	0,00	(100,00)

Uraian	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Laju (%)
EKUITAS DANA	2.429.049.772.828,37	2.299.527.123.167,72	2.686.216.466.981,92	3.027.354.225.122,10	3.133.133.862.903	6,57
EKUITAS DANA LANCAR	136.893.715.835,38	145.568.009.699,24	113.000.225.777,00	64.769.482.669,56	65.933.769.119	(16,69)
SILPA	98.935.978.865,00	90.263.529.884,00	125.811.143.274,75	64.013.718.926,00	63.705.483.186	(10,42)
Pendapatan yang ditangguhkan	388.991.592,00	4.234.155.305,00	-	214.963.250,00	63.703.500	(36,39)
Cadangan Piutang	24.698.238.371,12	34.533.234.183,00	10.230.107.367,00	12.037.209.399,52	48.166.830.747	18,17
Cadangan Asuransi Dibayar Dimuka	-	-	-	211.112.238,76	331.677.948	(74,61)
Cadangan Persediaan	13.103.877.981,21	20.270.013.070,24	18.130.276.544,75	18.357.604.345,28	22.284.398.231	14,20
Dana Yang Harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(251.370.913,95)	(3.732.922.743,00)	(15.549.466.414,00)	(30.065.125.490,00)	(68.618.324.493)	306,47
						-
EKUITAS DANA INVESTASI	2.292.156.056.992,99	.153.959.113.468,48	2.555.405.323.707,17	2.952.292.558.243,54	3.067.200.093.784	7,55
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	76.645.456.815,89	61.741.238.167,28	62.557.805.802,17	67.882.538.313,54	72.600.272.476	(1,35)
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	2.211.141.518.941,00	2.085.489.675.500,00	6.821.998.623,00	2.881.576.356.479,00	2.991.861.997.423	7,85
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	4.463.081.236,10	6.822.199.801,20	2.486.119.519.282,00	2.833.663.451,00	2.737.823.885	(11,50)
Dana Yang Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(94.000.000,00)	(94.000.000,00)	(94.000.000,00)	-	-	(100,00)
EKUITAS DANA CADANGAN	0,00	-	5.000.000.000,00	10.292.184.209,00		
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0,00	-	5.000.000.000,00	10.292.184.209,00		
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.429.395.143.724,32	2.303.354.045.910,72	2.701.859.933.395,92	3.057.419.350.612,10	3.201.752.187.396	7,15

3.1.2.4 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (current ratio) dan Quick Ratio. Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Sedangkan Quick Ratio adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

Tabel 3.5 Rasio Liquiditas Tahun 2009-2013

No	Rasio Liquiditas	2009	2010	2011	2012	2013	Laju pertumbuhan
1	Rasio Lancar	545,59	40,00	9,04	3,15	1,95	-68,35%
2	Quick Ratio	493,46	4,57	8,63	2,54	1,64	-68,56%

Rasio lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2009 sebesar 545,59 namun tahun 2010 sampai dengan 2013 rasio lancar mengalami penurunan dengan tingkat penurunan rata-rata 68,35 %. Nilai Rasio Lancar pada tahun 2013 sampai pada tingkat 1,95 %. Nilai yang diperoleh ini mengindikasikan bahwa Pemerintah pada tahun 2009-2010 dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun begitu, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang semakin menurun tajam. Nilai rasio yang semakin kecil dapat menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya. Jika ditelusuri penyebabnya, hal ini dapat disebabkan oleh laju pertumbuhan aset lancar yang relatif kecil bahkan cenderung stagnan, namun di sisi lain hutang jangka pendek meningkat tajam dengan laju pertumbuhan sebesar 377,28 %.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (current ratio) karena Quick ratio telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai quick ratio neraca keuangan

Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2009 mencapai 493,46. Namun sebagaimana Rasio Lancar, pada tahun 2010-2013 nilai Quick Ratio juga mengalami penurunan secara drastis dengan laju penurunannya sebesar 68,56%. Pada tahun 2013 sebesar 1,64. Nilai dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kabupaten Cirebon setelah dikurangi persediaan mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

3.1.2.5 Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas.

Table 3.6 Rasio Solvabilitas Tahun 2009-2013

No	Rasio Solvabilitas	2009	2010	2011	2012	2013	Laju pertumbuhan
1	Rasio Kewajiban terhadap aset	0,000146	0,001661	0,005790	0,009833	0,021392	368,72%
2	Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas	0,000146	0,001664	0,005824	0,009931	0,021860	370,33%

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio kewajiban terhadap aset tahun 2009 sebesar 0,000146, tahun 2013 sebesar 0,021392. Semakin besar nilai rasio ini, maka semakin buruk rasio kewajiban terhadap aset. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon selama tahun 2009-2013 cukup kuat untuk membayar jika Pemerintah melakukan pinjaman ke kreditor namun tingkat kemampuan membayar tersebut cenderung menurun dengan laju 368,72 %.

Rasio kewajiban terhadap ekuitas secara langsung membandingkan kewajiban dibagi dengan ekuitas. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2009 sebesar 0,000146, tahun 2013 sebesar 0,021846. Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin

baik rasio kewajiban terhadap ekuitas karena menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membayar kewajibannya.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Kebijakan Pelaksanaan Belanja Aparatur

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon selama 2009-2013, dilihat dari proporsi terhadap Belanja daerah menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2009 proporsi belanja aparatur mencapai 70,63 %. Namun pada tahun 2013 proporsi belanja aparatur hanya mencapai 58,95 %. Ini menunjukkan kinerja pengelolaan belanja daerah yang semakin baik, karena belanja yang bersifat pelayanan masyarakat porsinya semakin meningkat. Namun demikian proporsinya masih diatas 50 %. Ini mengindikasikan bahwa belanja daerah masih lebih banyak digunakan untuk kebutuhan rutin birokrasi dibandingkan untuk memberikan pelayanan publik.

Tabel. 3.5 Proporsi Rasio Belanja Aparatur/Belanja Pegawai Berdasarkan Realisasi Anggaran Tahun 2009-2013

Tahun	Belanja Aparatur			Total Belanja Daerah	Proporsi Belanja Aparatur
	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah		
2009	773.534.417.841,00	82.648.356.121,00	856.182.773.962,00	1.212.197.559.304,00	70,63%
2010	997.750.081.295,00	84.068.133.478,00	1.081.818.214.773,00	1.488.743.155.743,00	72,67%
2011	940.312.470.023,00	121.393.972.074,00	1.061.706.442.097,00	1.749.525.592.819,00	60,69%
2012	1.073.334.636.882,00	118.638.969.489,00	1.191.973.606.371,00	2.033.136.939.599,00	58,63%
2013	1.248.557.039.626,00	121.702.423.998,00	1.370.259.463.624,00	2.324.459.340.602,00	58,95%

Sumber: Bagian Keuangan 2009-2013

3.2.2 Pembiayaan Daerah

Kondisi pembiayaan daerah dipengaruhi oleh sisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Selama kurun waktu 2009-2013, APBD Kabupaten Cirebon mengalami tiga kali defisit anggaran dan dua kali surplus anggaran. Pada awal pelaksanaan RPJMD 2009-2014, APBD Kabupaten Cirebon mengalami surplus anggaran mencapai Rp 77.534.962.418,00 kemudian mengalami defisit pada tahun 2010 sebesar Rp 5.367.699.213,00. Pada tahun 2011, APBD mengalami surplus kembali sebesar Rp 31.717.495.893,00. Sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 berturut-turut APBD

kembali mengalami defisit masing-masing sebesar Rp 38.871.626.891,00 dan Rp 8.434.517.344,00.

Kondisi APBD yang mengalami surplus dan deficit tersebut berpengaruh dominan terhadap jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun berkenaan dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap total penerimaan pembiayaan pada tahun selanjutnya. Selain itu penerimaan pembiayaan juga didapat dari pencairan dana cadangan dan penerimaan piutang daerah.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan lebih banyak digunakan untuk investasi pemerintah untuk pembiayaan BUMD, baik Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun PDAM. Selain itu pengeluaran pembiayaan juga dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan dalam rangka kebutuhan pendanaan pemilihan kepala daerah yang baru. Secara lengkap kondisi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel 3.6

**Tabel 3.6 Pembiayaan Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2013**

U R A I A N	TAHUN ANGGARAN 2009			TAHUN ANGGARAN 2010			TAHUN ANGGARAN 2011		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Surplus/(Defisit) APBD	(36.252.868.736,00)	73.534.962.418,00	-202,84%	(94.981.178.865,00)	(5.367.699.213,00)	5,65%	(81.263.529.884,00)	31.717.495.893,00	-39,03%
PEMBIAYAAN DAERAH									
6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	56.204.129.155,00	33.325.865.853,00		99.481.178.865,00	99.131.229.097,00	99,65%	90.263.529.884,00	90.282.729.884,00	100,02%
6.1.1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	22.860.412.021,00	22.860.412.021,00	100,00%	98.953.978.865,00	98.953.978.865,00	100,00%	90.263.529.884,00	90.263.529.884,00	100,00%
6.1.2. PENCAIRAN DANA CADANGAN	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00%	-	-	#DIV/0!	-	-	
6.1.6. PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	23.343.717.134,00	465.453.832,00	1,99%	527.200.000,00	177.250.232,00	33,62%	-	19.200.000,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	56.204.129.155,00	33.325.865.853,00	59,29%	99.481.178.865,00	99.131.229.097,00	99,65%	90.263.529.884,00	90.282.729.884,00	100,02%
6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	19.951.260.419,00	7.906.849.406,00	39,63%	4.500.000.000,00	3.500.000.000,00	77,78%	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	100,00%
6.2.1. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00%
6.2.2. PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	6.592.386.000,00	6.592.386.000,00	100,00%	4.500.000.000,00	3.500.000.000,00	77,78%	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00%
6.2.3. PEMBAYARAN POKOK UTANG	1.358.874.419,00	1.314.463.406,00	96,73%	-	-		-	-	
6.2.4. PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	12.000.000.000,00	-	0,00%	-	-		-	-	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	19.951.260.419,00	7.906.849.406,00	39,63%	4.500.000.000,00	3.500.000.000,00	77,78%	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	100,00%
Pembiayaan neto	36.252.868.736,00	25.419.016.447,00	70,12%	94.981.178.865,00	95.631.229.097,00	100,68%	81.263.529.884,00	81.282.729.884,00	100,02%
6.4 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	-	98.953.978.865,00		-	90.263.529.884,00		-	113.000.225.777,00	

Lanjutan Tabel 3.6

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2012			TAHUN ANGGARAN 2013		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Surplus/(Defisit)	(102.885.345.817,00)	(38.871.626.891,00)	37,78%	(81.455.581.336,00)	(8.434.517.344,00)	10,35%
PEMBIAYAAN DAERAH						
6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	113.000.225.777,00	113.000.225.777,00	100,00%	74.013.718.926,00	74.945.754.539,00	101,26%
6.1.1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	113.000.225.777,00	113.000.225.777,00	100,00%	64.013.718.926,00	64.013.718.926,00	100,00%
6.1.2. PENCAIRAN DANA CADANGAN	-	-		10.000.000.000,00	10.932.035.613,00	109,32%
6.1.6. PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	-	-		-	-	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	113.000.225.777,00	113.000.225.777,00	100,00%	74.013.718.926,00	74.945.754.539,00	101,26%
6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.114.879.960,00	10.114.879.960,00	100,00%	4.092.135.485,00	2.792.575.856,00	68,24%
6.2.1. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00%			
6.2.2. PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00%	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00%
6.2.3. PEMBAYARAN POKOK UTANG	2.114.879.960,00	2.114.879.960,00	100,00%	2.092.135.485,00	792.575.856,00	37,88%
6.2.4. PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	-	-		-	-	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.114.879.960,00	10.114.879.960,00	100,00%	4.092.135.485,00	2.792.575.856,00	68,24%
Pembiayaan neto	102.885.345.817,00	102.885.345.817,00	100,00%	69.921.583.441,00	72.153.178.683,00	103,19%
6.4 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	-	64.013.718.926,00		(11.533.997.895,00)	63.718.661.339,00	-552,44%

Dari tabel 3.6 terlihat bahwa pada tahun 2009-2013 Pemerintah Kabupaten Cirebon mempunyai sisa lebih tahun berjalan yang merupakan surplus riil yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar. Sisa Lebih yang terdapat pada APBD Kabupaten Cirebon sebagian besar berasal dari tertundanya belanja langsung program dan Kegiatan.

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya. Sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Tabel 3.7.
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta
Prioritas Utama Kabupaten Cirebon

No	Uraian	Data Tahun Dasar 2013 (Milyar Rp)	Laju 2010-2013 (%)
A.	Belanja Tidak Langsung	1.248,59	13,22
1	Belanja Pegawai	1.248,56	13,23
2	Belanja Bunga		
3	Belanja bagi Hasil	0,03	(46,64)
B.	Belanja Langsung	130,18	19,36
1	Belanja Honorarium PNS, khusus guru dan tenaga medis	33,33	11,70
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,71	(22,50)
3	Belanja premi asuransi kesehatan	1,70	27,33

No	Uraian	Data Tahun Dasar 2013 (Milyar Rp)	Laju 2010-2013 (%)
3	Belanja Jasa Kantor (Khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	82,88	23,37
4	Belanja Sewa Gedung Kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	9,27	23,81
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	2,29	7,56
C.	Pembiayaan Pengeluaran	0,79	~
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	
2	Pembayaran pokok utang	0,79	~
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	1.379,56	13,77

Sumber: Bagian Keuangan Setda

Pertumbuhan belanja periodik prioritas utama untuk belanja tidak langsung Kab Cirebon berasal dari belanja pegawai adalah sebesar 13.22 %. Sedangkan untuk belanja langsung pertumbuhan mencapai 19.36 %, sehingga rata-rata total pertumbuhan untuk belanja mengikat prioritas utama adalah sebesar 13.77 %.

3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu

Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan anggaran adalah pendapatan daerah. Ini karena akan berkaitan dengan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik.

Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk lima tahun kedepan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun kebelakang. Adapun proyeksi untuk lima tahun kedepan, meliputi proyeksi pendapatan, serta proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama.

3.3.2.1 Proyeksi pendapatan

Dalam hal proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan pertumbuhan rata-rata pendapatan selama lima tahun dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Proyeksi pendapatan ini mengacu pada rata-rata pertumbuhan pendapatan selama lima tahun (2009-2013).

Berdasarkan penghitungan tersebut, proyeksi pendapatan untuk tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp 2,653.8 - 2,711.8 miliar, dan meningkat menjadi Rp 3,027.5 - 3,161.9 miliar pada tahun 2015. Diproyeksikan pada akhir periode RPJMD 2014-2019, pendapatan akan menjadi Rp. 5,057.6 - 5,761.4 miliar. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Dana Perimbangan.

Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Adapun proyeksi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8. Proyeksi Pendapatan Daerah (miliar rupiah)

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	laju (%)
I.	PENDAPATAN	2.754,37	3.167,02	3.647,18	4.207,56	4.860,63	5.624,09	15,35
1	Pendapatan Asli Daerah	403,46	459,47	526,38	607,56	704,52	822,19	15,30
a	Pajak Daerah	139,83	166,06	199,64	243,4	298,53	369,39	21,44
b	Retribusi Daerah	107,52	119,41	132,69	147,52	164,1	182,65	11,18
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang dipisahkan	8,65	9,3	10,1	11,18	12,41	13,84	9,86
d	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	147,46	164,7	183,95	205,46	229,48	256,31	11,69
2	Dana Perimbangan	1.590,29	1.802,24	2.043,01	2.316,54	2.627,34	2.980,51	13,39
a	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	81,9	92,32	104,08	117,33	132,27	149,12	12,73
b	Dana Alokasi Umum	1.406,86	1.602,10	1.824,42	2.077,60	2.365,92	2.694,24	13,88
c	Dana Alokasi Khusus	101,53	107,82	114,51	121,61	129,15	137,15	6,2
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	760,62	905,31	1077,79	1283,46	1528,77	1821,39	19,08
a	Hibah	0	0	0	0	0	0	0
b	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0	0
c	Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi dan Pemerintah daerah lainnya	183,73	220,5	264,63	317,59	381,15	457,42	20,01
d	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	419,18	503,02	603,62	724,34	869,21	1.043,06	20
e	Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya	157,71	181,79	209,54	241,53	278,41	320,91	15,27

Tabel 3.9
Proyeksi Kontribusi Jenis Pendapatan Terhadap Pendapatan Daerah (%)

Uraian	Kontribusi (%)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PAD	14,65	13,10	13,54	14,04	14,49	14,62
Dana perimbangan	57,74	51,38	52,55	53,53	54,05	53,00
Penerimaan lainnya yang sah	27,62	35,53	33,91	32,43	31,45	32,39
Total	100	100	100	100	100	100

3.3.2.2 Proyeksi belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama

Proyeksi Belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama tahun 2014-2019 diproyeksikan cenderung meningkat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10 Proyeksi Belanja Dan Pengeluaran
Wajib, Mengikat Serta Prioritas Utama (Miliar Rupiah) (Prioritas I)

NO	Uraian	Tahun Dasar 2013 (Milyar Rp)	Tingkat pertumbuhan (%)	Proyeksi					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A.	Belanja Tidak Langsung	1.248,59	13,22	1.413,68	1.573,04	1683,15	1800,97	1927,04	2061,93
B.	Belanja Langsung	118,62	10,50	130,90	131	159,67	176,45	195,04	215,63
	TOTAL	1.366,11	23,72	1544,58	1704,04	1842,82	1977,42	2122,08	2277,56

Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat, serta prioritas utama diproyeksikan mengalami peningkatan dari Rp 1,544.58 milyar di tahun 2014 menjadi sebesar Rp 2,846.00 milyar di tahun 2019. Belanja tidak langsung dalam hal ini merupakan bagian yang sangat dominan dalam total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat, serta prioritas utama.

3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk kurun waktu 5 tahun mendatang (2014-2019), kapasitas kemampuan keuangan daerah Kab Cirebon diharapkan akan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah.

Berdasarkan data dalam kurun waktu 5 tahun 2009-2013 daya serap anggaran, pada belanja langsung rata-rata hanya mampu menyerap 91.42 % anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

- Jenis belanja pegawai daya serap sebesar 93.83 %
- Jenis belanja barang dan jasa sebesar 95.38 %
- Jenis belanja modal sebesar 85.34%

Berdasarkan data tersebut diatas SiLPA akan terjadi, diskenariokan sebesar 4 % pada setiap tahunnya. Akan tetapi, apabila SiLPA pada akhir tahun terealisasi diatas 4 %, selisih tersebut akan diprioritaskan pada dana cadangan, penyertaan modal, penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, serta belanja peningkatan jaminan sosial.

Perkiraan kapasitas kemampuan daerah dapat disajikan secara indikatif yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahun. Selengkapny secara indikatif tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.11
Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon (Miliar Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendapatan	2.754,36	3.508,00	3.887,56	4.327,22	4.860,63	5.624,09
2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran		105,09	131,31	7,37	7,07	7,10
	Total Kapasitas Kemampuan Keuangan daerah	2.754,36	3.613,09	4.018,87	4.334,59	4.867,70	5.631,19

3.3.4 Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, kebijakan alokasi anggaran pemerintah daerah digunakan untuk membiaya urusan wajib dan urusan pilihan yang selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi kedalam tiga kelompok prioritas dengan uraian sebagai berikut.

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai belanja dan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan:

- a. Program unggulan dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati Cirebon) periode 2014-2019, yang seiring dengan amanat RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
- b. Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar dan tugas dan fungsi SKPD.

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasiannya Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. Berkaitan dengan hal tersebut Alokasi kerangka pendanaan berdasarkan Prioritas tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.12
Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Jenis Prioritas
Tahun Anggaran 2014-2019 (dalam milyar rupiah)

No	Jenis Dana	Alokasi											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
1	Prioritas I	54,25	1.544,58	47,856	1.745,15	47,626	1.971,92	48,675	2.228,32	47,908	2.518,22	45,962	2.846,00
	Belanja Tidak Langsung	49,66	1.413,68	43,136	1.573,04	40,651	1683,15	39,340	1800,97	36,661	1927,04	33,299	2061,93
	Belanja Langsung	4,6	130,9	3,592	131	3,856	159,67	3,854	176,45	3,711	195,04	3,482	215,63
	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0,206	7,5	0,181	7,5	0,164	7,5	0,143	7,5	0,121	7,5
2	Prioritas II	41,03	1.168,01	36,753	1340,27	37,647	1.558,76	37,239	1.704,81	39,025	2.051,27	42,131	2.608,81
3	Prioritas III	4,72	134,41	15,391	561,259	14,728	609,79	14,086	644,86	13,067	686,85	11,907	737,31
	Belanja Subsidi	0	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0
	Belanja Hibah	1,2	34,16	1,754	63,96	1,185	49,08	1,284	58,8	1,341	70,48	1,366	84,58
	Belanja Bagi Hasil	0,001	0,03	0,005	0,18	0,456	18,88	0,476	21,78	0,479	25,17	0,471	29,17
	Belanja Bantuan Sosial	0,6	17,08	0,290	10,569	0,001	0,04	0,001	0,04	0,001	0,05	0,001	0,06
	Belanja Bantuan Keuangan	2,9	82,56	12,993	473,8	13,067	541,03	12,306	563,37	11,227	590,14	10,050	622,33
	Belanja Tidak Terduga	0,02	0,57	0,350	12,75	0,018	0,76	0,019	0,87	0,019	1,01	0,019	1,17
	Total	100	2.847,00	100,00	3.646,68	100,00	4.140,47	100,00	4.577,99	100,00	5.256,34	100,00	6.192,12

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Telaah Kebijakan

4.1.1. Telaahan Kebijakan Pembangunan Nasional

Hasil telaahan kebijakan pembangunan nasional meliputi :

1. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014*

Dalam RPJMN 2010-2014 terdapat sebelas program prioritas, yaitu:

- a. **Prioritas 1 : reformasi birokrasi dan tata kelola**, Tema: Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel. Taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas Pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah. Kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik.
- b. **Prioritas 2 : pendidikan**, Tema: Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1). Menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan; 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja
- c. **Prioritas 3 : rencana aksi bidang kesehatan**, Tema: Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada tahun 2009 menjadi 72,0 tahun pada tahun 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015.

- d. **Prioritas 4 : penanggulangan kemiskinan**, Tema: Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1 % pada 2009 menjadi 8-10 % pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.
- e. **Prioritas 5 : program aksi dibidang pangan**, Tema: Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
- f. **Prioritas 6 : program aksi di bidang infrastruktur**, Tema: Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- g. **Prioritas 7 : iklim investasi dan iklim usaha**, Tema:Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- h. **Prioritas 8 : program aksi dibidang energi**, Tema: Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya
- i. **Prioritas 9 : program aksi bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana**, Tema: Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklimkebutuhan tenaga kerja.
- j. **Prioritas 10 : daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik**, Tema: Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik.

- k. **Prioritas 11 : kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi**, Tema: Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan.

2. Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka optimalisasi pelayanan publik, perlu didorong percepatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di yang terkait sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar Pelayanan Minimal. Adapun pada tahun 2014 telah dilaksanakan 15 (lima belas) SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang akan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kemampuan kelembagaan personil daerah dalam bidang bersangkutan, dengan rincian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai berikut:

- a. Bidang Kesehatan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang SPM Bidang Kesehatan.
- b. Bidang Lingkungan Hidup, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota.
- d. Bidang Sosial, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

- e. Bidang Perumahan Rakyat, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- g. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55/Hk-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.
- h. Bidang Pendidikan Dasar, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar.
- i. Bidang Pekerjaan Umum, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum.
- j. Bidang Ketenagakerjaan, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15/MEN/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan.
- k. Bidang Ketahanan Pangan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/T.140/12/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- l. Bidang Komunikasi dan Informasi, berdasarkan Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 22/PER/M.Kominfo/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang SPM Bidang Komunikasi dan Informasi.
- m. Bidang Kesenian, berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 106/HK.501/MKP/2010 tentang SPM Bidang Kesenian.

- n. Bidang Penanaman modal, berdasarkan Peraturan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011
- o. Bidang Perhubungan khusus angkutan masal berbasis jalan, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.10 Tahun 2012

3. Millenium Development Goals (MDGs) Indonesia

MDGs bukan hanya merupakan pemenuhan komitmen internasional tetapi merupakan penajaman upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk itu, MDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan Nasional.

Sejalan dengan rencana pembangunan nasional, pengarusutamaan MDGs juga harus dilakukan dalam proses perencanaan di tingkat daerah. Pengarusutamaan MDGs dalam pembangunan daerah diarahkan untuk dapat menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan karakteristik masing-masing daerah.

Konsep MDGs pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak. Adapun kedelapan tujuan pembangunan millenium terdiri dari:

1. Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan;
2. Memberlakukan pendidikan dasar yang universal;
3. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Memperbaiki kesehatan maternal;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya;
7. Menjamin kesinambungan lingkungan hidup; dan
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan

4.1.2 Telaah Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Jawa Barat yang akan dilaksanakan selama 2013 – 2018 adalah :

Misi Pertama, Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing

- 1) **Bidang Pendidikan** melalui **strategi pertama**, menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah dan tinggi dengan biaya terjangkau dengan arah kebijakan (1) pendidikan gratis Dasar dan Menengah (SD,SLTP, dan SLTA) dalam rangka Penuntasan Wajar Dikdas Dua Belas Tahun pada tahun 2018; (2) peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah dan tinggi serta pesantren (3) pendidikan terjangkau bagi anak- anak buruh dan TKI; (4) penyediaan beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, keluarga atlit berprestasi dan guru serta mahasiswa di PTN/PTS; (5) peningkatan akses transportasi sekolah di daerah terpencil. **Strategi kedua** meningkatkan jumlah dan kualitas Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSNN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP dengan arah kebijakan perwujudan Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSNN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP yang berkualitas. **Strategi ketiga**, Menyelenggarakan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan dengan arah kebijakan (1) peningkatan kompetensi melalui pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan (2) Peningkatan kualifikasi pendidik minimal s1/D4; (3) Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan antara lain berupa pembayaran bantuan 20% premi tunjangan pensiun guru non PNS. **Strategi keempat**, Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan usia dini dengan arah Peningkatan pendidikan usia dini di Jawa Barat. **Strategi kelima**, mengembangkan pendidikan inklusif denganarah kebijakan peningkatan pemerataan dan mutu Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan berkebutuhan khusus. **Strategi keenam**, menuntaskan buta Aksara dengan arah kebijakan terwujudnya masyarakat Jawa Barat bebas dari buta aksara.
- 2) **Bidang Kesehatan** melalui **strategi pertama**, Memperkuat pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan dengan **arah**

kebijakan Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan. **Strategi kedua**, Menguatkan pelayanan kesehatan, Pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, gangguan mental serta gangguan gizi dengan **arah kebijakan** penguatan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular gangguan mental serta gizi masyarakat. **Strategi ketiga**, Menguatkan pembiayaan, Sumber daya kesehatan dengan **arah kebijakan** Penguatan Pembiayaan dan sumber daya kesehatan. **Strategi keempat**, Menguatkan manajemen, regulasi, teknologi informasi kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan dengan **arah kebijakan** Penguatan Manajemen, regulasi, system informasi bidang kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan.

- 3) **Bidang Ketenagakerjaan** melalui **strategi pertama**, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan arah kebijakan peningkatan daya saing tenaga kerja. **Strategi kedua**, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dengan arah kebijakan perlindungan, pengawasan dan memberikan bantuan hukum bagi tenaga kerja Jawa Barat. **Strategi ketiga**, perluasan lapangan kerja dengan arah kebijakan (a) Peningkatan penempatan tenaga kerja; (b) Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat berkebutuhan khusus.
- 4) **Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera** melalui strategi meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB dengan arah kebijakan Revitalisasi Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.
- 5) **Bidang Perpustakaan** melalui strategi Mendukung Perpustakaan di Jawa Barat dan meningkatkan sarana dan Prasarana Perpustakaan berbasis IT dengan arah kebijakan perwujudan masyarakat gemar membaca di Jawa Barat.
- 6) **Bidang Ketransmigrasian** melalui **strategi pertama**, menata persebaran penduduk baik didalam maupun keluar wilayah provinsi, dengan arah kebijakan kerjasama bidang ketransmigrasian serta pengembangan kawasan transmigrasi. **Strategi kedua**, Peningkatan kemampuan dan kemandirian calon transmigran, masyarakat Kawasan transmigrasi Lokal (Resettlement) dan warga sekitar dengan arah kebijakan Peningkatan kemampuan melalui pelatihan keterampilan.

- 7) **Bidang Perumahan** melalui strategi meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan dengan arah kebijakan penyediaan rumah untuk rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR)

Misi Kedua, Membangun Perkonomian yang Kokoh dan Berkeadilan,

- 1) **Bidang Pekerjaan Umum** melalui strategi meningkatkan ekonomi perdesaan dengan arah kebijakan (a) dukungan pembangunan jalan di sentra pertanian, wisata dan industri manufaktur, (b) dukungan sarana irigasi di sentra pertanian lahan sawah.
- 2) **Bidang Ketenagakerjaan** melalui strategi mempeluas kesempatan kerja dengan arah kebijakan penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
- 3) **Bidang Penanaman Modal** melalui **strategi pertama** meningkatkan investasi dengan arah kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif. **Strategi kedua**, meningkatkan produktivitas BUMD dan lembaga keuangan lainnya.
- 4) **Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah** melalui **strategi pertama**, meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM dengan arah kebijakan : (a) peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM; (b) peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM.
- 5) **Bidang Ketahanan Pangan** melalui **strategi** meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan, dengan arah kebijakan peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi pangan masyarakat dan penanganan daerah rawan pangan.
- 6) **Bidang Pertanian** melalui **strategi pertama**, mempertahankan dan menggantikan luas baku lahan sawah yang beralih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dengan arah kebijakan mencetak lahan sawah baru untuk mencapai lahan pertanian berkelanjutan. **Strategi kedua**, meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan dan peternakan, dengan arah kebijakan

(a) peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan; (b) peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan; (c) peningkatan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak; (d) pengembangan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran produk pertanian, perkebunan, dan peternakan.

- 7) **Bidang Perikanan dan Kelautan** melalui **strategi**, meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya dan tangkap serta pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautanterutama perikanan komersil di Pantai Selatan dan Pantai Utara melalui gerakan pengembangan perikanan pantai utara dan pantai selatan (GAPURA) dengan arah kebijakan (a) peningkatan produksi perikanan dan kelautan; (b) peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan.
- 8) **Bidang Kehutanan**, melalui **strategi**, meningkatkan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan, dengan arah kebijakan peningkatan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
- 9) **Bidang Pariwisata** melalui **strategi**, meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli, dengan arah kebijakan pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, ziarah) dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali.
- 10) **Bidang Perindustrian** melalui **strategi**, meningkatkan daya saing industri, dengan arah kebijakan (a) peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan kemitraan antar industri; (b) peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan (industri kreatif, industri telematika, industri agro, industri tekstil dan produk tekstil, industri komponen otomotif serta industri alas kaki).
- 11) **Bidang Perdagangan** melalui **strategi**, meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional, dengan arah kebijakan (a) peningkatan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri; (b)

peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien;(c) Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan dan pasar tradisional;

- 12) **Bidang Penataan Ruang** melalui **strategi** menguatkan ekonomi regional, dengan arah kebijakan (a) pengembangan Metropolitan Bodebek Karpur, Metropolitan Bandung Raya, dan Metropolitan Cirebon Raya; (b) pengembangan pusat pertumbuhan Pangandaran, Palabuhanratu, dan Rancabuaya.
- 13) **Bidang Perhubungan** melalui **strategi** meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional, dengan arah kebijakan pengembangan sistem transportasi laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnya.

Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik,

- 1) **Bidang Perencanaan Pembangunan** melalui **strategi** meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dengan arah kebijakan (a) Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, (b) Meningkatkan kualitas perencanaan daerah, (c) Peningkatan kualitas penelitian dan riset perencanaan pembangunan daerah.
- 2) **Bidang Komunikasi dan Informatika** melalui **strategi** meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan arah kebijakan: (1) pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan; (2) peningkatan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik menuju *cyber province*
- 3) **Bidang Pertanahan** melalui **strategi** meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dengan arah kebijakan mewujudkan tertib administrasi pertanahan.
- 4) **Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri** melalui **strategi pertama**, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hak dan kewajiban politik sebagai warga Negara, dengan arah kebijakan (a) Meningkatkan

fungsi partai politik dalam pendidikan politik, (b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik, (c) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu. **Strategi kedua**, Memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara, dengan arah kebijakan Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara.

- 5) **Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**, melalui **Strategi pertama**, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan arah kebijakan (a) Penataan struktur organisasi yang proporsional, (b) Peningkatan pelayanan administrasi organisasi, (c) Penuntasan kejelasan batas administrasi daerah, (d) Percepatan Penanganan dan Pelayanan kepada masyarakat, (e) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pengembangan zona integritas, (f) Pengaturan pengelolaan keuangan daerah, (g) Peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, (h) Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, (i) Peningkatan penerimaan daerah sesuai dengan potensi, (j) Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (k) Peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dalam menyelesaikan aset-aset daerah yang bermasalah, (l) Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), (m) Peningkatan Pengawasan internal untuk mendukung tata kelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, (n) Penataan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. **Strategi kedua**, Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, dengan arah kebijakan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparat. **Strategi ketiga** Meningkatkan kerjasama pembangunan, dengan arah kebijakan (a) Peningkatan Kerjasama Kemitraan Strategis lintas provinsi, pemerintahan pusat, dan kabupaten/kota, (b) Peningkatan Kualitas pengelolaan kerjasama Jawa Barat melalui aliansi strategis multi pihak dalam dan luar negeri. **Strategi keempat**, Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah, dengan arah

kebijakan (a) Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku aparatur berbasis kompetensi, (b) Meningkatkan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja. **Strategi kelima**, Menata sistem hukum di daerah, dengan arah kebijakan (a) Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, (b) Peningkatan Penyelarasan peraturan daerah, (c) Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya. **Strategi keenam**, Meningkatkan budaya taat hukum, dengan arah kebijakan peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perundangan dan HAM. **Strategi ketujuh**, Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan arah kebijakan (a) Peningkatan pembinaan tibumtranmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya, (b) Peningkatan kuantitas dan kualitas Pol PP dan PPNS Se Jawa Barat. **Strategi kedelapan**, meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik sebagai warga negara dengan arah kebijakan peningkatan kapasitas lembaga legislatif dan intensitas komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD.

- 6) **Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**, melalui **strategi** meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat, dengan arah kebijakan (a) Peningkatan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan kemampuan keuangan dan sarana prasarana pemerintahan desa, (b) Peningkatan pembinaan bagi aparat desa, (c) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, (d) Meningkatkan Infrastruktur Perdesaan.
- 7) **Bidang Statistik**, melalui **strategi** Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dengan arah kebijakan (a) Peningkatan pengelolaan Satu Data Pembangunan.
- 8) **Bidang Kearsipan**, melalui **strategi** Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dengan arah kebijakan Mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan

- 1) **Bidang Lingkungan Hidup** dengan **strategi pertama**, menurunkan beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana dengan arah kebijakan (a) peningkatan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta penerapan teknologi bersih untuk industri; (b) peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. **Strategi kedua**, meningkatkan kualitas dan fungsi kawasan lindung dengan arah kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan kawasan lindung hutan dan non hutan. **Strategi ketiga**, meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup dengan arah kebijakan : (a) peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, dan (b) peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir dan laut.
- 2) **Bidang Pekerjaan Umum** dengan **strategi pertama**, meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang, dengan arah kebijakan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat. **Strategi kedua**, meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air dengan arah kebijakan (a) peningkatan konservasi sumber daya air; (b) peningkatan pendayagunaan sumber daya air, (c) peningkatan pengendalian daya rusak air, (d) pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi. **Strategi ketiga**, meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman dengan arah kebijakan (a) peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum; (b) peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik; (c) peningkatan cakupan layanan persampahan; (d) peningkatan ketersediaan drainase perkotaan, dan (e) pengembangan lingkungan permukiman sehat. **Strategi keempat**, meningkatkan pelayanan jasa konstruksi dan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah Negara dengan arah kebijakan : (a) peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi, dan (b) peningkatan

pengelolaan bangunan gedung/rumah negara.

- 3) **Bidang Penataan Ruang** melalui strategi, meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing dengan arah kebijakan: (a) perwujudan harmonisasi dalam pemanfaatan, penataan dan pengendalian ruang pada seluruh Kawasan Strategis Provinsi (KSP); (b) peningkatan kinerja perencanaan ruang; (c) peningkatan kinerja pemanfaatan ruang; dan (d) peningkatan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang.
- 4) **Bidang Perumahan** melalui strategi, meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan dengan arah kebijakan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian.
- 5) **Bidang Perhubungan** melalui strategi mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang serta mengembangkan sistem transportasi publik regional yang nyaman dengan arah kebijakan: (a) pengembangan sistem transportasi darat dan perkeretaapian serta sistem transportasi massal (Mass Rapid Transport); (b) pengembangan sistem transportasi udara; (c) pengembangan sistem transportasi laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnya, dan (d) peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan.
- 6) **Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**, melalui **strategi pertama** meningkatkan penyediaan infrastruktur energi ketenagalistrikan, dengan arah kebijakan meningkatkan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan. **Strategi kedua**, mengembangkan sumber energi baru terbarukan dan konservasi energi, sumber daya mineral, geologi dan air tanah, dengan arah kebijakan (a) meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan; (b) meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber energi panas bumi; (c) Meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya mineral, geologi, dan air tanah; (d) meningkatkan pengusahaan dan nilai tambah produksi sumber daya mineral. **Strategi ketiga**, optimalisasi penanganan dan mitigasi bencana alam geologi, dengan arah kebijakan

pengembangan upaya penanganan dan mitigasi bencana alam geologi.

Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni Dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.

- 1) **Bidang Pemuda dan Olah Raga** melalui **strategi pertama**, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga dengan arah kebijakan pendudukan pembangunan gelanggang olah raga di kota/kabupaten. **Strategi kedua**, meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan dengan arah kebijakan peningkatan pembinaan olahragawan. **Strategi ketiga**, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dengan arah kebijakan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga. **Strategi keempat**, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri dengan arah kebijakan (a) Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan; (b) peningkatan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif.
- 2) **Bidang Kebudayaan** melalui **strategi pertama**, Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah dengan arah kebijakan pelestarian budaya lokal. **Strategi kedua**, Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permusiuman, dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya daerah, dengan arah kebijakan terwujudnya Jawa Barat sebagai pusat budaya. **Strategi ketiga**, Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan perfilman daerah; dengan arah kebijakan meningkatkan pelestarian seni dan perfilman daerah serta meningkatnya kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya. **Strategi keempat**, Meningkatkan pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam bidang seni dan budaya dengan arah kebijakan meningkatnya perlindungan dan pengakuan atas seni dan budaya daerah. **Strategi kelima**, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Bidang Seni dan Budaya dengan arah kebijakan (a) Peningkatan penghargaan dan pembinaan kepada seniman, budayawan, komunitas seni, budaya dan pariwisata serta masyarakat; (b) peningkatan kualitas dan kuantitas

pusat gelar karya seni dan budaya di Kabupaten/Kota.

- 3) **Bidang Sosial** melalui **strategi pertama**, mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui sistem panti dan luar panti atau berbasis masyarakat/ komunitas, serta bantuan kepada korban bencana dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya. Arah kebijakan : meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial terhadap PMKS dan penghargaan kepada para Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI)/Janda PKRI dan keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial; **Strategi kedua**, meningkatkan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS, dengan arah kebijakan pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial.
- 4) **Bidang Agama** melalui **strategi kesatu**, meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan pemahaman pengamalan agama dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik inter umat beragama. **Strategi kedua**, meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan dengan arah kebijakan penguatan lembaga keagamaan.
- 5) **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** melalui **strategi pertama**, meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha bagi perempuan dengan arah kebijakan peningkatan upaya pemberdayaan, pengetahuan, keterampilan dan kemandirian perempuan. **Strategi kedua**, mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dengan arah kebijakan pemberdayaan gender/ pemberdayaan perempuan. **Strategi ketiga**, mencegah dan menangani perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*) dengan arah kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*). **Strategi keempat**,

mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) dan mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan mandiri dengan arah kebijakan (1) terwujudnya kota dan kabupaten di Jawa Barat sebagai kota layak anak; (2) pengokohan ketahanan keluarga,(3) Pengendalian dan menata kependudukan

Kebijakan umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada RPJMD 2013-2018 diarahkan untuk:

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kualitas dan sebaran layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta peningkatan kapabilitas sumberdaya manusia Jawa Barat;
2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan dimaknai melalui kebijakan pengembangan kemampuan dan daya saing ekonomi Jawa Barat berbasis potensi lokal;
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tatakelola dan perluasan partisipasi publik dimaknai melalui kebijakan penyelenggaraan *good governance* yang bermutu, akuntabel, toleran dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kuantitas, kualitas dan pelayanan infrastruktur wilayah serta pengendalian tata ruang berbasis daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana serta peningkatan penciptaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
5. Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olahraga, seni, budaya dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal dimaknai melalui kebijakan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbasis potensi lokal.

Sementara, kebijakan kewilayahan pembangunan Jawa Barat pada tahun 2013-2018 diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan kawasan strategis dengan membagi peran strategis

pembangunan kewilayahan. Fokus tersebut memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan strategis dan kawasan sekitarnya.

Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan Jawa Barat adalah:

1. Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana, terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor dan tertuang dalam suatu rencana tata ruang. Selanjutnya rencana tata ruang tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan;
2. Peningkatan percepatan pembangunan wilayah tertinggal agar dapat sejajar dengan wilayah lainnya melalui pendekatan peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarannya;
3. Peningkatan keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan perkotaan diarahkan agar dapat menjadi pusat koleksi dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang akan menjadi pusat produksi agroindustri/agropolitan dan sektor lainnya.
4. Peningkatan kerjasama antar daerah khususnya di kawasan metropolitan dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi untuk menciptakan sinergitas dan integrasi wilayah, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaannya.
5. Peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan dengan arah kebijakan wilayah untuk wilayah perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah :
 - 1) Bidang Sosial dan Pemerintahan :
 - a) Kesehatan, dengan fokus penanganan keluarga miskin;
 - b) Pendidikan, dengan fokus praktek kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pendataan siswa;
 - c) Batas wilayah, dengan fokus penetapan batas wilayah dan pembangunan tugu batas.

2) Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup :

- a) Penataan Ruang dan Permukiman, dengan fokus koordinasi penataan ruang;
- b) Lingkungan Hidup, dengan fokus pengelolaan daerah aliran sungai;
- c) Pengelolaan Sumberdaya Air, dengan fokus pembangunan bendung/waduk dan normalisasi sungai serta rehabilitasi jaringan irigasi;
- d) Infrastruktur Jalan dan Jembatan, dengan fokus pembangunan dan peningkatan jalan serta pembangunan jembatan;
- e) Perhubungan, dengan fokus pembangunan PJU serta sinkronisasi fungsi dan kelas jalan.

3) Bidang Ekonomi :

- a) Pertanian, dengan fokus pemberantasan hama, pertanian multi aktivitas (padi-ternak), serta relokasi dan optimalisasi *check point* ternak dan hasil hutan;
- b) Perdagangan dan Jasa, dengan fokus pembangunan dan penataan pasar kecamatan;
- c) Pariwisata, dengan fokus koordinasi dan pengembangan paket wisata.

Skenario Pembangunan berbasis kewilayahan (tematik kewilayahan) yang berdasarkan kepada wilayah koordinasi pemerintahan dan pembangunan (WKPP) III (Wilayah Cirebon) adalah :

- 1) Mengembangkan agribisnis buah-buahan, tebu dan industrialisasi perikanan, sentra ternak sapi perah, sapi potong, kerbau dan unggas lokal;
- 2) Mengembangkan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija;
- 3) Mengembangkan industri batik dan rotan, serta industri makanan olahan berbahan baku lokal;
- 4) Melestarikan keraton, wisata sejarah dan mengembangkan ekowisata;
- 5) Mengembangkan Metropolitan Cirebon Raya serta Kawasan BIJB dan Aerocity Kertajati.

Selain itu, Pemerintah juga telah menetapkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), terdiri dari :
 - a. PKN Jabodetabek, meliputi Provinsi Jabar, DKI dan Banten;
 - b. PKN Bandung Raya;
 - c. PKN Cirebon.
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), terdiri dari :
 - a. PKW Sukabumi;
 - b. PKW Palabuhanratu;
 - c. PKW Cikampek - Cikopo;
 - d. PKW Kadipaten;
 - e. PKW Pangandaran;
 - f. PKW Indramayu;
 - g. PKW Tasikmalaya;

4.1.3 Telaah kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota perbatasan

Penyusunan kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon memperhatikan kebijakan pemerintah daerah di wilayah perbatasan dengan uraian sebagai berikut.

4.1.3.1 Kota Cirebon

Pembangunan komunikasi dalam rangka penyelesaian batas daerah dengan Kabupaten Cirebon yaitu upaya penyelesaian dan penegasan batas daerah antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon

4.1.3.2 Kabupaten Kuningan

- Pengendalian potensi konflik daerah perbatasan
- Pembangunan daerah perbatasan
- Peningkatan kerja sama antar daerah
- Peningkatan koordinasi dan percepatan pembangunan wilayah perbatasan melalui Percepatan penyediaan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan

- Penyelenggaraan musyawarah pembangunan regional
- Peningkatan kerja sama ekonomi masyarakat melalui aktivitas perdagangan lintas batas
- Peningkatan kerja sama sosial budaya melalui kegiatan olah raga dan seni
- Pelaksanaan koordinasi kebijakan lingkungan makro secara regional

4.1.3.3 Kabupaten Brebes

- Pengembangan wilayah perbatasan

4.1.3.4 Kabupaten Majalengka

- Memfasilitasi kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan kabupaten/kota;
- Mengembangkan pola-pola kerjasama pembangunan lintas batas dengan kabupaten;
- Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan pada kawasan koridor secara selektif yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai;

4.1.3.5 Kabupaten Indramayu

- Pengembangan wilayah perbatasan

4.1.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon

Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon tahun 2011-2031, pola pengembangan wilayah Kabupaten Cirebon terbagi dalam sistem perkotaan dan sistem perdesaan, dengan struktur dan pola ruang sesuai dengan potensi sumber daya yang ada.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala Kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air,

termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

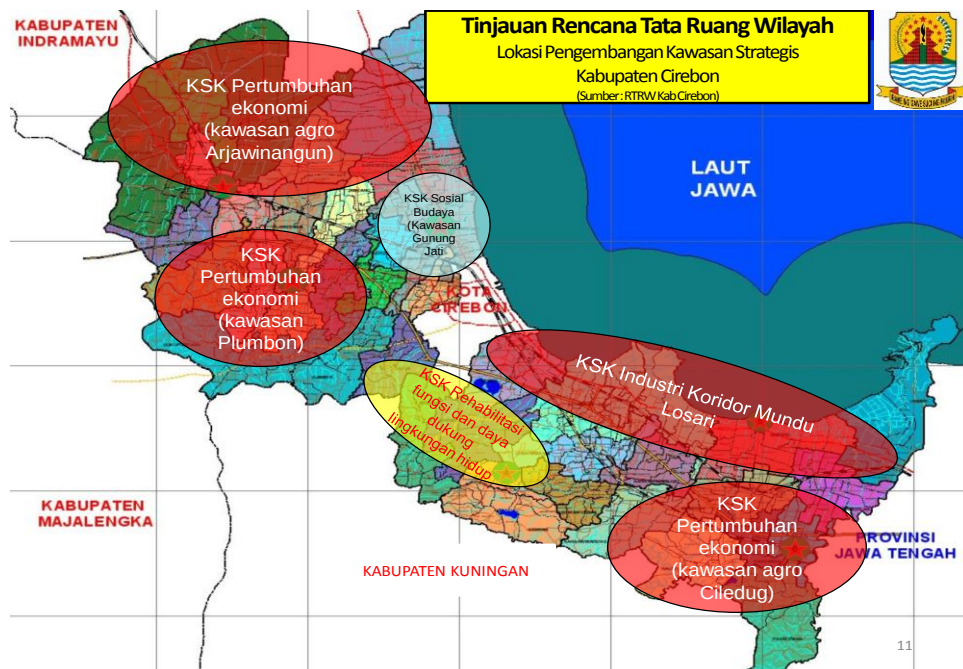
Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan; Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai sentra pertanian, industri dan pariwisata sebagai pendukung PKN Cirebon yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah. Kebijakan Penataan Ruang meliputi :

- a. Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan terpadu dengan strategi meliputi :
 1. Meningkatkan akses jalan dari sentra industri ke pusat pemasaran;
 2. Mengembangkan kawasan agropolitan;
 3. Mengembangkan kawasan minapolitan; dan
 4. Mempertahankan luas pertanian tanaman pangan dan perikanan sebagai basis perekonomian kabupaten

- b. Pengembangan kawasan industri, agroindustri, serta industri kecil dan mikro sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia dengan strategi meliputi :
 - 1. Mengoptimalkan sentra industri dan pengembangan kawasan industri di bagian tengah hingga bagian utara;
 - 2. Meningkatkan penataan sentra industri kecil dan mikro serta industri menengah;
 - 3. Meningkatkan infrastruktur penunjang kegiatan industri.
- c. Pengembangan wisata agro dan wisata religi dengan memanfaatkan potensi alam serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya dengan strategi meliputi :
 - 1. Mengembangkan kawasan wisata agro, wisata religi, wisata budaya, wisata bahari, dan wisata alam; dan
 - 2. Mengembangkan infrastruktur penunjang kegiatan pengembangan kawasan wisata.
- d. Pengembangan pusat pelayanan bersinergis didukung prasarana wilayah dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan strategi meliputi :
 - 1. Meningkatkan akses jaringan jalan antar PKL dengan arteri primer, PPK dengan kolektor primer dan PPL dengan lokal primer;
 - 2. Meningkatkan pengawasan terhadap ketinggian bangunan, Building Coverage Ratio (BCR), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
 - 3. Mengembangkan prasarana wilayah terinterkoneksi;
 - 4. Mengembangkan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung lingkungan dan penduduk; dan
 - 5. Memantapkan keterkaitan fungsional antar PKL, PPK, dan PPL.
- e. Pengembangan dan pelestarian kawasan berfungsi lindung sesuai dengan fungsi dan potensi sumberdaya alam dengan strategi meliputi :
 - 1. Mempertahankan kawasan yang berfungsi lindung sesuai dengan fungsinya;
 - 2. Mengembangkan infrastruktur penunjang kawasan berfungsi lindung; dan

3. Melestarikan kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.
- f. Pendistribusian penduduk sesuai dengan pengembangan sistem perkotaan dengan strategi meliputi :
1. Menetapkan distribusi kepadatan penduduk untuk setiap pusat pelayanan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 2. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan standar tingkat pelayanan penduduk
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dengan strategi meliputi :
1. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 2. Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budidaya terbangun; dan
 3. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.



Gambar 4.1.
Pengembangan wilayah Strategis Kabupaten Cirebon
 (Sumber : Bappeda Kab Cirebon, 2011)

Selanjutnya, pengembangan wilayah disusun berdasarkan rencana struktur ruang wilayah yaitu rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Kabupaten Cirebon memiliki beberapa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan. Sementara, PKLp adalah pusat pelayanan kawasan yang akan dipromosikan menjadi PKL.

Setiap PKL dan PKLp mempunyai peran dan fungsi berbeda. Adapun peran dan fungsi masing-masing PKL dan PKLp sebagai berikut:

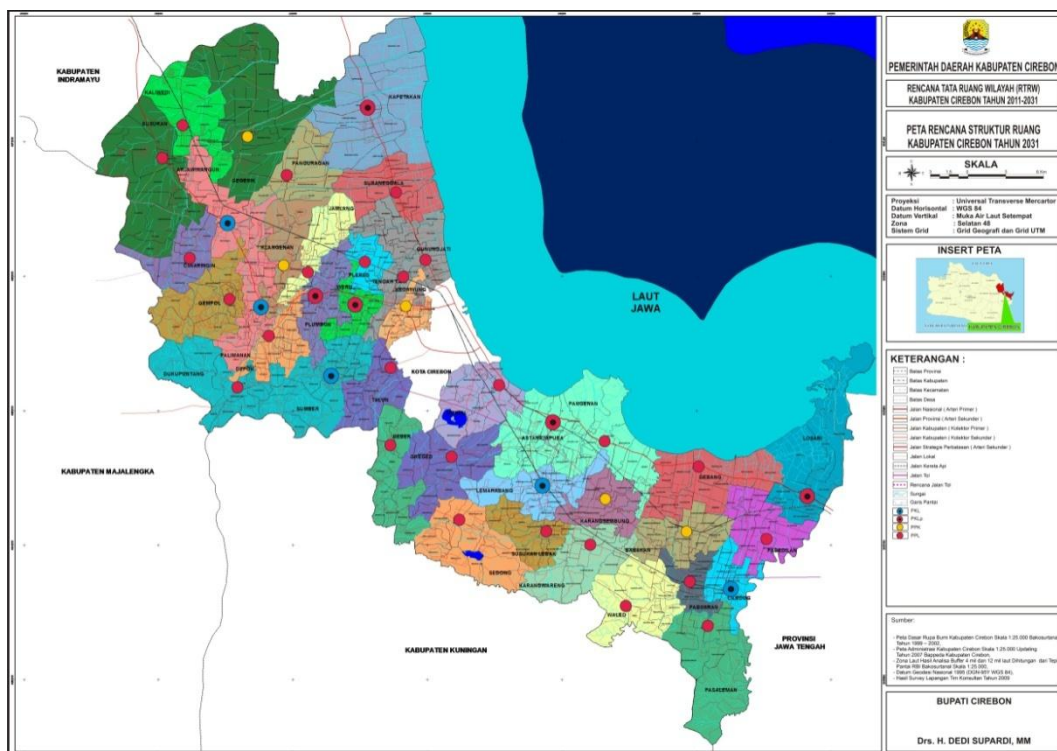
- a. **PKL Ciledug dan PKLp Losari** dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perikanan laut, perdagangan hasil pertanian, industri, pergudangan, pelabuhan, pelayanan sosial ekonomi, perumahan, pendidikan tinggi, perdagangan hasil pertambangan dan fungsi penunjang PKN;
Wilayah pelayanan PKL Ciledug meliputi Kecamatan Losari (PKLp); Pabedilan; Pabuaran; Waled; Babakan; Gebang; dan Pasaleman
- b. **PKL Lemahabang dan PKLp Astanajapura** dengan fungsi utama sebagai industri manufaktur. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan industri, pertanian, perikanan laut, perumahan, pelayanan sosial, pariwisata, pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pendidikan kejuruan, industri hasil hutan dan fungsi penunjang PKN;
Wilayah pelayanan PKL Lemahabang meliputi Astanajapura (PKLp); Mundu; Pangenan; Sedong; Susukanlebak; Karangsembung; dan Karangwareng
- c. **PKL Sumber dan PKLp Weru** dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, perdagangan dan jasa. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan, fungsi penunjang PKN, pendidikan tinggi, pertanian, pariwisata, industri, perikanan budidaya, pertambangan, dan pelayanan sosial ekonomi;
Wilayah Pelayanan PKL Sumber meliputi Kecamatan Weru (PKLp); Beber; Greged; Plered; Tengahtani; Talun; Kedawung; dan Gunungjati

- d. **PKL Palimanan dan PKLp Plumbon** dengan fungsi utama sebagai sentra industry. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan, pariwisata sejarah, agro wisata, industri batu alam, pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pertanian, perikanan budidaya, pelayanan sosial, pendidikan kejuruan, dan fungsi penunjang PKN;

Wilayah pelayanan PKL Palimanan meliputi Kecamatan Plumbon (PKLp); Klangeran; Jamblang; Depok; Dukupuntang; dan Gempol.

- e. **PKL Arjawinangun dan PKLp Kapetakan** dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian tanaman pangan. Fungsi penunjangnya adalah perikanan tangkap dan budidaya, perumahan, agro wisata, industri, pendidikan tinggi, pelayanan sosial, dan fungsi penunjang PKN.

Wilayah pelayanan PKL Arjawinangun meliputi Kecamatan Kapetakan (PKLp); Susukan; Kaliwedi; Gegesik; Panguragan; Suranenggala; dan Ciwaringin.



Gambar 4.2.
Peta Struktur Ruang Kabupaten Cirebon
(Sumber : Bappeda Kab. Cirebon, 2011)

4.1.5 Telaah Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Penyusunan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah tahun 2014-2019 merujuk pada perumusan hasil telaah lingkungan hidup strategis. Adapun isu strategis lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon adalah adanya kerentanan bencana alam, keterbatasan dan deplesi sumber daya alam, belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip lingkungan hidup dalam aktivitas pembangunan, belum adanya upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global, adanya laju kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup melebihi upaya perbaikannya, adanya kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Cirebon yang belum dijabarkan ke bentuk rencana tata ruang yang lebih operasional dan rencana sektor yang berkesesuaian dengan kebutuhan dalam pengembangan tata ruang.

4.2. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah adalah kondisi ketidaktercapaian antara realisasi dan rencana yang dibuat. Secara umum, kemunculan permasalahan pembangunan daerah disebabkan oleh kekuatan yang belum dioptimalkan, kelemahan yang tidak bisa diatasi, peluang yang tidak bisa dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak bisa diantisipasi.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Cirebon dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis hubungan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal, regional maupun nasional dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir. Perumusan permasalahan ini menjadi dasar bagi penyusunan visi dan misi pembangunan Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, visi dan misi yang telah

disusun dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan. Secara operasional, visi dan misi tersebut dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

Berdasarkan gambaran kondisi wilayah dan perekonomian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, permasalahan Kabupaten Cirebon dibagi menurut kondisi kewilayahan/geografis, kehidupan beragama, kependudukan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, infrastruktur wilayah, Lingkungan Hidup, ketahanan pangan, perdagangan dan perindustrian, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemerintahan, pemukiman dan perumahan, sanitasi, kelautan dan perikanan, ketertiban dan ketentraman, dan pariwisata, pemuda, dan olahraga.

4.2.1 Kondisi Kewilayahan/Geografis

Dari sisi geografis, permasalahan yang paling menonjol adalah adanya alih fungsi lahan dimana proporsi lahan tidak terbangun semakin menyempit. Hal ini sebagai konsekuensi karena wilayah Kabupaten Cirebon merupakan tujuan investasi terutama aktivitas pembangunan perumahan, industri, dan perdagangan. Alih fungsi lahan juga merambah pada kawasan lindung seperti wilayah sempadan sungai, sempadan pesisir, situ, dan SUTET (saluran udara tegangan ekstra tinggi). Dampaknya berupa penyempitan lahan pertanian, berkurangnya resapan air, dan menurunnya kualitas lingkungan.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) wilayah perkotaan adalah 30%, dimana pemerintah daerah (publik) bertanggung jawab menyediakan 20% dan 10% oleh pihak swasta atau masyarakat. Tata ruang wilayah merupakan bagian penting dalam upaya konsolidasi penggunaan lahan. Tata ruang wilayah menjadi panduan dalam pengembangan wilayah. Namun, permasalahan pengembangan wilayah berbasis penataan ruang menghadapi berbagai kendala, yaitu belum adanya penetapan wilayah berdasarkan kondisi rinci atau detail ruang; pengembangan wilayah tampak tidak beraturan, tidak membentuk pola; belum adanya sistem pengelolaan ruang; belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.

4.2.2 Kehidupan beragama

Kabupaten Cirebon menjadi sentra penyebaran agama Islam. Bahkan sejarah telah mencatat daerah ini menjadi simpul para wali songo sehingga daerah ini disebut kota wali. Pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari menjadi hak asasi setiap individu yang berketuhanan. Pemahaman dan implementasi ajaran agama menjadi pondasi dalam pembangunan berbagai sektor. Kini, perubahan arah kehidupan masyarakat menuju kondisi yang bersifat materialistik, komersial, dan bendawi telah menceraiberau jiwa hampir setiap warga Kabupaten Cirebon. Akibatnya, berbagai kerawanan sosial, ras, dan agama sering kali muncul. Kriminalitas cenderung semakin meningkat, korupsi secara berjamaah, dan tindak asusila menjadi semakin marak. Oleh karena itu, pemahaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari harus semakin digalakan.

Namun demikian, Kabupaten Cirebon memiliki berbagai permasalahan dalam menjalani kehidupan beragama yang toleran dan damai, yaitu kurang optimalnya pemahaman umat terhadap kitab sucinya terutama pemahaman umat Islam terhadap Al Quran, kurang optimalnya pemanfaatan prasarana ibadah bagi pembentukan karakter masyarakat, kurang optimalnya kinerja lembaga keagamaan dalam mendorong kesholehan sosial, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan manajemen lembaga keagamaan.

4.2.3 Kependudukan

Ada dua hal penting berkaitan dengan kondisi demografis, yaitu Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan distribusi penduduk. Rata-rata LPP dalam kurun 2009-2012 adalah 3,44%. Sementara, distribusi penduduk masih belum merata. Wilayah Kabupaten Cirebon yang berbatasan dengan wilayah kota Cirebon (hinterland) memiliki kepadatan yang lebih tinggi dibanding dengan wilayah perbatasan. Implikasinya, pertumbuhan wilayah suburban menjadi semakin banyak. Kerawanan konflik sosial semakin meningkat seiring dengan beragamnya karakter masyarakat yang datang di wilayah perbatasan kota dan Kabupaten Cirebon. Kondisi ini berkonsekuensi Pemerintah Kabupaten Cirebon harus menyiapkan penambahan berbagai fasilitas

pelayanan dasar bagi warganya seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur pemukiman, air bersih, perumahan yang layak huni, prasarana ibadah, dan prasarana olahraga.

4.2.4 Pendidikan

Pendidikan menjadi penentu kemajuan daerah. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Cirebon adalah rata-rata pendidikan masyarakat masih rendah. Berdasarkan hasil penghitungan Indeks Pembangunan Manusia, rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Cirebon masih berkisar pada 6,89 tahun. Ini menunjukkan tingkat melanjutkan sekolah masih rendah terutama pada jenjang pendidikan dasar (SMP/MTs) ke jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Dengan demikian wajib belajar pendidikan dasar masih belum tuntas. Selain itu, Kabupaten Cirebon masih menyisakan kisaran 87 ribu penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih belum melek huruf. Kemampuan melek huruf merupakan kemampuan dasar untuk menyerap pengetahuan dan ketrampilan. Dari sisi fasilitas gedung sekolah, Kabupaten Cirebon masih menghadapi kondisi ruang kelas yang membutuhkan banyak perbaikan. Sementara, dari aspek ketersediaan tenaga pendidik, Kabupaten Cirebon masih menyisakan tenaga pendidik yang tidak layak mengajar terutama dari sisi kualifikasi pendidikan tenaga pendidik. Berdasarkan uraian di atas, pembangunan daerah untuk mengejar ketertinggalan akan semakin sulit jika pembangunan sumber daya manusia tidak segera dilakukan percepatan perbaikan melalui pembangunan pendidikan.

4.2.5 Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia produktif. Tanpa kondisi kesehatan prima, masyarakat Kabupaten Cirebon tidak akan produktif dan tidak akan mampu mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal. Saat ini angka kesakitan masyarakat Kabupaten Cirebon masih berkisar 1-10 hari dalam sebulan.

Dalam kerangka pembangunan kesehatan, Kabupaten Cirebon menghadapi berbagai permasalahan yaitu (1) belum optimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, sebagai implikasi kurang optimalnya fungsi dan peran sarana dan prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan pembiayaan kesehatan; (2) keterbatasan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; (3) Angka kematian bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan yang masih relatif tinggi; (4) kerawanan gizi yang ditunjukkan dengan masih banyaknya bayi dan balita dalam keadaan gizi buruk dan gizi kurang; (5) adanya penyakit endemik yang berjangkit rutin dan sulit dikendalikan karena beriringan dengan perubahan cuaca seperti demam berdarah; (6) tingginya kasus penyakit menular akibat perubahan iklim dan gaya hidup seperti flu burung, kusta, AIDS, dan HIV positif.

4.2.6 Kemiskinan

Kemiskinan menjadi indikator utama kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan yang tinggi mengindikasikan kesejahteraan masyarakat rendah. Berdasarkan data BPS, kemiskinan di Kabupaten Cirebon berada diatas rata-rata kemiskinan nasional dan Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan dukungan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat terus berupaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun, permasalahan yang dihadapi dalam penurunan jumlah kemiskinan adalah kurangnya sinergi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan, belum adanya pemutakhiran data kemiskinan yang bersifat *by name-by adress*, kurangnya pemahaman dan identifikasi mendalam terhadap permasalahan kemiskinan.

4.2.7 Infrastruktur Wilayah

Ketersediaan dan kemapaman infrastruktur wilayah menjadi potret kemajuan daerah. Infrastruktur wilayah mendukung distribusi barang, jasa dan manusia. Namun demikian, kondisi pembangunan infrastruktur wilayah menghadapi beberapa kendala, sebagai berikut (1) Transportasi darat : belum optimalnya tingkat kemantapan jalan, rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastuktur jaringan jalan, terbatasnya fasilitas lalu lintas, belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal

sebagai tempat pertukaran moda transportasi, dan belum optimalnya jalur pejalan kaki (pedestrian) bagi kenyamanan para pejalan kaki.

Permasalahan pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, (1) Potensi sumber daya air di Kabupaten Cirebon cukup terbatas dan belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik; (2) Sistem informasi pengelolaan sumber daya air masih belum memadai; (3) menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan; dan (4) Kondisi jaringan irigasi belum memadai karena kondisi infrastruktur mengalami rusak berat dan ringan.

Permasalahan aspek infrastruktur listrik dan energi adalah rasio elektrifikasi rumah tangga belum memadai; belum ada upaya penyediaan sumber energi alternatif pengganti minyak; adanya kerentanan kerawanan sumber energi listrik dan gas.

Permasalahan aspek infrastruktur sanitasi adalah masih rendahnya rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang berasal dari air kemasan/ledeng/pompa; Cakupan pelayanan pengelolaan air limbah domestik masih rendah; belum optimalnya fasilitas pengolahan limbah yang ada.

4.2.8 Lingkungan hidup

Sumber daya alam menjadi salah satu modal pembangunan Kabupaten Cirebon. Agar pembangunan di Kabupaten Cirebon bisa berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun demikian, pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan menghadapi berbagai kendala, yaitu adanya kerentanan bencana alam, keterbatasan dan deplesi sumber daya alam, belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip lingkungan hidup dalam aktivitas pembangunan, belum adanya upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global, adanya laju kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup melebihi upaya perbaikannya.

4.2.9 Ketahanan pangan

Pangan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan pangan akan semakin banyak.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan adalah keterbatasan infrastruktur pendukung akses dan distribusi pangan, alih fungsi lahan, adanya perubahan iklim global yang berpengaruh pada ketersediaan dan distribusi pangan, kurangnya pemahaman masyarakat dan aparaturnya terhadap ketahanan pangan, kurang optimalnya diversifikasi pangan, keterbatasan daya beli masyarakat terhadap pangan, dan belum adanya sistem pengendalian dan pengawasan pangan.

4.2.10 Perdagangan dan perindustrian

Permasalahan perdagangan adalah kurang optimalnya sistem logistik, kurang tersedianya fasilitas perdagangan yang memadai, kondisi pasar tradisional yang belum tertata dengan baik. Sementara, permasalahan perindustrian adalah keterbatasan bahan baku industri, pembaharuan teknologi, dan rendahnya sumber daya manusia.

4.2.11 Ketenagakerjaan dan transmigrasi

Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Kabupaten Cirebon membutuhkan sumber daya manusia produktif. Tenaga kerja menjadi kunci bagi pergerakan perekonomian daerah dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia. Posisi Kabupaten Cirebon di lintasan jalur ekonomi regional dan nasional membuka peluang bagi terbentuknya ekonomi baru. Hal ini membutuhkan ketersediaan tenaga kerja yang memadai. Namun demikian, ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon menghadapi berbagai permasalahan yakni (1) Rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja; (2) Jumlah angkatan kerja jauh lebih banyak dibanding dengan kesempatan kerja; (3) terbatasnya fasilitasi pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi para pencari kerja; (4) sistem informasi ketenagakerjaan yang belum sistematis dan terpadu sehingga menimbulkan asimetri informasi peluang kerja; (5) masih maraknya pekerja anak; dan (6) kurang optimalnya

pengawasan dan perlindungan tenaga kerja Kabupaten Cirebon di luar negeri dan dalam negeri.

4.2.12 Pemerintahan

Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik akan mendorong terciptanya kelembagaan dan kinerja aparatur yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Permasalahan dalam pembangunan sistem pemerintahan adalah sistem manajemen pemerintahan yang kurang didukung oleh kualitas sumber daya aparatur, peran serta masyarakat sebagai sosial kontrol, sistem pengendalian dan pengawasan yang akuntabel dan transparan, kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja; belum optimalnya kapasitas dan profesionalisme SDM aparatur; dan terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan publik; masih adanya peraturan perundangan yang tumpang tindih, belum adanya sinergi antar tingkat pemerintahan, belum optimalnya penyelenggaraan berbasis pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Sementara, pembangunan desa menghadapi berbagai permasalahan, yaitu keterbatasan sumber daya manusia di tingkat pemerintahan desa, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya di desa.

Pada sisi keuangan daerah, keberadaan keuangan daerah menjadi sumber penggerak pembangunan daerah. Namun, pengelolaan keuangan daerah menghadapi berbagai permasalahan, yaitu keterbatasan sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunan, belum optimalnya penataan aset daerah, belum optimalnya efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan daerah, belum optimalnya sistem manajemen keuangan daerah, dan terbatasnya kemampuan personel pengelola keuangan daerah.

4.2.13 Pemukiman dan perumahan

Pemenuhan perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Idealnya, setiap keluarga memiliki rumah. Nyatanya, kondisi ideal tersebut belum terpenuhi. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perumahan dan pemukiman adalah akses pembiayaan perumahan terbatas terutama untuk keluarga miskin/keluarga berpenghasilan rendah, belum optimalnya penataan pemukiman sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

4.2.14 Sanitasi

Sanitasi meliputi pengelolaan limbah/sampah, akses air bersih/air minum, dan pengelolaan drainase. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sanitasi lingkungan adalah belum optimalnya pengelolaan sampah secara teknis/mekanis, belum optimalnya pengelolaan sampah/limbah yang ramah lingkungan berbasis masyarakat, keterbatasan sumber air baku dalam pemenuhan akses air minum/air bersih, belum adanya ketegasan sistem pengaturan drainase, dan penanganan drainase belum terpadu.

4.2.15 Kelautan dan perikanan

Kabupaten Cirebon memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang prospektif. Kedua sumber daya ini bisa menjadi pilihan utama pengembangan perekonomian daerah. Namun, hingga saat ini kedua sumber daya tersebut belum digali secara optimal. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya kelautan dan perikanan adalah keterbatasan sarana dan prasarana, SDM kelautan dan perikanan, penurunan daya dukung lingkungan, tingginya tingkat pencemaran lingkungan, sedimentasi muara dan alur sungai sangat tinggi, pemanfaatan ilmu dan teknologi perikanan masih rendah, dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan

4.2.16 Ketertiban dan ketentraman

Pembangunan ketertiban dan ketentraman menghadapi berbagai permasalahan, yaitu berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah, kurangnya dukungan dan respon masyarakat dalam menangkai berbagai friksi sosial, kurangnya langkah antisipatif terhadap kemunculan kriminalitas, berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih, dan keterbatasan fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman.

4.2.17 Pariwisata, pemuda dan olahraga

Pembangunan tidak hanya menghasilkan dampak positif bagi perbaikan kehidupan masyarakat. Tetapi juga, pembangunan menghasilkan berbagai dampak negatif. Berkaitan dengan aspek sosial, dampak negatif pembangunan telah memudahkan rasa kesetiakawanan sosial. Pembangunan telah membentuk karakter individualis yang menghasilkan kelompok masyarakat terpinggirkan terutama bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu bersaing. Kelompok masyarakat jenis ini menimbulkan kerawanan bagi kesejahteraan sosial. Dampaknya berbagai permasalahan kesejahteraan sosial cenderung meningkat seperti Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), anak nakal dan anak terlantar, kenakalan remaja, perumahan yang tidak layak huni, belum optimalnya mengelola masyarakat lanjut usia, anak yatim/piatu, dan penyalahgunaan minuman keras dan NAPZA.

Kebudayaan merupakan kekuatan pembangunan. Kebudayaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat akan menjadi kohesi lintas pemangku kepentingan yang berserakan untuk bisa bersatu menjadi potensi kekuatan pembangunan. Kabupaten Cirebon memiliki beragam kebudayaan adi luhung yang bisa dikembangkan. Kini, masa depan pengembangan beragam kebudayaan tersebut dihadapkan pada derasnya gempuran modernisasi dan liberalisasi. Gelombang modernisasi dan liberalisasi harus menjadi peluang dan tantangan bagi dispersi budaya dan kearifan lokal. Keduanya harus berjalan seiring dalam membentuk kehidupan masyarakat.

Namun demikian, pembangunan kebudayaan di Kabupaten Cirebon menghadapi berbagai permasalahan, yakni belum optimalnya pengelolaan bangunan cagar budaya

sebagai catatan perkembangan sejarah, kenihilan keberpihakan dan komitmen pemerintah, belum adanya sinergi pelestarian dan pengembangan kebudayaan dengan sektor lain misalnya sinergi dengan pariwisata, keterbatasan sumber daya manusia pengelola cagar budaya dan budaya lokal, dan belum optimalnya jejaring kerja dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Jiwa yang sehat harus didukung oleh jasmani yang sehat agar menjadi insan penggerak pembangunan yang sempurna. Pembangunan olahraga menjadi bagian tak terpisahkan dalam membentuk insan kamil pembangunan. Namun, pembangunan olah raga menghadapi berbagai masalah yaitu keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana olahraga, kurang optimalnya pembinaan olahraga baik olahraga pelajar, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi, kurangnya fasilitasi pendidikan dan pelatihan pelatih, pengurus, wasit dan hakim terutama pada cabang olahraga unggulan.

Pemuda menjadi tumpuan masa depan Kabupaten Cirebon. Berdasarkan struktur penduduk, Kabupaten Cirebon memiliki jumlah penduduk berusia muda berkisar 60%. Tentu ini menjadi peluang dan kekuatan bagi masa depan Kabupaten Cirebon yang lebih baik. Sebaliknya, keberadaan pemuda bisa menjadi beban pembangunan jika para pemuda yang ada tidak memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh dinamika pembangunan. Dalam kerangka membangun pemuda yang produktif dan bersumbangsiah positif bagi pembangunan, pembangunan kepemudaan menghadapi berbagai permasalahan, yakni terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda, kurangnya event olahraga, dan rendahnya prestasi olahraga.

4.2.18 Investasi

Investasi menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi perkembangan ekonomi daerah. Investasi bisa bersumber dari dalam negeri dan luar negeri (Foreign Direct Investment/FDI). Untuk menarik investor ke Kabupaten Cirebon, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan peluang investasi dalam bentuk zonasi peruntukan kegiatan usaha, dan sistem pelayanan perijinan terpadu. Namun demikian, peningkatan investasi dan perkembangan ekonomi menghadapi berbagai masalah,

yakni prosedur perijinan yang masih panjang/birokratis, belum adanya jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha, masih terbatasnya infrastruktur wilayah.

Sektor pertanian menjadi kontributor terbesar bagi produktivitas ekonomi daerah. Namun, dalam kurun beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian semakin menurun seiring dengan beralihnya tenaga kerja ke sektor lain. Ada permasalahan dalam pengembangan pertanian mencakup, antara lain: (1) belum optimalnya pengembangan nilai tambah komoditas melalui mekanisme agroindustri; (2) keterbatasan sarana dan prasarana teknologi pertanian baik *on farm* (*proses tanam*) maupun *off farm* (*pasca panen*), jejaring pemasaran dan permodalan; (3) adanya ketidakseimbangan biaya produksi pertanian dan nilai jual komoditas akibat rente ekonomi; (4) tidak adanya jaminan harga komoditas dari pemerintah kecuali padi; (5) Kondisi infrastruktur jalan ke sentra produksi belum memadai; (6) belum optimalnya penggunaan panca usaha tani; (7) adanya perubahan iklim global yang tidak menentu berdampak pada keberlanjutan produksi komoditas pertanian.

Keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) menjadi penopang perekonomian daerah. Kelompok usaha ini menjadi katup pengaman pada saat bangsa ini dalam keadaan krisis ekonomi. Sektor UMKM merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan. KUMKM menjadi sektor penyerap tenaga kerja yang paling banyak. Sektor ini pula yang membentuk wirausaha. Namun, pembangunan KUMKM belum mendapat perhatian serius. Ada beberapa permasalahan dalam pembangunan KUMKM, yakni keterbatasan kemampuan sumber daya manusia pengelola KUMKM; terbatasnya jejaring kerja, pemasaran, permodalan, dan peralatan; dan keberadaan UMKM yang mudah berubah sehingga menyulitkan pendataan.

Sementara, perindustrian dan perdagangan menghadapi permasalahan yakni, keberlanjutan dan ketersediaan bahan baku industri unggulan; daya saing produk industri dan perdagangan masih rendah; belum optimalnya jejaring kerja sama, pemasaran dan promosi; terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana perdagangan; dan belum optimalnya pelaksanaan sistem pengawasan dan perlindungan konsumen.

4.2.19 Politik

Penyelenggaraan pesta politik menjadi bagian dari agenda menuju perubahan. Keberpihakan dan komitmen politik menjadi penting bagi keberlangsungan pembangunan. Namun, pembangunan politik menghadapi berbagai kendala, yaitu pemilihan langsung oleh masyarakat dalam pesta politik membutuhkan biaya yang mahal dan waktu yang lama, kurang selektifnya pemilihan bakal calon legislatif, adanya kecenderungan penurunan partisipasi masyarakat dalam pesta politik.

4.3. Isu Strategis

Berdasarkan telaahan kebijakan pembangunan dan analisis berbagai permasalahan di atas, Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama:

- a. Implementasi pendidikan keagamaan
- b. Internalisasi kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat

2. Keterjangkauan, kualitas, dan partisipasi pendidikan :

- a. Keterjangkauan : akses dan pembiayaan pendidikan
- b. Kualitas pendidikan : SDM pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan
- c. Partisipasi pendidikan masyarakat : peran serta masyarakat bagi keberlanjutan pendidikan dasar dan menengah

3. Jaminan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan :

- a. Kesehatan ibu, bayi, dan balita : kematian ibu, bayi, balita; gizi ibu, bayi, dan balita; cakupan imunisasi dan kunjungan ibu hamil
- b. Jaminan dan keterjangkauan akses pelayanan kesehatan : keikutsertaan menjadi peserta BPJS
- c. Mutu pelayanan kesehatan : SDM medis dan paramedis, sarana dan prasarana kesehatan
- d. Promosi, Jejaring, dan partisipasi masyarakat
- e. Penyehatan lingkungan : perilaku hidup bersih dan sehat, pengendalian penyakit (menular dan non menular)

4. Ketersediaan dan kemantapan infrastruktur wilayah :

- a. Kemantapan jembatan dan jalan (jalan kabupaten dan poros desa)
- b. Penataan fasos fasum : jalan pemukiman
- c. Prasarana air bersih dan sanitasi (SPAL, Sampah, Jamban)
- d. Pemeliharaan irigasi teknis dan setengah teknis
- e. Prasarana telekomunikasi dan informasi

5. Ketahanan pangan :

- a. Ketersediaan : produksi, produktivitas pangan, alih fungsi lahan, teknologi
- b. Akses dan distribusi pangan : jalan produksi, gudang/lumbung pangan, tata niaga
- c. Keragaman/diversifikasi pangan
- d. Stabilitas harga pangan
- e. Mutu dan Keamanan pangan

6. Pengendalian kependudukan :

- a. Distribusi : sebaran, urbanisasi
- b. Jumlah : kelahiran, kematian, perpindahan, pertumbuhan penduduk, rasio sex

7. Penurunan jumlah penduduk miskin :

- a. Pendapatan : mata pencaharian
- b. Akses terhadap sumber daya : modal, dll

8. Reformasi birokrasi :

- a. Penataan kelembagaan
- b. Sistem kepegawaian : Kapasitas dan Profesionalisme pegawai, remunerasi PNS
- c. Pelayanan publik
- d. Sarana dan prasarana pemerintahan

9. Peningkatan investasi

- a. Komitmen kepala daerah
- b. Pelayanan perijinan usaha
- c. Kepastian hukum
- d. Stabilitas wilayah : keamanan dan ketertiban, politik

- e. Promosi
- f. Akses permodalan
- g. Penciptaan sentra-sentra ekonomi

10. Ketersediaan energi

- a. Akses listrik bagi rumah tangga kurang mampu
- b. Energi terbarukan

11. Kesempatan dan daya saing ketenagakerjaan

- a. Daya saing tenaga kerja : keterampilan dan produktivitas
- b. Kesempatan kerja : enterpreneur, pengangguran

12. Pengelolaan lingkungan hidup :

- a. Ruang Terbuka Hijau : hutan kota, alun-alun kecamatan
- b. Perubahan iklim global dan lokal
- c. Bencana alam
- d. Konservasi sumber daya alam
- e. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

13. Pembinaan dan pengembangan generasi muda :

- a. Nilai kebangsaan dan kepemimpinan
- b. Sarana dan prasarana kepemudaan

14. Pelestarian dan pengembangan seni, budaya, dan pariwisata :

- a. Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya
- b. Destinasi wisata : local etnic
- c. Sarana dan prasarana seni dan budaya : gedung kesenian dan kebudayaan

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD pada akhir periode perencanaan. Pencapaian target merupakan hasil dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari pelaksanaan program pembangunan daerah tiap tahun yang dilaksanakan oleh semua SKPD pada Pemerintah Kabupaten Cirebon selama lima tahun dengan para pemangku kepentingan daerah.

Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019 meliputi indikator kinerja pembangunan daerah yang menjelaskan pencapaian setiap misi RPJMD, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010. Target indikator kinerja daerah ditetapkan dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan arahan RPJPD Kabupaten Cirebon tahun 2005-2025 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya daerah.

Tabel 9.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Cirebon 2014-2019

NO	ASPEK	FOKUS	INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL TAHUN		TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan capaian IPM	Capaian Indeks Pembangunan Manusia	%	69,93	70,69 - 70,94	71,03 - 71,75	71,79 - 72,44	72,48 - 73,13	73,17 - 73,81	73,85 - 74,41	73,85 - 74,41
			IPM Min		69,93	70,69	71,03	71,79	72,48	73,17	73,85	73,85
			IPM Maks		69,93	70,94	71,75	72,44	73,13	73,81	74,41	74,41
			- Indeks Pendidikan		77,90	79,44 - 80,04	80,33 - 81,6	81,89 - 82,93	83,22 - 84,27	84,56 - 85,60	85,89 - 86,67	85,89 - 86,67
			Indeks Pendidikan (IP Min)		77,90	79,44	80,33	81,89	83,22	84,56	85,89	85,89
			Indeks Pendidikan (IP Maks)		77,90	80,04	81,60	82,93	84,27	85,60	86,67	86,67
			- Indeks Kesehatan		67,53	67,92	68,05 - 68,30	68,28 - 68,53	68,50 - 68,75	68,72 - 68,97	68,93 - 69,18	68,93 - 69,18
			Indeks Kesehatan (Min)		67,53	67,79	68,05	68,28	68,50	68,72	68,93	68,93
			Indeks kesehatan (Maks)		67,53	67,92	68,30	68,53	68,75	68,97	69,18	69,18
			- Indeks Ekonomi/Daya beli		64,34	64,85	64,71 - 65,35	65,21 - 65,86	65,72 - 66,36	66,22 - 66,87	66,73 - 67,37	66,73 - 67,37
			Indeks Ekonomi/Daya beli (Min)		64,34	64,85	64,71	65,21	65,72	66,22	66,73	66,73
			Indeks Ekonomi/Daya beli (Maks)		64,34	64,85	65,35	65,86	66,36	66,87	67,37	67,37

NO	ASPEK	FOKUS	INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL TAHUN		TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
A	Kesejahteraan Masyarakat	1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi										
		a Pertumbuhan ekonomi/LPE	1 Pertumbuhan PDRB	%	4,83	5,20	5,35	5,40	5,45	5,50	5,55	5,55
		b Laju Inflasi	2 Laju inflasi wilayah	%	3,03	3,5-4,5	3,5-4,5	3,5-4,5	3,5-4,5	3,5-4,5	3,5-4,5	3,5-4,5
		c PDRB Perkapita (berkalku)	3 PDRB per kapita (berlaku)	Rp	12.112.404	13.398.988	14.765.489	16.210.302	17.811.979	19.590.887	21.568.345	21.568.345
		e Daya Beli	5 Capaian daya beli	Rp	638.417	640.603	642.790	644.977	647.163	649.350	651.537	651.537
			DB Min		638.417	640.603	640.000	642.187	644.373	646.560	648.747	648.747
			DB Maks		638.417	640.603	642.790	644.977	647.163	649.350	651.537	651.537
		f Ketahanan Pangan	6 Capaian skor PPH	%	-	68,40	71,00	73,70	76,30	78,90	81,60	81,60
		2 Kesejahteraan Sosial										
		a Pendidikan	7 Angka melek huruf	%	93,52	94,5-95,4	95,5-96,4	96,5-97,4	97,5-98,4	98,5-99,4	99,5-100	99,5-100
			AMH Min		93,52	94,5	95,5	96,5	97,5	98,5	99,5	99,5
			AMH Maks		93,52	95,4	96,4	97,4	98,4	99,4	100,0	100,0
			8 Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,01	7,40	7,5-7,8	7,9-8,1	8,2-8,4	8,5-8,7	8,8-9,0	8,8-9,0
			RLS Min	Tahun								

NO	ASPEK	FOKUS	INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL TAHUN		TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
					7,00	7,40	7,5	7,9	8,2	8,5	8,8	8,8
			RLS Maks	Tahun	7,00	7,40	7,8	8,1	8,4	8,7	9,0	9,0
			9 Angka partisipasi murni (APM)				7,8	8,1	8,4	8,7	9	9,0
			- SD/MI/Paket A	%	99,99	100	100	100	100	100	100	100
			- SMP/MTs/Paket B	%	89,3	89,60	89,90	90,19	90,49	90,79	91,09	91,09
			- SMA/SMK/MA/Paket C	%	59,88	60,39	60,84	61,32	61,8	62,28	62,76	62,76
			10 Angka partisipasi kasar (APK)									
			- SD/MI/Paket A	%	109,23	111	114	118	122	126	130	130
			- SMP/MTs/Paket B	%	110,63	110,62	110,51	110,41	110,31	110,20	110,00	110,00
			- SMA/SMK/MA/Paket C	%	79,58	85	93,15	100,44	107,73	115,02	122,30	122,30
		b Kesehatan	11 Angka kelangsungan hidup bayi	%	0,9951	0,9951	0,9957	0,9962	0,9967	0,9972	0,9977	0,9977
			Angka Kematian bayi	bayi	0,0049	0,0049	0,0043	0,0038	0,0033	0,0028	0,0023	0,0023
			12 Angka usia harapan hidup	Tahun	65,52	65,75	65,98	66,12	66,25	66,38	66,51	67
			AHH Min		65,52	65,68	65,83	65,97	66,10	66,23	66,36	66
			AHH Maks		65,52	65,75	65,98	66,12	66,25	66,38	66,51	67
			13 Persentase balita	%	1,21	1,21	1,09	0,97	0,85	0,73	0,61	0,61

NO	ASPEK	FOKUS	INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL TAHUN		TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
			gizi buruk									
		c Kemiskinan	14 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	85,96	87,13	88,30	89,47	90,64	91,81	92,98	92,98
			Penduduk dibawah garis kemiskinan	%	14,04	12,87	11,70	10,53	9,36	8,19	7,02	
		d Kesempatan kerja	15 Rasio penduduk yang bekerja	%	90,10	90,30	90,50	90,70	90,90	91,10	91,30	91,30
			Angka pengangguran terbuka	%	9,9	9,7	9,5	9,3	9,1	8,9	8,7	8,7
			16 Adanya kampung wirausaha	Desa	-	-	-	1	1	1	1	4
		3 Seni Budaya dan Olah Raga										
		a Kesenian	17 Jumlah gedung kesenian	Unit	0	0	0	0	0	1	0	1
			18 Jumlah pertunjukan/pagelaran/festival budaya tingkat nasional yang digelar	Kali	0	0	0	1	1	1	1	4
			19 Jumlah kawasan desa seni budaya	buah	0	0	0	1	0	1	0	2
		b Olah raga	20 Jumlah gedung olah raga/GOR	Unit	10	4	4	4	6	6	6	26

NO	ASPEK	FOKUS	INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL TAHUN		TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
B	Pelayanan Umum	1 Pelayanan Dasar										
		a Pendidikan	Pendidikan dasar:	-	-							
		21 Rasio ketersediaan sekolah/ 10.000 penduduk usia sekolah SD/MI	Unit		48	48	48	49	49	50	50	50
		22 Rasio guru/siswa (SD)	‰		35,40	35,4	36	36	36	36	36	36
		23 Rasio kls/siswa (SD)	‰		27,81	27,81	29,33	30,00	30,66	31,33	32,00	32,00
		24 Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMP/MTs	%		17	17	18	18	19	19	20	20
		26 Rasio kelas/siswa SMP	‰		29,79	29,79	30,29	30,79	31,29	31,79	32,29	32,29
		27 Angka kelulusan :	%									
		SD/MI	%		99,97	99,98	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
		SMP/MTs	%		99,96	99,98	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
		28 Angka putus sekolah										
		SD/MI	%		2,3	2,29	2,28	2,27	2,26	2,25	2,24	2,24
		SMP/MTs	%		0,24	0,23	0,22	0,21	0,2	0,19	0,18	0,18
		Pendidikan	-		-							

NO	ASPEK	FOKUS	INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL TAHUN		TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
			Menengah :									
			29 Rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah	%	19	19	19	20	21	22	23	23
			30 Rasio kls/siswa (SMA)	‰	28,93	29,18	29,43	29,68	29,93	30,18	30,43	30,43
			Rasio kls/siswa (SMK)	‰	26,99	27,24	27,49	27,74	27,99	28,24	28,49	28,49
			31 Angka kelulusan :									
			SMA/SMK/MA	%	99,97	99,98	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
			33 Angka putus sekolah									
			SMA/SMK/MA	%	0,68	0,66	0,64	0,62	0,6	0,58	0,56	0,56
			34 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	73,70	74,75	75,80	76,85	77,90	78,95	80,00	80,00
			35 Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	74,09	75,08	76,06	77,05	78,03	79,02	80,00	80,00
		b Kesehatan										
			37 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu	%	0,058	0,027	0,027	0,055	0,055	0,054	0,053	0,053

NO	ASPEK	FOKUS	INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL TAHUN		TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
			per satuan penduduk.									
			38 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	%	0,00392	0,00387	0,00382	0,00377	0,00372	0,00408	0,00403	0,004
			39 Rasio dokter per satuan penduduk	%	0,144	0,143	0,142	0,140	0,139	0,138	0,137	0,14
			40 Rasio tenaga medis per satuan penduduk	%	1,389	1,091	1,076	1,062	1,048	1,035	1,022	1,022
			41 Cakupan Desa/kelurahan Siaga Aktif :								424	424
			- Madya	Desa/kelurahan	100	120	132	145	160	176	193	193
			- Purnama	Desa/kelurahan	7	8	10	12	15	17	21	21
			- Mandiri	Desa/kelurahan	9	10	11	12	13	14	16	17
			42 Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	90,21	90,21	95	95,5	96	96,5	97	97
		c Lingkungan hidup	43 Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah di	kelompok	NA	3	7	8	8	8	8	39

NO	ASPEK	FOKUS	INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL TAHUN		TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
			tingkat kecamatan									
			Jumlah Industri yang ramah lingkungan/mendapat proper/ecoindustry	unit	4	4	4	4	4	5	6	23
			44 Jumlah sekolah berwawasan lingkungan	unit	11	15	6	6	6	6	6	30
		d Pekerjaan Umum	45 Rasio jaringan irigasi:	%								
			Irigasi desa	m ²	13.000	14.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	19.000
			Keandalan ketersediaan air irigasi	%	89	89,5	89	89	89	89	89	89
			intensitas tanam	%	200	200	210	220	230	240	250	250
			46 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	‰	1,57	1,72	1,87	2,02	2,17	2,32	2,47	2,47
			47 Persentase rumah tinggal bersanitasi	%								

NO	ASPEK	FOKUS	INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL TAHUN		TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
			Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	-	-	35	40	45	50	55	60
			Persentase pengurangan sampah di perkotaan (daerah layanan persampahan)	%	-	-	42	39	36	33	30	20
			Persentase pengangkutan sampah	%	-	-	27	32	37	42	47	52
			Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	-	-	10	20	30	40	50	60
			Persentase pengoperasian TPA	%	-	-	45	50	55	60	65	70
			Persentase penduduk yg terlayani sistem jaringan drainase Skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)	%	-	-	25	30	35	40	45	50

NO	ASPEK	FOKUS	INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL TAHUN		TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
			lebih dari 2 kali setahun									
			Persentase berkurangnya jalan lingkungan, senderan, TPT dan jembatan pedesaan yang rusak	%	-	-	75	66	50	45	35	25
			Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (pos jaga)	Pos jaga	-	-	9	9	10	12	13	14
			Tingkat waktu tanggap (response time rate)	Menit	-	-	20	20	20	20	19	18
			Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	-	-	12	33	45	75	90	100

NO	ASPEK	FOKUS	INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL TAHUN		TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
			Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK	%	-	-	50	65	75	80	85	90
			Persentase berkurangnya konflik atau permasalahan pertanahan	%	-	-	60	50	40	30	20	15
			48 Adanya percontohan pemukiman dengan sistem pembuangan air limbah cair secara terpadu	unit	-	-	1	1	1	1	1	5
			49 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	%	64,10	64,10	69,06	72,37	78,91	86,33	93,6	100
			50 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Desa dalam kondisi mantap	%	66,67	70,12	74,15	80,78	87,19	93,6	100	100
			51 Panjang Jaringan Jalan Kabupaten yang terjaga kemantapannya	Km	593,48	593,48	407,24	604,35	603,65	614,65	626,38	626,38
			52 Panjang Jaringan Jalan Desa yang	Km	102,71	102,71	133,49	433,24	438,07	438,07	438,07	438,07

NO	ASPEK	FOKUS	INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL TAHUN		TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
			terjaga kemantapannya									
		e Perumahan	53 Rasio rumah layak huni	%	60	63	67	71	75	79	84	
			54 Rumah tangga pengguna air bersih dengan sistem perpipaan	%		13,17	19,17	25,17	31,17	37,17	43,17	43,17
		f Penataan Ruang	55 Pengelolaan lahan kritis	Ha	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500
			56 Jumlah ruang terbuka hijau/taman kota di tingkat kecamatan	unit	1	1	5	5	10	10	10	40
			57 kawasan lindung	Ha	200	200	300	400	500	600	700	700
			Tinggi genangan dengan lama genangan di permukiman	tinggi genangan (cm)	80	80	80	65	50	35	20	-
			Tinggi genangan dengan lama genangan di lahan pertanian	tinggi genangan (cm)	80	80	80	65	50	35	20	-
			58 Luas wilayah terkena banjir	kecamatan	12	10	8	6	4	2	0	0
			59 Luas wilayah terkena kekeringan	kecamatan	NA	NA	8	6	4	2	0	

NO	ASPEK	FOKUS	INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL TAHUN		TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	g Perencanaan Pembangunan		61 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda	dokumen	0	1	0	0	0	0	0	1
			Evaluasi RPJMD 2014-2019	dokumen	0	0	0	0	1	0	0	1
			62 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perbup	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	5
	h Perhubungan		63 Jumlah ijin trayek	Unit kendaraan	NA	561	593	625	657	689	721	721
			64 Jumlah uji kir angkutan penumpang dan barang	Unit kendaraan	NA	30.000	30.000	32.000	34.000	36.000	38.000	38.000
			Jumlah perlintasan sebidang yang tertangani			14	14	14	14	22	30	30
	i Kependudukan dan catatan sipil		65 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	50,35	55	60	70	80	90	100	100
			66 Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	%	40,02	50	60	70	80	90	100	100

NO	ASPEK	FOKUS	INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL TAHUN		TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		j Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak										
			69 Ketersediaan fasilitas bagi aktivitas anak/taman bermain anak di tingkat kecamatan	Unit	1	2	3	8	9	9	8	40
		k Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)	70 Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,3
			71 Rasio akseptor KB (KB Aktif) bagi keluarga miskin	%	35,84	33,38	31,09	28,96	26,97	25,12	23,4	23,4
		l Ketenagakerjaan	72 Tingkat pengangguran terbuka	%	9,90	9,70	8,15	8,13	8,10	8,08	8,05	8,05
			73 Tingkat Partisipasi angkatan kerja	%	90,10	90,30	91,85	91,88	91,90	91,93	91,95	91,95
		m KUKM	74 prosentase koperasi aktif	%	86,42	86,42	88,42	91,00	94,00	97,00	100,00	100
			75 Jumlah wirausaha baru	orang	0	0	500	500	500	500	500	2500
			76 Jumlah BPR	Unit	19	19	0	2	0	0	0	2
		n Penanaman Modal	77 Jumlah investor (PMDN)	unit usaha	200	230	242	254	266	280	294	1566
			Jumlah investor (PMA)	unit usaha	1	1	1	1	1	1	1	1

NO	ASPEK	FOKUS	INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL TAHUN		TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
			78 Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Rupiah	744.765.296.300	756.250.000.000	853.192.492.026	981.171.365.830	1.128.347.070.704	1.297.599.131.310	1.492.239.001.007	5.752.549.060.877
			79 Rasio daya serap tenaga kerja	%		0,20	1,55	0,02	0,03	0,03	0,03	1,65
		o Otonomi Daerah	80 Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	3,5	3,625	3,75	3,875	4	4,125	4,25	
		p Komunikasi dan Informatika	81 Jumlah kantor pemerintah yang terhubung jaringan WAN	%	44	75	81	86	92	97	100	100
			82 Jumlah pelayanan publik berbasis IT	Jenis	3	3	4	4	4	4	4	4
			83 Jumlah website instansi pemerintah daerah	SKPD	16	16	28	40	52	64	72	256
		r Pemberdayaan masyarakat dan desa	85 PKK tingkat desa yang aktif	PKK	-	-	65	75	82	90	100	412
			86 Cakupan desa berstatus swasembada	Desa	-	7	10	10	10	10	10	50
			Jumlah BUMDES yang aktif	BUMDES	-	47	30	40	40	40	40	190
			87 jumlah Posyandu purnama	unit	384	384	461	538	615	692	769	769
		s Perpustakaan	88 Jumlah perpustakaan umum tingkat kecamatan	unit	1	1	8	8	8	8	8	40

NO	ASPEK	FOKUS	INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL TAHUN		TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
			89 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	-	16.976	17.476	17.976	18.476	18.976	19.476	19.476
		t Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	90 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	%	-	1,278	1,278	1,278	1,278	1,278	1,278	1,278
			91 Jumlah tenaga perlindungan masyarakat (linmas) per Jumlah 10.000 Penduduk	%	20,37	20,37	21,87	23,37	24,87	26,37	27,87	27,87
			92 Peningkatan Siskamling yang aktif	%	NA	NA	10	10	10	10	10	50
		u Pemuda dan olahraga	93 Jumlah wirausaha muda baru	orang	0	0	100	100	100	100	100	500
			94 Prestasi olahraga pelajar (POPDA) tingkat Jawa Barat (Penyelenggara setiap 2 tahunan)	Peringkat	10	10	-	9	-	8	-	8 dari 27 Kab/kota
			95 Prestasi olahraga prestasi (PORDA) tingkat Jawa Barat (Penyelenggara	Peringkat	22	15	-	-	-	14	-	14 dari 27 kab/kota

NO	ASPEK	FOKUS	INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL TAHUN		TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
			n 4 tahunan)									
		v Statistik	96 Buku daerah dalam angka	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
			97 buku PDRB Kab Cirebon	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
		w Pertanian	98 Produksi Beras	Ton	389.379	401.053	413.085	425.477	438.242	451.389	464.931	497.258
			99 Produksi Daging Sapi	Kg	4.419.054	3.638.339	191.013	200.563	210.592	221.121	22.321.772	4.643.545
			101 Produksi Gula	Ton	1.479	33.620	34.965	36.343	37.755	39.201	40.680	40.680
			Produksi Telur	Ton	3.649,80	6.649.923	6.999.044	6.977.773	7.034.829	7.054.074	7.074.282	8.487.175
			Produksi Mangga	Kw/Thn	311,179	400	410	420	430	440	450	450
		x Pariwisata	102 Jumlah kunjungan wisatawan	orang	735.125	808.637	889.500	978.441	1.077.659	1.185.424	1.303.966	1.303.966
			103 Jumlah bangunan cagar budaya yang dipelihara yang menjadi tujuan wisata	Unit	-	-	-	1	1	1	1	4
			104 Jumlah sanggar seni yang terbina	sanggar			10	20	20	20	20	90
		y Kelautan dan perikanan	105 Konsumsi ikan masyarakat	kg/kapita/tahun	24,50	24,75	25	25,25	25,5	25,75	26	26

NO	ASPEK	FOKUS	INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL TAHUN		TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		z Perdagangan	106 sentra pedagang kaki lima sebagai pusat kuliner (kawasan kuliner)	unit	-	-	8	8	8	8	8	40
		a Perindustrian	107 Jumlah cluster industri aktif	Unit	-	-	-	-		1 (kluster rotan)	2 (kluster rotan + batik)	3
			108 Jumlah komoditas ekspor	komoditas		20	22	24	26	28	30	150
C	Daya Saing Daerah	1 Kemampuan Ekonomi Daerah										
		a Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	109 Angka konsumsi pangan per kapita	Rp	307.315,00	338.046,50	371.851,15	409.036,27	449.939,89	494.933,88	544.427,27	
		b Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	110 Angka konsumsi non pangan per kapita	Rp	177027,00	194729,70	214202,67	235622,94	259185,23	285103,76	313614,13	313614,13
		c Nilai PDRB	111 Nilai PDRB atas dasar harga konstan (adhk)	Rp (dalam juta)	9.403.633	9.900.215	10.419.976	10.972.236	11.559.249	12.183.449	12.847.447	12.847.447
			112 Nilai PDRB atas dasar harga konstan (adhb)	Rp (dalam juta)	26,616,041.92	29.016.595	32.372.364	35.962.948	39.970.746	44.446.270	49.446.364	49.446.364
		d Produktivitas total daerah	113 Dihitung produktivitas daerah setiap sektor pada 9									

NO	ASPEK	FOKUS	INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL TAHUN		TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
			sektor :									
			1) Pertanian	-	-	3,34	3,36	3,38	3,41	3,43	3,45	3,45
			2) Pertambangan dan penggalan	-	-	4,96	4,97	4,99	5,00	5,02	5,03	5,03
			3) Industri pengolahan	-	-	3,18	3,19	3,20	3,21	3,21	3,22	3,22
			4) Listrik	-	-	6,34	6,36	6,37	6,39	6,41	6,43	6,43
			5) Bangunan	-	-	6,75	6,77	6,79	6,81	6,83	6,85	6,85
			6) Perdagangan	-	-	5,79	5,80	5,82	5,84	5,86	5,88	5,88
			7) Pengangkutan dan komunikasi	-	-	6,47	6,52	6,57	6,62	6,68	6,73	6,73
			8) Keuangan	-	-	6,53	6,55	6,58	6,60	6,62	6,65	6,65
			9) Jasa	-	-	7,85	7,88	7,90	7,93	7,95	7,98	7,98
		2 Fasilitas Wilayah/Infra struktur										
		a Aksesibilitas daerah	114 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	%	64,09	69,07	78,73	85,27	91,92	96,86	100,00	100

NO	ASPEK	FOKUS	INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL TAHUN		TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
			115 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Desa dalam kondisi mantap	%	66,67	70,12	76,89	83,30	89,71	96,12	100,00	100
			116 Panjang Jaringan Jalan Kabupaten yang terjaga kemantapannya	Km	593,48	482,53	584,15	604,35	603,65	614,65	626,38	626,38
			117 Panjang Jaringan Jalan Desa yang terjaga kemantapannya	Km	102,71	133,49	436,87	433,24	438,07	438,07	438,07	438,07
		b Ketersediaan air bersih	119 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%	-	59,6	64	68	72	76	81	81
		c Fasilitas listrik dan telepon	121 Persentase rumah tangga miskin yang menggunakan listrik	%	-	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	14.850
			122 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%								
		3 Iklim Berinvestasi										
		a Keamanan dan ketertiban	126 Jumlah demo	Kali	35	35	37	37	39	40	40	40
			Demo anarkis	Kali	2	2	2	2	2	1	1	1

NO	ASPEK	FOKUS	INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL TAHUN		TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		b Kemudahan perijinan	127 Jumlah jenis perijinan dengan proses one day service	Jenis	24	24	24	29	29	29	29	29
		c Pengenaan pajak daerah	128 Target capaian pajak daerah (miliar)	Rp		139,83	166,06	199,64	243,4	301,53	380,39	
		d Pengenaan retribusi daerah	129 Target capaian retribusi daerah	Rp		107,52	119,41	132,69	147,52	164,1	182,65	
		e Peraturan daerah	130 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	buah	5	10	11	12	13	14	15	15
		4 Sumber Daya Manusia										
		a Kualitas tenaga kerja	131 Rasio lulusan perguruan tinggi (diploma/S1/S2/S3)	%	2,19	2,30	2,41	2,53	2,66	2,79	2,93	2,93
		b Tingkat ketergantungan	132 Rasio ketergantungan	%	61,93	58,84	55,90	53,10	50,45	47,92	45,53	45,53

TABEL 9.2 Tabel Indikator Visi Misi RPJMD Tahun 2014-2019

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera	1 Meningkatkan SDM yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik	Membentuk SDM yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik	1 Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama	a Angka melek huruf Al-Quran lulusan SD/MD	Lulusan SD yg bisa baca qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim	%		30	38	46	54	62	70
				b Angka Melek huruf Al Quran lulusan SMP	Siswa muslim lulusan SMP yg bisa baca qur'an	%		40	47	54	61	68	75
				c Angka Melek huruf Al Quran lulusan SMA	Siswa muslim lulusan SMA yg bisa baca qur'an	%		45	52	59	66	73	80
				d Angka Melek huruf Al Quran lulusan SMK	Siswa muslim lulusan SMK yg bisa baca qur'an	%		45	52	59	66	73	80
				e Jumlah siswa yang hafal juz 'amma pada pendidikan SLTP dan SLTA	prosestase Siswa muslim lulusan SLTP dan SLTA yg hafal juz 'amma	%	NA	NA	5	5	5	5	5
				f Jumlah DKM yang menyelenggarakan kegiatan ba'da maghrib mengaji	Cukup jelas	DKM	424	424	424	424	424	424	424

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
				g Jumlah penghafal Quran	Jumlah penghafal Quran yang dihasilkan pada tahun berjalan	Orang	NA	755	831	914	1.005	1.105	1.216
				h Prestasi lomba keagamaan tingkat provinsi Jawa Barat	Perolehan peringkat MTQ tingkat Provinsi	Peringkat	peringkat ke 6	Lima besar	Lima besar	Lima besar	Lima besar	Lima besar	Lima besar
				i Jumlah kasus konflik yang bernuansa agama (IKU)	Ada atau tidak adanya kejadian konflik agama	Kasus		6	6	5	5	4	4
	2 Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu dan berkecakupan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan	Meningkatkan derajat SDM yang sehat, berbudaya, berilmu, dan berkecakupan	1 terwujudnya pelayanan pendidikan untuk semua	a Peningkatan indeks pendidikan		%			80,33-81,60	81,67-82,93	83,00-84,27	84,33-85,60	85,67-86,67
				b Angka Melek Huruf (AMH) pada penduduk usia 15 tahun keatas (pp6)	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yg buta huruf dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	%	93,52	94,5-95,4	95,5-96,4	96,5-97,4	97,5-98,4	98,5-99,4	99,5-100
				c Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Tahun	7	7,4	7,5-7,8	7,8-8,1	8,1-8,4	8,4-8,7	8,7-9,0
				d Angka Partisipasi Kasar (APK)									

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
				- SD/MI		%	109,23	111	114	118	122	126	130
				- SMP/MTs		%	110,63	110,62	110,51	110,41	110,31	110,20	110,00
				- SMA/MA		%	79,58	85,87	93,15	100,44	107,73	115,02	122,30
				e Angka Partisipasi Murni (APM)									
				- SD/MI		%	99,99	100	100	100	100	100	100
				- SMP/MTs		%	89,3	89,60	89,90	90,19	90,49	90,79	91,09
				- SMA/MA		%	59,88	60,39	60,84	61,32	61,8	62,28	62,76
				- SMK			45,95	46,45	46,95	47,45	47,95	48,45	48,95
				f Rasio ketersediaan sekolah terhadap jml penduduk per usia tingkatan sekolah									

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
				- SD	Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap jumlah penduduk usia sekolah SD (7-12 tahun)	%	48	48	48	49	49	50	50
				- SMP	Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap jumlah penduduk usia sekolah SMP (13-15 tahun)	%	17	17	18	18	19	19	20
				- SMA dan SMK	Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap jumlah penduduk usia sekolah SMA (16-18 tahun)	%	19	19	19	20	21	22	23
			2 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	a Angka Harapan Hidup (AHH)		Tahun	65,52		65,98	66,12	66,25	66,38	67

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
				b Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah ibu melahirkan dalam keadaan meninggal dunia pada saat melahirkan dibandingkan jumlah seluruh ibu melahirkan	Point			106,42	95,98	83,46	70,94	58,42
				c Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah bayi yang dilahirkan dalam keadaan meninggal dibagi seluruh jumlah kelahiran bayi	Point	4,87	4,60	4,34	3,86	3,36	2,88	2,40
				d Balita gizi buruk (BB/TB)	Berat badan dibandingkan dengan Tinggi badan. Data balita dihitung dari jumlah balita yang ditimbang	%			1,09	0,97	0,85	0,73	0,61

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
				e cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar	jumlah penduduk miskin yang berobat di PKM dibagi total penduduk yang mendapat jaminan kesehatan	orang	1.115.865	1.115.865	1.345.865	1.345.865	1.345.865	1.345.865	1.345.865
				g Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Jumlah rumah sakit (swasta dan negeri) yang ada di Kabupaten Cirebon	%	0,052	0,056	0,055	0,054	0,054	0,053	0,052
				h Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	Jumlah puskesmas, klinik (swasta dan negeri), dan puskesmas pembantu yang ada di Kabupaten Cirebon	%	0,058	0,027	0,027	0,055	0,055	0,054	0,053
				i Jml puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter anak dan kandungan		Unit	-	-	57	57	57	57	57

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
				k Rasio dokter terhadap penduduk	Jumlah seluruh dokter yang bertugas di Kabupaten Cirebon	%	0,144	0,143	0,142	0,140	0,139	0,138	0,137
				l Rasio paramedis terhadap penduduk	Jumlah seluruh paramedis yang bertugas di Kabupaten Cirebon	%	1,389	1,422	1,454	1,485	1,516	1,545	1,574
				m presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dibandingkan seluruh jumlah penduduk Kabupaten Cirebon	%	1.115.000	1.115.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
				n Jumlah Posyandu Purnama	akumulasi jumlah posyandu setiap tahun	Unit	384	384	461	538	615	692	769

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
			3 Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berketrampilan, dan berjiwa kewirausahaan	a Jumlah kawasan seni	Kawasan seni merupakan hamparan wilayah yang meliputi beberapa desa terdekat. Lokasi kawasan seni ada 2 : Gegesik (Gegesik Wetan, Kidul, Kulon, Lor, Kidul, dan Panunggul) dan Trusmi (Trusmi Wetan, Trusmi Kulon, Panembahan, dan Kalitengah)	Kawasan	-	-	-	-	1		1
				b Jumlah pertunjukan/pagelaran/festival budaya tingkat nasional (iku)		Kali				1	1	1	1

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
				c Cakupan peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (spm)	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi	%	74.41%	50%	55%	60%	65%	70%	75%
					Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan kewirausahaan	%	25%	50%	55%	60%	65%	70%	75%
					Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	60.40%	30%	35%	40%	45%	50%	55%
					Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100%	40%	45%	50%	60%	70%	75%
					Besaran Pekerja/buruh yang menjadi program jamsostek.	%	67.23%	40%	45%	50%	50%	55%	60%

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	44.25%	35%	40%	45%	50%	55%	60%
					Besaran Pengujian peralatan di Perusahaan.	%	40.45%	40%	45%	50%	55%	60%	65%
				d Jumlah wirausahawan baru	Wirausaha baru setiap tahun	Orang			100	100	100	100	100
				e Angka pengangguran terbuka	Jumlah Pengangguran terbuka tiap tahun	%	9,9	9,7	9,5	9,3	9,1	8,9	8,7
			4 Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya	a Meningkatnya kunjungan wisatawan	Kenaikan kunjungan wisatawan setiap tahun	%			10	10	10	10	10

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
			5 Terwujudnya peningkatan peran pemuda dan prestasi Olah raga	a prestasi olahraga di tingkat Provinsi Jawa Barat	Peringkat prestasi olah raga yang mendapat medali dalam pertandingan tingkat Jawa Barat	peringkat - POPDA - PORDA	10 22	10 15		9		8 14	
	3 Mendorong pemerataan pembangunan tematik/sectoral dan kewilayahan berdasarkan potensi yang tersedia	Mendorong pemerataan pembangunan sektoral dan kewilayahan	1 Peningkatan koneksitas antar wilayah	a Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Akumulasi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Kilometer		446,64	509,14	551,44	594,44	626,44	646,65
			2 Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	b Jumlah panjang ruas jalan poros desa dalam kondisi baik		Kilometer		328,21	359,91	389,91	419,91	449,91	468,07
				a jaringan irigasi:									

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
				- panjang saluran induk	akumulasi panjang saluran induk dalam kondisi baik	km		54,218	58,995	63,772	68,548	73,325	78,102
				- panjang saluran sekunder	akumulasi panjang saluran sekunder dalam kondisi baik	km		28,467	30,666	32,866	35,065	37,262	39,464
				c jumlah rumah tangga berakses air minum untuk keperluan sehari-hari	akumulasi RT yang terlayani air bersih	Rumah tangga	67.122	67.122	84.400	102.100	118.620	150.320	210.700
				d jumlah daerah rawan banjir		kec	12	10	8	6	4	2	-
				f prosentase pengangkutan sampah	Jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk daerah layanan persampahan	%		27%	32%	37%	42%	47%	52%

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
				g Persentase penduduk yg terlayani sistem jaringan drainase Skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	Jumlah kumulatif penduduk yang rumahnya terlayani sistem drainase dibagi jumlah kumulatif masyarakat seluruh kota.	%		25%	30%	35%	40%	45%	50%
				h Persentase pengurangan sampah di perkotaan (daerah layanan persampahan)	Persentase Jumlah penduduk yang dilayani yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah (3R) dibagi dengan total jumlah penduduk	%		42%	39%	36%	33%	30%	20%

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
				i Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya .	%	59,7%	63%	67%	71%	75%	79%	84%
				j Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (pos jaga)	Cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan bencana kebakaran dengan wilayah manajemen kebakaran yang ditandai dengan ketersediaan pos jaga dan prasarana pendukung lainnya	Pos jaga	9	9	9	10	12	13	14

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
			3 Terwujudnya Cirebon yang bersih, Asri dan lestari	a Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah mandiri	Kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas 3R	Kelompok	NA	3	7	8	8	8	8
				b Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Kecamatan yang memiliki RTH ≥ 1 Ha	%		1	3	10	20	30	40
				c Prosentase kawasan lindung		%	NA	NA	30	30	30	30	30
				d Penghargaan Adipura	piala adipura	kali		1	1	1	1	1	1
	4 Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik dan komuniti)	Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	1 Terwujudnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	a Jumlah komunitas		Komunitas		70	75	80	85	90	92
				b Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		Kelompok		70	75	80	85	90	92
				c Jumlah lembaga ekonomi pedesaan		Lembaga			84	169	254	339	424

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	5 Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram	Meningkatkan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	1 Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	a Nilai PDRB	Bersumber dari BPS Kab. Cirebon	Rp (dln juta)	9.403.633	9.900.215	10.419.976	10.972.236	11.559.249	12.183.449	12.847.447
				b Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Bersumber dari BPS Kab. Cirebon	%	5,07	5,20	5,35	5,40	5,45	5,50	5,55
				c PDRB per kapita	Bersumber dari BPS Kab. Cirebon	Rp	11.639.000	13.398.988	14.765.489	16.210.302	17.811.979	19.590.887	21.568.345
				d Tingkat inflasi	Data inflasi merujuk pada tingkat inflasi Kota Cirebon	%	3,03	3,5-4,5	3,5-4,5	3,5-4,5	3,5-4,5	3,5-4,5	3,5-4,5
				e Jumlah daerah rawan pangan		Desa	13	12	11	10	9	8	7
				f Nilai investasi	Investasi yang terdaftar di BPPT	Rp (juta)	744.765	756.250	853.192	981.171	1.128.347	1.297.599	1.492.239

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
				g Prosentase Koperasi aktif	prosentase koperasi yang aktif terhadap jumlah koperasi yang ada			86,42	88,42	91,00	94,00	97,00	100,00
				h Jumlah lokasi wisata kuliner di kecamatan		Lokasi			8	8	8	8	8
			2 Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	a Menurunnya Jumlah penduduk miskin	Prosentase penduduk miskin setiap tahun	%	14,47	14,00	13,53	13,06	12,59	12,12	11,65
				b Meningkatnya cakupan listrik bagi penduduk			99,50	99,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6 Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Mewujudkan reformasi sistem birokrasi	1 Terwujudnya pelayanan publik yang prima	a Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala 1-5		3,50	3,63	3,75	3,88	4,00	4,13	4,25
				b Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan SOP dan SPM		unit		4	5	6	7	9	11
				c Kecamatan yang menjalankan Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan (PATEN)	Terdapat 120 indikator kinerja				1	10	20	30	40

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	(KKN)												
			2 Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	a Rasio pegawai S2 terhadap jumlah seluruh pegawai		%		2,1	2,4	2,8	3,1	3,4	3,7
				b Penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi/ latar pendidikan		%		80%	85%	90%	95%	100%	100%
			3 Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih	a Rata-rata capaian kinerja SKPD		%	40	45	50-55	55-60	60-70	65-70	70-75%
				b Penilaian RAD Pencegahan Penanggulangan Korupsi (PPK)			kurang	kurang	cukup	baik	baik	baik	baik
				c Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal		%	-	-	2	3	3	4	5
				d Peningkatan Pendapatan asli daerah		%	-	-	15	15	15	15	15

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Cirebon dan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2014-2019 adalah:

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon
yang agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera“

Untuk memperjelas tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan, pengertian visi di atas sebagai batasan operasionalnya, yaitu:

- Agamis : Suatu kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada pengalaman nilai-nilai agama menuju tatanan masyarakat dan aparatur pemerintah yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.
- Maju : Suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing nasional dan global berdasarkan kemampuan, ketrampilan, keunggulan, dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan sumber daya yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik, berprestasi dan berdaya guna.

- Adil : Suatu kondisi masyarakat yang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya.
- Sinergi : Suatu kondisi pembangunan daerah yang menjadi bagian dari pembangunan Jawa Barat dan Nasional yang merupakan satu kesatuan
- Sejahtera : Suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan pokok/dasarnya secara lahir dan bathin dalam berbagai aspek dan memiliki rasa aman, damai dan tentram.

5.2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut, Bupati Cirebon menyusun misi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut:

- Misi pertama,** Meningkatkan SDM yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik
- Misi Kedua,** Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu, dan berketrampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan
- Misi Ketiga,** Mendorong pemerataan pembangunan tematik/sektoral dan kewilayahan berdasarkan potensi yang tersedia
- Misi Keempat,** Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik, dan komunitas)
- Misi Kelima,** Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram
- Misi Keenam,** Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019, tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun kedepan sebagai berikut:

1. Membentuk sumber daya manusia yang memiliki integritas (jati diri), sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai agama, jujur dan bertakwa

Sasaran:

- Meningkatnya prasarana keagamaan dan aktivitas pendidikan agama di masyarakat
- Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama

2. Meningkatkan derajat SDM yang sehat, berbudaya, berilmu, berketrampilan dan berdaya saing

Sasaran:

- Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
- Meningkatnya peran perempuan dan perlindungan anak
- Meningkatnya implementasi kehidupan masyarakat berbasis budaya dan kearifan lokal
- Meningkatnya pelayanan pendidikan untuk semua
- Meningkatnya minat baca masyarakat
- Meningkatnya ketrampilan masyarakat
- Meningkatnya daya saing pariwisata Kabupaten Cirebon
- Meningkatnya prestasi olahraga

3. Meningkatkan pemerataan pembangunan sektoral dan kewilayahan

Sasaran:

- Meningkatnya prasarana wilayah yang memadai dan koneksitas wilayah
- Meningkatnya kepemilikan rumah sehat dan murah
- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

4. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan

Sasaran:

- Meningkatnya sinergi pembangunan antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha dan komunitas

5. Meningkatkan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Sasaran :

- Meningkatnya perekonomian masyarakat

6. Mewujudkan reformasi sistem birokrasi

Sasaran :

- Meningkatnya pelayanan publik yang prima
- Meningkatnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah
- Meningkatnya tata pemerintahan yang baik dan bersih

Tabel 5.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera

Misi		Tujuan	Sasaran	
1	Meningkatkan kualitas SDM yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik	Membentuk sumber daya manusia yang memiliki integritas (jati diri), sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai agama, jujur dan bertakwa	1	Meningkatnya prasarana keagamaan dan aktivitas Pendidikan agama di Masyarakat
			2	Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama
2	Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu, dan berketrampilan melalui pembangunan	Meningkatkan derajat SDM yang sehat, berbudaya, berilmu, berketrampilan dan berdaya saing	1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
			2	Meningkatnya peran perempuan dan dan perlindungan anak
			3	Meningkatnya implementasi kehidupan masyarakat berbasis budaya dan kearifan lokal

Misi		Tujuan	Sasaran	
	pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan		4	Meningkatnya pelayanan pendidikan untuk semua
			5	Meningkatnya minat baca masyarakat
			6	Meningkatnya ketrampilan masyarakat
			7	Meningkatnya daya saing pariwisata Kabupaten Cirebon
			8	Meningkatnya prestasi olahraga
3	Mendorong pemerataan pembangunan tematik/sektoral dan kewilayahan berdasarkan potensi yang tersedia	Meningkatkan pemerataan pembangunan sektoral dan kewilayahan	1	Meningkatnya prasarana wilayah yang memadai dan koneksitas wilayah
			2	Meningkatnya kepemilikan rumah sehat dan murah
			3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
			4	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang
4	Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik, dan komuniti)	Menciptakan lingkungan kondusif yang partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	1	Meningkatnya sinergi pembangunan antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha dan komunitas
5	Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram	Meningkatkan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	1	Meningkatnya perekonomian masyarakat
6	Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	Mewujudkan reformasi sistem birokrasi	1	Meningkatnya pelayanan publik yang prima
			2	Meningkatnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah
			3	Meningkatnya tata pemerintahan yang baik dan bersih

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna). Secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2014-2019, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2014-2019 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan pada tabel 6.1. dibawah ini.

Tabel. 6.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera

Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Membentuk SDM yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik	Meningkatnya prasarana keagamaan dan aktifitas Pendidikan agama di Masyarakat	Perbaikan sistem pendidikan agama, Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan agama	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan pendidikan agama dan keagamaan: - Gerakan mengaji awal belajar (GEMAR) - Gerakan 'One Day One ayat" (Go Doa) - Ba'da Maghrib Mengaji - Stimulan insentif bagi imam masjid/mushollah dan penghafal al Quran - Pemberian beasiswa bagi guru MD
			Penyusunan regulasi pendidikan keagamaan
	Meningkatnya aktifitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama	Meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dalam pembangunan dengan arah kebijakan penguatan lembaga keagamaan	Penguatan implementasi kesalehan sosial dan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai ajaran agama

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		meningkatkan kerukunan antar agama dan pemahaman pengamalan agama dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik inter maupun antar umat beragama	Memantapkan kerjasama antara umat beragama dan pemerintah Menciptakan kondisi yang kondusif dan toleran bagi pelaksanaan kehidupan beragama
Misi : Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu, dan berketrampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan derajat SDM yang sehat, berbudaya, berilmu, berketrampilan dan berdaya saing	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau	Penyelenggaraan Pendidikan terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat terutamanya bagi keluarga kurang mampu
			Peningkatan dan pemerataan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat
			Perbaikan tata kelola Pendidikan
			Pengembangan Pendidikan Vokasional berbasis potensi lokal
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
	Meningkatnya minat baca masyarakat	Peningkatan budaya membaca	Menghidupkan budaya literasi masyarakat
	Terwujudnya peningkatan	Peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terutama bagi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	kualitas kesehatan masyarakat	berkualitas dan terjangkau	keluarga tidak mampu
			Perbaikan tata kelola penyelenggaraan kesehatan
			Peningkatan dan pemerataan aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan
	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berketrampilan dan berjiwa kewirausahaan	Peningkatan kesehatan keluarga dan reproduksi	Pembentukan kampung kb
		Pelestarian seni dn budaya berbasis kearifan lokal	Pengembangan nilai-nilai budaya lokal
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan budaya
		Peningkatan pelatihan keterampilan bagi masyarakat	Optimalisasi balai latihan kerja
			Fasilitasi magang ke luar negeri
		Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan dan SDM kewirausahaan	Pelatihan gratis di lembaga pelatihan non BLK Cirebon
			Penciptaan kampung wirausaha dan bebas pengangguran
		Pengembangan ketransmigrasian	Pelatihan kewirausahaan
			Peningkatan kualitas penyelenggaraan ketransmigrasian
	Terwujudnya kabupaten cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya	Meningkatkan keunggulan dan daya tarik wisata	Pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Kabupaten Cirebon

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Terwujudnya peningkatan peran perempuan dan dan perlindungan anak	Pembanguann berkesetaraan gender dan perlindungan anak	Perbaikan tata keloloa pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menuju cirebon berkesetaraan gender dan anak ceria
	Terwujudnya peningkatan peran dan prestasi pemuda	Peningkatan kapasitaas pemuda dan sarana olah raga	Mendorong peran pemuda dlm pembangunan
			Penyediaan sarpras olahraga dan kepemudaan
			Peningkatan perenserta masy dalam penyelenggaraan olah raga
Misi : Mendorong pemerataan pembangunan tematik/sektoral dan kewilayahan berdasarkan potensi yang tersedia			
TUJUAN	SASARAN	Strategi	Arah kebijakan
Mendorong pemerataan pembangunan sektoral dan kewilayahan	Peningkatan koneksitas antar wilayah	Peningkatan sarana-prasarana perkotaan dan perdesaan	Memantapkan kondisi transportasi jalan dan jembatan (Cirebon Berhotmik Mulus)
			Pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan dan terpencil
			Penyediaan moda transportasi humanis
	Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	Peningkatan aksesibilitas jalan produksi	Perluasan dan pemantapan jalan produksi pertanian dan perikanan
		Peningkatan infrastruktur SDA	Meningkatkan dan memperluas jaringan irigasi
			Meningkatkan konservasi , pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air
			Pengendalian banjir
		Peningkatan pelayanan prasarana sanitasi, perumahan dan permukiman	Meningkatkan sistem jaringan drainase
		Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		masyarakat	
			Meningkatkan jangkauan pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan
			Meningkatkan ketersediaan perumahan murah bagi masyarakat miskin
		Peningkatan pelayanan pengendalian bencana kebakaran dan bencana alam	Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana kebakaran
			Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana alam
		Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Penegak hukum lingkungan
			Meningkatkan upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan
			Meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan berdasarkan perkembangan sains dan teknologi
		Perbaikan pola perencanaan dan pengendalian tata ruang	Penyelenggaraan pola penataan ruang yang partisipatif
Misi : Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik, dan komunitas)			
TUJUAN	SASARAN	Strategi	Arah kebijakan
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	Adanya sinergi pembangunan antara pemerintah daerah, dunia akademik, dunia usaha dan komunitas	Peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal
			Meningkatkan peran serta dan fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Menumbuhkan semangat inisiasi, kemandirian dan gotong royong masyarakat
		Melakukan kemitraan pembangunan dengan dunia usaha, LSM dan akademika	Meningkatkan peran serta dunia usaha dalam pembangunan
			Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam mendorong pencapaian target pembangunan
			Meningkatkan peran serta lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan
		Kerjasama antar daerah	Penataan wilayah perbatasan
			Kerjasama pembangunan antar daerah
Misi: Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram			
Meningkatkan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan	Penciptaan klinik agribisnis untuk meningkatkan produktivitas pertanian/perkebunan/peternakan/kehutanan
			Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan
			Mengembangkan aneka usaha non kayu sekitar hutan
			Mengembangkan hutan rakyat
			Meningkatkan daya saing industri
			Meningkatkan pengusaha dan nilai tambah produksi sumber daya mineral
			Meningkatkan ketahanan pangan individu (Cirebon bebas rawan pangan)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Penguatan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat	Pelayanan perijinan yang profesional, murah dan terjangkau
			Penciptaan kampung wirausaha dengan Penguatan peran dan fungsi kelembagaan dan kapasitas SDM
			Fasilitasi pengembangan sistem pembiayaan dan peluang pasar KUMKM
		Peningkatan sistem jaringan distribusi barang serta pengembangan pasar dalam dan luar negeri	Meningkatkan ekspor produk unggulan
			Revitalisasi pasar daerah dan fasilitasi pengembangan pasar desa
	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	Percepatan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat	Menciptakan keluarga yang berkualitas dan sejahtera
			Peningkatan pelayanan PMKS
Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan reformasi sistem birokrasi	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Peningkatan kinerja pelayanan kelembagaan pemerintah	Mengembangkan pelayanan publik yang prima
			Memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan berbasis kewilayahan
	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Pengelolaan manajemaen kepegawaian yang mendukung pemenuhan pelayanan prima	Perbaiki tata kelola penyelenggaraan diklat pegawai
			Fasilitasi beasiswa program 250 master dan doktoral

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan kapasitas kelembagaan	Optimalisasi pelaksanaan analisis jabatan dan pemantapan restrukturisasi kelembagaan
			Pelaksanaan remunerasi bagi pegawai
		Peningkatan efektifitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan	Peningkatan sistem pengawasan dan Pengendalian internal yang efektif
			Mengembangkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan (e-gov) Dalam rangka peningkatan Pelayanan kepada masyarakat
			Meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan daerah dan kinerja pengelolaan kearsipan menuju tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
			Penataan Aset daerah
		Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan	Meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan yang partisipatif
			Perbaikan tata kelola penyelenggaraan pelayanan data dan informasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah secara transparan, valid dan terpadu
			Meningkatkan kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan yang pro rakyat
			Mewujudkan sistem perencanaan dan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			penganggaran terpadu, transparan, dan akuntabel yang berbasis kinerja
			Mengefektikan pengendalian dan evaluasi pembangunan
		Peningkatan pendapatan daerah	Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah
			Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD
			Meningkatkan kualitas kebijakan pendapatan daerah
	Terwujudnya Peningkatan kualitas ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat	Peningkatan kapasitas legislasi	Peningkatan fungsi kesekretariatan DPRD
		Penciptaan wawasan kebangsaan yang mengarah kepada terwujudnya sistem perlindungan masyarakat dan ketahanan bangsa	Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis, dinamis dan bersatu yang berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya
			Meningkatkan kemandirian institusi-institusi sosial dan politik pada tataran suprastruktur dan infrastruktur politik sebagai unsur perekat, pemelihara dan pengaman kondusifitas daerah

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Kebijakan Umum

Visi dan misi dalam pembangunan Kabupaten Cirebon perlu diterjemahkan dalam kebijakan umum dan program pembangunan yang spesifik. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran, dan program-program yang *inherent*.

Untuk memantapkan tujuan dan sasaran visi dan misi pembangunan tersebut didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014), Instruksi presiden Nomor 3 tahun 2010 sebagai bagian dari program dunia untuk mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, serta dalam rangka mensinergikan program prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat.

RPJMD 2014-2019 yang merupakan tahapan ketiga dalam arah pembangunan RPJPD Kabupaten Cirebon 2005-2025 ditujukan untuk memantapkan pencapaian masyarakat yang sejahtera disegala bidang yang ditandai dengan peningkatan angka IPM. Kebijakan umum RPJMD 2014-2019 ini pada akhirnya ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Cirebon pada tahun 2025 yaitu *“Terbangunnya Sumber Daya Manusia yang **Beriman** dan **Produktif** Menuju Masyarakat Kabupaten Cirebon yang **Sejahtera**”*

Penyusunan kebijakan umum pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019 dikelompokkan sesuai bidang utama pengembangan program pembangunan, yaitu (1) bidang sosial budaya; (2) bidang ekonomi; (3) bidang fisik- sarana dan prasarana; (4) bidang pemerintahan.

Kebijakan umum pembangunan sosial budaya merepresentasikan misi 1, 2, 4 dan 5. Kebijakan umum pembangunan ekonomi, merepresentasikan misi ke 5. Kebijakan umum bidang fisik-sarana dan prasarana merepresentasikan misi 3. Kemudian,

Kebijakan umum bidang pemerintahan merepresentasikan misi 6. Namun, kebijakan umum bidang pemerintahan ini mewadahi urusan-urusan yang secara implisit dapat tertampung dalam enam misi. Penyusunan kebijakan umum dalam kelompok bidang utama pembangunan ini sekaligus merepresentasikan cara mencapai sasaran dalam masing-masing bidang pembangunan.

Selanjutnya gambaran kebijakan umum pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019 sebagai berikut:

7.1.1. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Sosial Budaya

1. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan berakhlak mulia, melalui kebijakan peningkatan penyelenggaraan pendidikan umum dan pendidikan agama, optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau serta peningkatan kapasitas atau *life skill* masyarakat.
2. Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam rangka sinergi pembangunan antar pemangku kepentingan pembangunan
3. Membangun kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan melalui pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat (PMKS), peningkatan peran serta dan prestasi pemuda, perlindungan perempuan dan anak, serta pelestarian seni dan budaya lokal.

7.1.2. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Ekonomi

1. Membangun ekonomi daerah melalui penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal wilayah;
2. Meningkatkan investasi daerah dalam rangka perluasan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan daerah;
3. Membangun danmemantapkan kemajuan usaha mikro, kecil, menengah, (UMKM) dan koperasi dengan penguatan kemampuan dan daya saing kelembagaan UMKM.

7.1.3 Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Fisik-Sarana dan Prasarana

1. Membangun wilayah yang terkoneksi, nyaman dan lestari, melalui pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang ramah lingkungan, ramah anak, dan ramah investasi guna mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia;
2. Mengembangkan Perencanaan dan Pengendalian pemanfaatan ruang yang mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

7.1.4 Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Tata Pemerintahan

1. Review regulasi untuk menghasilkan regulasi daerah pro ekonomi kerakyatan (pro poor), membuka kesempatan kerja (pro job), mendorong pertumbuhan ekonomi (pro growth), dan ramah lingkungan dan berkelanjutan (pro environment), secara adil bagi semua kelompok tanpa diskriminasi.
2. Pelayanan administrasi umum yang prima (berdaya tanggap, kepastian, dapat dipercaya, ramah).
3. Pengawasan aparatur untuk menjamin kepercayaan (*trust*) dunia usaha dan masyarakat.
4. Penegakan kepastian pelaksanaan regulasi daerah.
5. Pengembangan sistem administrasi dan pendataan yang akurat dan akuntabel untuk mendukung perencanaan, implementasi, monitoring, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.
6. Pengembangan sistem komunikasi dan informasi pembangunan dan pemerintahan yang transparan, cepat, dan akuntabel.
7. Pengembangan kapasitas SKPD untuk menjalin kerjasama pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kemampuan pembiayaan pelayanan publik.

7.2. Kebijakan Kewilayahan

Prioritas pembangunan kewilayahan Kabupaten Cirebon merujuk pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sesuai dengan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2013¹ yaitu :

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Arjawinangun

PKL Arjawinangun berfungsi utama sebagai wilayah pertanian. Sementara, fungsi penunjangnya adalah perikanan tangkap, dan budidaya, agrowisata, industri, pendidikan tinggi, pelayanan sosial-ekonomi, penunjang fungsi PKN. Prioritas pembangunan di wilayah PKL Arjawinangun adalah :

- a. Penyusunan Rencana KSK Agro Arjawinangun
- b. Penyusunan Rencana KSK Gunungjati
- c. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Koridor Jalur KA Arjawinangun - Kertajati
- d. Penyusunan Rencana Kawasan Wisata Budaya Pesisir Cirebon Kec. Kapetakan, Suranenggala, dan Gunungjati
- e. Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman dan Perumahan Kec. Kapetakan, Suranenggala, dan Gunungjati
- f. Pengembangan dan Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa Kec. Arjawinangun & Panguragan

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Palimanan

PKL Palimanan berfungsi utama sebagai wilayah industri. Sementara, fungsi penunjang wilayah ini adalah perumahan, pariwisata, agrowisata, pertanian, industri batualam, pertambangan, perikanan budidaya, pendidikan kejuruan, pelayanan sosial ekonomi, penunjang fungsi PKN.

Prioritas pembangunan di wilayah PKL Palimanan adalah :

- a. Penyusunan Rencana KSK Plumbon Zona Industri
- b. Pengembangan dan Penataan Kawasan Pertambangan Kecamatan Palimanan, Gempol, Ciwaringin dan Dukupuntang
- c. Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman dan Perumahan

- d. Pengembangan dan Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa Koridor Jalan Palimanan - Cirebon

3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Sumber

PKL Sumber berfungsi utama sebagai wilayah pemerintahan, perdagangan, dan jasa. Sementara, fungsi penunjangnya adalah perumahan, pendidikan tinggi, pertanian, pariwisata, industri, perikanan budidaya, pelayanan sosial ekonomi, pendidikan kejuruan, pertambangan, penunjang fungsi PKN

Prioritas pembangunan di wilayah PKL Sumber adalah :

- a. Penyusunan Rencana KSK Rehabilitasi Lingkungan Hidup Kec. Sumber; Talun; Beber; dan Greged;
- b. Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman dan Perumahan kecamatan Talun
- c. Pengembangan dan Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa

4. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Lemahabang

PKL Lemahabang berfungsi utama sebagai wilayah pengembangan industri manufaktur. Sementara, fungsi penunjang adalah industri, pertanian, perumahan, pariwisata, pelayanan sosial ekonomi, pertambangan, pendidikan kejuruan, industri hasil hutan, penunjang fungsi PKN

Prioritas pembangunan di wilayah PKL Lemahabang adalah :

- a. Penyusunan Rencana KSK Mundu -Losari
- b. Penyusunan Rencana KSK Rehabilitasi Lingkungan Hidup Kec. Lemahabang; Sedong; Karangsembung; Karangwareng; dan Susukanlebak
- c. Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman dan Perumahan Kec. Mundu, Astanajapura, dan Pangenan; dan Karangwareng
- d. Pengembangan dan Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa Kec. Lemahabang dan Astanajapura

5. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Ciledug

PKL Ciledug berfungsi utama untuk pertanian. dan, fungsi penunjang kegiatan perikanan, perdagangan hasil pertanian, industri, pergudangan, pelabuhan intra seluler, perumahan, pelayanan sosial ekonomi, pelayanan sosial ekonomi, pendidikan kejuruan, pariwisata, pertambangan, penunjang fungsi PKN.

Prioritas pembangunan di wilayah PKL Ciledug adalah :

- a. Penyusunan KSK agro Ciledug
- b. Pengembangan dan penataan kawasan permukiman dan perumahan
- c. Penyusunan Rencana Kawasan Wisata Budaya Pesisir Cirebon di gebang
- d. Pengembangan dan Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa

Selain kebijakan kewilayahan yang didasarkan pada kebijakan tata ruang wilayah, dari sisi pembiayaan pembangunan wilayah pemerintah Kabupaten Cirebon menerapkan kebijakan pendanaan pembangunan kewilayahan dengan konsep Pagu Indikatif Kewilayahan. Hal ini dilakukan untuk lebih meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam mendorong pencapaian target pembangunan wilayah.

Adapun definisi operasional Pagu Indikatif Kewilayahan adalah :

- Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) adalah sejumlah patokan batas anggaran belanja yang bersifat indikatif untuk menampung usulan program/kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
- Mekanisme penyusunan program/kegiatan untuk pagu indikatif kewilayahan ini dilakukan secara partisipatif melalui musrenbang kecamatan dan berdasarkan prioritas dari beberapa program yang diusulkan oleh setiap desa/kelurahan, yang menjadi prioritas pembangunan wilayah kecamatan;
- Pelaksanaan program/kegiatannya sendiri dilakukan oleh SKPD terkait, sesuai dengan urusannya, disinkronkan dengan renja SKPD.
- Jenis Program/kegiatan dibagi dalam tiga aspek besar (aspek fisik, social budaya, pemerintahan, dan ekonomi) dengan proporsi yang berbeda.

- PIK bukanlah alokasi dana yang diberikan kepada pihak kecamatan, melainkan besaran dana pembangunan di kecamatan (bottom-up planning) yang dilaksanakan oleh SKPD. PIK menjadi pegangan bagi SKPD dalam menyusun dan merencanakan kegiatan (pembangunan) di kecamatan.

7.3. Program Pembangunan Daerah

7.3.1 Program-Program Penjabaran Misi Ke-1 :

Program-program Bidang Agama

- Program Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama
- Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
- Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Kerukunan Umat Beragama
- Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan

7.3.2 Program-Program Penjabaran Misi Ke-2 :

Program-Program Bidang Pendidikan

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- Program Pendidikan Menengah
- Program Pendidikan Non Formal dan Informal
- Program Peningkatan Mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program-Program Bidang Perpustakaan

- Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Program-Program Bidang Kesehatan

- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Pengawasan Obat dan Makanan

- d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- h. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- i. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru /rumah sakit mata
- j. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru /rumah sakit mata
- k. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
- l. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
- m. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
- n. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Program-Program Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. Program Keluarga Berencana
- b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- c. Program pelayanan kontrasepsi
- d. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
- e. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
- f. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling Kesehatan reproduksi Remaja (KRR)

Program-Program Bidang Kebudayaan

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya
- b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- d. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Program-Program Bidang Pariwisata

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- c. Program Pengembangan Kemitraan

Program-Program Bidang Ketenaga Kerjaan :

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program-Program Bidang Ketrasmigrasian

- a. Program pengembangan wilayah transmigrasi
- b. Program Trasmigrasi Lokal

Program-Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak:

- a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- c. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
- d. Program Kota Layak Anak

Program-Program Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- a. Program peningkatan peran serta kepemudaan
- b. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
- c. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
- d. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

7.3.3 Program-Program Penjabaran Misi Ke-3 :

Program-program Bidang Pekerjaan Umum

- a. Program pembangunan jalan-jalan dan jembatan
- b. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan
- c. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya
- d. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, sumber daya air lainnya
- e. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- f. Program pengendalian banjir
- g. Program pembangunan infrastruktur pedesaan
- h. Program peningkatan Infrastruktur pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan

Program-Program Bidang Perhubungan :

- a. Program peningkatan pelayanan angkutan umum
- b. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Program-Program Bidang perumahan dan pemukiman:

- a. Program pengelolaan bangunan gedung/rumah negara
- b. Program pemberdayaan komunitas perumahan
- c. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Program-Program Bidang Lingkungan Hidup:

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
- e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- f. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan
- g. Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
- h. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program-program Penataan Ruang:

- a. Program Perencanaan Tata Ruang
- b. Program Pemanfaatan Ruang
- c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

7.3.4 Program-Program Penjabaran Misi Ke-4:

Program-program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

- a. Program peningkatan keberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
- b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
- c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Program-Program Bidang Kerjasama antar stake holder

- a. Program Pengembangan Kemitraan
- b. Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

7.3.5 Program-Program Penjabaran Misi Ke-5 :

Program-Program Bidang Sosial

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial
- c. Program Pembinaan Anak Terlantar
- d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
- e. Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Program-program Bidang Pertanian:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- b. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- c. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
- d. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- e. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
- f. Program peningkatan produksi hasil peternakan
- g. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- h. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
- i. Program peningkatan Infrastruktur pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan

Program-program Bidang Kehutanan

- a. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
- b. Program Rehabilitasi hutan dan lahan

Program-program Bidang Kelautan dan Perikanan

- a. Program peningkatan kapasitas kelautan dan perikanan
- b. Program pembinaan dan pengembangan mutu hasil perikanan
- c. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan/pesisir
- d. Program peningkatan manajemen usaha kelautan dan perikanan
- e. Program pengendalian hama dan penyakit ikan
- f. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
- g. Program pengembangan budidaya perikanan
- h. Program pengembangan perikanan tangkap
- i. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
- j. Program pengelolaan pelabuhan perikanan dan alur lalu lintas kapal perikanan

- k. Program peningkatan produksi benih ikan
- l. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan

Program-program Bidang Ketahanan Pangan

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program-program Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM)

- a. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil menengah
- c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- d. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kelembagaan Koperasi

Program-program Bidang Industri

- a. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
- b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- d. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

Program-program Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:

- a. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
- b. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Program-program Bidang Penanaman Modal

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- c. Program Penyiapan Potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

Program-program Bidang Perdagangan:

- a. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
- b. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
- c. Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor
- d. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- e. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

7.3.6 Program-Program Penjabaran Misi Ke-6 :

Program-Program Bidang Perencanaan Pembangunan

- a. Program pengembangan data/informasi perencanaan
- b. Program Kerjasama Pembangunan
- c. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- d. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh dan cepat tumbuh
- e. Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- f. Program perencanaan pembangunan daerah
- g. Program perencanaan pembangunan ekonomi
- h. Program perencanaan sosial budaya
- i. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
- j. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Program-Program Bidang Komunikasi dan Informatika

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- b. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
- c. Program fasilitas Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
- d. Program kerjasama informasi dan media masalokal dan nasional

Program-program Bidang Pertanahan :

- a. Program penataan penguasaan, kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah

Program-Program Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- b. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
- c. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan daerah
- d. Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa
- e. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- f. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- g. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- h. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- i. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- j. Program pengentasan kemiskinan
- k. Program PenataanAset Daerah
- l. Program Pengembangan BUMD
- m. Program pengembangan kebijakan pemerintah
- n. Program penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah
- o. Program penataan ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah
- p. Program penataan pendayagunaan aparatur daerah
- q. Program pendidikan kedinasan
- r. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- s. Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Program-program Bidang Statistik

- a. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Program-program Bidang Kearsipan :

- a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
- b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
- c. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
- d. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Program-program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Program pemeliharaan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dan tindakan kriminal
- c. Program pengembangan wawasan kebangsaan
- d. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- e. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)
- f. Program pendidikan politik masyarakat
- g. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Program-program Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Program pendataan dan perkembangan kependudukan
- b. Penataan administrasi kependudukan
- c. Program pelayanan pencatatan sipil
- d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas meliputi program unggulan kepala daerah dan program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang semuanya diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019.

8.1. Program Unggulan Kepala Daerah

Program unggulan ditetapkan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati Cirebon selama kampanye pemilihan kepala daerah yang menjadi prioritas pertama program pembangunan daerah tahun 2014-2019. Ada 18 program unggulan kepala daerah meliputi:

1. Cirebon Bebas Buta Huruf al Qur'an / Cirebon Melek Huruf Qur'an;
2. Cirebon Bebas Biaya Pendidikan dan Bebas Putus Sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah / Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Semua;
3. Cirebon Berbudaya Membaca;
4. Cirebon Gratis Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Miskin/Cirebon Bebas Balita Gizi Buruk /Cirebon Gratis Pelayanan Jaminan Persalinan/Cirebon Sehat;
5. Cirebon Kota Kreasi Seni, Berbudaya, dan Dimensi Destinasi Wisata;
6. Cirebon Berprestasi;
7. Cirebon Bebas Pengangguran;
8. Kampung Keluarga Berencana (Ber KB);
9. Cirebon Berhotmik, Mulus dan Bebas Banjir
10. Penyediaan Rumah Murah Bagi Keluarga Miskin
11. Cirebon Bersih, Asri, dan Lestari
12. Cirebon Berkesetaraan Gender dan Anak Ceria
13. Cirebon Bebas Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Informal
14. Kampung Wirausaha

15. Cirebon Bebas Rawan Pangan
16. Klinik Agribisnis Bagi Petani
17. Cirebon Terang Bagi Keluarga Miskin
18. Fasilitas Beasiswa 250 Master

8.2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Kabupaten Cirebon menyusun berbagai program yang disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan daerah serta sekaligus memuat penjabaran dari program unggulan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan target kinerja terukur yang akan dilaksanakan oleh semua SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Rekapitulasi rencana program dan pagu indikatif pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 8.1. Rekapitulasi Program dan Pagu Indikatif Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	2015		2016		2017		2018		2019		KONDISI AKHIR	
		Program	Rp	Program	Rp	Program	Rp	Program	Rp	Program	Rp	Program	Rp
	URUSAN WAJIB												
1	Pendidikan	12	143.553.291.605	12	173.770.778.801	12	191.038.102.877	12	213.778.959.361	12	282.245.058.416	12	1.004.386.191.059
2	Kesehatan	21	432.580.858.811	20	458.604.161.841	20	460.999.031.672	20	582.559.137.270	20	660.476.761.520	20	2.595.219.951.114
3	Pekerjaan Umum	14	357.335.283.274	15	495.502.028.801	14	567.050.082.762	14	588.389.291.038	14	763.051.520.141	15	2.771.328.206.016
4	Perumahan	2	4.266.540.900	2	4.932.741.250	2	7.109.533.635	2	106.957.861.649	2	112.818.260.225	2	236.084.937.659
5	Penataan Ruang	2	1.085.000.000	3	4.732.000.000	3	4.594.350.000	3	4.533.635.000	2	16.574.485.000	3	31.519.470.000
6	Perencanaan Pembangunan	8	7.977.178.000	8	8.017.195.800	8	8.061.215.380	8	8.109.636.918	8	8.162.900.610	8	40.328.126.708
7	Perhubungan	7	7.917.325.500	7	7.660.018.500	7	4.542.432.700	7	4.996.675.970	7	55.409.828.567	7	80.526.281.237
8	Lingkungan Hidup	14	24.685.293.100	15	31.953.317.090	15	34.037.610.148	15	36.157.320.497	15	38.368.887.423	15	165.202.428.258
9	Pertanahan	4	2.700.484.500	4	3.245.532.950	4	3.568.086.245	4	3.926.594.870	4	4.317.754.356	4	17.758.452.921
10	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	4.886.309.200	5	5.374.940.120	5	5.912.434.132	5	6.503.677.545	5	7.154.045.300	5	29.831.406.297
11	Pemberdayaan Perempuan	3	1.633.447.000	3	3.990.150.000	3	4.064.265.000	3	3.918.091.500	3	3.039.900.650	3	16.645.854.150
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	8	3.135.475.600	8	3.571.906.000	8	3.717.770.000	8	3.797.631.000	8	3.882.852.250	8	18.105.634.850
13	Sosial	12	12.980.658.800	12	59.735.274.600	12	60.283.834.800	12	61.803.646.020	12	62.886.043.362	12	257.689.457.582
14	Tenaga Kerja	3	11.944.584.465	3	14.164.155.948	3	15.834.307.773	3	16.847.856.628	3	18.864.818.346	3	77.655.723.160
15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7	3.833.408.400	8	7.136.187.169	6	7.152.305.888	7	7.696.666.987	6	8.132.719.469	8	33.951.287.913
16	Penanaman Modal	6	2.782.790.302	6	3.339.348.362	6	4.007.218.035	6	4.808.661.642	6	5.770.393.970	6	20.708.412.311
17	Kebudayaan	6	4.592.144.550	6	5.060.629.005	6	5.574.416.905	6	6.138.038.596	6	6.756.477.455	6	28.121.706.511
18	Pemuda dan Olahraga	8	13.793.311.015	8	15.672.642.117	8	17.189.906.328	8	18.858.896.961	8	20.694.786.457	8	86.209.542.878
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	9	8.731.696.580	10	9.350.064.848	11	10.200.497.273	11	11.017.690.870	11	11.886.474.517	11	51.186.424.088
20	Pemerintahan Umum	56	63.332.451.304	56	67.767.936.370	56	73.142.877.490	56	129.172.413.455	56	197.677.311.573	56	531.092.990.192

No	Urusan Pemerintahan	2015		2016		2017		2018		2019		KONDISI AKHIR	
		Program	Rp	Program	Rp	Program	Rp	Program	Rp	Program	Rp	Program	Rp
21	Ketahanan Pangan	2	18.062.706.000	2	29.670.976.600	2	31.514.574.260	2	33.383.531.686	2	85.600.224.855	2	198.232.013.401
22	Pemberdayaan Masyarakat Desa	6	6.944.521.005	6	7.056.189.530	6	7.344.868.037	6	7.834.811.723	6	8.138.395.456	6	37.318.785.751
23	Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kearsipan	4	987.991.815	4	1.065.797.803	4	1.151.998.265	4	1.252.937.070	4	1.366.134.691	4	5.824.859.643
25	Komunikasi dan Informatika	5	5.473.111.900	5	6.119.038.090	5	11.628.156.899	5	12.337.667.589	5	12.973.949.348	5	48.531.923.826
26	Perpustakaan	1	1.362.452.900	1	1.619.998.430	1	1.714.868.249	1	1.819.225.050	1	1.934.017.470	1	8.450.562.099
	JUMLAH A	225	1.146.578.316.526	229	1.429.113.010.024	227	1.541.434.744.752	228	1.876.600.556.893	226	2.398.184.001.427	230	8.391.910.629.622
	URUSAN PILIHAN												
1	Pertanian	13	19.099.811.650	13	46.575.808.265	13	48.691.404.542	13	50.951.460.446	13	78.392.321.940	13	243.710.806.843
2	Kehutanan	7	3.034.026.721	7	3.032.179.393	7	3.334.197.332	7	3.714.237.066	7	4.084.920.772	7	17.199.561.284
3	Energi dan Sumber Daya Mineral	3	1.904.790.700	3	6.900.000.000	3	11.911.000.000	3	16.923.100.000	3	21.940.410.000	3	59.579.300.700
4	Pariwisata	3	2.260.955.400	3	3.487.050.940	3	3.735.756.034	3	4.009.331.637	3	4.310.264.801	3	17.803.358.813
5	Kelautan	19	14.281.900.000	19	33.212.390.000	19	35.513.204.000	19	38.421.399.400	19	40.524.710.840	19	161.953.604.240
6	Perdagangan	13	16.614.744.300	13	26.532.744.300	10	50.151.744.300	10	50.816.744.300	12	51.203.744.300	13	195.319.721.500
7	Perindustrian	7	2.725.617.500	10	8.975.000.000	11	9.155.000.000	9	8.925.000.000	9	9.125.000.000	11	38.905.617.500
8	Transmigrasi	1	670.891.500	1	929.559.950	1	879.966.655	1	908.282.931	1	1.047.006.049	1	4.435.707.084
	JUMLAH B	66	60.592.737.771	69	129.644.732.848	69	163.372.272.863	67	174.669.555.779	69	210.628.378.702	72	738.907.677.964
	JUMLAH A+B	291	1.207.171.054.297	298	1.558.757.742.872	296	1.704.807.017.616	295	2.051.270.112.672	295	2.608.812.380.130	302	9.130.818.307.586

TABEL 8.2 INDIKASI PROGRAM PRIORITAS DISERTAI PENDANAAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1		URUSAN WAJIB																
1	1	PENDIDIKAN																
1	1	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK)	35	35,64	1.547.093.000	36,73	1.701.802.300	37,82	1.871.982.530	38,91	8.059.180.783	40	8.059.180.783	40	21.239.239.396	Disdik
1	1	16	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK (SD,SMP), APM (SD,SMP), AMQ (SD,SMP)	APK : SD 109.71% / SMP 110.52% dan APM : SD 99.91%/SMP 89.50% ; AMQ : SD 30 %/SMP40 %	APK : SD 109,57% / SMP 110.41% dan APM : SD 99.92%/SMP 89.70% ; AMQ : SD 38 %/ SMP 47 %	57.574.165.800	APK : SD 109,43% / SMP 110.31% dan APM : SD 99.93% / SMP 89.90% ; AMQ : SD 46 %/ SMP 54 %	63.455.182.380	APK : SD 109,29% / SMP 110.21% dan APM : SD 99.94% / SMP 90.10% ; AMQ : SD 54 %/ SMP 61 %	70.774.300.618	APK : SD 109,15% / SMP 110.11% dan APM : SD 99.95% / SMP 90.30% ; AMQ : SD 62 %/ SMP 68 %	77.825.330.680	APK : SD 109,00% / SMP 110.00% dan APM : SD 99.96% / SMP 90.50% ; AMQ : SD 70 %/ SMP 75 %	85.581.463.748	APK : SD 109,00% / SMP 110.00% dan APM : SD 99.96% / SMP 90.50% ; AMQ : SD 70 %/ SMP 75 %	355.210.443.226	Disdik
1	1	16	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terbinanya warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan dan perundang-undangan yang berlaku melalui MBS	-	250 orang	100.000.000	250 orang	110.000.000	250 orang	121.000.000	250 orang	133.150.000	250 orang	146.410.000	1250 orang	610.560.000	Setda
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	APK, APM , AMQ	APK : 79.06% , APM : 60.36% ; AMQ : 45 %	APK : 79.54% , APM : 60.84% ; AMQ : 52 %	70.544.677.305	APK : 80.02% , APM : 61.80% ; AMQ : 59%	77.859.225.036	APK : 80.50% , APM : 61.80% ; AMQ : 66%	86.775.147.539	APK : 80.98% , APM : 62.28% ; AMQ : 73%	95.452.662.293	APK : 81% , APM : 62.76% ; AMQ : 890	104.997.928.522		435.629.640.695	Disdik
1	1	18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf (AMH)	93.89	94,26	8.966.798.250	94,63	9.166.518.075	95	9.386.209.883	95	9.627.870.871	96	9.893.697.958	96	47.041.095.036	Disdik
1	1	18	Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya kapasitas sumber daya tenaga kependidikan pada satuan pendidikan non formal		525 orang	135.000.000	525 orang	142.500.000	525 orang	150.000.000	525 orang	160.000.000	525 orang	165.000.000	525 orang	752.500.000	Setda
1	1	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru layak Mengajar	SD : 81% , SMP : 95% , SMA : 96.25% , SMK : 94.76%	SD : 81.50% , SMP : 95.50% , SMA : 96.50% , SMK : 95,01%	1.394.293.360	SD : 82% , SMP : 96% , SMA : 96.75% , SMK : 95.26%	1.813.722.696	SD : 82.50% , SMP : 96.50% , SMA : 97% , SMK : 95.51%	1.995.094.966	SD : 83% , SMP : 97% , SMA : 97.25% , SMK : 95.76%	2.194.604.462	SD : 83.50% , SMP : 97.50% , SMA : 97.50% , SMK : 96.01%	2.414.064.908		9.811.780.392	Disdik

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB		
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	1	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya tenaga pengajar / guru profesional dan berkompeten untuk guru RA, KKG PAI SD dan Guru MTs.	-	723 orang	250.000.000	723 orang	275.000.000	723 orang	302.500.000	723 orang	332.750.000	723 orang	366.025.000	3615 orang	1.526.275.000	Setda
1	1	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Akreditasi Sekolah	SD (A) : 211, SMP (A) : 70, SMA (A) : 31, SMK (A) : 34.	SD (A) : 216, SMP (A) : 72, SMA (A) : 32, SMK (A) : 35.	2.341.263.890	SD (A) : 221, SMP (A) : 74, SMA (A) : 32, SMK (A) : 35.	2.575.390.279	SD (A) : 226, SMP (A) : 76, SMA (A) : 33, SMK (A) : 36.	2.912.929.307	SD (A) : 231, SMP (A) : 78, SMA (A) : 34, SMK (A) : 37.	3.204.222.238	SD (A) : 236, SMP (A) : 80, SMA (A) : 35, SMK (A) : 38.	3.524.644.461		14.558.450.175	Disdik
1	1	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terdatanya siswa/mahasiswa beprestasi dari keluarga tidak mampu yang dapat dibantu melalui program beasiswa		1014 orang	250.000.000	1014 orang	275.000.000	1014 orang	302.500.000	1014 orang	332.750.000	1014 orang	365.205.000	2870 orang	1.525.455.000	Setda
1	1		Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan	Meningkatnya peran satuan pendidikan non formal dalam meningkatkan jumlah siswa yang melekat huruf al qur'an dan jumlah peserta didik hafal al-qur'an yang menjadi peserta MTQ	-	100%	450.000.000	100%	600.000.000	100%	650.000.000	100%	660.000.000	100%	935.000.000	100%	3.295.000.000	Setda
1	2		KESEHATAN															
1	2	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pelayanan kefarmasian yang sesuai standar	-	57 PKM	15.170.000.000	57 PKM	16.690.000.000	57 PKM	18.360.000.000	57 PKM	20.195.000.000	57 PKM	22.211.500.000		92.626.500.000	Dinkes
1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan			37.133.844.500		38.134.801.060		39.090.223.746		40.059.457.275		40.628.576.373		195.046.902.954	Dinkes
1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin	70%	75%	70.808.200.000	80%	70.808.200.000	85%	70.808.200.000	90%	70.808.200.000	100%	70.808.200.000	100%	354.041.000.000	RSUD Waled

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 2 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan untuk masyarakat	70%	75%	60.000.000.000	80%	60.000.000.000	85%	60.000.000.000	90%	60.000.000.000	100%	60.000.000.000	100%	300.000.000.000	RSUD Arjawinangun
1 2 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi			225.000.000		260.000.000		280.000.000		295.000.000		310.000.000	1800 orang	1.370.000.000	Setda
1 2 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi			225.000.000		260.000.000		280.000.000		295.000.000		310.000.000	100%	1.370.000.000	Dinkes
1 2 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Adanya perubahan perilaku masyarakat dari tidak sehat menjadi berperilaku sehat		Cakupan Rumah Tangga Ber PHBS : 51.3% (178.094 RT)	1.161.193.425	Cakupan Rumah Tangga Ber PHBS : 59.1% (191.370 RT)	1.353.394.110	Cakupan Rumah Tangga ber PHBS : 66.9% (216.627 RT)	1.586.995.432	Cakupan Rumah Tangga ber PHBS : 74.7% (241.884 RT)	1.871.335.143	Cakupan Rumah Tangga ber PHBS : 82.5% (267.141 RT)	2.217.777.921	Cakupan Rumah Tangga ber PHBS : 82.5% (267.141 RT)	8.190.696.031	Dinkes
1 2 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk, temuan kasus baru pada bayi dan balita	-	S.Kurus : 0,14 %	1.417.482.000	S.Kurus : 0,13 %	1.559.230.200	S.Kurus : 0,12 %	1.715.153.220	S.Kurus : 0,11 %	17.670.233.863	S.Kurus : 0,10 %	17.858.900.717	S.Kurus : 0,10 %	40.221.000.000	Dinkes
				Buruk : 1,09 %		Buruk : 0,97 %		Buruk : 0,85 %		Buruk : 0,73 %		Buruk : 0,61 %		Buruk : 0,61 %		Dinkes
				Kurang : 7,91 %		Kurang : 7,03 %		Kurang : 6,15 %		Kurang : 5,27 %		Kurang : 4,39 %		Kurang : 4,39 %		Dinkes
				Stunting : 2,05 %		Stunting : 1,83 %		Stunting : 1,61 %		Stunting : 1,39 %		Stunting : 1,14 %		Stunting : 1,14 %		Dinkes
		Menurunnya Prevalensi Anemia dan KEK pada Remaja, Bumil dan Bufas		Anemi : 9,74 %		Anemi : 8,66 %		Anemia : 7,58 %		Anemi : 6,49 %		Anemi : 5,41 %		Anemi : 5,41 %		Dinkes
				KEK : 5,67 %		KEK : 5,04 %		KEK : 4,41 %		KEK : 3,78 %		KEK : 3,15 %		KEK : 3,15 %		Dinkes
1 2 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat			552.477.850	-	718.221.205	-	933.687.567	-	1.213.793.836	-	1.577.931.987		4.996.112.445	Dinkes
1 2 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam	100% (133 KLB)	100%	2.985.032.000	100%	3.239.292.000	100%	3.563.221.200	100%	3.870.875.800	100%	4.209.295.860		17.867.716.860	Dinkes
		UCI Desa	UCI Desa : 95,5% (405 desa,kel)	UCI desa ≥ 95 %		UCI desa ≥ 95 %		UCI desa ≥ 95 %		UCI desa ≥ 95 %		UCI desa ≥ 95 %				Dinkes

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 2 22	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (TPM)	Mengendalikan prevalensi tekanan darah tinggi relatif sebesar 25% DAN Mengendalikan peningkatan diabetes	Prevalensi Hipertensi (44.708) dan DM (6.092) kasus	25%	0	25%	569.320.000	25%	626.252.000	25%	751.502.400	25%	976.954.000		2.924.028.400	Dinkes
1 2 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan	6	2	821.991.000	2	882.490.550	2	947.955.078	2	1.018.826.831	2	1.095.589.573		4.766.853.032	Dinkes
1 2 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan	-	100%	739.668.000	100%	739.668.000	100%	739.668.000	100%	739.668.000	100%	739.668.000	100%	3.698.340.000	RSUD Waled
1 2 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan		100%	49.000.000.000	100%	49.000.000.000	100%	49.000.000.000	100%	49.000.000.000	100%	49.000.000.000	100%	245.000.000.000	RSUD Arjawanangun
1 2 28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Meningkatnya Kepesertaan Masyarakat Dalam Berasuransi Kesehatan dlm Program JKN		230 orang miskin	95.166.205.176	230 orang miskin	95.040.365.856	230 orang miskin	96.187.204.662	230 orang miskin	96.962.127.161	230 orang miskin	97.035.837.729	1150 orang miskin	480.391.740.584	Dinkes
1 2 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Jumlah Kematian Bayi menjadi 115/ KH	227 / KH	208 / KH	1.773.692.800	185/ KH	1.773.692.800	161/ KH	1.662.871.800	138/ KH	1.675.093.800	115/ KH	1.661.649.580	115/ KH	8.547.000.780	Dinkes
1 2 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Usia Lanjut			75.350.000		82.885.000		91.173.500		100.290.850		110.319.930		460.019.280	Dinkes
1 2 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Jumlah Kematian Ibu menjadi 28/ KH	56/ KH	51/ KH	3.356.430.060	46/ KH	3.482.909.060	40/ KH	3.668.813.468	34/ KH	3.873.308.310	28/ KH	4.098.242.650	28/ KH	18.479.703.548	Dinkes
1 2 33	Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan pelayanan kesehatan dasar peserta BPJS	1.245.706	1.245.706	77.958.492.000	1.245.706	77.958.492.000	1.245.706	77.958.492.000	1.245.706	77.958.492.000	1.245.706	77.958.492.000	1.245.706	389.792.460.000	Dinkes
1 2	Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)	Masy mengetahui bahaya merokok thdp kesehatan			172.000.000		189.200.000		208.120.000		228.932.000		251.825.200	100%	1.050.077.200	Dinkes

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1 2	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan lingkungannya	Performa bangunan puskesmas yang lebih baik, memadai dan memenuhi standar kesehatan			13.838.800.000			11.542.000.000		8.971.000.000		9.652.000.000		8.096.000.000		52.099.800.000	Dinkes
1 3	PEKERJAAN UMUM																
1 3 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terbangunnya jalan dan jembatan sehingga tercapai target panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	414,44 km	467,98 km	85.525.000.000	510,27 km	117.446.000.000	558,252945 km	74.262.000.000	605,2644 km	72.452.000.000	646,65 km	43.615.000.000	646,65 km	393.300.000.000	DBM	
1 3 16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terbangun dan terpeliharanya Saluran/Gorong-gorong di Kabupaten Cirebon	-	10 unit, 2.090 m	4.224.000.000	10 unit, 4.500 m	6.195.000.000	10 unit, 4.500 m	7.088.000.000	10 unit, 4.500 m	8.203.000.000	10 unit, 4.500 m	9.085.000.000	10 unit, 4.500 m	34.795.000.000	DBM	
1 3 17	Program Pembangunan Turap/Talud bronjong	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan turap/talud bronjong	18 DAS	-	-	100%	242.317.200	-	-	-	-	-	-	100%	242.317.200	DPSDAP	
1 3 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	646,65 km	584,15 km	89.070.000.000	604,35 km	132.830.000.000	603,65 km	146.069.000.000	614,65 km	148.966.000.000	626,38 km	162.600.000.000	626,38 km	679.535.000.000		
1 3 20	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	Tersedianya data pengguna ruang milik jalan pada jalan Kabupaten	1	100%	100.000.000	100%	115.000.000	100%	125.000.000	100%	135.000.000	100%	145.000.000	100%	620.000.000	DBM	
1 3 22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tersusunnya Informasi Database jalan dan Jembatan	1	100%	410.000.000	100%	267.000.000	100%	294.000.000	100%	304.000.000	100%	335.000.000	100%	1.610.000.000	DBM	
1 3 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Terperuhnya peralatan pendukung Pengelolaan jaringan jalan yang siap pakai	1	100%	5.912.000.000	100%	5.623.000.000	100%	7.918.000.000	100%	7.155.000.000	100%	9.190.000.000	100%	35.798.000.000	DBM	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 3 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Terpenuhinya peralatan pendukung Pengelolaan sumber daya air yang siap pakai	1 unit excavator amphi	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	302.500.000	100%	332.750.000	100%	366.025.000	100%	1.526.275.000	DPSDAP
1 3 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Meningkatnya intensitas anam di 45 Daerah Irigasi	200%	210%	34.560.695.156	220%	38.016.764.672	230%	41.818.441.139	240%	46.000.285.253	250%	50.600.313.778	250%	210.996.499.997	DPSDAP
1 3 25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air baku	Berkurangnya daerah rawan air bersih	25 desa	5 desa	1.000.000.000	5 desa	1.100.000.000	5 desa	1.210.000.000	5 desa	1.331.000.000	5 desa	1.464.100.000	25 desa	6.105.100.000	DPSDAP
1 3 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Tersedianya sarana air limbah, sanitasi, sumber mata air dan jaringan air bersih bagi masyarakat	-	43%	4.348.825.200	47%	4.783.707.720	49%	5.262.078.492	51%	5.788.286.341	53%	6.367.114.975	55%	26.550.012.729	DCKTR
1 3 28	Program Pengendalian Banjir	Berkurangnya tinggi dan lama genangan banjir	13 kecamatan, 18 DAS	5%	7.000.000.000	10%	7.700.000.000	20%	8.470.000.000	35%	9.317.000.000	50%	10.248.700.000	50%	42.735.700.000	DPSDAP
1 3 29	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Berkembangnya wilayah strategis cepat tumbuh dan terbangunnya infrastruktur pasar batik	-	18%	2.331.500.000	19%	2.564.650.000	20%	2.821.115.000	21%	3.103.226.500	22%	3.413.549.150	23%	14.234.040.650	DCKTR
1 3 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Terpelihara dan terbangunnya jaringan jalan Desa kondisi mantap	313,6069 km	347,073905 km	39.200.000.000	378,106946 km	36.600.000.000	408,110233 km	35.492.000.000	438,11352 km	39.292.000.000	468,07 km	43.511.000.000	468,07 km	194.095.000.000	DBM
1 3 30	Program Pembangunan infrastruktur perdesaan	Terbangunnya dan terpeliharanya Infrastruktur Jalan dan Jembatan Perdesaan	-	23%	83.403.262.918	25%	91.743.589.210	26%	100.917.948.131	27%	111.009.742.944	29%	122.110.717.238	30%	509.185.260.441	DCKTR
1 4	PERUMAHAN															
1 4 19	Program : Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Terdidik dan terlatihnya anggota pemadam kebakaran sehingga meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	-	21%	3.966.540.900	1318%	4.582.741.250	55%	6.709.533.635	74%	9.507.861.649	86%	12.318.260.225	58%	37.084.937.659	DCKTR

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	4	20	Program Pengelolaan Areal pemakaman	Terkelolanya kebijakan pemanfaatan ruang wilayah/kawasan pemakaman yang bisa dipahami oleh masyarakat	-	0%	300.000.000	5%	350.000.000	10%	400.000.000	15%	450.000.000	20%	500.000.000	25%	2.000.000.000	DKCTR
1	5		PENATAAN RUANG															
1	5	15	Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya dokumen teknis RDTRK, RTRK, RTBL dan Draft Perda tentang RDTRK yang dibutuhkan para pemangku kepentingan	-	5%	1.000.000.000	10%	3.300.000.000	15%	3.300.000.000	20%	3.300.000.000	25%	3.300.000.000	30%	14.200.000.000	DKCTR
1	5	17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terkendalinya pelanggaran Perda yang terkait garis sempadan, reklame dan IMB	-	30%	85.000.000	35%	1.132.000.000	40%	1.144.350.000	45%	1.158.635.000	50%	1.274.485.000	55%	4.794.470.000	DKCTR
1	5	16	Program Pemanfaatan Ruang	Terkendalinya pemanfaatan ruang untuk reklame	-	35%		40%	300.000.000	80%	150.000.000	50%	75.000.000	55%			525.000.000	DKCTR
1	6		PERENCANAAN PEMBANGUNAN															
1	6	15	Program Pengembangan Data / Informasi	Tersedianya data dan informasi untuk perencanaan pengelolaan sumber daya air	18 DAS, 30 DI	100%	400.178.000	100%	440.195.800	100%	484.215.380	100%	532.636.918	100%	585.900.610	100%	2.443.126.708	DPSDAP
1	6	15	Program Pengembangan Data / Informasi	Tersedianya data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah		100%	1.950.000.000	100%	1.950.000.000	100%	1.950.000.000	100%	1.950.000.000	100%	1.950.000.000	100%	9.750.000.000	Bappeda
1	6	17	Pengembangan Wilayah Perbatasan	Tersusunnya pedoman perencanaan wilayah perbatasan		1 dok	240.000.000	1 dok	240.000.000	1 dok	240.000.000	1 dok	240.000.000	1 dok	240.000.000	100%	1.200.000.000	Bappeda

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 6 18	Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tersusunnya perencanaan di wilayah strategis yang cepat tumbuh		100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	275.000.000	Bappeda
1 6 19	Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Terciptanya peningkatan kualitas pelayanan sanitasi kota		100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	750.000.000	Bappeda
1 6 21	Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya rencana pembangunan daerah yang memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan		100%	1.982.000.000	100%	1.982.000.000	100%	1.982.000.000	100%	1.982.000.000	100%	1.982.000.000	100%	9.910.000.000	Bappeda
1 6 23	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Tersusunnya perencanaan bidang sosial budaya		100%	1.650.000.000	100%	1.650.000.000	100%	1.650.000.000	100%	1.650.000.000	100%	1.650.000.000	100%	8.250.000.000	Bappeda
1 6 22	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersusunnya perencanaan bidang ekonomi		100%	1.550.000.000	100%	1.550.000.000	100%	1.550.000.000	100%	1.550.000.000	100%	1.550.000.000	100%	7.750.000.000	Bappeda
1 7	PERHUBUNGAN															
1 7 15	Program pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan	Meningkatnya pelayanan trayek angkutan yang memadai dan mengutamakan keselamatan penumpang	561 kend.	593 kend.	822.527.500	625 kend.	925.000.000	657 kend.	1.017.500.000	689 kend.	1.119.250.000	721 Kend.	1.231.175.000	721 Kend.	5.115.452.500	Dishub
1 7 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.	Meningkatkan Pelayanan dan kenyamanan kerja pada Prasarana dan Fasilitas LLAJ			1.798.075.000		325.000.000		357.500.000		393.250.000		432.575.000		3.306.400.000	Dishub
1 7 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Terpenuhinya sarana angkutan yang memadai dan selamat			566.350.000		622.985.000		685.283.500		753.811.850		829.193.035		3.457.623.385	Dishub
1 7 18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Memberikan Kenyamanan penumpang dalam menggunakan angkutan umum			650.000.000		715.000.000		786.500.000		865.150.000		865.150.000		3.881.800.000	Dishub

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 7 19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan dan mengurangi rawan kecelakaan dengan pemasangan rambu - rambu lalu lintas	600	720	78.000.000	860	100.100.000	1.010	117.975.000	1.170	129.772.500	1.300	142.749.750	1.300	568.597.250	Dishub
		meningkatkan keamanan dan mengurangi rawan kecelakaan (PJU)	301	980	3.570.875.000	980	3.927.961.500	974	429.305.000	970	472.235.500	970	519.459.050	970	8.919.836.050	Dishub
		Pengadaan Marka Jalan dan Paku Jalan	1.420	2.520	193.600.000	5.040	487.872.000	7.560	536.659.200	10.080	590.325.120	12.600	649.357.632	12.600	2.457.813.952	Dishub
1 7 20	Program Peningkatan Kelaiikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.	Meningkatnya kenyamanan angkutan umum yang laik jalan dan memenuhi syarat teknis	30.000	32.000	56.398.000	34.000	60.000.000	36.000	66.000.000	38.000	72.600.000	40.000	79.860.000	40.000	334.858.000	Dishub
1 7 21	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Pengadaan Pagar pengaman Jalan	465	630	181.500.000	1.040	496.100.000	1.560	545.710.000	2.080	600.281.000	2.600	660.309.100	2.600	2.483.900.100	Dishub
1 8	LINGKUNGAN HIDUP															
1 8 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pelayanan persampahan untuk seluruh stakeholder di Kabupaten Cirebon	-	30%	11.961.672.750	33%	13.157.840.025	36%	14.473.624.028	39%	15.920.986.430	42%	17.513.085.073	45%	73.027.208.306	DCKTR
1 8 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Berkurangnya timbulan sampah dan berkembangnya konversi sampah menjadi biogas	-	Berkurangn ya 5-10% timbulan sampah dari masyarakat	800.000.000	Berkurangnya 5-10% timbulan sampah dari masyarakat	800.000.000	Berkurangnya 5-10% timbulan sampah dari masyarakat	800.000.000	Berkurangnya 5-10% timbulan sampah dari masyarakat	800.000.000	Berkurangnya 5-10% timbulan sampah dari masyarakat	800.000.000	Berkurangnya 5-10% timbulan sampah dari masyarakat	4.000.000.000	BLHD
1 8 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terkendalinya kegiatan perusakan lingkungan hidup	975.5 Ha kawasan pertambangan	70%	40.000.000	70%	44.000.000	70%	48.400.000	70%	53.240.000	70%	58.564.000	70%	244.204.000	DPSDAP
1 8 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Cirebon	-	Penurunan pencemaran dan kerusakan lingkungan 10%	2.331.515.600	Penurunan pencemaran dan kerusakan lingkungan 10%	2.494.488.200	Penurunan pencemaran dan kerusakan lingkungan 10%	2.676.567.710	Penurunan pencemaran dan kerusakan lingkungan 10%	2.842.100.121	Penurunan pencemaran dan kerusakan lingkungan 10%	3.030.596.593	Penurunan pencemaran dan kerusakan lingkungan 10%	13.375.268.224	BLHD

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 8 16	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Terlaksananya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	20%	25%	480.000.000	30%	510.000.000	35%	541.000.000	40%	573.000.000	45%	366.000.000	50%	2.470.000.000	Setda
1 8 17	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Terlindungi dan terkonservasinya sumber daya alam	975.5 Ha kawasan pertambangan	20%	50.000.000	20%	55.000.000	20%	60.500.000	20%	66.550.000	20%	73.205.000	100%	305.255.000	DPSDAP
1 8 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya jumlah bibit pohon untuk perlindungan dan konservasi sumber daya alam	-	5000 batang & 3000 bibit pohon	582.792.550	5000 batang & 3000 bibit pohon	626.592.600	5000 batang & 3000 bibit pohon	626.592.600	5000 batang & 3000 bibit pohon	626.592.600	5000 batang & 3000 bibit pohon	626.592.600	25000 batang & 15000 bibit pohon	3.089.162.950	BLHD
1 8 18	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Terehabilitasi dan pulihnya kondisi sumber daya alam	975.5 Ha kawasan pertambangan	-	-	75%	66.800.000	75%	73.480.000	75%	80.828.000	75%	88.910.800	75%	310.018.800	DPSDAP
1 8 18	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam gerakan rehabilitasi dan pemulihan ekosistem	-	Penanaman 6000 batang bakau	200.000.000	Penanaman 6000 batang bakau	200.000.000	Penanaman 6000 batang bakau	200.000.000	Penanaman 6000 batang bakau	200.000.000	Penanaman 6000 batang bakau	200.000.000	Penanaman 6000 batang bakau	1.000.000.000	BLHD
1 8 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dibidang lingkungan dan tersedianya basis data & informasi lingkungan	-	30 sekolah, 1 basis data	418.000.000	30 sekolah, 1 basis data	428.000.000	30 sekolah, 1 basis data	438.000.000	30 sekolah, 1 basis data	448.000.000	30 sekolah, 1 basis data	458.000.000	150 sekolah, 1 basis data	2.190.000.000	BLHD
1 8 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Terbangun dan terkelolanya RTH di 20 Kecamatan	-	10%	6.141.789.100	15%	6.735.969.700	20%	7.089.585.260	25%	7.555.410.686	30%	7.899.398.165	35%	35.422.152.911	DCKTR
1 8 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau	-	100%	748.023.100	100%	860.226.565	100%	989.260.550	100%	1.187.112.660	100%	1.424.535.192	100%	5.209.158.067	Setda
1 8 23	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Meningkatnya tanaman mangrove di pesisir pantai panganan dan gunung jati	-	8 kecamatan pesisir, 72000 batang mangrove	200.000.000	8 kecamatan pesisir, 72000 batang mangrove	200.000.000	8 kecamatan pesisir, 72000 batang mangrove	200.000.000	8 kecamatan pesisir, 72000 batang mangrove	200.000.000	8 kecamatan pesisir, 72000 batang mangrove	200.000.000	8 kecamatan pesisir, 72000 batang mangrove	1.000.000.000	BLHD
1 8	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Termonitornya Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan	-	51 kali Se-Kabupaten Cirebon	70.000.000	51 kali Se-Kabupaten Cirebon	70.000.000	51 kali Se-Kabupaten Cirebon	70.000.000	51 kali Se-Kabupaten Cirebon	70.000.000	51 kali Se-Kabupaten Cirebon	70.000.000	51 kali Se-Kabupaten Cirebon	350.000.000	BLHD

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 8	Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah tentang SDA	Terlaksananya koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi Bidang LH dan SDA	30%	35%	661.500.000	40%	704.400.000	45%	750.600.000	50%	533.500.000	55%	560.000.000	60%	3.210.000.000	Setda
1 9	PERTANAHAN															
1 9 16	Program Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersedianya Patok Km/Hm pada Jaringan Jalan Kabupaten	1.349 bh	1.010 bh	250.000.000	2.400 bh	550.000.000	2.400 bh	603.000.000	2.400 bh	665.000.000	2.400 bh	730.000.000	10.610 bh	2.798.000.000	DBM
1 9 16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	menekan jumlah pertumbuhan bangunan liar di sempadan sungai/irigasi	3967 pelanggar garis sempadan sungai/saluran irigasi	80%	1.334.557.500	80%	1.468.013.250	80%	1.614.814.575	80%	1.776.296.033	80%	1.953.925.636	80%	8.147.606.993	DPSDAP
1 9 16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersedianya data-data monitoring desa yang akurat/ yang baru dan data tanah timbul	-	22%	1.097.000.000	24%	1.206.700.000	26%	1.327.370.000	28%	1.460.107.000	30%	1.606.117.700	32%	6.697.294.700	CKTR
1 9 17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Kegiatan : Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terfasilitasinya konflik/ sengketa di bidang pertanahan	-	10%	18.927.000	15%	20.819.700	20%	22.901.670	25%	25.191.837	30%	27.711.021	35%	115.551.228	CKTR
1 10	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
1 10 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang Kependudukan dalam angka kepuasan masyarakat	130.000 ktp.180.000 KK	130.000 ktp.180.000 KK	3.014.524.200	130.000 ktp.180.000 KK	3.315.976.620	130.000 ktp.180.000 KK	3.647.574.282	130.000 ktp.180.000 KK	4.012.331.710	130.000 ktp.180.000 KK	4.413.564.881	130.000 ktp.180.000 KK	18.403.971.693	Disdukcapil
1 10	Program Penyelenggaraan SIAK On Line	Penerapan Aplikasi SIAK di Dinas, 40 kecamatan dan Desa	40	40 unit	292.627.700	40 unit	321.890.470	40 unit	354.079.517	40 unit	389.487.469	40 unit	428.436.216	40 unit	1.786.521.371	Disdukcapil
1 10	Program Pendataan dan Perkembangan Kependudukan	Berkurangnya Data Ganda Kependudukan	1 dokumen	1 dokumen	552.599.100	1 dokumen	607.859.010	1 dokumen	668.644.911	1 dokumen	735.509.402	1 dokumen	809.060.342	1 dokumen	3.373.672.765	Disdukcapil

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 10	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya pelayanan akta-akta catatan sipil	60.000 orang	60.000 orang	969.924.400	60.000 orang	1.066.916.840	60.000 orang	1.173.608.524	60.000 orang	1.290.969.376	60.000 orang	1.420.066.314	60.000 orang	5.921.485.454	Disdukcapil
1 10	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan	Monitoring pelayanan kependudukan pada masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	56.633.800	1 dokumen	62.297.180	1 dokumen	68.526.898	1 dokumen	75.379.588	1 dokumen	82917546,58	1 dokumen	345.755.012	Disdukcapil
1 11	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN															
1 11 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Jumlah kelompok perempuan dalam pembangunan	28	27	303.000.000	39	532.050.000	37	517.655.000	38	544.420.500	37	545.462.550	178	2.442.588.050	BPPKB
1 11 19	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah lembaga/organisasi yang mendukung kesetaraan gender	393	403	134.247.000	424	211.000.000	421	222.000.000	414	231.000.000	402	240.000.000	2064	1.038.247.000	BPPKB
1 11 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya perempuan berkualitas	-	134	1.196.200.000	127	3.247.100.000	120	3.324.610.000	111	3.142.671.000	102	2.254.438.100	594	13.165.019.100	BPPKB
1 12	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA															
1 12 15	Program Keluarga Berencana	Jumlah Motivator KIE KB	5	5	285.445.000	7	301.000.000	10	303.500.000	10	308.000.000	10	308.000.000	15	1.505.945.000	BPPKB
1 12 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah Remaja yang memahami KRR	100	100	78.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	150	80.000.000	150	81.500.000	600	399.500.000	BPPKB
1 12 17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Peserta KB yang dilayani	71%	71,50%	1.342.850.000	72%	1.365.750.000	73%	1.373.500.000	73,50%	1.381.250.000	74%	1.389.000.000	74%	6.852.350.000	BPPKB
1 12 18	Program pembinaan masyarakat dalam pelayanan KBKR yang mandiri	Jumlah kelompok ketahanan keluarga stratifikasi paripurna	35	75	769.024.600	115	855.000.000	155	940.000.000	195	987.025.000	200	1.036.376.250	200	4.587.425.850	BPPKB
1 12 20	Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah kelompok KB pria	6	6	65.386.000	12	165.386.000	18	169.000.000	24	165.386.000	30	165.386.000	90	730.544.000	BPPKB

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 12 21	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyandang Masalah Sosial dan HIV/AIDS	Menguatnya respon masyarakat dan remaja dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS		400 orang	200.000.000	400 orang	220.000.000	400 orang	242.000.000	400 orang	266.200.000	400 orang	292.820.000	400 orang	1.221.020.000	Setda
1 12 22	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Terkumpulnya data keluarga yang valid	100%	100%	369.770.000	100%	359.770.000	100%	359.770.000	100%	359.770.000	100%	359.770.000	5	1.808.850.000	BPPKB
1 12 23	Program Penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga	Terbentuknya kelompok bina keluarga	12	1	25.000.000	9	225.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	40	1.000.000.000	BPPKB
1 13	SOSIAL															
1 13 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Meningkatnya jumlah keluarga miskin dan PMKS lainnya yang mandiri	100%	100%	2.156.893.900	100%	2.741.502.000	100%	2.464.652.200	100%	3.085.512.420	100%	3.171.563.662	100%	13.620.124.182	Dinsos
1 13 16	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Tersalurkannya Bantuan bagi Kaum Dhuafa dan Yatim Piatu 100%		4.000 orang	50.000.000	4.000 orang	55.000.000	4.000 orang	60.500.000	4.000 orang	66.550.000	4.000 orang	73.205.000	4.000 orang	305.255.000	Setda
1 13 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	100%	5.942.778.900	100%	4.298.100.000	100%	4.615.910.000	100%	4.956.501.000	100%	5.338.651.100	100%	25.151.941.000	Dinsos
1 13 17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Terselenggaranya pembinaan terhadap anak terlantar	100%	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000	100%	610.510.000	Dinsos
1 13 18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Meningkatnya pelayanan bagi penyandang cacat	100%	100%	898.675.000	100%	1.245.000.000	100%	1.369.500.000	100%	1.506.450.000	100%	1.657.095.000	100%	6.676.720.000	Dinsos
1 13 19	Pembinaan Panti Asuhan/ panti jompo	Meningkatnya Panti Asuhan/ Panti Jompo yang terbina	100%	100%	400.000.000	100%	440.000.000	100%	484.000.000	100%	532.400.000	100%	585.640.000	100%	2.442.040.000	Dinsos
1 13 20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial	Meningkatnya kualitas pelayanan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial	100%	100%	550.000.000	100%	695.000.000	100%	764.500.000	100%	840.950.000	100%	925.045.000	100%	3.775.495.000	Dinsos

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	lainnya)															
1 13 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100%	100%	2.297.311.000	100%	2.278.000.000	100%	2.505.800.000	100%	2.756.380.000	100%	3.032.018.000	100%	12.869.509.000	Dinsos
1 13	Program peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya hasil kajian dan kebijakan bidang kesejahteraan sosial dan agama dan meningkatnya penanganan bencana alam	-	100%	225.000.000	100%	225.000.000	100%	225.000.000	100%	225.000.000	100%	225.000.000	100%	1.125.000.000	Setda
1 13	Program Pengembangan Data dan Informasi Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya laporan data dan informasi keagamaan dan kesejahteraan sosial, data dana hibah dan bansos		1 laporan	170.000.000	1 laporan	174.000.000	1 laporan	178.400.000	1 laporan	183.240.000	1 laporan	188.564.000	5 laporan	894.204.000	Setda
1 13	Program pembinaan pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga dan pelaku kesejahteraan sosial	Meningkatnya Kemampuan Teknis Lembaga dan Pelaku Kesejahteraan Sosial		544 orang	190.000.000	544 orang	209.000.000	544 orang	229.900.000	544 orang	252.890.000	544 orang	278.179.000	544 orang	1.159.969.000	Setda
1 13	Program Pengentasan Kemiskinan	Jumlah subsidi reskin untuk penerima manfaat			6.891.885.000		6.891.885.000		9.542.610.000		9.542.610.000		17.239.712.000		50.108.702.000	Setda
1 14	TENAGA KERJA															
1 14 15	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.	Tersedianya tenaga kerja Terlatih dari pencari kerja per tahun.	-	2000 peserta di LPK Pemerintah	6.984.633.800	2000 peserta di LPK Pemerintah	7.323.581.320	2000 peserta di LPK Pemerintah	8.448.138.572	2000 peserta di LPK Pemerintah	8.861.533.397	2000 peserta di LPK Pemerintah	10.218.325.681	10.000 peserta di LPK Pemerintah	41.836.212.770	Disnakertrans
1 14 16	Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran	-	9720 HOK	3.727.384.665	9720 HOK	4.100.123.132	9720 HOK	4.510.135.445	9720 HOK	4.961.148.989	9720 HOK	5.457.263.888	48600 HOK	22.756.056.118	Disnakertrans
1 14 17	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	-	100%	1.232.566.000	100%	1.355.822.600	100%	1.491.404.860	100%	1.640.545.346	100%	1.804.599.881	100%	7.524.938.687	Disnakertrans

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB	
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	15	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH															
1	15	15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	-	460 UMKM	845.041.900	460 UMKM	856.153.914	460 UMKM	941.769.306	460 UMKM	1.035.946.236	105 UMKM	1.139.540.381	525 UMKM	4.818.451.737	Dinkop & UMKM
1	15	15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Tersusunnya data pengembangan kawasan UMKM	-	1 dok	65.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	65.000.000	Setda	
1	15	16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap KUMKM melalui pendidikan dan pelatihan	-	40 UKM	644.549.800	40 UKM	703.908.920	40 UKM	774.299.812	40 UKM	851.729.793	40 UKM	936.902.773	200 UKM	3.911.391.098	Dinkop & UMKM
1	15	16 Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM	Terbentuknya asosiasi pelaku UMKM yang terlegalisasi secara formal				1 dok	50.000.000									Setda
1	15	17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Tersedianya sistem pendukung untuk UMKM		80 UMKM	503.979.900	80 UMKM	554.377.890	80 UMKM	609.815.679	80 UMKM	670.769.518	80 UMKM	737.876.972	400 UMKM	3.076.819.959	Dinkop & UMKM
1	15	17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Tersusunnya perbup tentang pengelolaan dan penggunaan dana kredit program pemerintah dan adanya monitoring sistem pendukung umkm	3 dok	1 dok	95.000.000	1 dok	160.000.000	1 dok	95.000.000	1 dok	95.000.000	1 dok	95.000.000	5 dok	540.000.000	Setda
1	15	17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pendamping kredit program yang ditingkatkan kualitas SDM nya				7 orang	150.000.000								150.000.000	Setda
1	15	18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi sebagai badan usaha dalam meningkatkan perekonomian daerah	-	100 KUKM	654.819.650	100 KUKM	715.637.450	100 KUKM	787.201.196	100 KUKM	865.921.314	100 KUKM	922.513.446	500 KUKM	3.946.093.056	Dinkop & UMKM

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 15 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Tersusunnya dokumen penerapan sistem IT bagi pengembangan koperasi								1 dok	65.000.000				65.000.000	Setda
1 15 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Tersusunnya keputusan bupati tentang pengembangan koperasi				1 dok	65.000.000								65.000.000	Setda
1 15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya jumlah SDM yang mempunyai kompetensi pada pengadimistrasian, pengelolaan keuangan, kemampuan pada jaringan usaha dan pembiayaan.		1000 orang	1.120.017.150	1000 orang	1.581.108.995	1000 orang	1.739.219.895	1000 orang	1.907.300.126	1000 orang	2.095.885.897	5000 orang	8.443.532.063	Dinkop & UMKM
1 16	PENANAMAN MODAL															
1 16 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya promosi, kerjasama investasi dan pembinaan penanaman modal	9 kali promosi dan terbinanya 60 perusahaan	3 kali promosi dan terbinanya 60 perusahaan	968.088.562	3 kali promosi dan terbinanya 60 perusahaan	1.161.706.274	3 kali promosi dan terbinanya 60 perusahaan	1.394.047.529	3 kali promosi dan terbinanya 60 perusahaan	1.672.857.035	3 kali promosi dan terbinanya 60 perusahaan	2.007.428.442	15 kali promosi dan terbinanya 300 perusahaan	7.204.127.843	BPPT
1 16 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Tersedianya cetak biru Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), penyederhanaan prosedur penanaman modal dan penanganan masalah penanaman modal	Belum ada RUPM dan dokumen penyederhanaan penanaman modal. Penanganan kasus 1 SK	1 RUPM, 1 dokumen penyederhanaan dan 10 kasus	201.532.000	1 dokumen penyederhanaan modal dan 12 kasus	241.838.400	1 dokumen penyederhanaan dan 14 kasus	290.206.080	1 dokumen penyederhanaan dan 16 kasus	348.247.296	1 dokumen penyederhanaan dan 18 kasus	417.896.755	5 dokumen penyederhanaan dan 70 kasus	1.499.720.531	BPPT
1 16 17	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Tersedianya pedoman pengembangan penanaman modal sebagai kajian sumber daya alam sebagai potensi dan peluang investasi daerah	1 dokumen	1 dokumen	190.000.000	1 dokumen	228.000.000	1 dokumen	273.600.000	1 dokumen	328.320.000	1 dokumen	393.984.000	5 dokumen	1.413.904.000	BPPT

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 16 19	Program Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal pada masyarakat, pelaku usaha dan aparat des	285 orang	750 orang	350.936.000	750 orang	421.123.200	750 orang	505.347.840	750 orang	606.417.408	750 orang	727.700.890	4250 orang	2.611.525.338	BPPT
1 16 20	Program Peningkatan Kualitas pelayanan Perizinan	Tersedianya SISYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu) untuk meningkatkan kualitas perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP	Penyelesaian 8942 SK dengan SISYANDU	9389 sk	1.002.233.740	9859 sk	1.202.680.488	10351 sk	1.443.216.586	10869 sk	1.731.859.903	11413 sk	2.078.231.883	51881 sk	7.458.222.600	BPPT
1 16 21	Program Penanganan pengaduan Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Tersedianya pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	2 dokumen	70.000.000	2 dokumen	84.000.000	2 dokumen	100.800.000	2 dokumen	120.960.000	2 dokumen	145.152.000	10 dokumen	520.912.000	BPPT
1 17	KEBUDAYAAN															
1 17 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Bertambahnya produk budaya yang bertahan hidup	13 group	16 group	922.001.155	15 group	1.014.201.270	15 group	1.115.621.397	15 group	1.227.183.537	15 group	1.349.901.891	89 group	1.484.892.080	Disbudparpora
1 17 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terkelolanya museum, cagar budaya dan buku kebudayaan	82 BCB	57 BCB	2.257.018.500	57 BCB	2.482.720.350	57 BCB	2.730.992.385	57 BCB	3.004.091.624	57 BCB	3.304.500.786	387 BCB	3.634.950.864	Disbudparpora
1 17 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Bertambahnya pertgelaran karya seni kreasi baru	53 kreasi	108	551.324.895	108	606.457.385	108	667.103.123	108	733.813.435	108	807.194.779	540	887.914.257	Disbudparpora
1 17 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya jumlah orang di desa/kelurahan yang menerapkan budaya mengaji ba'da maghrib	-	889 orang	311.800.000	889 orang	352.250.000	889 orang	395.200.000	889 orang	440.900.000	889 orang	489.625.000	1545 orang	1.989.775.000	Setda
1 17 18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Bertambahnya kelompok budaya yang dibina	20 sanggar	20	550.000.000	20	605.000.000	20	665.500.000	20	732.050.000	20	805.255.000	120 sanggar	885.780.500	Disbudparpora
1 18	PEMUDA DAN															

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	OLAHRAGA															
1 18 15	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Bertambahnya pemuda yang memiliki kepemimpinan tinggi	1112 pemuda	1.252	108.036.500	1.284	118.840.150	1.252	130.724.165	1.284	143.796.582	1.252	158.176.240	7.436	173.993.864	Disbudparpora
1 18 16	program peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatkan peran serta kepemudaan	980 pemuda	952	1.070.608.330	952	1.177.669.163	952	1.295.436.079	952	1.424.979.687	952	1.567.477.656	5.740	1.724.225.422	Disbudparpora
1 18 16	Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Terbinanya anggota OKP di Kabupaten Cirebon yang memiliki peran strategis dalam mengawal pembangunan	-	400 orang	132.000.000	400 orang	145.200.000	400 orang	159.720.000	400 orang	175.692.000	400 orang	193.261.000	2000 orang	805.873.000	Setda
1 18 17	Program peningkatan penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Bertambahnya pemuda yang memiliki kemampuan berwirausaha	130 orang	630	127.491.760	630	140.240.936	630	154.265.030	630	169.691.533	630	186.660.686	3.280	205.326.754	Disbudparpora
1 18 18	Program Upaya Pencegahan penyalahgunaan narkoba	Bertambahnya pemuda yang memiliki wawasan tentang NAPZA	400 orang	100	110.000.000	100	121.000.000	100	133.100.000	100	146.410.000	100	161.051.000	500	177.156.100	Disbudparpora
1 18 19	Program pengembangan kebijakan manajemen olahraga	Bertambahnya dokumen perencanaan pembinaan olahraga	1 dokumen	1	63.708.700	1	70.079.570	-	77.087.527	-	84.796.280	1	93.275.908	4	102.603.498	Disbudparpora
1 18 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Bertambahnya kegiatan pembibitan olahraga	335 orang	350	7.987.297.725	700	8.786.027.498	735	9.664.630.247	335	10.631.093.272	1.100	11.694.202.599	3555	12.863.622.859	Disbudparpora
1 18 21	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Bertambahnya jumlah GOR dan sarana prasarana olahraga yang dibangun Pemkab	4 GOR dan 39 sarpras	4 gor dan 109 sarpras	4.194.168.000	4 gor dan 59 sarpras	4.613.584.800	6 gor dan 109 sarpras	5.074.943.280	6 gor dan 109 sarpras	5582437608	6 gor dan 109 sarpras	6.140.681.369	30 gor dan 384 sarpras	6.754.749.506	Disbudparpora
1 19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI															

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG G JAWAB		
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	19	15	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan lingkungan serta meningkatnya pengetahuan satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah konflik sosial, demo dan kerusuhan (45)	90%	1.328.231.000	80%	1.329.231.000	70%	1.332.231.000	60%	1.334.231.000	50%	1336231000	50%	6.660.155.000	Bakesbang Linmas
1	19	15	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Menurunnya jumlah masyarakat yang mengalami kecelakaan karena tindak kejahatan	30	25	2.548.083.340	20	2.802.891.674	15	3.083.180.841	10	3.391.498.926	5	3.730.648.818	5	15.556.303.599	Satpol PP
1	19	16	Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terukupinya kebutuhan Informasi / Data Kondisi Terkini Daerah serta Terbangunnya kekuatan Pengamanan Daerah dan Desa / Kelurahan	1180 org	1180 org	332.963.600	1200 org	307.006.200	1270 org	321.623.000	1330 org	332.825.700	1410 org	349.527.200	1410 org	1.643.945.700	Bakesbang Linmas
1	19	16	Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Menurunnya jumlah surat peringatan dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang diawasi	30	25	2.548.083.340	20	2.802.891.674	15	3.083.180.841	10	3.391.498.926	5	3.730.648.818	5	15.556.303.599	Satpol PP
1	19	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya pengetahuan / pemahaman tentang wawasan Kebangsaan	665 org	665 org	349.815.800	720 org	366.139.100	770 org	396.291.600	830 org	427.020.700	880 org	463.600.400	880 org	2.002.867.600	Bakesbang Linmas
1	19	18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya mitra dalam pengembangan wawasan kebangsaan	550 org	550 org	312.079.600	600 org	339.475.500	650 org	367.764.000	700 org	394.011.000	750 org	427.299.000	750 org	1.840.629.100	Bakesbang Linmas
1	19	20	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Menurunnya jumlah pelaku miras dan narkoba	23	16	229.449.000	14	252.393.900	11	277.633.290	9	305.396.619	7	335.936.281	80	1.400.809.090	Satpol PP
1	19	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Terwujudnya kehidupan politik masyarakat yang demokratis dan beretika	1835 org	2840 org	1.008.111.300	2910 org	1.023.027.500	2500 org	897.014.100	2500 org	897.014.100	2550 org	927.014.100	2550 org	4.752.181.100	Bakesbang Linmas

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 19 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Tersedianya data daerah rawan bencana di Kabupaten Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	74.879.600	1 dokumen	80.986.700	1 dokumen	86.523.900	1 dokumen	89.653.700	1 dokumen	95.345.500	1 dokumen	427.389.400	Bakesbang Linmas
1 19 23	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan terpantaunya pelaksanaan pemilu	2500 org	-	-	-	-	2750 org	304.687.200	3000 org	399.325.600	3000 org	429.236.000	3000 org	1.133.248.800	Bakesbang Linmas
1 19 24	Fasilitasi Organisasi / lembaga politik dan kemasyarakatan	Meningkatnya Orpol dan orkemas yang berpartisipasi dalam pembangunan	45% dari orpol dan orkemas yang terdaftar	-	-	55% dari orpol dan orkemas yang terdaftar	46.021.600	60% dari orpol dan orkemas yang terdaftar	50.367.500	65% dari orpol dan orkemas yang terdaftar	55.214.600	70% dari orpol dan orkemas yang terdaftar	60.987.400	70% dari orpol dan orkemas yang terdaftar	212.591.100	Bakesbang Linmas
1 20	PEMERINTAHAN UMUM															
1 20 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya kapasitas hasil kajian anggota DPRD, sebagai bahan perumusan legislasi, penganggaran, dan pengawasan	100%	100%	23.527.752.700	100%	24.704.140.335	100%	25.880.527.970	100%	27.056.915.605	100%	28.233.303.240	100%	129.402.639.850	Sekretariat DPRD
1 20 17	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	100%	100%	7.748.975.256	100%	8.523.872.782	100%	9.376.260.060	100%	10.313.886.066	100%	11.345.274.672	100%	47.308.268.835	Dispenda
1 20 20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Meningkatnya prosentase difungsikannya laporan peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan kebijakan KDH	100%	100%	7.359.371.250	100%	8.095.304.800	100%	8.904.833.650	100%	9.795.312.100	100%	10.774.842.850	100%	44.929.664.650	Inspektorat
1 20 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tersedianya dokumen perencanaan Dinas 5 Tahun dan 1	100%	100%	20.044.640	100%	22.049.104	100%	24.254.014	100%	26.679.416	100%	29.347.357	100%	122.374.532	Dispenda
1 20 26	Program Penataan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati	Terwujudnya peraturan Bupati/Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati	100%	100%	60.894.735	100%	66.984.209	100%	73.682.629	100%	81.050.892	100%	89.155.982	100%	371.768.447	Dispenda

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	20	37	Program Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan	Terwujudnya tertib administrasi dalam pengelolaan pajak daerah	100%	100%	67.533.895	100%	74.287.285	100%	81.716.013	100%	89.887.614	100%	98.876.376	100%	412.301.182	Dispenda
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan KDH bidang Pemerintahan, Tantrib, Ekbang, Yanum, dan Kesra	-	20%	87.700.000	20%	96.300.000	20%	105.950.000	20%	116.265.000	20%	127.961.500	20%	534.176.500	Kec. Jamblang
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan kepada Camat sebesar 100 % setiap tahun	-	100%	100.000.000	100%	120.000.000	100%	144.000.000	100%	172.800.000	100%	207.360.000	100%	744.160.000	Kec. Ciwaringin
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Melaksanakan Sebagian Urusan Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan Kepada Camat di Bidang Pemerintahan, Tantrib, Ekbang, Yanum, dan Kesra	-	100%	150.000.000	100%	180.000.000	100%	216.000.000	100%	245.000.000	100%	292.000.000	100%	1.083.000.000	Kec. Karangsembung
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terselenggaranya Kinerja Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	-	20%	82.000.000	40%	90.200.000	60%	99.220.000	80%	109.142.000	100%	120.056.200	100%	500.618.200	Kec. Waled
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Melaksanakan Sebagian Urusan Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan Kepada Camat di Bidang Ekbang, Kesra, Tantrib, Pemerintahan dan Yanum	-	100%	15.979.000	100%	17.576.900	100%	17.752.669	100%	17.930.196	100%	18.109.498	100%	87.348.262	Kec. Dukupuntang

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Melaksanakan Sebagian Urusan Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan Kepada Camat di Bidang Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000	100%	161.051.000	671.561.000	Kec. Mundu
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-		98.500.000	100%	108.250.000	100%	118.500.000	100%	129.900.000	100%	142.400.000	597.550.000	Kec. Plumbon
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	482.694.000	100%	530.963.400	100%	584.059.740	100%	642.465.714	100%	706.712.285	2.946.895.139	Kec. Sumber
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	81.732.500	100%	85.819.125	100%	90.110.081	100%	94.615.585	100%	99.346.365	451.623.656	Kec. Suranenggala
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000	100%	161.051.000	671.561.000	Kec. Panguragan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	500.000.000	Kec. Tengah Tani
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	118.500.000	100%	130.350.000	100%	143.385.000	100%	157.723.500	100%	723.454.350	Kec. Susukan Lebak
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	120.000.000	100%	145.000.000	100%	210.000.000	100%	195.000.000	100%	890.000.000	Kec. Losari
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	80.319.000	100%	80.319.000	100%	80.319.000	100%	80.319.000	100%	401.595.000	Kec. Lemahabang
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	101.000.000	100%	104.000.000	100%	107.000.000	100%	110.000.000	100%	535.000.000	Kec. Gempol

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	500.000.000	Kec. Talun
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	500.000.000	Kec. Weru
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	111.100.000	100%	112.211.000	100%	113.333.110	100%	546.644.110	Kec. Kedawung
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	145.996.400	100%	145.996.400	100%	150.000.000	100%	165.000.000	100%	181.500.000	100%	199.650.000	100%	842.146.400	Kec. Kapetakan
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000	100%	610.510.000	Kec. Ciledug

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB		
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	147.944.000	100%	165.697.280	100%	185.580.954	100%	207.850.668	100%	232.792.748	100%	939.865.650	Kec. Arjawinangun
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	120.000.000	100%	132.000.000	100%	145.200.000	100%	159.720.000	100%	175.692.000	100%	732.612.000	Kec. Babakan
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	100.000.000	100%	98.400.000	100%	98.400.000	100%	98.400.000	100%	98.400.000	100%	493.600.000	Kec Pasaleman
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan kepada Camat sebesar 100 % setiap tahun	-	100%	88.940.000	100%	97.834.000	100%	107.617.400	100%	118.379.140	100%	130.217.054	100%	542.987.594	Kec. Palimanan
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	83.128.000	100%	104.455.000	100%	114.900.500	100%	116.049.505	100%	117.210.000	100%	118.382.100	100%	570.997.105	Kec. Plered
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	144.000.000	100%	164.700.000	100%	188.200.000	100%	210.300.000	100%	241.400.000	100%	948.600.000	Kec. Klangeran

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB		
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	88.940.000	100%	93.387.000	100%	98.056.350	100%	102.959.168	100%	108.107.126	100%	491.449.643	Kec. Depok
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	73.653.400	100%	77.336.070	100%	81.202.874	100%	85.263.017	100%	89.526.168	100%	406.981.529	Kec. Karangwareng
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	100.477.000	100%	105.500.850	100%	110.775.893	100%	116.314.687	100%	122.130.421	100%	555.198.851	Kec. Kedawung
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	110.880.000	100%	116.424.000	100%	122.245.200	100%	128.357.460	100%	134.775.333	100%	612.681.993	Kec. Pabedian
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	118.259.751	100%	124.172.739	100%	130.381.375	100%	136.900.444	100%	143.745.466	100%	653.459.776	Kec. Gebang
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	100.000.000	100%	105.000.000	100%	110.250.000	100%	115.762.500	100%	121.550.625	100%	552.563.125	Kec. Sedong

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB		
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	114.839.951	100%	120.581.949	100%	126.611.046	100%	132.941.598	100%	139.588.678	100%	634.563.222	Kec. Astana Japura
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	100.000.000	100%	105.000.000	100%	110.250.000	100%	115.762.500	100%	121.550.625	100%	552.563.125	Kec. Pangenan
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	100.000.000	100%	105.000.000	100%	110.250.000	100%	115.762.500	100%	121.550.625	100%	552.563.125	Kec. Gunung Jati
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	100.647.501	100%	105.679.876	100%	110.963.870	100%	116.512.063	100%	122.337.667	100%	556.140.977	Kec. Susukan
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	100.000.000	100%	105.000.000	100%	110.250.000	100%	115.762.500	100%	121.550.625	100%	552.563.125	Kec. Gegesik
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	109.619.500	100%	120.581.450	100%	132.639.595	100%	145.903.556	100%	160.402.912	100%	669.147.013	Kec. Pabuaran

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	102.956.000	100%	108.103.800	100%	113.508.990	100%	119.184.440	100%	125.143.661	100%	568.896.891	Kec. Grege
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan Pengendalian Kebijakan KDH Bid. Yanum, Kesra, Tantrib, Ekbang, & Pemerintahan	-	100%	100.000.000	100%	105.000.000	100%	110.250.000	100%	115.762.500	100%	121.550.625	100%	552.563.125	Kec. Beber
1 20	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya jumlah Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Setiap Tahun	-	2 Desa	70.000.000	2 Desa	78.400.000	2 Desa	87.808.000	2 Desa	98.344.960	3 Desa	110.146.355	11 Desa	444.699.315	Kec. Arjawinangun
1 20	Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Meningkatnya rasio jenis perizinan dan rekomendasi yang diterbitkan	-		26.500.000		30.000.000		34.000.000		38.000.000		42.000.000		170.500.000	Kec. Gempol
1 20	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat sebesar 10 % setiap tahun	-	10%	27.000.000	10%	32.500.000	10%	39.000.000	10%	46.000.000	10%	55.000.000	10%	199.500.000	Kec. Karangsembung
1 20	Program peningkatan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang hukum dan HAM	Tersusunnya usulan program legislasi daerah	1 dokumen usulan prolegda	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	85.000.000	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen	100.000.000	5 dokumen	400.000.000	Setda
1 20	Program pengembangan data dan informasi	Tersedianya produk hukum daerah dalam website JDIH	-	425 dokumen	60.000.000	430 dokumen	70.000.000	435 dokumen	80.000.000	440 dokumen	90.000.000	445 dokumen	100.000.000	2175 dokumen	400.000.000	Setda

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 20 26	Program penataan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kualitas produk hukum daerah	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah dengan adanya pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa raperda, raperup, kepup, MoU/peraturan bersama/perjanjian kerjasama, instruksi bupati		100%	918.000.000	100%	1.115.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.480.000.000	100%	1.215.000.000	100%	6.028.000.000	Setda
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya penanganan sengketa/perkara/permasalahan hukum di dalam dan diluar pengadilan	10 perkara	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	2.000.000.000	Setda
1 20 40	Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pmda	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah/Penataan TUPOKSI SKPD		100%	1.211.501.100	100%	1.260.162.740	100%	1.386.177.600	100%	1.524.793.900	100%	1677271000	100%	7.059.906.340	Setda
1 20	Program peningkatan administrasi dan pengelolaan barang daerah	Meningkatnya administrasi pengelolaan barang daerah		100%	625.000.000	100%	577.000.000	100%	565.000.000	100%	550.000.000	100%	540.000.000	100%	2.857.000.000	Setda
1 20	Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Pelayanan kedinasan KDH/WKDH		100%	3.207.953.320	100%	3.689.146.318	100%	4.242.518.266	100%	5.091.021.919	100%	6.109.226.302	100%	22.339.866.125	Setda
1 20	Program Administrasi Kepegawaian	Prosentase pelayanan tepat waktu dan objek	91%	91,63%	1.072.153.990	93%	1.179.369.389	94%	1.297.306.328	95%	1.386.095.786	96%	1.514.455.364	96%	6.449.380.857	BKPPD
1 20 31	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kompetensi aparatur	-	62%	7.152.522.025	64%	7.273.059.243	65%	7.793.872.967	68%	8.861.719.963	69%	9.575.166.860	69%	40.656.341.057	BKPPD
1 20 32	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa	-	83%	4.503.196.850	84%	4.538.516.535	85%	5.291.368.189	86%	5.445.505.007	87%	6.345.055.508	87%	26.123.642.089	BKPPD
1 20	Program Fasilitas Kesejahteraan Aparatur	Terpenuhinya hak-hak kesejahteraan aparatur	-	755 orang	351.195.900	1044 orang	632.960.790	1300 orang	341.256.869	1.400 orang	375.382.556	1500 orang	412.920.811	5722 orang	2.113.716.926	BKPPD
1 20	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data layanan dan data aparatur yang up to date	20%	30%	462.822.640	60%	509.104.904	70%	560.015.394	90%	616.016.934	100%	677.618.627	100%	2.825.578.499	BKPPD

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 21	KETAHANAN PANGAN															
1 21 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebuna n)	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	20 Ton GKG	40 Ton GKG	15.044.228.500	40 Ton GKG	16.350.651.350	40 Ton GKG	17.862.216.485	40 Ton GKG	19.365.938.134	40 Ton GKG	21.180.871.947	260 Ton GKG	89.803.906.415	BKP5K
1 21 15	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya ketahanan pangan			3.018.477.500		3.320.325.250		3.652.357.775		4.017.593.553		4.419.352.908		18.428.106.985	Distanbunnakh ut
1 22	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA															
1 22 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Terbinanya lembaga ekonomi pedesaan, BUMDES dan GOLEKMAH	87	71	551.717.500	81	580.752.500	81	580.752.500	81	580.752.500	81	580.752.500	482	2.874.727.500	BPMPD
1 22	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pedesaan	Terselenggaranya Gelar ITG Tingkat Propinsi dan Nasional	17	2	100.000.000	2	115.000.000	2	115.000.000	2	115.000.000	2	115.000.000	27	560.000.000	BPMPD
1 22 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Terbinanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	177	589	1.621.572.000	589	1.621.572.000	589	1.621.572.000	589	1.621.572.000	593	1.621.572.000	3.126	8.107.860.000	BPMPD
1 22 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa			2.467.618.005	1.599	2.482.901.980	1.995	2.713.995.982	1.579	2.702.526.712	1.862	2.936.433.194	10.081	13.303.475.874	BPMPD
1 22	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel	Terbinanya lembaga kemasyarakatan desa/kel	327	689	1.680.118.000	689	1.680.118.000	689	1.680.118.000	689	2.118.188.000	697	2.118.188.000	3.782	9.276.730.000	BPMPD
1 22	Program Peningkatan Peranserta BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatnya peran serta BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	145	80	523.495.500	80	575.845.050	80	633.429.555	80	696.772.511	80	766.449.762	545	3.195.992.377	BPMPD
1 23	STATISTIK															
1 24	KEARSIPAN															

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 24 15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan yang Terpadu	Diterapkannya sistem administrasi kearsipan yang terpadu	-	1 sistem aplikasi	332.657.500	1 sistem aplikasi	365.923.250	1 sistem aplikasi	402.515.575	1 sistem aplikasi	442.767.133	1 sistem aplikasi	487.043.846	1 sistem aplikasi	2.030.907.304	Kantor Arsip dan Dokumen
1 24 15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan yang Terpadu	Terselenggaranya peliputan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah	350 Kegiatan	100%	322.627.195	100%	354.889.915	100%	390.378.906	100%	429.416.797	100%	472.358.476	100%	1.969.671.288	Setda
1 24 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Meningkatnya jumlah arsip daerah yang dapat diselamatkan	-	1.080 arsip vital, 1 arsip bersejarah	250.857.000	1.080 arsip vital, 1 arsip bersejarah	250.857.000	1.080 arsip vital, 1 arsip bersejarah	250.857.000	1.080 arsip vital, 1 arsip bersejarah	250.857.000	1.080 arsip vital, 1 arsip bersejarah	250.857.000	1.080 arsip vital, 1 arsip bersejarah	1.254.285.000	Kantor Arsip dan Dokumen
1 24 16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah		100%	81.850.120	100%	94.127.638	100%	108.246.784	100%	129.896.140	100%	155.875.369	100%	569.996.051	Setda
1 25	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
1 25 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terselenggaranya sistem komunikasi, informasi dan media massa, Belanja sarana dan prasarana layanan informasi dan komunikasi	16 OPD	28 OPD	1.675.000.000	40 OPD/ Kec	2.025.000.000	52 OPD/ Kec	2.225.000.000	64 OPD/ Kec	2.525.000.000	72 OPD/ Kec	2.750.000.000	72 OPD/ Kec	11.200.000.000	Diskominfo
1 25 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terpenuhinya kebutuhan sistem informasi di lingkungan Setda Kab. Cirebon, tercukupinya penyediaan bandwidth untuk akses internet di lingkungan Setda Kab. Cirebon	12 Mbps	12 Mbps	226.232.160	12 Mbps	248.855.376	12 Mbps	273.740.914	12 Mbps	301.115.005	12 Mbps	331.226.505	12 Mbps	1.381.169.960	Setda
1 25 17	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Terfasilitasinya Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi baik untuk aparatur, SDM TIK dan masyarakat	420 orang	824 orang	400.000.000	924 orang	400.000.000	1324 orang	400.000.000	1674 orang	400.000.000	2024 orang	400.000.000	3424 orang	2.000.000.000	Diskominfo

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 25 18	Program Kerjasama Informasi dan Media Masa	Terselenggaranya Kerjasama Informasi dan Media Massa dalam diseminasi informasi	200 berita	200 berita	1.166.950.000	200	1.239.760.000	250	1.303.451.000	250	1.442.991.100	300	1.557.305.210	300	6.710.457.310	Diskominfo
1 25 18	Program Kerjasama Informasi dan Media Masa	Tersosialisasikannya kegiatan pemerintahan daerah baik media cetak ataupun TV	10 TV Lokal, 2 TV Nasional, 72 Media, 1000 iklan	100%	2.004.929.740	100%	2.205.422.714	100%	2.425.964.985	100%	2.668.561.484	100%	2.935.417.632	100%	12.240.296.556	Setda
1 26	PERPUSTAKAAN															
1 26 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya budaya baca dan terbinaanya perpustakaan	-	17.868 orang	862.452.900	17.940 orang	948.698.190	18.119 orang	1.043.568.009	19931 orang	1.147.924.810	21.743 orang	1.262.717.230	21.743 orang	5.265.361.139	Kantor Perpustakaan Daerah
2	URUSAN PILIHAN															
2 1	PERTANIAN															
2 1 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya sikap, pengetahuan dan keterampilan petani	2820 orang	3900 orang	2.320.000.000	4200 orang	2.950.000.000	4350 orang	3.200.000.000	4500 orang	3.450.000.000	4650 orang	3.700.000.000	4650 orang	15.620.000.000	BKP5K
2 1 17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya sikap, pengetahuan dan keterampilan pelaku utama	120	150	97.000.000	180	107.000.000	210	118.000.000	240	130.000.000	270	143.000.000	1.050	595.000.000	BKP5K
2 1 17	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya jumlah transaksi/omset produk tanbunnakhut	17.300.000	58.700.000	594.180.000	64.570.000	653.598.000	71.027.000	718.957.800	78.129.700	790.853.580	85.942.670	869.938.938	94.536.937	3.627.528.318	Distanbunnakh ut
2 1 18	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Tersedianya alsintan untuk budidaya dan pasca panen komoditas hortikultura			2.836.674.500		3.120.341.950		3.432.376.145		3.775.613.760		4.153.175.135		17.318.181.490	Distanbunnakh ut
2 1 18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Peningkatan disiminasi teknologi pada komoditas pertanian	12	14	980.000.000	16	1.180.000.000	18	1.250.000.000	20	1.300.000.000	22	1.350.000.000	90	6.060.000.000	BKP5K

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 1 19	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Tersedianya alsintan pertanian/perkebunan			7.170.595.500		7.887.655.050		8.676.420.555		9.544.062.611		10.498.468.872		43.777.202.587	Distanbunnakh ut
2 1 19	Program Peningkatan Produksi pertanian /perkebunan	Tingkat penerapan teknologi tepat guna pada bidang perkebunan	4	5	155.684.650	6	171.253.115	7	188.378.427	8	207.216.269	9	227.937.896	900%	950.470.357	BKP5K
2 1 20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Meningkatnya sikap, pengetahuan dan keterampilan tenaga penyuluh	332	342	700.000.000	352	770.000.000	362	847.000.000	372	931.700.000	382	1.024.870.000	382	4.273.570.000	BKP5K
2 1 22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya populasi dan produksi ternak			1.153.677.000		1.269.044.700		1.395.949.170		1.535.544.087		1.689.098.496		7.043.313.453	Distanbunnakh ut
2 1 24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Terbangunya sistem produksi peternakan dengan penerapan teknologi peternakan tepat guna (inseminasi buatan)	2000 Inseminasi buatan	3000	200.000.000	3.200	220.000.000	3.400	242.000.000	3.600	266.200.000	3.800	292.820.000	4.000	1.221.020.000	Distanbunnakh ut
2 1	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Meningkatnya PSK Petani tembakau	3 klp	7 klp	250.000.000	11 klp	400.000.000	15 klp	550.000.000	19 klp	700.000.000	23 klp	850.000.000	75	2.750.000.000	BKP5K
2 1	Peningkatan kualitas bahan baku tembaku	Tersedianya bahan baku tembakau berkadar nikotin rendah		20	1.650.000.000	20	1.815.000.000	20	1.996.500.000	20	2.196.150.000	20	2.415.765.000	20	10.073.415.000	Distanbunnakh ut
2 1	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Tersedianya vaksinasi dan pemeriksaan sampel untuk pencegahan dan pemeliharaan penyakit hewan menular	152000 vaksin	155.040	992.000.000	158.141	1.031.915.450	161.303	1.075.822.445	164.529	1.124.120.140	167.820	1.177.247.603	161.367	5.401.105.638	Distanbunnakh ut
2 2	KEHUTANAN															
2 2 15	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Tingkat penerapan teknologi tepat guna pada bidang kehutanan		48%	683.500.000	49%	418.500.000	52%	460.350.000	53%	506.385.000	55%	557.023.500	55%	2.625.758.500	BKP5K
2 2 15	Pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Terlatihnya petugas penerbit SKAU di tingkat desa (desa)		15	555.000.000	16	610.500.000	17	671.550.000	18	738.705.000	19	812.575.500	20	3.388.330.500	Distanbunnakh ut

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB			
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD					
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
2	2	16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Tersedianya bibit tanaman kehutanan siap tanaman (batang) untuk reboisasi dan penghijauan hutan		100000 bibit	1.066.526.721	110000 bibit	1.173.179.393	121000 bibit	1.290.497.332	133100 bibit	1.419.547.066	146410 bibit	1.561.501.772	161051 bibit	6.511.252.284	Distanbunnakht	
2	2	16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Peningkatan kelas kemampuan kelompok utama kehutanan			360.000.000	-	425.000.000		-	467.000.000		561.000.000		617.000.000		2.430.000.000	BKP5K
2	2	16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan	25%	35%	169.000.000	45%	185.000.000	55%	202.800.000	65%	222.400.000	75%	244.000.000	85%	1.023.200.000	Setda	
2	2	19	Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Tersedianya layanan informasi pemasaran hasil hutan SKAU, IUIPHHK, dan IUIPHHBK	22	24	50.000.000	24	55.000.000	24	60.500.000	24	66.550.000	24	73.205.000	142	305.255.000	Distanbunnakht	
2	2		Program pengendalian alih fungsi lahan	Terkendalinya alih fungsi lahan tanbunakht dengan adanya luas lahan pertanian lestari		51.628	150.000.000	50.901	165.000.000	50.174	181.500.000	49.447	199.650.000	48.720	219.615.000	47.993	915.765.000	Distanbunnakht	
2	3		ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																
2	3	15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Tertibnya kegiatan pertambangan		80%	60.000.000	80%	66.000.000	80%	72.600.000	80%	79.860.000	80%	87.846.000	80%	366.306.000	DPSDAP	
2	3	16	Program Pengawasan dan Penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	tertibnya kegiatan pertambangan rakyat		20%	40.000.000	20%	44.000.000	20%	48.400.000	20%	53.240.000	20%	58.564.000	100%	244.204.000	DPSDAP	
2	3	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kebutuhan listrik		8.54%	1.804.790.700	22.86%	6.790.000.000	22.86%	6.790.000.000	22.86%	6.790.000.000	22.88%	6.794.000.000	100%	28.968.790.700	DPSDAP	
2	4		PARIWISATA																

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 4 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Bertambahnya kunjungan wisatawan	732.235 orang	739.557	761.101.000	746.953	837.211.100	754.422	920.932.210	761.976	1.013.025.431	769.586	1.114.327.974	4.504.729	1.225.760.772	Disbudparpora
2 4 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Bertambahnya ODTW yang ditata	5 ODTW	6	1.142.515.000	8	1.256.766.500	8	1.382.443.150	5	1.520.687.465	7	1.672.756.212	39	1.840.031.833	Disbudparpora
2 4 17	Program pengembangan kemitraan	Bertambahnya bentuk kerjasama pengembangan pariwisata	-	6	357.339.400	6	393.073.340	6	432.380.674	6	475.618.741	6	523.180.616	30	575.498.677	Disbudparpora
2 5	KELAUTAN															
2 5 15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Terbinanya kelompok ekonomi masyarakat pesisir	40 orang	30 orang	440.000.000	30 orang	484.000.000	35 orang	532.400.000	35 orang	585.640.000	35 orang	644.204.000	40 orang	2.686.244.000	Dislakan
2 5 16	Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	Terbinanya anggota Pokmaswas petugas dan pelaku usaha dapat terbina serta terlaksananya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	130 orang dan 11 OPS pengawasan	0	150.000.000	2.5%	165.000.000	0	181.500.000	3.5%	199.650.000	3.5%	219.615.000	3.5%	915.765.000	Dislakan
2 5 20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Berkembangnya bibit ikan unggul	84,91 juta ekor	5-10 %	1.380.000.000	5-10 %	1.518.000.000	5-10 %	1.669.800.000	5-10 %	1.836.780.000	5-10 %	2.020.458.000	5-10 %	8.425.038.000	Dislakan
2 5 20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Peningkatan kelas kemampuan kelompok utama perikanan	445	490	1.432.000.000	539	1.710.000.000	593	1.910.000.000	652	2.330.000.000	690	2.600.000.000	2.964	9.982.000.000	BKP5K
2 5 21	Program Pengembangan perikanan tangkap	Tersedianya alat tangkap ikan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi perikanan	produksi perikanan tangkap 28.645 Ton	50%	734.700.000	50%	808.170.000	50%	888.987.000	50%	977.885.700	50%	1.075.674.270	50%	4.485.416.970	Dislakan
2 5 22	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Peningkatan diseminasi teknologi pada komoditas perikanan	0	39%	1.510.000.000	43%	2.204.000.000	47%	2.810.000.000	51%	3.690.000.000	55%	3.750.000.000	55%	13.964.000.000	BKP5K

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 5 24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Terbentuknya kawasan budidaya ikan air payau	9 Lokasi	6 Lokasi	742.000.000	7 Lokasi	941.200.000	8 Lokasi	1.035.320.000	8 Lokasi	1.145.727.000	9 Lokasi	1.268.175.950	9 Lokasi	5.132.422.950	Dislakan
2 5 25	Program Peningkatan Kapasitas Usaha Kelautan dan Perikanan	Adanya temu usaha pelaku bisnis	140 orang	100 orang	110.000.000	110 orang	121.000.000	120 orang	133.100.000	130 orang	146.410.000	140 orang	161.051.000	140 orang	671.561.000	Dislakan
2 5 26	Program Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan UPT Laboratorium Perikanan	Meningkatnya pelayanan laboratorium	75 unit	65 unit	450.000.000	65 unit	495.000.000	65 unit	544.500.000	70 unit	598.950.000	70 unit	658.845.000	75 unit	2.747.295.000	Dislakan
2 5 27	Program Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dan Alur lalu Lintas Kapal Perikanan	Terbangunnya breakwater, Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPI Gebang Mekar dan pengerukan kolam & alur lalu lintas kapal/perahu	0	20%	2.020.000.000	20%	2.222.000.000	20%	2.444.200.000	20%	2.688.620.000	20%	2.957.482.000	20%	12.332.302.000	Dislakan
2 5 28	Program Pembinaan dan Pengembangan Mutu Hasil Perikanan	Peningkatan sarana dan Meningkatnya prasarana uji mutu hasil perikanan	1 Unit	1 Unit	935.000.000	1 Unit	1.028.500.000	1 Unit	1.131.350.000	1 Unit	1.244.485.000	1 Unit	1.368.933.000	1 Unit	5.708.268.000	Dislakan
2 5 29	Program Peningkatan Produksi Benih Ikan UPT Benih Ikan	Terpenuhinya kebutuhan benih ikan bagi para pembudidaya ikan dan sarana prasarananya	Benih ikan air tawar berkualitas 70,86 juta ekor (Nila, Mas, Gurame, Lele dan lainnya)	Benih ikan air tawar berkualitas 74,17 juta ekor (Nila, Mas, Gurame, Lele dan lainnya)	455.000.000	Benih ikan air tawar berkualitas 78,09 juta ekor (Nila, Mas, Gurame, Lele dan lainnya)	500.500.000	Benih ikan air tawar berkualitas 81,22 juta ekor (Nila, Mas, Gurame, Lele dan lainnya)	550.550.000	Benih ikan air tawar berkualitas 82,67 juta ekor (Nila, Mas, Gurame, Lele dan lainnya)	605.605.000	Benih ikan air tawar berkualitas 84,91 juta ekor (Nila, Mas, Gurame, Lele dan lainnya)	666.165.500	Benih ikan air tawar berkualitas 84,91 juta ekor (Nila, Mas, Gurame, Lele dan lainnya)	2.777.820.500	Dislakan
2 5 30	Program Pengembangan Data Informasi Statistik Daerah	Tersedianya data statistik kelautan dan perikanan yang akurat dan terbaru	-	100%	24.200.000	100%	26.620.000	100%	29.282.000	100%	32.210.200	100%	35.431.220	100%	147.743.420	Dislakan
2 5 31	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat diWil Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Tersedianya Tanaman mangrove dan cerucuk bambu, meingkatnya populasi kura-kura belawa	11 Ha, 150 ekor kura-kura belawa	20%	670.000.000	40%	737.000.000	60%	810.700.000	80%	891.770.000	100%	980.947.000	100%	4.090.417.000	Dislakan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 5 Ba	Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	Tersedianya benih ikan untuk pengelolaan perairan umum berbasis pemberdayaan masyarakat	460.000 ekor benih ikan di 2 kawasan dan 1 dok	460.000 ekor benih ikan (40%) dan 1 dok	455.000.000	460.000 ekor benih ikan (60%) dan 1 dok	500.500.000	460.000 ekor benih ikan (80%) dan 1 dok	550.550.000	460.000 ekor benih ikan (60%) dan 1 dok	605.605.000	460.000 ekor benih ikan (80%) dan 5 dok	666.165.500	460.000 ekor benih ikan (100%) dan 5 dok	2.777.820.500	Dislakan
2 5 Ba	Program Peningkatan ru Daya Saing Produk Perikanan	Tersedianya Sarana display produk non konsumsi	10 Unit	2 Unit	57.000.000	4 Unit	62.700.000	6 Unit	68.970.000	8 Unit	75.867.000	10 Unit	83.453.700	10 Unit	347.990.700	Dislakan
2 5 Ba	Program Pengolahan Sumberdaya Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Terbangunnya infrastruktur gudang garam dan meningkatnya kemampuan SDM	18 Unit, 3 TPI, 42 orang	10 unit,1 TPI, 14 orang	2.502.000.000	12 unit, 2 TPI, 28 orang	2.752.200.000	14 unit, 2 TPI, 28 orang	3.027.420.000	16 unit, 2 TPI, 28 orang	3.330.162.000	18 unit, 3 TPI, 42 orang	3.663.178.200	18 Unit, 3 TPI, 42 orang	15.274.960.200	Dislakan
2 5 Ba	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Tersedianya sarana mutu pengolah hasil perikanan	12 paket	10 paket	110.000.000	10 paket	121.000.000	10 paket	133.100.000	10 paket	146.410.000	12 paket	161.051.000	12 paket	671.561.000	Dislakan
2 5 Ba	Program Pengembangan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) UPT PPI Gebangmekar	Meningkatkan kelancaran Jumlah Kapal/perahu yang masuk dan berlabuh di PPI Gebang Mekar 1.050 kapal/hari	2.250 Nelayan	-	105.000.000	10%	1.815.000.000	15%	2.061.475.000	15%	2.289.622.500	15%	2.543.880.500	15%	8.814.978.000	Dislakan
2 6	PERDAGANGAN															
2 6 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan konsumen	240 orang, 24 kasus penyelesaian sengketa, 500 pengawasan barang dan jasa, 8 Pos ukur ulang, 15 SPBU, 7 SPBE, 4 Sentra Produksi, 7 Sosialisasi Perda Tera	100%	1.135.900.000	100%	1.135.900.000	100%	1.135.900.000	100%	1.135.900.000	100%	1.135.900.000	100%	5.679.500.000	Disperindag

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 6 16	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Tersedianya data promosi produk unggulan dan Dokumen laporan forum pertemuan pelaku usaha, akademisi dan pemerintah		1 dok	87.000.000	2 dok	230.000.000	2 dok	244.000.000	2 dok	259.000.000	2 dok	276.000.000	2 dok	1.096.000.000	Setda
2 6 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Terfasilitasinya pelaku usaha perdagangan dalam negeri dan ekspor melalui promosi	50 pengusaha dan perluasan pasar luar negeri 3%	100%	1.754.000.000	100%	1.979.000.000	100%	1.779.000.000	100%	1.979.000.000	100%	1.879.000.000	100%	9.370.000.000	Disperindag
2 6 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan terdistribusikan dengan daya saing yang baik	17 komoditi dan 11 barang strategis	100%	425.000.000	100%	1.100.000.000	100%	650.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.150.000.000	100%	4.425.000.000	Disperindag
2 6 19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tertampungnya pedagang pasar tradisional dan tersedianya sarana dan prasarana pedagang kaki lima dan asongan	1 pasar, 240 pedagang dan kenaikan retribusi daerah 4%	1 pasar, 240 pedagang dan kenaikan retribusi daerah 4%	12.162.844.300	2 pasar, 240 pedagang dan kenaikan retribusi daerah 4%	20.912.844.300	2 pasar, 240 pedagang dan kenaikan retribusi daerah 4%	20.912.844.300	2 pasar, 240 pedagang dan kenaikan retribusi daerah 4%	20.912.844.300	2 pasar, 240 pedagang dan kenaikan retribusi daerah 4%	20.912.844.300	9 pasar, 1200 pedagang dan kenaikan retribusi daerah 20%	95.814.221.500	Disperindag
2 6 19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tersedianya data PKL di poros jalan nasional, provinsi dan kabupaten		1 dok	170.000.000										170.000.000	Setda
2 6	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Tersusunnya Keputusan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT)	-	2 dok	61.000.000	2 dok	61.000.000	2 dok	61.000.000	2 dok	61.000.000	2 dok	61.000.000	10 dok	305.000.000	Setda
2 6	Program Kebijakan Pengendalian dan Pemanfaatan Penerimaan Pajak Rokok	Tersusunnya peraturan bupati tentang pedoman pemanfaatan dana pajak rokok		1 dok	75.000.000										75.000.000	Setda
2 6	Program perlindungan konsumen dan pengamanan Perdagangan	Tersusunnya peraturan bupati tentang kebijakan perlindungan konsumen				1 dok	75.000.000								75.000.000	Setda

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 6	Program Kebijakan Pengendalian dan pemanfaatan Penerimaan Pajak Rokok	Tersusunnya dokumen hasil laporan sosialisasi ketentuan pajak rokok bagi OPD dan masyarakat				1 dok	200.000.000					1 dok	200.000.000		400.000.000	Setda
2 6	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Tersusunnya dokumen hasil laporan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan penggunaan DBHCHT				1 dok	220.000.000					1 dok	220.000.000		440.000.000	Setda
2 6	Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah	Tersusunnya program kerja TPID dalam mengatasi inflasi daerah dan tersusunnya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon		2 dok	150.000.000	2 dok	150.000.000	2 dok	150.000.000	2 dok	150.000.000	2 dok	150.000.000	10 dok	750.000.000	Setda
2 6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Tersedianya data penyesuaian migas di kabupaten Cirebon		1 dok	125.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	525.000.000	Setda
2 6	Program Peningkatan Usaha Perusahaan daerah	Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi BUMD	1 dok	2 dok	90.000.000	2 dok	90.000.000	2 dok	90.000.000	2 dok	90.000.000	2 dok	90.000.000	10 dok	450.000.000	Setda
2 6	Program Peningkatan Usaha Perusahaan daerah	Tersusunnya dokumen usulan merger bagi 12 BPR Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon		1 dok	100.000.000									1 dok	100.000.000	Setda

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 6	Program Pengembangan SDM Badan Usaha Daerah	Terseleksinya dewan Pengawas dan Direksi PD. BPR hasil merger, yang berkualitas dan profesional, yang terpilih melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertambahnya wawasan aparatur BUMD tentang aturan perusahaan daerah		6 orang direktur, DP dan 50 orang aparatur	340.000.000	6 orang direktur, DP dan 50 orang aparatur	340.000.000	50 orang	90.000.000	50 orang	90.000.000	50 orang	90.000.000	12 orang direktur dan DP, dan 250 aparatur BUMD	950.000.000	Setda
2 7	PERINDUSTRIAN															
2 7 15	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem Produksi	Meningkatnya kapasitas IPTEK industri	110 IKM	110 IKM	369.597.000	250 IKM	1.050.000.000	250 IKM	1.050.000.000	250 IKM	1.050.000.000	250 IKM	1.100.000.000	1.110 IKM	4.619.597.000	Disperindag
2 7 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terbinanya pengembangan industri kecil dan menengah	Fasilitasi 230 IKM, klaster industri 100 IKM, database 3 komoditi, akses perbankan 30 IKM, kemitraan 30 IKM	100%	715.275.500	100%	1.250.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.300.000.000	Fasilitasi 1.150 IKM, pengembangan SDM di 290 IKM, klaster industri 900 IKM, database 15 komoditi, akses perbankan 430 IKM, kemitraan 430 IKM	5.865.275.500	Disperindag
2 7 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terdidik dan termonitornya penerima kredit program bantuan dan pengelolaan dan dan usaha	200 orang	30 orang	250.000.000	30 orang	250.000.000	30 orang	250.000.000	30 orang	250.000.000	30 orang	250.000.000	150 orang	1.250.000.000	Setda

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB		
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	7	17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya penguasaan dan penggunaan teknologi tepat guna	Teknologi industri di 100 IKM, penerapan SNI di 30 IKM dan standar produk industri manufaktur di 100 IKM	Teknologi industri di 100 IKM, penerapan SNI di 30 IKM dan standar produk industri manufaktur di 100 IKM	1.100.000.000	Teknologi industri di 300 IKM, penerapan SNI di 30 IKM dan standar produk industri manufaktur di 100 IKM	1.350.000.000	Teknologi industri di 400 IKM, penerapan SNI di 30 IKM dan standar produk industri manufaktur di 100 IKM	1.450.000.000	Teknologi industri di 450 IKM, penerapan SNI di 30 IKM dan standar produk industri manufaktur di 100 IKM	1.500.000.000	Teknologi industri di 500 IKM, penerapan SNI di 30 IKM dan standar produk industri manufaktur di 100 IKM	1.650.000.000	Teknologi industri di 1.750 IKM, penerapan SNI di 150 IKM dan standar produk industri manufaktur di 500 IKM	7.050.000.000	Disperindag
2	7	18	Program Penataan Struktur Industri	Meningkatkan penguasaan dan penggunaan teknologi tepat guna dengan cara pleatihan, magang, sosialisasi, pendampingan langsung, dan bantuan peralatan	-	-	-	4 komoditi & 15 IKM	1.375.000.000	4 komoditi & 15 IKM	1.375.000.000	4 komoditi & 15 IKM	1.375.000.000	4 komoditi & 15 IKM	1.375.000.000	16 komoditi & 60 IKM	5.500.000.000	Disperindag
2	7	19	Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial	Terbangunnya sarana dan prasarana jalan menuju sentra-sentra industri potensial	Sentra 4 komoditi dan informasi ke 4 komoditi	-	-	Sentra 4 komoditi dan informasi ke 4 komoditi	3.000.000.000	Sentra 4 komoditi dan informasi ke 4 komoditi	3.000.000.000	Sentra 4 komoditi dan informasi ke 4 komoditi	3.000.000.000	Sentra 4 komoditi dan informasi ke 4 komoditi	3.000.000.000	Sentra 16 komoditi dan informasi ke 16 komoditi	12.000.000.000	Disperindag
2	7	20	Program pembinaan industri	Meningkatnya jumlah SDM industri yang terlatih	pemasaran 20 IKM	100%	40.745.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	mutu 100 IKM dan pemasaran 80 IKM	840.745.000	Disperindag
2	7		Program pengembangan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Perusahaan Daerah	Tersusunnya perda/perbup tentang perusahaan daerah, capaian SPM, merger 7 BPR milik Pemkab Cirebon & Prov Jabar	6 dok	1 dok	150.000.000	1 dok	150.000.000	1 dok	300.000.000	1 dok	150.000.000	1 dok	150.000.000	7 dok	900.000.000	Setda
2	7		Program pengembangan industri kecil menengah	Tersusunnya data industri kecil menengah di kabupaten Cirebon	1 dok	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	5 dok	500.000.000	Setda
2	7		Program penciptaan iklim UMKM yang Kondusif	Terbentuknya kawasan (zona) untuk outlet UMKM		1 dok	250.000.000									250.000.000	Setda	
2	7		Program penciptaan iklim UMKM yang Kondusif	Tersusunnya dokumen fasilitasi kemudahan perijinan dan sertifikasi usaha				1 dok	65.000.000							65.000.000	Setda	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 7	Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM	Laporan hasil kordinasi, bimbingan dan kerja sama antara OPD teknis, akademisi dan perusahaan untuk inkubasi UMKM						1 dok	65.000.000						65.000.000	Setda
2 8	TRANSMIGRASI															
2 8 15	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Terkirim dan terfasilitasinya perpindahan peserta transmigrasi serta penempatan transmigrasi di lokasi tujuan	-	10 KK	670.891.500	15 KK	929.559.950	20 KK	879.966.655	25 KK	908.282.931	30 KK	1.047.006.049	100 KK	4.435.707.084	Disnakertrans

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, langkah yang dilakukan adalah :

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD masa transisi yaitu tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya.
- 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.
- 3) Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya, yang kemudian akan direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru.

10.2. Kaidah Pelaksanaan:

RPJMD menjadi pedoman bagi setiap SKPD untuk menyusun renstra SKPD, rumah sakit daerah yang menerapkan PPK BLUD dan pedoman untuk menyusun RKPD. Sehubungan dengan hal tersebut, rumusan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Seluruh SKPD, dunia akademik, dunia usaha, dan komunitas/masyarakat berkewajiban untuk bersinergi melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
- 2) Seluruh SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam penyusunan renja SKPD setiap tahun;
- 3) Seluruh SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan renstra SKPD;

- 4) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penjabaran RPJMD ke dalam renstra SKPD.

BAB XI

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi, misi, kebijakan, dan program kepala daerah yang menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 secara terpadu, sinergi, dan searah dengan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat selama lima tahun mendatang.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 ditentukan oleh komitmen dan dukungan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, DPRD Kabupaten Cirebon, dunia akademik, dunia usaha, dan komunitas/masyarakat menuju masyarakat Kabupaten Cirebon yang Agamis, Maju, Adil, Sinergi dan Sejahtera.

BUPATI CIREBON,

H. SUNJAYA PURWADI SASTRA